



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-311 Fasilitas Umum di Desa Latdalam



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-312 Fasilitas Umum di Desa Matakus



Gambar III-313 Fasilitas Umum di Desa Tumbur



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-314 Fasilitas Umum di Desa Lorulun

1. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Fasilitas umum dan sosial yang tersebar di desa-desa terpengaruh kegiatan proyek cukup banyak. Salah satu fasilitas penting yang mendukung kegiatan masyarakat adalah listrik. Seluruh desa yang terpengaruh kegiatan proyek sudah teraliri listrik PLN maupun non PLN. Di Desa Olilit sendiri juga terdapat fasilitas sumber listrik tenaga surya untuk sebagian masyarakatnya.

Berdasarkan **Tabel III-261** dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh area pemukiman desa di Kecamatan Tanimbar Selatan sudah memperoleh akses listrik PLN secara merata. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah keluarga yang menggunakan listrik non PLN maupun jumlah keluarga yang belum teraliri listrik. Desa Sifnana merupakan desa dengan jumlah keluarga yang menggunakan sumber listrik PLN tertinggi dan sudah tidak ada keluarga yang menggunakan listrik non PLN maupun jumlah keluarga yang belum teraliri listrik. Tabel di bawah juga menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang belum teraliri listrik di Kecamatan Tanimbar Selatan, hanya ditemukan di Desa Ilngei sebanyak 34 keluarga

Tabel III-261 Akses Listrik Pemukiman Di Desa Terpengaruh Tahun 2019

Desa / Kecamatan	Jumlah Keluarga di Desa yang Menggunakan Sumber Listrik (Listrik PLN)	Jumlah Keluarga di Desa yang Menggunakan Sumber Listrik (Listrik Non PLN)	Jumlah Keluarga yang Belum Teraliri Listrik
1. Kecamatan Tanimbar Selatan			
Ilngei	299	-	34
Wowonda	597	-	-
Kabiarat	185	-	-
Lauran	691	-	-
Sifnana	1759	-	-
Saumlaki	1254	-	-
Olilit	1373	-	-
2. Kecamatan Selaru	3642	911	1
3. Kecamatan Wertamrian	2807	-	76
4. Kecamatan Tanimbar Utara	3690	69	62
5. Kecamatan Wer Maktian	2432	487	277
6. Kecamatan Fortada	-	-	-
7. Kecamatan Labobar	-	1437	788
8. Kecamatan Kormomolin	1827	7	67
9. Kecamatan Nirunmas	2088	7	10
10. Kecamatan Molu Maru	-	367	596

Sumber: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2020
BPS, Kecamatan dalam angka, 2023

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan di Kepulauan Tanimbar, masih belum memperoleh akses listrik PLN yang merata. Seperti di Kecamatan Wuar Labobar dan Kecamatan Molu Maru yang belum memperoleh sumber listrik PLN. **Tabel III-261** juga menunjukkan masih terdapat banyak jumlah keluarga yang belum teraliri listrik, kecamatan dengan jumlah keluarga yang belum teraliri listrik terbanyak adalah Kecamatan Wuar Labobar sebanyak 788 keluarga.

Fasilitas dasar yang juga penting bagi masyarakat adalah fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan disajikan dalam Tabel III-241 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di desa terdampak sudah cukup memadai terbukti dari adanya fasilitas

kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, dan apotek. Fasilitas kesehatan yang ada pada setiap desa adalah Pustu permanen. Selain fasilitas tersebut terdapat fasilitas kesehatan lain berupa Puskesmas dan rumah sakit permanen yang terdapat di Desa Olilit dan Desa Sifnana/Saumlaki. Masyarakat di desa-desa ini juga telah mendapatkan bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis, kecuali Desa Luran yang tidak memperoleh bantuan tersebut. Tetapi, Desa Luran memperoleh bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Secara rinci, fasilitas kesehatan di desa yang terpengaruh kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-262 Prasarana Kesehatan di Desa Terpengaruh 2018

Nama Desa/Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)								
	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Tempat Praktik Bidan	Apotek
Kecamatan Tanimbar Selatan									
Ilngai	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Wowonda	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kabiarat	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Luran	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sifnana	-	-	1	-	-	-	1	1	1
Saumlaki	2	-	1	-	-	-	5	1	6
Olilit	1	-	-	-	1	-	2	1	1
Kecamatan Selaru	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Kecamatan Wertamrian	-	-	1	4	-	-	-	-	-
Kecamatan Tanimbar Utara	-	-	1	3	-	-	-	-	-
Kecamatan Wer Maktian	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Kecamatan Fordata	-	-	1	-	2	2	-	-	-
Kecamatan Wuvar Labobar	-	-	1	6	-	-	-	-	-
Kecamatan Kormomolin	-	-	1	6	-	1	-	-	-
Kecamatan Nirunmas	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Kecamatan Molu Maru	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa terdampak dengan fasilitas kesehatan terbanyak ada di Desa Saumlaki, dimana terdapat 2 rumah sakit, 1 puskesmas permanen, 5 tempat praktek dokter, 1 tempat praktek bidan, dan 6 apotek. Pada hampir semua desa terpengaruh terdapat puskesmas pembantu kecuali desa Sinana dan Suamlaki. Pada semua desa terpengaruh tidak terdapat fasilitas kesehatan berupa Poskesdes dan Polindes. Fasilitas kesehatan yang belum dimiliki oleh semua desa terdampak hanya rumah sakit bersalin.

Jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas kesehatan di kecamatan lain yang ada di Kepulauan Tanimbar. Fasilitas di Kecamatan Tanimbar Selatan tergolong lebih baik, karena hampir seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar tidak memiliki rumah sakit kecuali Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara. Untuk fasilitas kesehatan berupa rumah sakit bersalin juga tidak ditemukan di seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar.

Fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar tersebar di seluruh wilayah desa terpengaruh, bahkan beberapa desa memiliki lebih dari satu unit SD. Hanya Desa Kabiarat yang belum memiliki fasilitas SMP. Sedangkan untuk SMA, desa yang terpengaruh kegiatan proyek yang memiliki fasilitas SMA adalah Desa Sifnana, Desa Saumlaki, dan Desa Olilit. Secara rinci ketersediaan sekolah di desa yang terpengaruh kegiatan proyek ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Jika menganalisis secara keseluruhan dari Tabel III-242, fasilitas pendidikan di Kepulauan Tanimbar terbilang merata, karena di setiap kecamatan ditemukan fasilitas pendidikan baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK. Jumlah fasilitas pendidikan terbanyak ada di tingkat SD, dan akan semakin berkurang pada tingkat SMP maupun SMA/SMK. Beberapa kecamatan di Kepulauan Tanimbar yang hanya memiliki satu SMA yaitu ada di Kecamatan Yaru, Kormolin, dan Molu Maru.

Tabel III-263 Prasarana Pendidikan di Desa Terpengaruh 2019

Desa/Kecamatan	Jenis Sekolah		
	SD	SMP	SMA/SMK
Kecamatan Tanimbar Selatan			
Ilngai	2	1	-
Wowonda	2	1	-
Kabiarat	1	-	-
Lauran	2	1	-
Sifnana	2	1	2
Saumlaki	5	4	4
Olilit	3	1	2
Kecamatan Selaru	13	8	3
Kecamatan Wertamrian	12	7	2
Kecamatan Tanimbar Utara	16	9	5
Kecamatan Wer Maktian	13	7	3
Kecamatan Yaru	8	3	1
Kecamatan Wuvar Labobar	12	7	2
Kecamatan Kormomolin	10	5	1
Kecamatan Nirunmas	9	5	3
Kecamatan Molu Maru	5	2	1

Sumber: Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian Dalam Angka 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, bantuan pendidikan telah disalurkan untuk Desa Lauran, Desa Olilit dan Desa Sifnana. Bantuan Pendidikan yang diterima Desa Lauran berupa beasiswa pendidikan untuk siswa kelas akhir. Berdasarkan data profil desa 2017, pada wilayah studi terdapat 1 perpustakaan desa yang berada di Desa Wowonda dan untuk sekolah TK hampir tersebar di seluruh wilayah studi kecuali Desa Kabiarat.

Berdasarkan profil Desa Ilngai, Kabiarat, dan Wowonda tahun 2017, fasilitas ibadah yang ada di ketiga desa adalah gereja. Hal yang sama juga disebutkan oleh tokoh masyarakat, bahwa di setiap desa terpengaruh terdapat setidaknya 1 unit gereja. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk beragama Kristen dan Katolik. Pada beberapa desa juga terdapat kapel untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, terdapat musholla permanen di desa terdampak tepatnya di Desa Lauran, Desa Olilit, dan Desa Sifnana.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, terdapat beberapa fasilitas umum lain yang tersebar di desa-desa wilayah studi. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa fasilitas balai desa hanya

ada di Desa Wowonda dan Desa Ilngai. Hampir semua desa memiliki fasilitas umum berupa alun-alun, kantor desa, lapangan, rumah adat, gedung serba guna, dan taman, kecuali Desa Ilngai.

Transportasi umum antar desa yang ada di desa-desa yang terpengaruh kegiatan proyek adalah angkutan umum. Prasarana transportasi di Desa Wowonda sebagai salah satu desa yang terpengaruh kegiatan. Desa wowonda memiliki jalan desa yang lebih panjang jika dibandingkan dengan Desa Bomaki dan Tumbur yang merupakan desa terdampak proyek.

Kondisi prasarana air bersih di desa terpengaruh khususnya Desa Ilngai Kabiarat dan Wowonda dijelaskan pada tabel di bawah ini.. Ketiga desa tersebut sudah memiliki hidran umum untuk menampung air hujan. Selain itu, desa-desa yang terpengaruh memanfaatkan mata air sebagai sumber air bersih. Desa Ilngai dan Kabiarat bahkan telah memiliki pengolahan air bersih. Desa-desa tersebut juga memiliki sumur gali, meskipun di Desa Kabiarat jumlahnya tidak banyak.

Tabel III-264 Prasarana Air Bersih di Desa Terpengaruh 2017

Desa	Hidran Umum	Penampungan Air Bersih	Mata Air	Pengolahan Air Bersih	Sumur Gali	Sumur Pompa	Tangki Air Bersih
Ilngai	4	2	7	2	10	-	12
Kabiarat	12	-	2	1	2	-	-
Wowonda	18	-	4	-	35	-	-

Sumber: Profil Desa 2017

Sanitasi dan irigasi di desa-desa yang terpengaruh kegiatan khususnya Desa Kabiarat dan Wowonda dijelaskan pada profil desa tahun 2017. Pada kedua desa terdapat MCK Umum dan sudah cukup banyak juga rumah yang memiliki jamban keluarga seperti di Desa Kabiarat sebanyak 151 KK dan Wowonda sebanyak 421 KK. Kedua desa ini juga telah memiliki saluran drainase.

Sarana dan prasarana kebersihan di desa yang terpengaruh kegiatan khususnya Desa Ilngai, Kabiarat, dan Wowonda ditunjukkan pada profil desa tahun 2017. Ketiga desa tersebut telah memiliki tempat pembuangan sementara dan akhir. Desa Kabiarat bahkan memiliki 6 unit truk pengangkut sampah.

Layanan telekomunikasi di desa terpengaruh dipengaruhi oleh keberadaan menara telepon seluler, jumlah operator seluler, dan kondisi sinyal. Kondisi sinyal di desa terpengaruh cukup kuat kecuali di Desa Sifnana berdasarkan data Kemendes (2020) namun operator seluler yang tersedia sudah mencakup telkomsel dan indosat. Secara rinci, sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi di desa terdampak kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-265 Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Desa Terdampak Kegiatan 2019

Desa	Menara Telepon Selular (BTS)	Operator Selular	Kondisi Sinyal
Ilngai	Tidak ada	Telkomsel	Sinyal kuat
Wowonda	Ada	Telkomsel	Sinyal kuat
Kabiarat	Tidak ada	Telkomsel, Indosat	Sinyal kuat
Lauran	Tidak ada	Telkomsel, Indosat	Sinyal kuat
Sifnana	Ada	Telkomsel, Indosat	Sinyal lemah
Saumlaki	-	-	-
Olilit	Tidak ada	Telkomsel	Sinyal kuat

Sumber: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2020



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-315 Fasilitas Umum di Desa Ingei



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-316 Fasilitas Umum di Desa Wowonda



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-317 Fasilitas Umum di Desa Kabiart



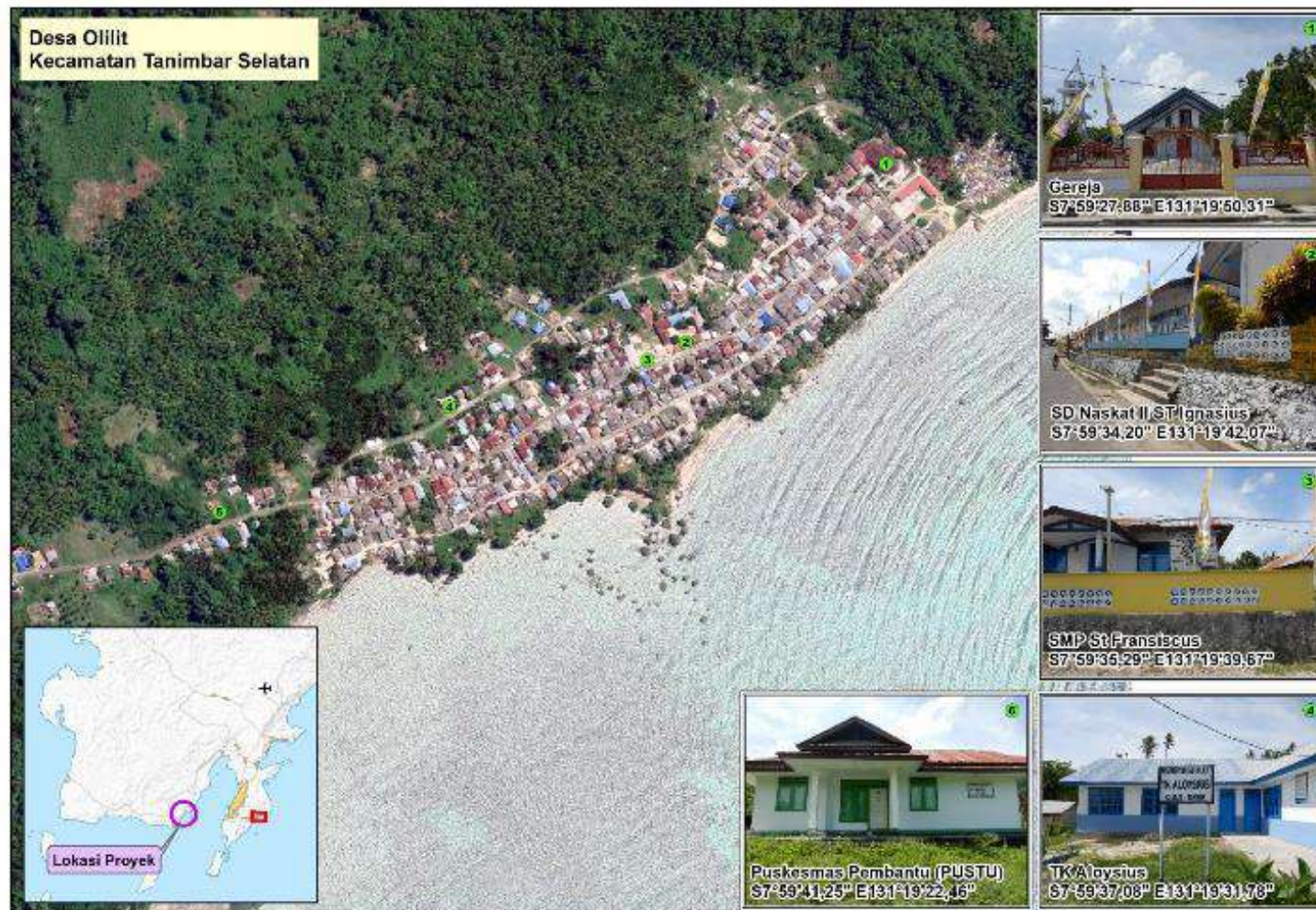
Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-318 Fasilitas Umum di Desa Luran



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-319 Fasilitas Umum di Desa Sifnana dan Saumlaki



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-320 Fasilitas Umum di Desa Olilit

3.3.2.8.2 Kabupaten Maluku Barat Daya

A. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan dengan beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1. Rasio Ketersediaan Sekolah SD Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya selama sampai dengan tahun 2020 adalah 1:88;
2. Rasio Ketersediaan Sekolah SMP Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan tahun 2020 adalah 1:98;
3. Capaian Rasio Guru Murid Sesuai Bidang Studi pada tahun 2020 yaitu: rasio guru/murid SD 1:19, rasio guru/murid SMP adalah 1:24.
4. Rasio tingkat kompetensi guru sampai tahun 2020 adalah sebesar 1:1,3
5. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan baik sampai dengan tahun 2020 adalah untuk SD/MI 85 persen dan SMP/MTs juga sama yaitu 85 persen.
6. Jumlah siswa pada jenjang TK/RA selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mencapai 2.503 siswa sedangkan jumlah PAUD mencapai 190 PAUD dengan Rasio Guru dan Siswa PAUD sampai dengan tahun 2020 adalah 1:88
7. Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SD/MI dan Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SMP/MTs selama tiga tahun berturut – turut yakni tahun 2017-2020 adalah 100 persen.
8. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs selama tahun 2017- 2020 adalah tetap dengan realisasi sebesar 100 persen, untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, apabila pada tahun 2017 sebesar 72 persen maka ditahun 2020 meningkat menjadi 100 persen sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMK mengalami fluktuatif atau berbanding terbalik dengan angka kelulusan SD ke SMP maupun SMP ke SMA dengan capaian ditahun 2017 sebesar 28 persen, kemudian turun ditahun 2018 dengan capaian 23 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 100 persen.
9. Guru yang belum memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan capaian sampai dengan tahun 2020 adalah 10 persen.

10. Kepala sekolah yang berkualifikasi S1/DIV sampai dengan tahun 2020 untuk tingkat SD dan SMP mengalami peningkatan untuk SD sebanyak 95, SMP 100 jika dibandingkan dengan tahun 2017 untuk SD hanya 61 dan SMP sebanyak 61.

11. Akses/kemudahan menuju sekolah tahun 2020 adalah 100%.

Tabel III-266. Indikator Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Sekolah SD terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:82	1:86	1:87	1:88
2	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:92	1:96	1:97	1:98
3	Rasio Guru/Murid SD	1:15	1:16	1:18	1:19
4	Rasio Guru/Murid SMP	1:20	1:21	1:23	1:24
5	Rasio Tingkat Kompetensi Guru	1:2	1:1,8	1:1,5	1:1,3
6	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	-	-	82	85
7	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	-	-	82	85
8	Jumlah Siswa Pada Jenjang TK/RA	-	3.600	4.565	2.503
9	Jumlah PAUD	172	186	184	190
10	Rasio Perbandingan Guru dan Siswa PAUD	1:60	1:50	1:30	1:88
11	Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SD/MI	100	100	100	100
12	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA	72	73	74	100
14	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMK	28	23	24	100
15	Jumlah Guru yang belum memenuhi Kualifikasi S1/DIV	36	15	10	10
16	Kepala Sekolah Yang Berkualifikasi S1/ DIV	SD=64 SMP=29	SD=61 SMP=61	SD=85 SMP=65	SD=95 SMP=100
17	Rasio Guru/Murid SD	1:15	1:16	1:18	1:24
18	Rasio Tingkat Kompetensi Guru	1:2	1:1,8	1:1,5	1:1,3
19	Akses/Kemudahan Menuju Sekolah (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.MBD 2021

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Beberapa indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III-267. Perkembangan Seni budaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	-	1	1	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	7	9	10	9
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	132	132	132	157	157
4	Jumlah Sanggar Budaya	5	7	9	10	10
5	Jumlah Bahasa Daerah Yang Masih Berlaku	25	24	25	25	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan seni budaya di Kabupaten Maluku Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 20120 mengalami peningkatan.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel III-268. Capaian Indikator Kesehatan Kab. MBD Tahun 2020

No	Indikator	2020
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	85,88%
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	103,08%
3	Cakupan Pelayanan Nifas	85,88%
4	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	64,44%
5	Cakupan Kunjungan Bayi	94,12%
6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	59,38%
7	Cakupan Pelayanan Anak Balita	92,63%
8	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Usia 6-24 bulan	100%
9	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100%
10	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	95%
11	Cakupan Peserta KB Aktif	95,56%
12	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana	100%
13	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk x 1.000	68 : 81.928 (0,83)
14	Rasio RS Per Satuan Penduduk	1 : 81.928 (0,012)
15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Per 1000	29 : 81.928 (0,4)
16	Cakupan Puskesmas	188,24
17	Cakupan Pembantu Puskesmas	30,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.MBD, 2021

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per seribu penduduk tahun Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 adalah 68 : 81.928 (0,83), pada tahun 2020 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio 1 : 81.928 (0,012) artinya satu rumah sakit melayani 81.928 penduduk. Secara kuantitas, Kabupaten Maluku Barat Daya telah memiliki dua rumah sakit namun salah satunya, selain belum tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit tersebut masih dalam tahap proses perijinan sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan, rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 adalah 29: 81.928 (0,4) dengan kata lain rasio dokter terhadap penduduk adalah 1: 2.825 artinya satu dokter melayani 2.825 Penduduk,

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dan Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsinya. sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum adalah:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik;
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana bangunan dan gedung pemerintahan dalam menunjang pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan.

Pencapaian beberapa indikator bidang urusan pekerjaan umum tersajikan melalui tabel berikut ini.

Tabel III-269. Realisasi Indikator Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2019	2020
1	Proporsi Kondisi Jaringan Jalan Baik (%)	42,67	109,58
2	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat (%)	32,62	43,38
3	Tersedianya Lalu Lintas Jalan dan Konstruksi Jembatan Yang Memadai (%)	70	107,69
4	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% rth Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (%)	44	44
5	Persentase Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang (%)	22,33	24,81
6	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	77,65	85,36
7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1 : 2,91	0,293

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.MBD,2021

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 sebesar 42,67 persen dan tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 100,59 persen. Persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 mencapai 85,36 persen, capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 77,65 persen. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2019 adalah 32,62 persen atau 3.262 Meter dan ditahun 2020 drainase dalam kondisi baik meningkat menjadi 43,38 persen atau 4.338 meter dari yang ditargetkan sebesar 10.000 meter. Persentase lalu lintas jalan dan konstruksi jembatan yang memadai sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 107,69%. Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% RTH Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu 44%. Peningkatan Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% RTH Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dikarenakan adanya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tiakur. Tahun 2019 persentase peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebesar 22,33% dan tahun 2020 persentase peran serta masyarakat terus meningkat menjadi 24,81%. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perkembangan ruas jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan bahwa pada tahun 2019, panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 1.126,35 km. Panjang jalan tersebut menurut jenis permukaan jalan terdiri dari jalan aspal sepanjang 415,43 Km, jalan hotmix sepanjang (AC/HRS) 200,93 Km, jalan lapen (penetrasi macadam) sepanjang 214,50 Km, jalan lainnya (sirtu/urpil) sepanjang 225,39 Km, jalan tanah sepanjang 485,53 Km dan jalan belum tembus/hutan sepanjang 485,53 Km. Di samping itu terdapat juga ruas jalan nasional sepanjang 198,38 km dan jalan provinsi sepanjang 61,15 km.

Tabel III-270. Data Jalan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019

Indikator	2019
Panjang Jalan Berdasarkan Status (Km)	
a. Jalan Nasional	198,38
b. Jalan Provinsi	61,15
c. Jalan Kabupaten	1126,36
d. Jalan Desa	0.00
e. Jalan Non Status	0.00
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km)	
a. Jalan Aspal	415,43
b. Jalan Hotmix(AC/HRS)	200,93
c. Jalan Lapen (Penetrasi Macadam)	214,50
d. Jalan Kerikil(Telford)	0.00
e. Jalan Lainnya (Sirtu/Urpil)	225,39
f. Jalan Setapak	0.00
g. Jalan Tanah	485,53
h. Jalan Belum Tembus/Hutan	485,53
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi	
a. Jalan Kondisi Baik	246,07
b. Jalan Kondisi Sedang	234,53
c. Jalan Kondisi Rusak Sedang	155,72
d. Jalan Kondisi Rusak Berat	490,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.MBD, 2021

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan Persentase Jumlah Rumah Layak Huni. Indikator-indikator perumahan diukur berdasarkan jumlah pengguna. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017 adalah sebesar 33 persen, meningkat menjadi 37 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 39 persen. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik diambil dari data pengguna listrik PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga mencapai 68,06 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 66,29 persen dan terus mengalami penurunan mencapai 66,04 persen pada tahun 2019, dikarenakan meningkatnya jumlah RT. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 angka yang tercatat sebesar 77,78 persen dan tahun 2018 masih tetap diangka yang sama yaitu 77,78 persen dikarenakan tidak ada kegiatan untuk mendukung capaian kegiatan tersebut, pada tahun 2019 capaian ini sedikit mengalami penurunan dengan capaian persentase 77,65 persen dan pada tahun 2020 capaian ini mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 85,36 persen. Persentase rumah layak huni mengalami kenaikan selama empat tahun berturut – turut yakni tahun 2017-2020. Tahun 2017 persentase capaian rumah layak huni sebesar 4 persen, capaian ini terus mengalami kenaikan ditahun 2018 sebesar 19 persen dan terus meningkat mencapai 30,48 persen pada tahun 2019 serta mengalami peningkatan mencapai 53,55 persen. Capaian Indikator urusan perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017-2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-271. Indikator Urusan Wajib Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 – 2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum (%)	33	37	39
2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	68,06	66,29	66,04
3	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	77,78	77,78	77,65
4	Jumlah Rumah Layak Huni	4	19	30,48

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.MBD,2021



Gambar III-321. Kondisi Jalan Utama di Kecamatan Moa Lakor



Gambar III-322. Rumah Warga yang telah memiliki Akses Air Bersih di Kecamatan Moa

E. Komunikasi dan Informatika

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dewasa ini. Berkembangnya teknologi komunikasi semakin mempermudah interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Dalam urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa.

Tabel III-272. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	16	42	64	62
2	Rasio Jaringan Komunikasi	16 : 17	42 : 17	64 : 17	62 : 17
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial)	7	9	9	10
4	Jumlah Siaran Radio/TV Lokal (Siaran)	-	-	1	1
5	Jumlah Website Dilingkup Pemda Maluku Barat Daya	-	-	5	6
7	Pameran/Expo	-	-	1	0
8	Kelompok Informasi Masyarakat	-	3	-	0

Sumber: Dinas Kominfo Kab. MBD, 2021

Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2017-2019 sejumlah 48 unit, begitu pun rasio jaringan telekomunikasi terus mengalami peningkatan ditahun 2019 dengan rasio 64:17. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial) untuk tahun 2018 dan 2019 masih tetap yaitu 9 surat kabar. Jumlah Siaran Radio/TV Lokal (siaran) mengalami peningkatan ditahun 2019 di mana untuk dua tahun berturut – turut yakni 2017 dan 2018 indikator ini belum terealisasi namun pada tahun 2019 telah terealisasi 1 siaran radio, sehingga indikator ini terus ditingkatkan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk indikator jumlah *website* dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 di mana pada dua tahun tersebut belum terealisasi dan ditahun 2019 terealisasi 5 *website*. Untuk kelompok informasi masyarakat mengalami fluktuatif selama tahun 2017-2019 di mana pada tahun 2018 jumlah kelompok informasi terealisasi 3 kelompok dan ditahun 2019 tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten MBD belum disediakan oleh PT Telkom. Jadi penduduk menggunakan jaringan telepon seluler untuk berkomunikasi di dalam maupun ke luar wilayah kabupaten. Sampai tahun 2019 jumlah BTS yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya berjumlah 63 BTS aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, kondisi ini merupakan capaian terbaik jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana jumlah dan penyebaran BTS masih terbatas di setiap kecamatan dan terdapat BTS yang rusak sehingga tidak berfungsi. Namun, akses internet berbasis 4G baru dapat dinikmati di 7 lokasi yaitu Kota Tiakur, Ustutun (P.Lirang) Ilwaki (P.Wetar), Lurang, Esulit, Arwala dan Ilmarang (P.Dawera).

Tabel III-273. Jumlah BTS Yang Masih Aktif Dan Rusak di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2019

No.	Kecamatan	2018		2019	
		BTS Aktif	BTS Rusak	BTS Aktif	BTS Rusak
1	Moa	5	1	3	-
2	Leti	3	1	9	-
3	Lakor	3	1	5	-
4	Mdona Hyera	1	2	5	-
5	Pp. Babar	3	-	7	-
6	Babar Timur	2	1	4	-
7	P. Masela	2	1	4	-
Jumlah		19	7	37	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.MBD, 2020

Pemerintah Maluku Barat Daya dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk meningkatkan layanan komunikasi di seluruh daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. OPD terkait telah memberikan bantuan berupa radio SSB yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Tercatat sampai tahun 2019 terdapat 68 radio SSB yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

F. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat.

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2017- 2019, sesuai standar sebagaimana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami peningkatan. Untuk tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun bervariasi, di mana jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2017 sebanyak 1.306 pengunjung, tahun 2018 turun drastis hingga mencapai angka 356 pengunjung, turunnya pengunjung di tahun 2018 ini disebabkan karena kurangnya jumlah koleksi judul buku pada perpustakaan daerah dan kurangnya sosialisasi perpustakaan bagi masyarakat tentang pentingnya membaca dan tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 2.618 pengunjung. Jumlah pengelola perpustakaan selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah perpustakaan di daerah. Sedangkan jumlah koleksi selama tiga tahun berturut turut mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2019 sebanyak 8.814 koleksi buku dengan demikian dengan meningkatnya jumlah koleksi buku tentu meningkatnya jumlah koleksi buku tiap tahunnya sehingga pada tahun 2019 jumlah koleksi buku perpustakaan sebanyak 4.178 koleksi judul buku.

Tabel III-274. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2019

No	Jumlah Perpustakaan	2017	2018	2019
1	jumlah perpustakaan	69	69	71
2	Tingkat kunjungan perpustakaan dalam 1 tahun (orang)	1.306	356	2.618
3	Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.306	356	2.618
4	Jumlah pengelolaan perpustakaan	69	69	71
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4.374	5.314	8.814
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	223	2.731	4.178

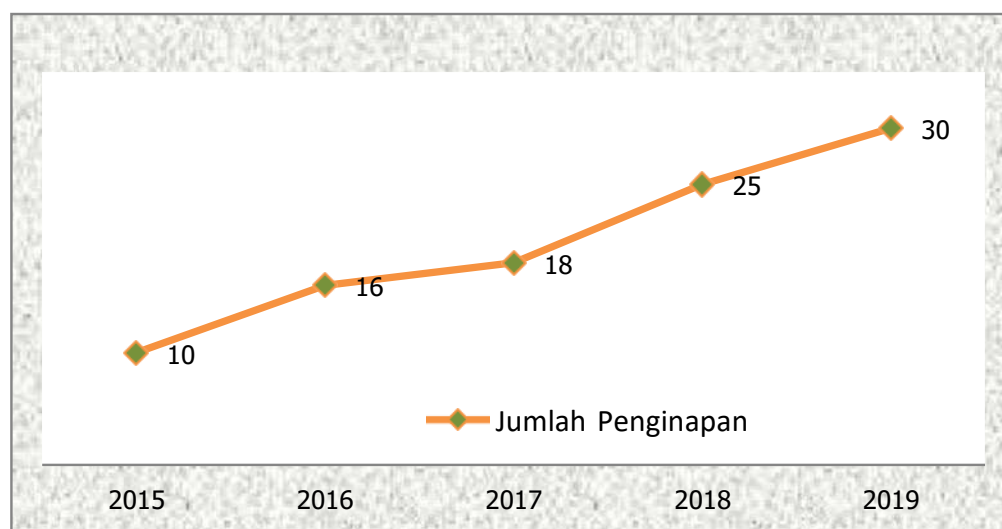
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. MBD, 2020

Kearsipan memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan dapat dilakukan dengan cara sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan di tiap bidang.

G. Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya Perbankan. Jasa perbankan di kabupaten Maluku Barat Daya dilayani oleh 7 kantor bank yang ada. Bank tersebut terdiri dari bank daerah 3 unit bank BRI yang masing –masing berlokasi di Tiakur, Kisar dan Tapa, 3 unit BPDM yang berlokasi di tiga lokasi yaitu Tiakur, Kisar dan Tapa dan 1 unit bank Ekspres Modern yang berlokasi di Tiakur.

Ketersediaan penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan. Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2015-2019, jumlah penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Barat mulai menunjukkan daya saing daerah walaupun masih belum maksimal.



Gambar III-323. Jumlah Penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015-2019

Penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah tersedia di seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, terkecuali di Kecamatan Wetar Timur. Kamar yang disediakan pun memiliki fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan pengunjung.

H. Penggunaan Air Bersih

Kondisi prasarana air bersih yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum tergolong belum memadai, karena hampir seluruh kecamatan, penduduknya menggunakan air hujan dan sumur resapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air hujan tersebut, digunakan

untuk air minum, mandi, mencuci dan lain-lain. Ketersediaan air bersih yang di sediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih sebatas di Kota Wonoreli, Tapa, dan Tiakur.

Tabel III-275. Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah	5.881	6.439	8.187

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang & PDAM Kab, MBD & , 2020

Ketidakseimbangan antara jumlah air bersih yang siap dimanfaatkan dengan permintaan kebutuhan air masyarakat saat ini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. Persentase Jumlah penduduk yang telah mengakses air bersih di Tahun 2019 mencapai 39% atau 6.752 KK dari yang ditargetkan 17.346 KK.

I. Fasilitas Listrik dan Telefon

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Maluku Barat Daya dua tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah Rumah Tangga (RT) sebesar 4,93% atau sebesar 815 RT pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dengan Meningkatnya jumlah Rumah Tangga maka Pemerintah Daerah wajib meningkatkan ketersediaan listrik di seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA, Kab. MBD, 2020

Gambar III-324. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

Suplai sumber daya listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui PLN, PLTS Terpusat, PLTS SHS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang menggunakan tenaga air di Kecamatan Mdonu Hyera. Suplai listrik ini telah menjangkau hampir ke seluruh kota kecamatan, terkecuali di Wulur, Masela, Lelang dan Jerusu sementara untuk desa yang belum dapat suplai listrik, penduduk memanfaatkan PLT Terpusat, PLTS

SHS dan PLTMH untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 sebanyak 11.793 rumah tangga dengan Ratio RT berlistrik Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 66,64%.

Sedangkan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Maluku Barat Daya telah dibuka kerjasama dengan PT Telkom. Disamping itu juga terdapat hubungan kerjasama dengan PT. Aplikasi Lintasarta khususnya terkait dengan akses internet. Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi menggunakan jaringan telepon seluler baik untuk komunikasi lokal maupun interlokal. Hingga tahun 2019, Seluruh Kota Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah dapat menggunakan Telepon Seluler untuk akses komunikasi, 63 (Enam Puluh Tiga) BTS telah di pasang di tiap desa/kota Kecamatan untuk memperlancar akses komunikasi. Sementara untuk akses internet berbasis 4G hanya dapat dinikmati di Kota Tiakur, Ustutun (P. Lirang) Ilwaki (P. Wetar), Lurang, Esulit, Arwala dan Ilmarang (P. Dawera).

Tabel III-276. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Maluku Barat Daya 2019

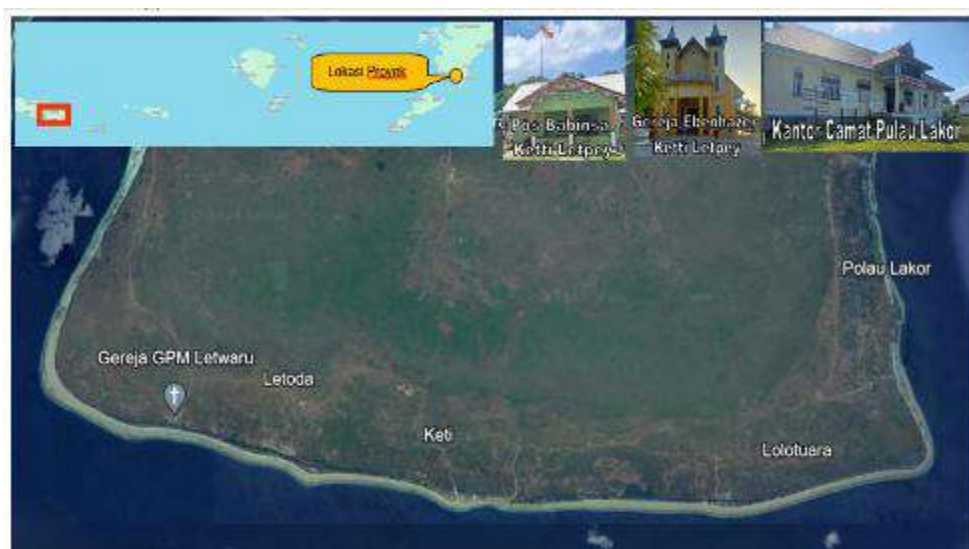
No	Uraian	%
1	Menggunakan Telepeon Seluler (HP)/Nirkabel/atau Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook, Tablet)	56,89
2	Mengakses Internet	8,95

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.MBD, 2019



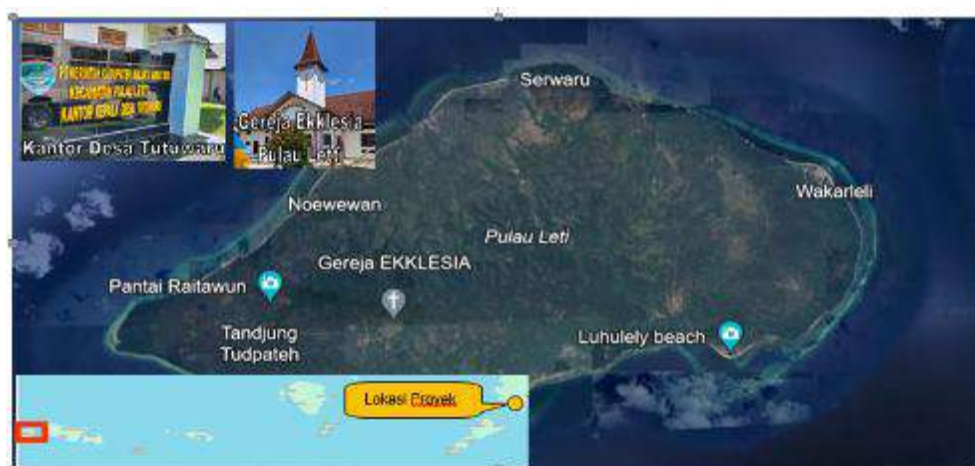
Sumber: Data Primer, 2024

Gambar III-325. Fasilitas Umum di Kecamatan Moa Lakor



Sumber: Data Primer, 2024

Gambar III-326. Fasilitas Umum di Kecamatan Pulau Lakor



Sumber: Data Primer, 2024

Gambar III-327. Fasilitas Umum di Kecamatan Pulau Lakor

J. Kegiatan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan sangat kecil yang dikelilingi dengan perairan laut yang kaya akan sumber daya hayati dan non hayati. Dengan kondisi geografis wilayah yang terletak di wilayah pesisir pantai, menjadikan sebagian besar penduduk atau masyarakatnya menggantungkan dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar masyarakat di wilayah studi memiliki mata pencaharian ganda sebagai nelayan, pembudidaya rumput laut dan petani.

Sektor perikanan tangkap merupakan penggerak ekonomi masyarakat di wilayah studi. Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pantai dan pesisir merupakan salah satu tempat/area penting untuk mencari nafkah bagi masyarakat desa dan merupakan penghasil protein ikani yang penting serta relatif murah bagi masyarakat. Di pulau-pulau terpencil, sumber makanan dari laut merupakan 90% dari protein yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ikan merupakan sumber

protein penting bagi banyak negara di Asia khususnya Indonesia. Sebagian besar ikan diperoleh dari laut melalui kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya baik budidaya laut maupun air payau. Komoditas yang dibudidayakan di laut umumnya adalah rumput laut.

Potensi sumberdaya nelayan sepatutnya menjadi perhatian utama. Aktivitas di laut (sebagai nelayan) dilakukan berdasarkan suatu sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang terbentuk melalui pengamatan, pengalaman, pewarisan, dan adaptasi yang terus-menerus tentang kondisi sumberdaya laut dan alam. Jadi sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal di wilayah laut ini merupakan kombinasi interrelasi atau integrasi antara lingkungan fisik dengan lingkungan bio-kultural (Soselisa 2010).

Rencana kegiatan pengembangan Blok Masela berada di wilayah perairan laut sekitar WPPNRI 718 dan WPPNRI 714. Berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang WPPNRI dijelaskan bahwa WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur, sedangkan WPPNRI 714 meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diketahui bahwa memiliki potensi sumberdaya ikan di WPPNRI-718 yang diestimasi mencapai 2.637.564 ton/tahun dan di WPPNRI-714 sebesar 1.033.979 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPPNRI-718 dan WPPNRI-714 secara umum berada pada status eksploitasi yang berlebih (*over exploited*) dan *fully exploited*. Data Selengkapnya mengenai estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI-718 dan WPPNRI-714 dapat dilihat pada Tabel III-277.

Tabel III-277. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI-718 dan WPPNRI-714

No	SDI	WPPNRI-718			WPPNRI-714		
		Potensi (ton)	JTB (ton)	Tingkat Pemanfaatan	Potensi (ton)	JTB (ton)	Tingkat Pemanfaatan
1	Ikan Pelagis Kecil	836,973	669,579	0.51	222,881	156,017	0.7
2	Ikan Pelagis Besara)	818,870	655,096	0.99	370,653	259,457	0.7
3	Ikan Demersal	876,722	701,378	0.67	292,000	204,400	0.7
4	Ikan Karang	29,485	23,588	1.07	121,326	60,663	1.1
5	Udang Penaeid	62,842	50,274	0.86	6,472	3,236	1
6	Lobster	1,187	950	0.97	724	362	1.7
7	Kepiting	1,498	1,198	0.85	1,758	879	1.4
8	Rajungan	775	620	0.77	4,705	3,294	0.6
9	Cumi-cumi	9,212	7,370	1.28	13,460	9,422	0.5
	Total	2,637,564	2,110,053		1,033,979	697,730	

Sumber : Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022

Keterangan: a) ikan pelagis besar non Tuna-cakalang

b) $E < 0,5$: moderate, upaya penangkapan dapat ditambah

$0,5 \leq E \leq 1$: fully exploited, upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat

$E \geq 1$: over exploited, upaya penangkapan harus dikurangi

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tertuang dalam Buku Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau Tanimbar tahun 2007 diketahui bahwa potensi sumber daya ikan di perairan pesisir sekitar Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut.

Sumberdaya ikan pelagis kecil. Potensi sumberdaya ikan pelagis kecil di perairan Gugus Pulau Tanimbar diperkirakan pada perairan wilayah 0 – 4 mil laut sebesar 9.455,25 ton dengan Maximum Sustainable Yield (MSY) sebesar 4.727,63 ton/tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 3.782,11 ton/tahun. Nilai ini akan lebih besar lagi bila nelayan di Gugus Pulau Tanimbar dapat memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah kelola Provinsi Maluku (4-12 mil laut) yang berbatasan langsung dengan perairan Gugus Pulau Tanimbar, yakni sebesar 13.396,56 ton dengan MSY sebesar 6.698,28 ton/tahun dan JTB sebesar 5.358,62 ton/tahun (Sumber: Buku Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau Tanimbar, Dinas Perikanan Kabupaten MTB 2007).

Sumberdaya ikan pelagis besar. Potensi ikan pelagis besar pada perairan wilayah 0-4 mil laut diperkirakan sebesar 4.867,72 ton dengan MSY sebesar 2.433,86 ton/tahun dan JTB sebesar 1.947,09 ton/tahun. Nelayan di Gugus Pulau ini dapat juga menangkap ikan pelagis besar hingga wilayah kelola Provinsi Maluku (4-12 mil laut), sehingga mereka masih dapat memanfaatkan ikan pelagis besar yang masih tersedia sebesar 6.896,77 ton dengan MSY sebesar 3.448,38 ton/tahun dan JTB sebesar 2.758,71 ton/tahun di wilayah ini lagi (Sumber: Buku Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau Tanimbar, Dinas Perikanan Kabupaten MTB 2007). Sumberdaya ikan Jenis ikan pelagis besar yang diketahui sering ditangkap oleh nelayan di Gugus Pulau Tanimbar adalah ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp). Di perairan ini, diperkirakan potensi ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp) sebesar 858,85 ton dengan *maximum sustainable yield* (MSY) sebesar 429,43 ton/tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 343,54 ton/tahun di perairan wilayah 0-4 mil laut. Pada perairan wilayah 4-12 mil laut, diperkirakan potensi sumberdaya ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp) sebesar 1.216,85 ton dengan MSY 608,43 ton/tahun dan JTB 486,74 ton/tahun.

Sumberdaya ikan demersal. Potensi sumberdaya ikan demersal pada wilayah perairan di Gugus Pulau Tanimbar, diperhitungkan sesuai dengan penyebaran ikan demersal. Potensi ikan demersal di perairan ini diperkirakan sebesar 38.361,42 ton dengan MSY sebesar 19.180,71 ton/tahun dan JTB sebesar 15.344,57 ton/tahun. Di wilayah Gugus Pulau Tanimbar, khususnya di perairan Teluk Salwasa dan sekitarnya memiliki potensi sumberdaya udang penaeid. Diperkirakan potensi sumberdaya udang penaeid di daerah penangkapan ini sebesar 133,34 ton dengan MSY sebesar 66,67 ton/tahun dan JTB sebesar 53,34 ton/tahun (Sumber: Buku Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau Tanimbar, Dinas Perikanan Kabupaten MTB 2007).

Sumberdaya Ikan Karang. Pada perairan pesisir Kecamatan Tanimbar Selatan yang dilakukan pengamatan di tiga titik areal terumbu karang yakni di Weluang (Desa Olilith), Pulau Asutubun dan Pulau Matakus. Ditemukan sebanyak 145 spesies ikan karang yang tergolong ke dalam 76 genera dan 26 famili. Kelimpahan spesies tertinggi ditemukan di terumbu karang perairan pesisir Weluang (114 spesies) dan terendah di Pulau Astubun (93 spesies), Secara keseluruhan maupun menurut titik pengamatan, ternyata jumlah spesies ikan hias lebih tinggi dari jumlah spesies ikan konsumsi. Jumlah spesies ikan hias dan ikan konsumsi di Pantai Weluang lebih tinggi dari dua areal terumbu karang lainnya. Kepadatan ikan karang rata-rata di perairan pesisir Kecamatan Tanimbar Selatan sebesar 4,49 ind./m² dan kepadatan ikan karang tertinggi berada di perairan pesisir Pulau Matakus

serta kepadatan terendah pada perairan pesisir Pulau Astubun. Berdasarkan kriteria pemanfaatan, ternyata kepadatan ikan konsumsi lebih tinggi dari ikan hias. Kepadatan ikan konsumsi lebih tinggi dari ikan hias pada ketiga areal terumbu karang tersebut. Kepadatan ikan konsumsi dan ikan hias tertinggi dijumpai di Pulau Matakus sedangkan kepadatan ikan konsumsi terendah di P. Astubun. Akan tetapi kepadatan ikan hias terendah dijumpai di perairan karang lokasi Weluang.

Sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan budidaya yang merupakan kontributor penting bagi perekonomian dan perdagangan nasional di Indonesia. Perikanan laut terdiri dari penangkapan ikan di pantai dan perikanan laut dalam. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2022 mencapai 13.941 ton dengan nilai mencapai 300,3 milyar rupiah. Volume ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2022 sebesar 1.191 ton dengan nilai 21,5 milyar rupiah.

Perkembangan volume produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama periode tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Volume produksi ikan yang di daratkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019 tercatat sebanyak 11.215 ton dan terus meningkat hingga di tahun 2022 mencapai 13.941 ton. Nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2022 cenderung meningkat, kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

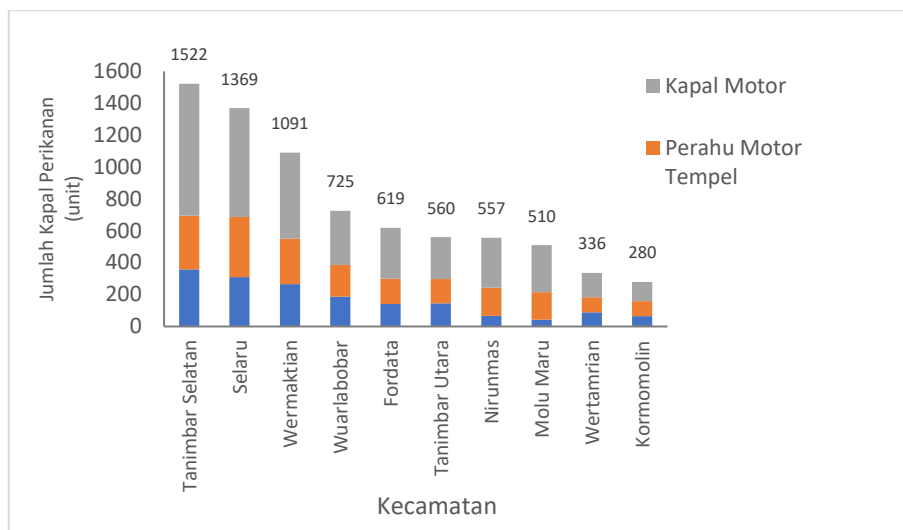
Volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Barat Daya selama periode 2019-2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang signifikan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini lebih disebabkan oleh pengaruh adanya pandemi covid-19. Aktivitas kegiatan penangkapan mengalami penurunan karena terbatasnya kegiatan pemasaran produk yang juga disebabkan karena terbatasnya aksesibilitas. Data selengkapnya mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap di wilayah studi disajikan pada **Tabel III-278**.

Tabel III-278. Perkembangan volume dan nilai produksi perikanan tangkap di wilayah studi tahun 2019-2022

Tahun	Kepulauan Tanimbar		Maluku Barat Daya	
	Volume (ton)	Nilai (Juta rupiah)	Volume (ton)	Nilai (Juta rupiah)
2019	11,215	287,228	15,786	368,734
2020	11,616	174,367	3,372	96,829
2021	12,192	317,594	2,507	49,868
2022	13,941	300,331	1,191	21,456

Sumber: Diolah dari Satu Data KKP, 2024

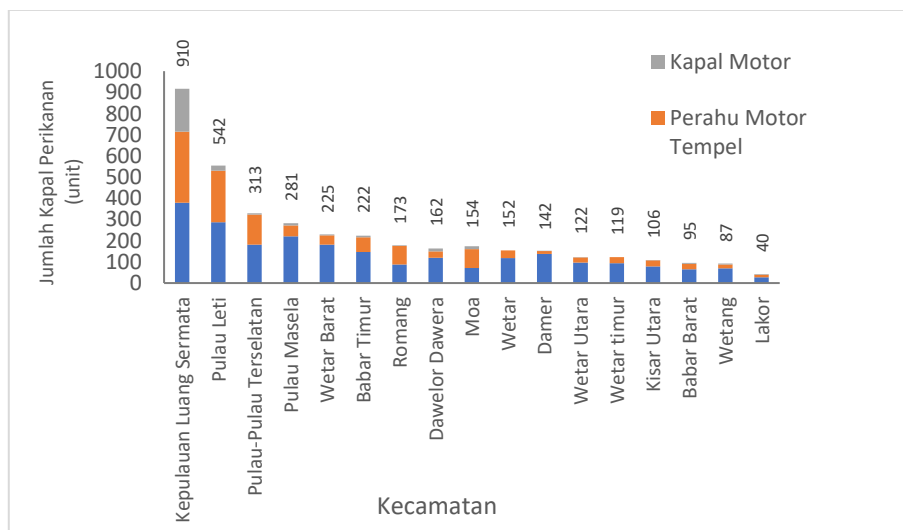
Kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk dalam perikanan skala kecil dengan ukuran kapal perikanan yang dominan dibawah 5 GT (<5 GT). Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diketahui jumlah kapal perikanan pada tahun 2022 tercatat sebanyak sebanyak 7.569 unit. Jumlah kapal perikanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling banyak terdapat di Kecamatan Tanimbar Selatan yakni sebanyak 1.522 unit (20,11%), di Kecamatan Selaru sebanyak 1.369 unit (18,09%) dan di Kecamatan Wermaktian sebanyak 1.091 unit (14,41%). Jumlah kapal perikanan yang terdapat di Kecamatan Wertamrian tercatat sebanyak 336 unit (4,44%). Data selengkapnya mengenai jumlah kapal perikanan menurut kategori dan kecamatan di wilayah studi tahun 2022 disajikan pada Gambar III-328.



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2024 (diolah)

Gambar III-328. Jumlah kapal perikanan berdasarkan kategorinya menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya diketahui jumlah kapal perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.845, terdiri dari perahu tanpa motor (61,33%), perahu motor tempel (33,34%) dan kapal motor (7,78%). Kecamatan Kepulauan Luang Sermata menjadi wilayah kecamatan yang memiliki jumlah unit kapal perikanan paling banyak yaitu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 910 unit (23,67%) dan memiliki jumlah kapal motor paling banyak yaitu sebanyak 60,6% dari total kapal motor di kabupaten. Jumlah kapal perikanan di Pulau Masela pada tahun 2023 tercatat sebanyak 281 unit (7,31%). Rincian data selengkapnya mengenai jumlah kapal perikanan berdasarkan kategorinya menurut kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2023 disajikan pada Gambar III-329.



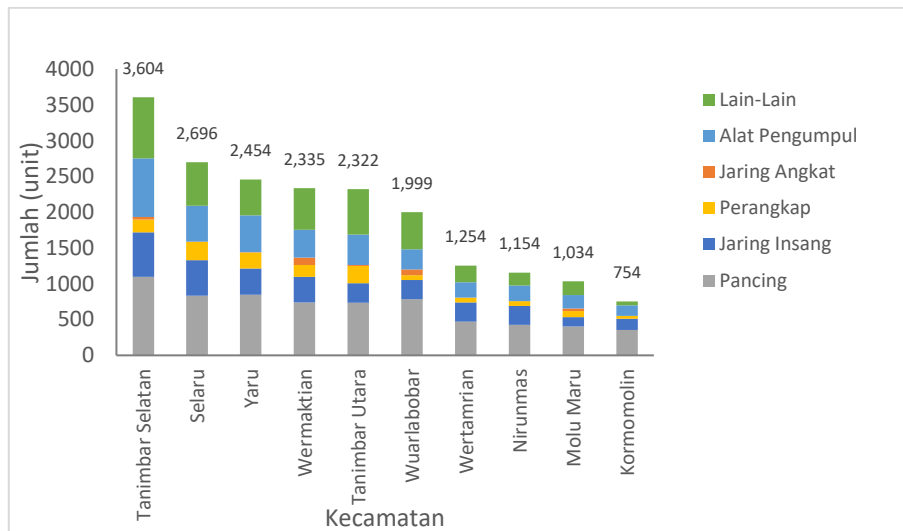
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya 2024 (diolah)

Gambar III-329. Jumlah kapal perikanan berdasarkan kategorinya menurut kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2023

Kapal penangkapan ikan di wilayah studi didominasi oleh perikanan skala kecil dengan menggunakan alat penangkapan ikan sederhana. Nelayan skala kecil/artisanal biasanya melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan pesisir. Berbeda dengan nelayan artisanal, nelayan komersial

menggunakan kapal yang lebih besar dan dilengkapi teknologi untuk beroperasi di lokasi yang lebih jauh di laut. Praktik penangkapan ikan artisanal skala kecil merupakan komponen kunci dari kegiatan komersial lokal dan penghidupan di sebagian besar Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di wilayah studi didominasi oleh alat tangkap pancing dan jaring insang. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diketahui jumlah alat penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2022 tercatat sebanyak 19.606 unit, meliputi pancing (34,11%), alat pengumpul (18,86%), jaring insang (16,35%), perangkap (7,09%) jaring angkat (1,39%) dan lainnya (22,19%). Apabila ditinjau dari wilayahnya, sebaran distribusi jumlah alat penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2022 paling banyak berada di Kecamatan Tanimbar Selatan mencapai 3.608 unit (18,38%) dan Kecamatan Selaru sebanyak 2.696 unit (13,75%), Kecamatan Yaru sebanyak 2.335 unit (12,52%) dan Kecamatan Wermaktian sebanyak 2.322 unit (11,91%). Data selengkapnya mengenai jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis alat dan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022 disajikan pada Gambar III-330.



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2024 (diolah)

Gambar III-330. Jumlah alat penangkapan ikan menurut kecamatan dan jenisnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022

Masyarakat pesisir di sekitar wilayah studi yang mencakup Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan aktivitas penangkapan ikan. Umumnya penduduk yang berada di wilayah pesisir seperti di Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit, Desa Sifnana, Desa Bomaki, Desa Lermatang, Desa Latdalam, Desa Luran dan Matakus sangat bergantung pada sumberdaya laut untuk kelangsungan hidup dimana sebagian besar dari mereka adalah perikanan skala kecil dengan alat tangkap seperti pancing, jaring insang, perangkap ikan dan tombak ikan. Nelayan skala kecil beroperasi di laut yang umumnya di sekitar pantai. Jenis ikan yang biasa ditangkap antara lain kakap merah, kerapu, ikan pari (*string ray*), sotong, ikan trigger, dan lobster.

Penangkapan ikan dianggap sebagai sumber pendapatan utama nelayan tradisional di Pulau Matakus. Mereka juga menangkap lobster, udang, dan hiu pada saat bulan purnama. Satu kilogram sirip hiu kering dihargai sekitar Rp 2 juta dan ukuran sirip yang lebih kecil sekitar Rp 200-300 ribu. Masyarakat Desa Matakus tidak berburu penyu, dugong, paus dan lumba-lumba. Teknik penangkapan ikan yang dominan dilakukan oleh nelayan ini adalah pancing ulur, jaring pukat, perangkap ikan dan tombak. Jenis ikan yang biasa ditangkap antara lain makarel (ikan kembung),

pari tali, kerapu, kakap merah, sotong, ikan trigger (ikan ayam-ayam) dan lobster. Matakus termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki sumberdaya ikan yang besar. Ikan yang berada di dalam dan di sekitar wilayah studi merupakan ikan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi mata pencaharian nelayan setempat. Selain dikonsumsi sendiri, ikan tersebut juga dijual ke pasar Saumlaki melalui tengkulak yang datang langsung ke desa-desa di wilayah studi.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-331. Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Aktivitas masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Barat Daya relatif sama dengan masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk dalam skala kecil dengan ukuran kapal perikanan yang berada di bawah 5 GT (<5 GT). Waktu operasi penangkapan ikan per trip operasi umumnya berlangsung kurang dari satu hari dan termasuk kategori penangkapan *one day fishing*.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-332. Kondisi kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya yang dekat dengan lokasi kegiatan salah satunya berada di Pulau Masela. Mata pencaharian masyarakat di Pulau Masela umumnya adalah sebagai petani dan juga nelayan. Kegiatan penangkapan ikan banyak dilakukan di wilayah perairan pesisir. Besaran biaya operasi penangkapan ikan rata-rata sebesar Rp 100.000 per trip yang digunakan untuk kebutuhan BBM dan logistik melaut. Rata-rata pendapatan yang diperoleh dari penjualan ikan hasil tangkapan berkisar Rp 200.000 per trip hingga Rp 500.000 per trip. Sehingga profitabilitas usaha penangkapan rata-rata berkisar Rp 100.000 per trip hingga Rp 400.000 per trip. Pendapatan usaha penangkapan selalu berfluktuatif tergantung pada jumlah ikan hasil tangkapan dan harga jualnya.

Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan antara lain pancing, jaring insang, jaring lingkaran dan bubu. Gambaran lebih jelasnya mengenai jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada Gambar III-333.



alat tangkap jaring



Pembuatan jaring



Alat tangkap pancing



Alat tangkap pengumpul ikan



Pembuatan alat tangkap bubu ikan



Alat tangkap bubu sidat

Sumber: Hasil Survei Lapangan di Kabupaten Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024

Gambar III-333. Alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya

Kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya didominasi oleh kapal perikanan skala kecil berukuran kurang dari 5 GT. Jenis kapal yang banyak digunakan yaitu perahu motor tempel dengan menggunakan mesin penggerak hingga 3.5 PK hingga 15 PK. Gambaran mengenai kondisi kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada Gambar III-334.



Kapal perikanan di Desa Iblatmuntah



Kapal perikanan di Lawawang



Kapal perikanan di Desa Babiotang



Kapal perikanan di Desa Telalora



Kapal perikanan di Desa Marsela



Kapal perikanan di Desa Serilli



Kapal Perikanan di Desa Latalola Kecil



Kapal perikanan di Desa Latalola Besar



Kapal perikanan di Tapa, Pulau Babar



Kapal Perikanan di Letwurung, Pulau babar



Kapal perikanan di Desa Emplawas, Pulau Babar

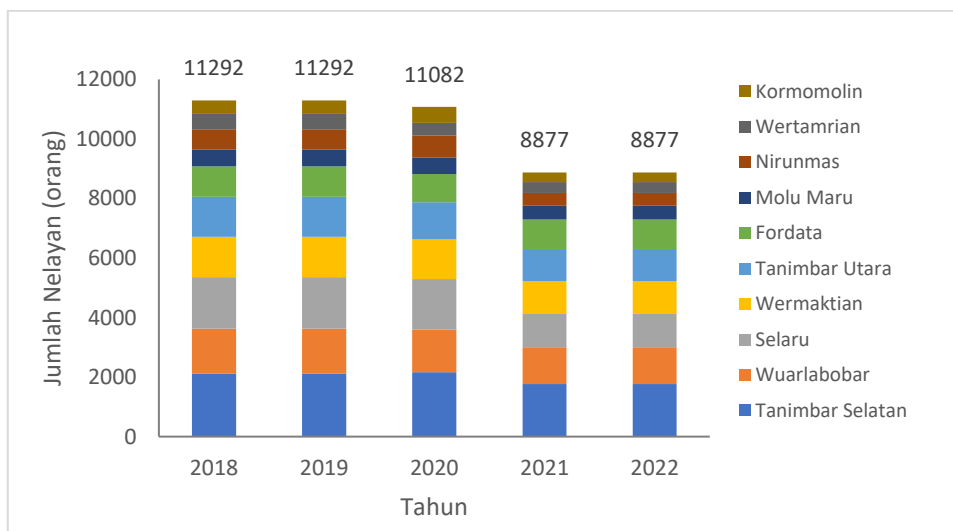


Mesin penggerak kapal perikanan yang dominan digunakan oleh nelayan

Sumber: Hasil Survei Lapangan di Kabupaten Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024

Gambar III-334. Kapal perikanan ikan yang digunakan nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diketahui bahwa banyaknya nelayan yang tercatat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 8.877 orang. Sebaran jumlah nelayan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2022 berada di wilayah Kecamatan sebanyak 1.765 orang (19,88%), di Kecamatan Wuarlabobar sebanyak 1.234 orang (13,9%), di Kecamatan Selaru sebanyak 1.123 orang (12,65%). Adapun jumlah nelayan di Kecamatan Wertamrian tercatat sebanyak 367 orang (4,13%). Rincian data selengkapnya mengenai perkembangan jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar III-335.

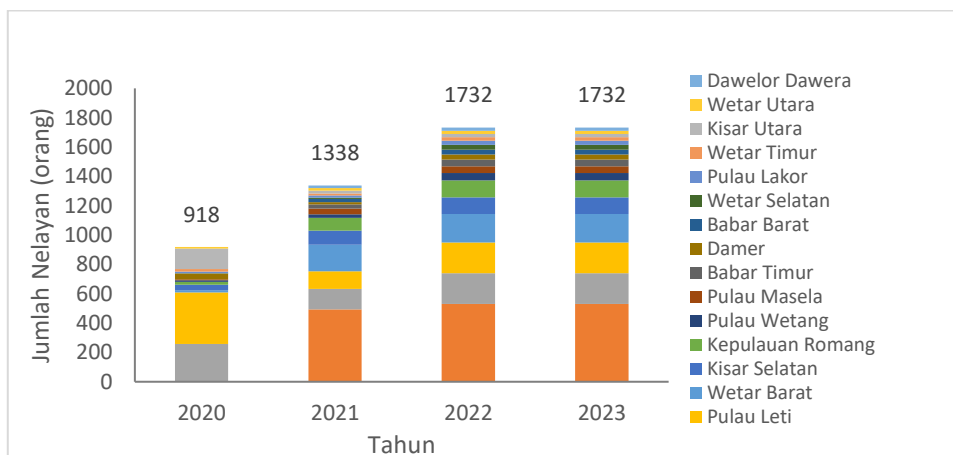


Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2024 (diolah)

Gambar III-335. Jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya diketahui bahwa banyaknya nelayan yang tercatat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.732 orang. Sebaran jumlah nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2023 terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Luang Sermata yaitu sebanyak 530 orang (30,6%), di Kecamatan Moa sebanyak 211 orang (12,18%), di Kecamatan Leti sebanyak 208 orang (12,01%). Jumlah nelayan di Kecamatan Pulau Masela yang tercatat di tahun 2023 sebanyak 47 orang (2,71%). Rincian data selengkapnya mengenai

perkembangan jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya selang periode tahun 2020-2023 disajikan pada Gambar III-336.



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, 2024 (diolah)

Gambar III-336. Jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022

Dilihat dari fasilitas perikanan, terdapat lima pengelolaan ikan yang beroperasi di Kecamatan Tanimbar Selatan. Tiga di antara unit pengelolaan ikan tersebut sudah berupa usaha perseroan terbatas. Terdapat 7 koperasi aktif di Kecamatan Tanimbar Selatan. Selanjutnya, detail informasi dapat dilihat Tabel III-279 dan Tabel III-280.

Tabel III-279. Unit Pengelolaan Ikan yang Beroperasi di Kecamatan Tanimbar Selatan

No	Nama Unit Pengolahan Ikan	Produk
1	PT. Indonesia Estearn Seafood	Ikan Beku
2	PT. Makmur Bahari Sukses	Ikan Beku
3	PT. Inti Mas Surya	Ikan Beku
4	CV. LH Korindo	Ikan Beku
5	UD. Joyo Mandiri Pratama	Ikan Beku

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020

Tabel III-280. Koperasi yang Aktif di Kecamatan Tanimbar Selatan

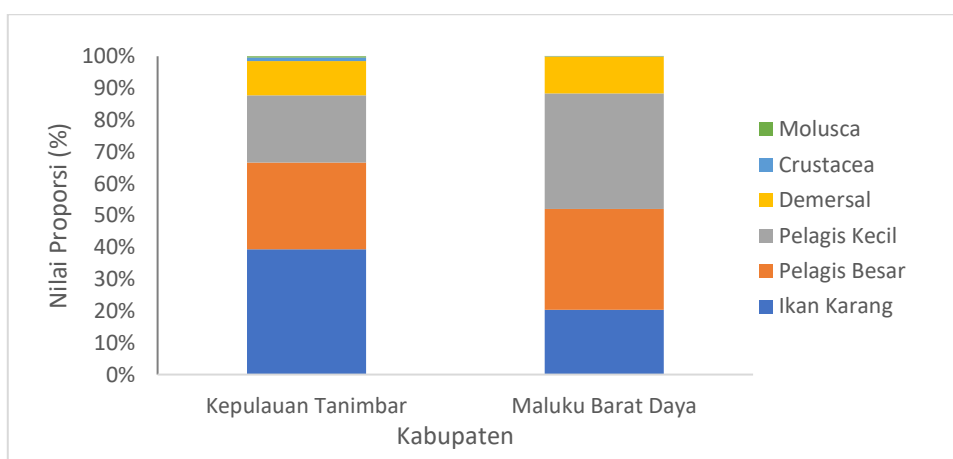
No	Nama Koperasi	NIK	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Koperasi Perikanan Udang Halus	8106100080006	Saumlaki	Tanimbar Selatan
2	Koperasi Perikanan Awai Eras	8106100080007	Saumlaki	Tanimbar Selatan
3	Koperasi Perikanan Korban Nleka	8106170110001	Latdalam	Tanimbar Selatan
4	Koperasi Perikanan Kakap Merah	8106150080001	Saumlaki	Tanimbar Selatan
5	Koperasi Serba Usaha Rau Center	8106100080008	Latdalam	Tanimbar Selatan
6	Koperasi Serba Usaha Pelangi	082397866769	Saumlaki	Tanimbar Selatan

No	Nama Koperasi	NIK	Desa/Kelurahan	Kecamatan
7	Koperasi Serba Usaha Terun Botawi	94/BH/XXX.3/III/2016	Saumlaki	Tanimbar Selatan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020

Secara tradisional, laut dan sumberdaya di dalamnya diakui sebagai milik komunal desa, sehingga tidak dikenal kepemilikan wilayah laut secara individu atau kelompok mata rumah (marga). Sebagai milik komunal, maka berlaku hak petuanan (hak ulayat) dimana setiap penduduk Lermatang dapat mencari ikan dan sumberdaya lainnya di wilayah laut Lermatang sebagai pemegang *primary use rights*. Sesuai sejarah desa dan diakui oleh desa-desa tetangga, wilayah petuanan laut Lermatang juga meliputi pulau kecil yang bernama Nus Twal atau Nustual yang terletak di selatan desa. Walaupun sebagai pemegang *primary use rights*, hak mereka untuk mengambil sumberdaya laut tertentu akan dibatasi atau ditunda penggunaannya ketika sumberdaya tersebut diberlakukan 'sasi' oleh pemerintah desa. Sasi adalah suatu bentuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu wilayah tertentu, baik di laut maupun di darat, dan pada suatu waktu tertentu. Sumberdaya laut yang dikenakan sasi di desa terdampak kegiatan adalah teripang (berbagai species), lola (*Trochus niloticus*), japin-japin (*Pinctada margaritifera*), batulaga (*Turbo marmorata*), dan kelapa (*Cocos nucifera*). Dengan demikian, ketika sasi dilakukan pada sumberdaya ini (tutup sasi), maka penduduk sebagai pemegang hak memanen tidak boleh menangkap atau mengambil sumberdaya tersebut sampai saatnya sasi dibuka (buka sasi). Selain diperlakukan secara internal, hukum sasi juga berlaku untuk orang luar yang memasuki wilayah yang dikenai sasi.

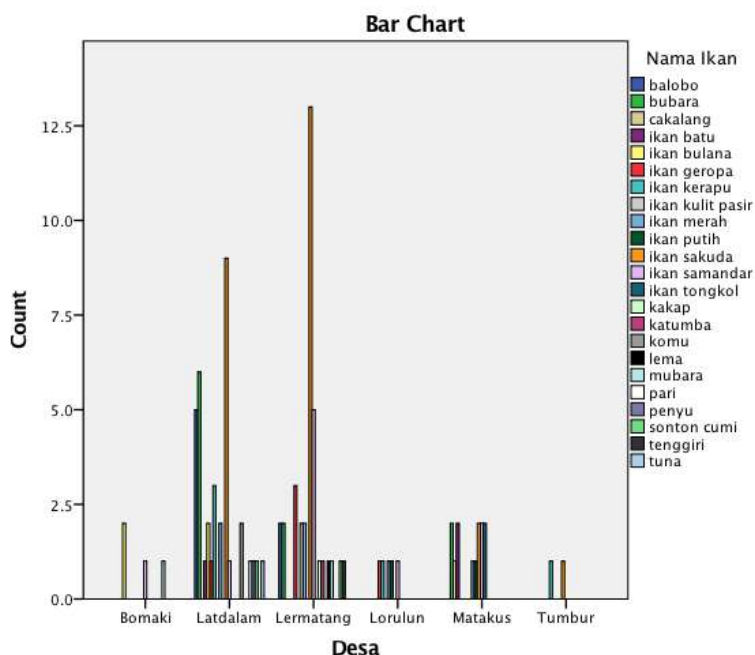
Dengan mengacu pada satu data KKP mengenai produksi perikanan tangkap di wilayah studi yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya selama periode tahun 2019-2023, maka dapat dihitung secara keseluruhan komposisi kelompok ikan yang paling banyak didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara berurut yaitu kelompok ikan karang (39,39%), pelagis besar (27,19%) dan pelagis kecil (21,11%). Kelompok sumberdaya ikan yang didaratkan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada periode yang sama secara berurut yaitu pelagis kecil (36,34%), pelagis besar (31,66%) dan ikan karang (20,35%). Gambaran selengkapnya mengenai komposisi produksi perikanan tangkap menurut kelompok sumber daya ikan di wilayah studi disajikan pada



Sumber: diolah dari satu data KKP, 2014

Gambar III-337. Komposisi produksi perikanan tangkap berdasarkan kelompok sumber daya ikan di wilayah studi.

Berdasarkan hasil survei, jenis ikan hasil tangkapan nelayan cukup beragam. Terdapat sekitar 23 spesies ikan hasil tangkapan nelayan dengan rincian yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis ikan yang paling sering ditangkap nelayan adalah ikan Sakuda (26,3%), khususnya oleh nelayan dari Desa Lermatang dan Latdalam. Ikan Sakuda (kakap merah) juga dapat ditemukan di Desa Matakus dan Tumbur namun tidak sebanyak di Desa Lermatang dan Latdalam. Jenis ikan lainnya yang paling banyak menjadi tangkapan nelayan di wilayah studi adalah jenis ikan Bubara (ikan kuwe, *Caranx sp*) dan Samandar (ikan baronang) yaitu sebanyak 10,5%.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-338. Komposisi jenis Ikan yang Ditangkap Nelayan di Wilayah Studi

Gambaran mengenai jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang di wilayah studi dapat dilihat pada Gambar III-339.



Ikan yang di tangkap oleh nelayan di Kepulauan Tanimbar (Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019)



Hasil tangkapan nelayan di telalora dengan menggunakan alat tangkap jaring lingk

(Sumber : Dokumentasi Foto Survei Lapangan di Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024)



Ikan hasil tangkapan nelayan di Telalora

(Sumber : Dokumentasi Foto Survei Lapangan di Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024)



Hasil tangkapan nelayan di Telalora, Pulau Masela

(Sumber : Dokumentasi Foto Survei Lapangan di Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024)

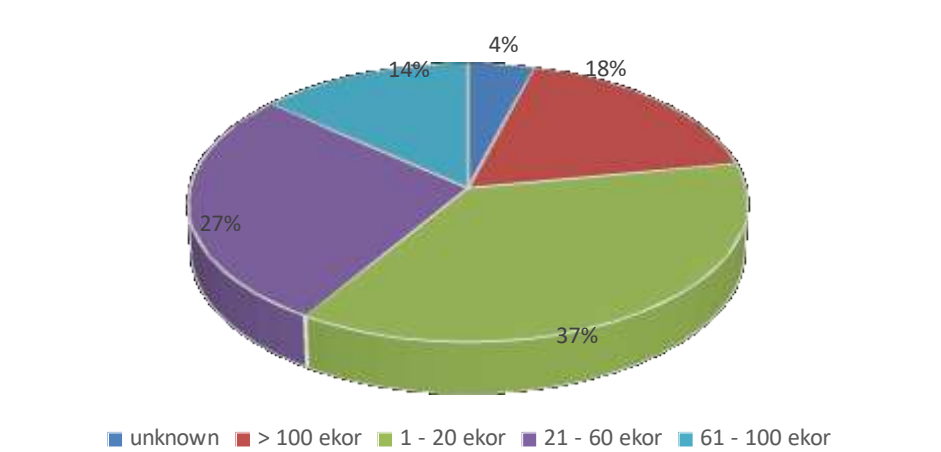


Produk olahan ikan kering di Iblatmuntah, Pulau Masela

(Sumber : Dokumentasi Foto Survei Lapangan di Maluku Barat Daya Bulan Januari 2024)

Gambar III-339. Ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi

Rata-rata jumlah hasil tangkapan ikan nelayan di wilayah studi adalah berkisar antara 1-20 ekor yaitu sebanyak 37%. Ikan yang paling banyak ditangkap pada kisaran jumlah ini diantaranya adalah ikan Bubara, Geropa, dan Samandar. Sebanyak 14% responden nelayan mengaku dapat menangkap lebih dari 100 ekor ikan khususnya jenis ikan Sakuda. Penjualan ikan secara eceran biasanya dalam bentuk “ikat/tali”. Harga ikan untuk untuk satu ikat/tali yang berisi 6 ekor ikan sakuda sekitar Rp 40.000, Untuk tali yang berisi 2 ekor seharga Rp 30.000. Dalam satu tali biasanya berbobot 2 kg. Jumlah trip rata-rata 20 trip per bulan. Nelayan pancing ulur (handline) mendapatkan ikan antara 4 sampai 8 kg dan bila musim ikan bisa memperoleh 50 kg per trip. Namun kadang-kadang juga bisa mendapatkan hasil yang sedikit. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000 dan bila musim ikan bisa mendapatkan Rp 1 juta per trip. Namun perolehan hasil penjualan kadang-kadang hanya cukup untuk menutupi biaya melaut atau hanya untuk konsumsi keluarga. Selanjutnya, jumlah hasil tangkapan ikan nelayan di wilayah studi dapat dilihat pada Gambar III-340.



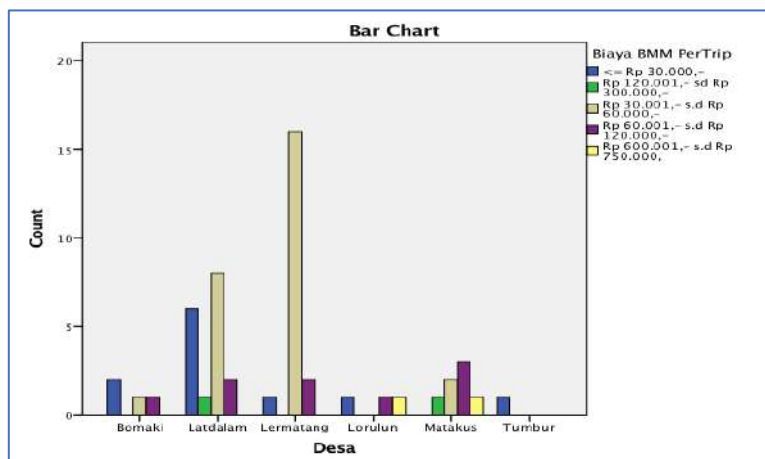
Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-340. Rata-rata Jumlah Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Wilayah Studi

Saat melaut, terdapat beberapa responden nelayan di wilayah studi yang melaut bersama dengan ABK. Rata-rata jumlah ABK sebanyak 2 orang. Rentang usia ABK yang pada umumnya sekitar umur 20 hingga 56 tahun dengan paling banyak ABK berada di usia 30 tahun. Di Desa Bomaki, Latdalam,

Lermatang, dan Matakus, rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh ABK yaitu tingkat SMA. Sementara itu, di Desa Tumbur, rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh ABK yaitu tingkat SD.

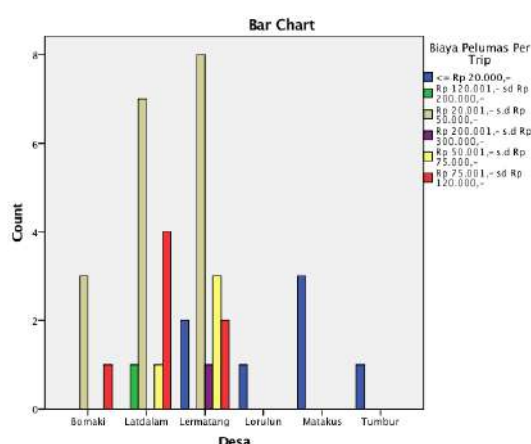
Jenis kapal yang digunakan oleh responden nelayan di desa wilayah studi pada umumnya menggunakan perahu kayu serta beberapa ditemukan berbahan besi dan fiber. Jumlah perahu terbanyak berasal dari Desa Lermatang yaitu sebanyak 20 unit dan diikuti dengan Desa Latdalam sebanyak 19 unitl. Jumlah perahu di Desa Bomaki sebanyak 4 unit dan Desa Lorulun dan Matakus sebanyak 2 unit.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-341. Biaya BBM Per Trip

Gambar III-341 menunjukkan biaya BBM per trip yang dikeluarkan oleh nelayan di desa wilayah studi. Di Desa Lermatang dan Latdalam, mayoritas nelayan menghabiskan biaya untuk BBM berkisar antara Rp 30.001 hingga Rp 60.000 per trip. Desa Bomaki dan Tumbur, nelayan menghabiskan biaya untuk BBM kurang dari Rp 30.000. Nelayan di Desa Matakus mayoritas menghabiskan biaya untuk BBM berkisar antara Rp 60.001 hingga Rp 120.000, sedangkan nelayan di Desa Lorulun menghabiskan biaya BBM berkisar antara Rp 60.001 hingga Rp 120.000 per trip.

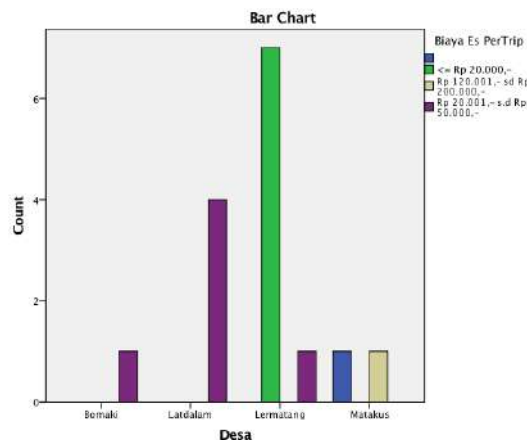


Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-342. Biaya Pelumas Per Trip

Mesin perahu membutuhkan pelumas untuk menggerakkan mesin, membantu melindungi dan membersihkan mesin dari kotoran sehingga mesin tetap awet. Berdasarkan hasil survei sosial yang

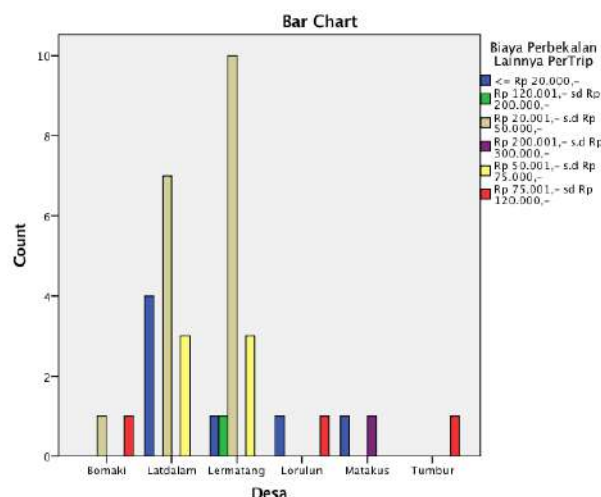
ditunjukkan oleh Gambar III-342, nelayan pada Desa Bomaki, Latdalam, dan Lermatang, mengeluarkan biaya untuk pelumas rata-rata adalah berkisar antara Rp 20.001 hingga Rp 50.000 untuk sekali trip. Sementara pada Desa Lorulun, Matakus, dan Tumbur, nelayan mengeluarkan biaya untuk pelumas berkisar kurang dari Rp 20.000.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-343. Biaya Es Per Trip

Selain pelumas, nelayan juga membutuhkan es untuk menyimpan ikan hasil tangkapan agar tetap segar. Pengeluaran tertinggi untuk es yaitu sekitar kurang dari Rp 20.000 per trip oleh nelayan di Desa Lermatang. Pada Desa Bomaki dan Latdalam, nelayan mengeluarkan biaya untuk es berkisar antara Rp 20.001 hingga Rp 50.000 dalam satu kali trip. Sementara pada Desa Matakus, pengeluaran untuk biaya es berkisar antara Rp 120.001 hingga Rp 200.000 dalam satu kali trip. Hal ini dikarenakan nelayan di Desa Matakus rata-rata menangkap ikan lebih lama dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sekitar 8 hingga 10 jam seharinya sehingga memerlukan es lebih banyak untuk menjaga ikan agar tetap segar. Biaya es per trip lebih rinci ditunjukkan pada Gambar III-343.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-344. Biaya Perbekalan Lainnya Per Trip

Saat melaut nelayan membutuhkan perbekalan berupa nasi, roti, air mineral, ataupun makanan lainnya untuk dikonsumsi saat menangkap ikan. Pengeluaran untuk perbekalan terbanyak yaitu

sebesar Rp 20.001 hingga Rp 50.000 oleh nelayan dari Desa Lermatang, Latdalam, dan Bomaki. Pengeluaran untuk perbekalan tertinggi yaitu berkisar antara Rp 200.001 hingga Rp 300.000 yang umumnya dikeluarkan oleh nelayan dari Desa Matakus. Secara rinci, biaya perbekalan lainnya dapat dilihat pada Gambar III-344.

Pulau Nustual yang di klaim milik masyarakat Lermatang merupakan wilayah penting bagi nelayan Lermatang. Berdasarkan wawancara, wilayah sekitar pulau adalah fishing ground yang kaya akan sumberdaya ikan. Selain itu, nelayan biasanya berlindung di perairan sekitar pulau tersebut ketika musim angin. Jarak yang jauh dengan kepala 'meti' membuat gelombang berkurang di sekitar situ sehingga menjadikannya tempat berlindung yang baik ketika sedang melaut. Wilayah antara Nustual dan daratan pulau besar juga merupakan wilayah yang dipakai nelayan Lermatang untuk budidaya rumput laut. Tanjung pulau ini pun dipakai sebagai tempat pengelolaan pasca panen teripang.

Pulau Nustual terletak di sebelah Tenggara dari Desa Lermatang, Pulau ini terdiri dari karang berbatu dan dikelilingi oleh vegetasi pantai dan lahan basah, Mangrove terletak di sisi Utara dan Barat Pulau Nustual. Beberapa bagian dari hutan mangrove di Pulau Nustual didominasi oleh mangrove primer dewasa dan juvenil.



Gambar III-345. Kondisi Pulau Nustual dan Perairan di sekitarnya

Area lahan basah di Pulau Nustual akan dibersihkan untuk memberi jalan bagi pengembangan OLNG. Pekerjaan konstruksi tersebut dapat mengubah kondisi ekosistem mangrove dan mengganggu komunitas lamun di daerah tersebut. Akumulasi partikel tersuspensi seperti debu, pasir, dan pengendapan dari pembukaan lahan dapat merusak habitat lamun yang merupakan habitat manatee (dugong). Hilangnya habitat mangrove dapat direstorasi dengan melaksanakan program penanaman kembali mangrove di wilayah lain untuk menggantikan pohon mangrove yang

telah terdegradasi. Menanam bakau adalah teknik yang terbukti membantu melindungi masyarakat dan lingkungan pesisir dengan mengurangi dampak gelombang yang kuat. Penghijauan pohon bakau juga akan meningkatkan pemasukan bagi masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah pesisir dengan berpartisipasi langsung dalam perlindungan hutan tanaman dan perkebunan.

Karang merupakan salah satu sumber makanan dan tempat berteduh bagi ikan dan habitat laut lainnya. Terumbu karang berperan penting untuk perlindungan erosi pantai. Karang rentan terhadap perubahan lingkungan dan karang yang diamati di garis pantai Nustual berada dalam kondisi sehat. Akibat kegiatan pembersihan lahan basah tersebut, kondisi karang dapat terpengaruh akibat meningkatnya beban sedimen dan pengendapan ke dalam air laut. Sebagai bagian dari langkah-langkah penanggulangan dampak, maka akan dilakukan penanaman kembali kembali di daerah tersebut dengan karang dan penanaman kembali bakau di daerah yang sesuai, setelah melakukan koordinasi dengan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Instansi Terkait lainnya.

Matakus merupakan sebuah dataran tanah seluas 474 hektar yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Selat Ergon, yang berjarak dua mil dari Kota Saumlaki. Pulau ini dikelilingi oleh pantai berpasir putih halus dan merupakan surga laut, dengan terumbu dangkal. Rute jalur pipa ekspor gas bawah laut yang diusulkan akan melintasi perairan Pulau Matakus dari kilang O LNG di Lermatang. Dengan demikian, Pulau Matakus kemungkinan akan mengalami masalah *ecosystem service* yang signifikan dalam hal gangguan perikanan tangkap, gangguan pada ekosistem karang dan sektor pariwisata. Pulau Matakus terletak di kawasan 'Segitiga Terumbu Karang' (utara Laut Arafura) mengandalkan terumbu karang indah yang beraneka ragam untuk menarik wisatawan mengunjungi Pulau Matakus sehingga memberikan kontribusi bagi pariwisata Indonesia serta perekonomian lokal. Pemerintah Daerah Maluku Barat telah membangun beberapa prasarana / sarana untuk menarik wisatawan internasional dan lokal datang untuk rekreasi diving, snorkeling dan fotografi bawah air.

Ekologi laut, habitat ikan, yang menjadi sumber mata pencaharian utama nelayan dapat mengalami kerusakan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya tangkapan ikan, konflik sosial, perpindahan penduduk dan hilangnya mata pencaharian. Hal ini memungkinkan nelayan akan memindahkan perahu dan alat tangkapnya karena adanya kegiatan konstruksi yang berpotensi mengganggu kegiatan penangkapan ikan dan sebagian besar ikan akan berpindah sejauh beberapa kilometer, sehingga mengurangi jumlah tangkapan. Akibatnya, nelayan mungkin harus melakukan perjalanan jauh dari pantai untuk menangkap ikan. Kondisi tersebut akan meningkatkan pengeluaran nelayan untuk bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal penangkap ikan mereka, sehingga pendapatan yang dihasilkan akan berkurang.

Lokasi penangkapan ikan nelayan dari Desa Terdampak dan Terpengaruh ditunjukkan pada Gambar III-346. Lokasi penangkapan ikan di perairan Desa Lermatang ditunjukkan pada Gambar III-347.



Gambar III-346. Lokasi Penangkapan Ikan



Gambar III-347. Lokasi Penangkapan Ikan di Perairan Desa Lermatang

Perikanan Budidaya

Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah China yang menyumbang 38% pasar rumput laut global. Lokasi budidaya rumput laut sebagian besar tersebar di bagian tengah dan timur Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Timur, dan Banten. Provinsi Maluku memiliki garis pantai untuk mendukung budidaya rumput laut dan meningkatkan peluang ekonomi, pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Maluku telah menyatakan akan menjadikan rumput laut sebagai komoditas ekspor utama daerah ini. Berbagai negara telah memberikan minat terhadap rumput laut dari Maluku yaitu Denmark, Jepang, China, Filipina, Korea, Taiwan, Australia dan Amerika (Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Indonesia 2014). Budidaya rumput laut di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan produksi karagenan. Diekstrak dari rumput laut yang dapat dimakan, produk sampingan ini digunakan secara luas dalam industri makanan dan kosmetik sebagai agen pembentuk gel alami.

Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah China yang menyumbang 38% pasar rumput laut global. Lokasi budidaya rumput laut sebagian besar tersebar di bagian tengah dan timur Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Timur, dan Banten. Provinsi Maluku memiliki garis pantai untuk mendukung budidaya rumput laut dan meningkatkan peluang ekonomi, pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Maluku telah menyatakan akan menjadikan rumput laut sebagai komoditas ekspor utama daerah ini. Berbagai negara telah memberikan minat terhadap rumput laut dari Maluku yaitu Denmark, Jepang, China, Filipina, Korea, Taiwan, Australia dan Amerika (Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Indonesia 2014). Budidaya rumput laut di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan produksi karagenan. Diekstrak dari rumput laut yang dapat dimakan, produk sampingan ini digunakan secara luas dalam industri makanan dan kosmetik sebagai agen pembentuk gel alami.

Rumput laut merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya utama yang dikembangkan di Kabupten Kepulauan Tanimbar. Budidaya rumput laut merupakan mata pencaharian yang semakin menjadi primadona usaha bagi masyarakat Kecamatan Tanimbar Selatan. Secara spasial, potensi lahan budidaya rumput laut di Kecamatan Tanimbar Selatan meliputi luas lahan sebesar 1.382 ha, dengan luas lahan yang telah dimanfaatkan baru sebesar 191 ha (13,82%). Secara umum lokasi budidaya rumput laut di Kecamatan Tanimbar Selatan merupakan perairan yang terlindung, karena lebih banyak dilakukan di sekitar teluk (Yudi Wahyudin, 2013).

Berdasarkan hasil survei di lokasi studi, budidaya rumput laut sebagian besar berada di Lermatang dan Matakus. Rumput laut dibudidayakan dengan metode long line dengan komoditas yang dibudidayakan adalah jenis *Eucheuma cottonii*. Manfaat budidaya rumput laut adalah 1) ramah lingkungan; 2) membutuhkan teknologi rendah, investasi rendah, dan pemrosesan pasca panen yang minimal; 3) dapat dilakukan di tingkat rumah tangga; dan 4) rumput laut dapat disimpan hingga enam bulan. Semua faktor ini menjadikan budidaya rumput laut sebagai kegiatan mata pencaharian yang menarik bagi penduduk, meskipun lokasi budidaya di lokasi 'terpencil' dan jauh dari rumah.

Produksi budidaya rumput laut berfluktuatif setiap tahunnya karena kegiatan budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh faktor alam. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kepulauan Kabupaten Tanimbar dan satu data KKP diketahui bahwa produksi rumput laut di Kabupaten Kepulauan

Tanimbar pada Tahun 2022 tercatat sebesar 43.039 ton dengan nilai sebesar 621.452 juta rupiah. Dengan mengacu pada satu data KKP diketahui produksi budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2022 sebesar 27.013 ton dengan nilai mencapai 82.380 juta rupiah. Perkembangan data volume dan nilai produksi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya periode tahun 2020-2022 disajikan pada **Tabel III-281**.

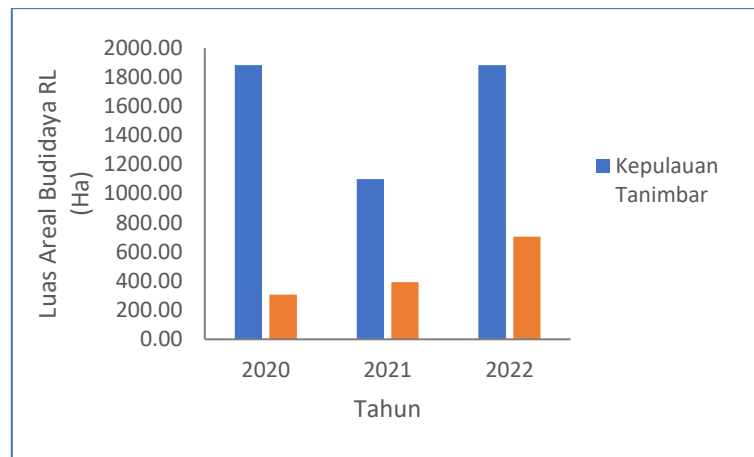
Tabel III-281. Perkembangan volume dan nilai produksi rumput laut di wilayah studi tahun 2020-2022

Tahun	Kabupaten Kepulauan Tanimbar		Kabupaten Maluku Barat Daya	
	Volume produksi (ton)	Nilai Produksi (juta rupiah)	Volume produksi (ton)	Nilai Produksi (juta rupiah)
2020	52,376	261,880	31,163	34,600
2021	28,875	144,375	34,156	43,530
2022	43,039	215,197	27,013	82,380

Sumber: Satu Data KKP, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya di awal tahun 2014, diketahui bahwa kegiatan budidaya rumput laut sejak akhir tahun 2019 mengalami penurunan karena adanya kendala produksi budidaya rumput laut dimana secara umum pembudidaya rumput laut di wilayah Maluku Barat Daya terkena ice-ice. Hingga saat ini berbagai upaya masih dilakukan untuk meningkatkan produksi rumput laut. Kegiatan budidaya rumput laut dirasakan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam meningkatkan pendapatan. Penanganan pasca panen rumput laut relatif mudah hanya dibutuhkan untuk proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Berbeda dengan ikan hasil tangkapan yang dibutuhkan penanganan rantai dingin agar ikan tidak mudah rusak. Sementara itu, sarana dan prasarana untuk melakukan penanganan rantai masih minim seperti infrastruktur dasar listrik yang masih terbatas. Listrik dibutuhkan untuk membuat es yang dibutuhkan untuk melakukan system rantai dingin produk perikanan.

Berdasarkan satu data KKP diketahui luas areal lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya rumput laut pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat seluas 1.881,54 ha dan di Kabupaten Maluku Barat Daya seluas 704,45 ha. Perkembangan luas areal lahan budidaya laut mengalami fluktuasi setiap tahunnya tergantung pada kegiatan budidaya rumput laut yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap faktor alam. Perkembangan luas areal lahan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya periode tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar III-348.



Sumber: Satu Data KKP, 2024 (diolah)

Gambar III-348. Perkembangan Luas areal budidaya rumput laut di wilayah studi selang periode tahun 2020-2022

Berdasarkan satu data KKP, diketahui bahwa pelaku usaha budidaya rumput laut pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebanyak 3.334 RTP dengan jumlah pembudidaya sebanyak 6.668 orang. Jumlah pelaku usaha budidaya rumput laut pada tahun 2022 di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebanyak 571 RTP dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.112 orang. Dengan demikian, setiap rumah tangga budidaya rumput laut rata-rata terdiri dari 1-2 orang pembudidaya rumput laut. Perkembangan data selengkapnya mengenai pelaku usaha budidaya rumput laut di wilayah studi tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel III-282.

Tabel III-282. Perkembangan jumlah rumah tangga dan pembudidaya rumput laut di wilayah studi tahun 2019-2020

Tahun	Kabupaten Kepulauan Tanimbar		Kabupaten Maluku Barat Daya	
	RTP Budidaya Rumput Laut (RTP)	Jumlah Pembudidaya Rumput Laut (orang)	RTP Budidaya Rumput Laut (RTP)	Jumlah Pembudidaya Rumput Laut (orang)
2019	2905	5810	568	604
2020	2900	5100	577	657
2021	3332	6664	569	1138
2022	3334	6668	571	1112

Sumber: Satu Data KKP, 2024 (diolah)

Secara umum, rata-rata penduduk yang melakukan usaha budidaya rumput laut dapat memproduksi rumput laut kering sebanyak 238,05 kilogram untuk setiap unit tali per tahun. Jumlah unit tali yang diusahakan pembudidaya rumput laut antara 38 sampai dengan 100 unit tali per pembudidaya rumput laut. Lama pemeliharaan rumput laut per musim panen dilakukan selama lebih kurang 46 hari dan setiap pembudidaya rumput laut dapat melakukan panen produksi mencapai sebanyak 6 kali panen per tahunnya. Produksi rumput laut basah antara 110 sampai dengan 360 kg per area budidaya (luasan antara 0,3 ha sampai dengan 1 ha). Lokasi budidaya tidak jauh dari pantai mulai dari 10 meter dari pantai sampai kedalaman 3 meter. Produktivitas per tali antara 1,2 sampai dengan 2 kg per tali. Dari 10 kg rumput laut basah menjadi 1 sampai dengan 1,5 kg rumput laut kering dengan harga antara Rp 16.000 sampai dengan Rp 20.000 per kg. Untuk harga rumput laut basah antara Rp 5000 sampai dengan Rp 6000 per kg. Perbedaan harga ini tergantung

dari kualitas rumput laut. Pendapatan kotor (omset) pembudidaya dalam satu kali periode panen (40 hari) berkisar antara Rp 2 juta sampai dengan Rp 3.5 juta.

Rumput laut sebagian besar dijual dalam bentuk kering dan dijual pada penampung di Saumlaki. Nelayan Lermatang memulai usaha budidaya rumput laut tahun 2007-2008. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten mendirikan sebuah bangunan di luar pemukiman Desa Lermatang yang letaknya tidak jauh dari areal budidaya, sebagai rencana membangun pabrik pengolahan rumput laut dalam bentuk chips, namun rencana itu tidak berlanjut.

Secara teknis, perairan pesisir di Kecamatan Tanimbar Selatan tergolong sesuai atau bahkan sangat sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yudi Wahyudin (2013) bahwa desa-desa di Kecamatan Tanimbar Selatan dapat dikategorikan memiliki tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut Sesuai dan Sangat Sesuai. Lebih lanjut Yudi Wahyudin (2013) menyimpulkan bahwa kondisi yang sesuai ini menyebabkan Desa Sifnana dan Lermatang merupakan desa dengan tingkat produktivitas tertinggi diantara desa-desa studi lainnya di Kecamatan Tanimbar Selatan. Lokasi sebaran budidaya rumput laut di Kecamatan Tanimbar Selatan disajikan pada Gambar III-352.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan usaha masyarakat di bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan di Kecamatan Tanimbar Selatan, pemerintah dan masyarakat usaha telah membangun beberapa infrastuktur dan kelembagaan perikanan pendukung diantaranya adalah:

Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran terletak di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan. Sarana fungsional PPI Ukurlaran yang telah dibangun oleh APBD Kabupaten/Kota dan dapat difungsikan antara lain: Dermaga, Sarana penampungan air bersih, TPI, Gedung kantor, Rumah Dinas Kopel, Workshop, Depo Rumput Laut, Pos Jaga, MCK, Ruang. Namun setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, urusan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) telah beralih menjadi kewenangan Pemda Provinsi sedangkan status tanah dan sarpras di PPI Ukurlaran adalah aset milik Pemda Kepulauan Tanimbar. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PPI Ukurlaran dijadikan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dimana KKP telah membangun Karantina Ikan dan Kantor PSDKP di Kawasan yang sama (Sumber: <https://kkp.go.id/Saumlaki/artikel/13101-dongkrak-perikanan-saumlaki-kkp-bangun-fasilitas-megah>).



Sumber: <https://kkp.go.id/SKPT/Saumlaki/galeri/2233-fasilitas-eksisting-pp-ukurlaran>

Gambar III-349. PPI Ukuran dan Fasilitas Eksisting yang Dimiliki

UPT Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan terletak di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan, melaksanakan fungsi budidaya perikanan dengan fokus masih pada perikanan darat dengan komoditas ikan air tawar yakni Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila. Pada saat ini baik PPI maupun BBI belum dapat difungsikan secara optimal. Kendala utama untuk mengoperasikan baik PPI maupun BBI adalah belum tersedianya jaringan listrik ke lokasi dan sumberdaya manusia yang mengelola pelabuhan pendaratan ikan serta pengelolaan balai benih.



Sumber: <https://docplayer.info/31628545-Badan-penelitian-dan-pengembangan-kelautan-dan-perikanan-kementerian-kelautan-dan-perikanan.html>

Gambar III-350. Kondisi Fasilitas Balai Benih Ikan di Wowonda (2015)

Pabrik Es

Pabrik Es Saumlaki dibangun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlokasi di Pasar Omele. Beberapa tahun terakhir tidak dapat beroperasi akibat kurangnya dukungan operasional dari APBD dan Permasalahan Teknis Operasional

Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Unit Pengolahan Ikan di Kecamatan Tanimbar Selatan dilaksanakan oleh 5 Pelaku Usaha dalam bentuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pembekuan. UPI ini memperoleh ikan dari armada penangkapan mereka sendiri serta membeli ikan dari koperasi perikanan atau dari nelayan. Beberapa jenis ikan yang biasa ditampung oleh unit pengolahan ikan seperti jenis ikan Kakap Putih, Tenggiri, dan Kerapu.

Tabel III-283. Unit Pengolahan Ikan yang Beroperasi di Kecamatan Tanimbar Selatan

No	Nama Unit Pengolahan Ikan	Produk
1	PT. Indonesia Estearn Seafood	Ikan Beku
2	PT. Makmur Bahari Sukses	Ikan Beku
3	PT. Inti Mas Surya	Ikan Beku
4	CV. LH Korindo	Ikan Beku
5	UD. Joyo Mandiri Pratama	Ikan Beku

Sumber: Data Dukung Penyusunan Andal Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi, Dinas Perikanan Kabupaten Tanimbar, 2020

Koperasi Perikanan

Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 7 koperasi yang bergerak di bidang perikanan. Koperasi perikanan ini menampung dan mengakomodasi produksi kegiatan usaha anggotanya yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya ikan. Umumnya koperasi perikanan ini berada di Desa Saumlaki dan sisanya di Desa Latdalam. Data Koperasi yang aktif dan melakukan Usaha di Bidang Perikanan di Kecamatan Tanimbar Selatan disajikan pada Tabel III-284 berikut.

Tabel III-284. Koperasi Perikanan di Kecamatan Tanimbar Selatan

No	Nama Koperasi	NIK	Desa/Kelurahan
1	Koperasi Perikanan Udang Halus	8106100080006	Saumlaki
2	Koperasi Perikanan Awai Eras	8106100080007	Saumlaki
3	Koperasi Perikanan Korban Nleka	8106170110001	Saumlaki
4	Koperasi Perikanan Kakap Merah	8106150080001	Saumlaki
5	Koperasi Serba Usaha Rau Center	8106100080008	Latdalam
6	Koperasi Serba Usaha Pelangi	082397866769	Saumlaki
7	Koperasi Serba Usaha Terun Botawi	94/BH/XXX.3/III/2016	Saumlaki

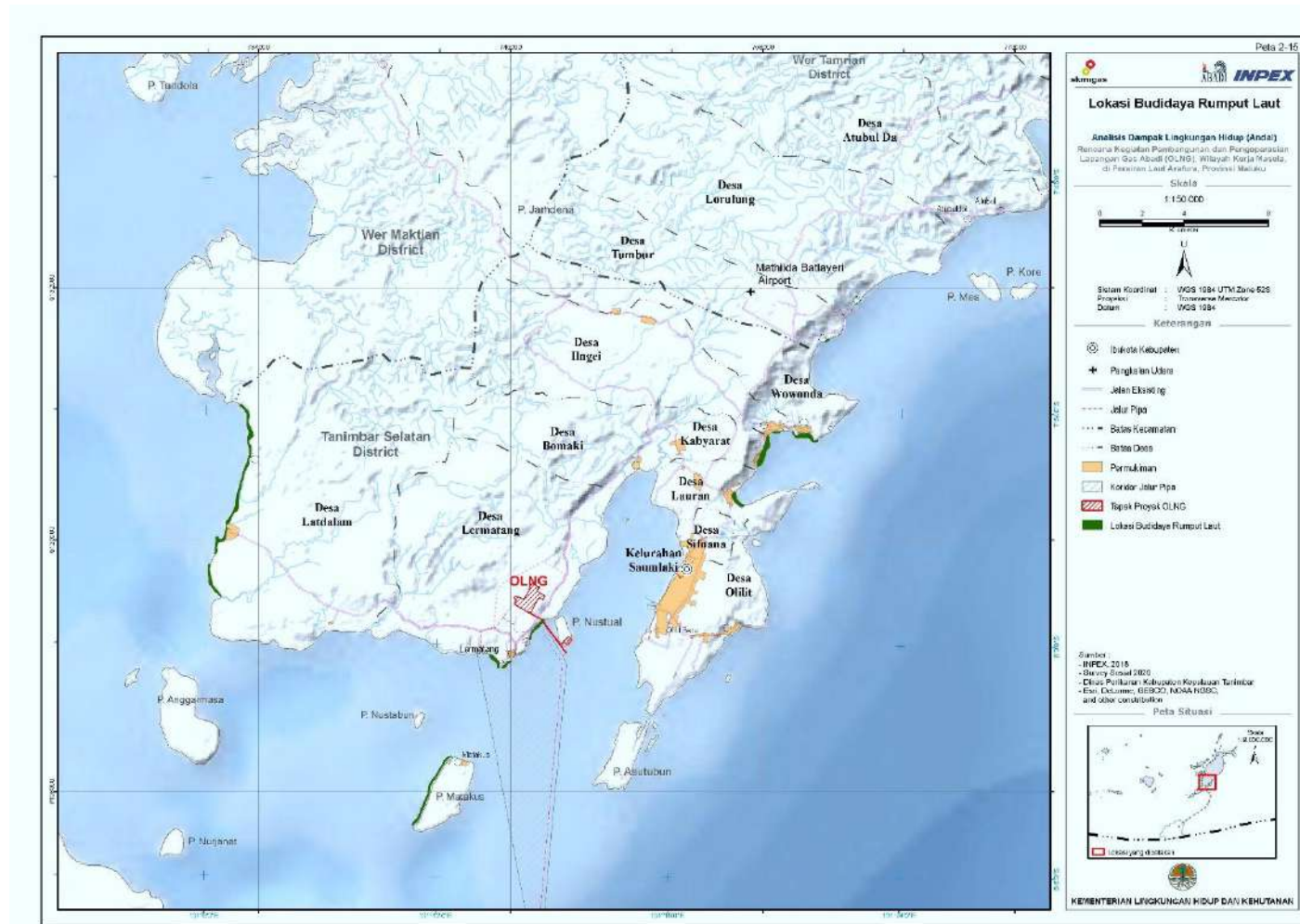
Sumber: Data Dukung Penyusunan Andal Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi, Dinas Perikanan Kabupaten Tanimbar, 2020

Salah satu koperasi perikanan yang agak menonjol adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelangi. KSU Pelangi yang didirikan sejak tahun 2010 awalnya memiliki anggota 20 orang dan berkembang hingga saat ini menjadi 30 orang. Jenis usaha yang dilakukan antara lain pada perikanan budidaya, perikanan tangkap dan sembako. Salah satu unit usaha yang dikelola KSU saat ini adalah Keramba Jaring Apung (KJA) yang ditempatkan di Perairan Desa Matakus dengan tujuan untuk mendukung Pulau Matakus sebagai destinasi wisata serta untuk mendorong nelayan yang merupakan anggota koperasi serta nelayan setempat untuk bersama melakukan penangkapan ikan hidup. Ikan hasil tangkapan tersebut selanjutnya akan dibeli oleh KSU untuk dimasukkan ke KJA. Hasil tangkapan nelayan biasanya lobster, kerapu dan ikan campuran lainnya (sumber: <https://kkp.go.id/Saumlaki/artikel/14234-peran-koperasi-serba-usaha-ksu-pelangi-dalam-mewarnai-bisnis-perikanan-di-skpt-saumlaki>).



Sumber: <https://kkp.go.id/Saumlaki/artikel/14234-peran-koperasi-serba-usaha-ksu-pelangi-dalam-mewarnai-bisnis-perikanan-di-skpt-saumlaki>

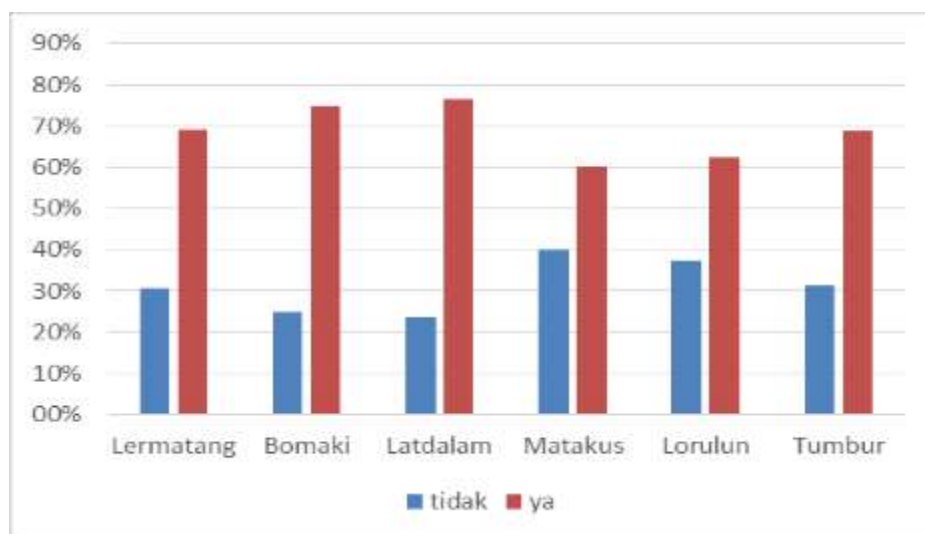
Gambar III-351. Kantor KSU Pelangi dan Aktivitas di KSU



Gambar III-352. Lokasi Budidaya Rumput Laut

1. Terdampak Kegiatan Proyek

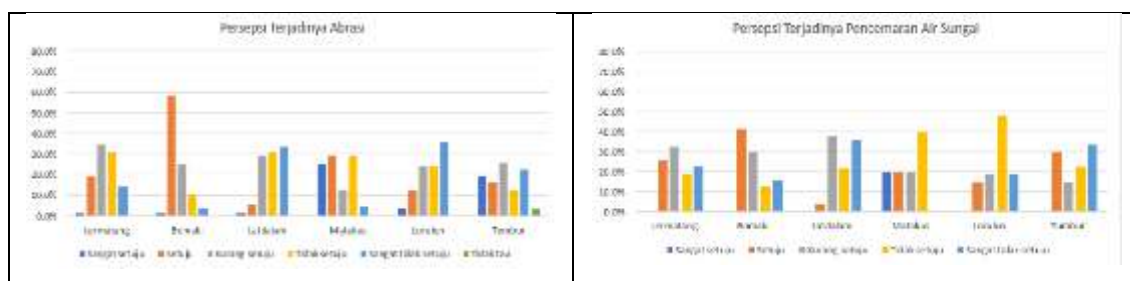
Desa yang diperkirakan terdampak oleh kegiatan adalah Desa Latdalam, Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Matakus, Desa Lorulun dan Desa Tumbur. Sebagian masyarakat di desa terdampak kegiatan berprofesi sebagai nelayan tangkap, khususnya Desa Matakus, Lorulun, dan Tumbur. Hasil kuesioner terhadap responden dari 6 desa di sekitar wilayah studi mengenai manfaat laut sebagai 'sumber makanan' menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menjawab bahwa laut merupakan sumber makanan yang dalam hal ini adalah sebagai sumber mata pencaharian (penghidupan). Sebagian masyarakat yang menjawab 'tidak' karena masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, hasil pengolahan data (kuesioner) tersebut dapat dilihat pada Gambar III-353.

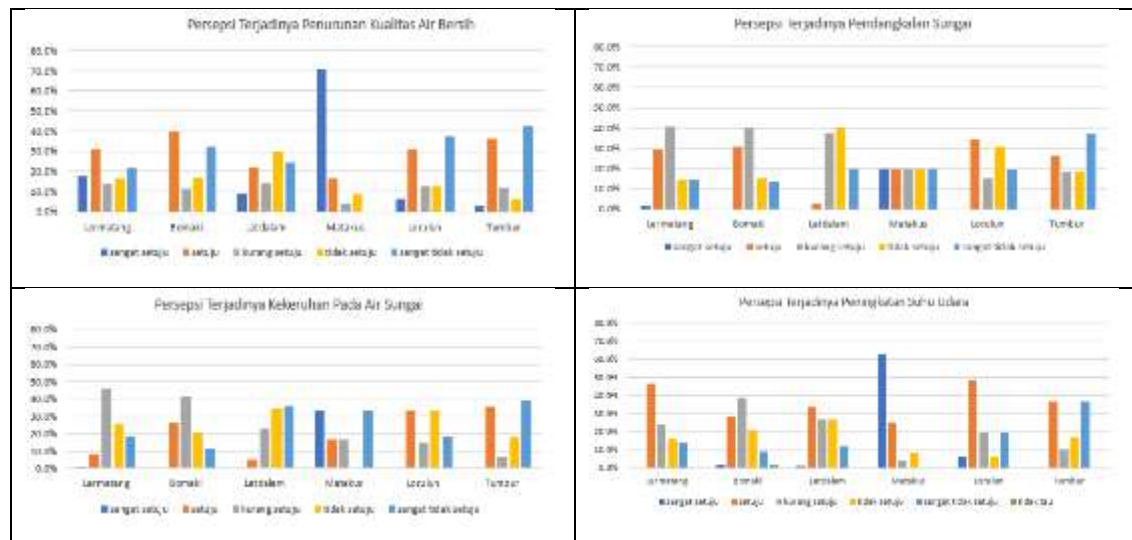


Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-353. Manfaat Laut Sebagai Sumber Makanan

Selain menggali informasi mengenai sumber mata pencaharian masyarakat, dilakukan juga pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat yang terkait dengan ada tidaknya kerusakan lingkungan yang meliputi pencemaran air sungai, terjadinya abrasi, penurunan kualitas air bersih, pendangkalan sungai, peningkatan kekeruhan air sungai dan peningkatan suhu. Hasil pengolahan data (kuesioner) mengenai persepsi masyarakat tentang kerusakan lingkungan tersebut dapat dilihat pada Gambar III-354.





Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-354. Persepsi Masyarakat Mengenai Ada Tidaknya Kerusakan Lingkungan

Sebagian nelayan tangkap yang berasal dari desa terdampak kegiatan menggunakan berbagai jenis alat tangkap untuk melakukan kegiatan perikanan di laut. Masyarakat di Desa Matakus biasa menggunakan alat tangkap berupa jaring, pancing dengan mata kail no. 7, dan rawai untuk memancing ikan geropa. Nelayan di Desa Lorulun biasa menggunakan panah (saat menyelam), jaring, dan pancing. Sedangkan nelayan di Desa Tumbur biasa menggunakan jaring nilon, pancing ulur, pancing rawe, tonda, dan jaring. Rawe merupakan tali induk dengan panjang 1 depa (1m) yang dipasang umpan ikan dan diujungnya dipasang pelampung. Rawe akan dipasang di perairan dengan jarak sekitar 3 mil dari pantai dengan kedalaman perairan antara 200 sampai dengan 300 meter. Tonda merupakan teknik memancing dengan menggunakan bulu ayam sebagai umpan artifisial. Jika dilihat dari alat tangkap yang digunakan, nelayan di desa terdampak masih tergolong nelayan skala kecil (tradisional).

Nelayan tangkap di Desa Matakus menggunakan perahu ketinting dengan mesin Honda 5,5 PK. Koperasi di Desa Matakus memiliki 2 kapal besar dengan ABK sebanyak 8 orang. Perahu tersebut digunakan untuk menangkap ikan tidak jauh dari pulau Matakus. Nelayan di Desa Lorulun menggunakan perahu mesin yang berbahan kayu dengan 2 ukuran, yaitu perahu dengan kapasitas 2-5 orang dan kapasitas 8 orang. Nelayan di Desa Tumbur biasa menggunakan perahu 'tonda' dengan lebar 1m dan panjang 4 meter (ukuran kecil) dan juga perahu fiber 1 unit dengan panjang 8 meter (ukuran besar). Desa-desa terdampak telah menerima bantuan pemerintah dalam bidang perikanan, seperti perahu ketinting, jaring, dan mesin bermerk Jhonson.

Lokasi penangkapan ikan dari ketiga desa ini pun sedikit berbeda. Nelayan dari Desa Matakus yang menggunakan kapal kecil hanya akan melaut dan menangkap ikan di sekitar Pulau Matakus, sedangkan untuk kapal berukuran relatif besar bisa sampai ke Larat dan Sera. Nelayan di Desa Lorulun biasanya melaut dan menangkap ikan sejauh 3 mil ke pulau dengan perjalanan kurang dari 1 jam dengan lokasi penangkapan ikan berada di sekitar Pulau Mes. Nelayan Desa Tumbur biasa melaut dan menangkap ikan di perairan Sekaru Besar, Sekaru, Petik, Saru Lumpikat, dan Sarkilmasa. Jarak tempuh ke lokasi tersebut sekitar 5 sampai 6 km. Lokasi penangkapan (pemancingan) biasanya memiliki kedalaman perairan antara 200 sampai 300 meter atau sekitar 3 gulung tali pancing.

Sebanyak 467 penduduk yang tinggal di Pulau Matakus memiliki mata pencaharian utama di perikanan baik penangkapan ikan di laut maupun budidaya rumput laut. Alat penangkapan ikan yang dominan digunakan oleh nelayan adalah pancing ulur, jaring pukat, jebakan dan tombak. Jenis ikan yang biasa ditangkap antara lain makarel (tembang, tenggiri), ikan pari, kerapu, kakap merah, sotong, triggerfish (ikan ayam-ayam) dan lobster. Mereka juga menangkap lobster, udang, dan hiu yang banyak diminati pembeli di pasar Saumlaki. Ikan yang berada di sekitar wilayah rencana kegiatan merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain menangkap ikan, penduduk Desa Matakus juga memiliki mata pencaharian budidaya rumput laut dengan metode long line.

Pulau Matakus terletak di kawasan 'Segitiga Terumbu Karang' (utara Laut Arafura) yang mengandalkan keindahan terumbu karang yang beraneka ragam sebagai obyek wisata untuk menarik wisatawan mengunjungi Pulau Matakus. Obyek wisata ini memberikan kontribusi bagi pariwisata daerah serta perekonomian lokal. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah membangun beberapa prasarana/sarana untuk menarik wisatawan internasional dan lokal (domestik).

Masyarakat di desa terdampak juga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan budidaya. Sebagaimana dijelaskan bahwa perikanan budidaya di wilayah studi adalah budidaya rumput laut. Jenis rumput yang dibudidayakan hanya jenis *Eucheuma cottonii* dengan lama pemeliharaan berkisar antara 40-60 hari. Adapun pasar utama yang menjadi tempat transaksi penjualan para pembudidaya rumput laut di Tanimbar Selatan adalah di pusat ibukota kabupaten yang terletak di Desa Saumlaki (Yudi Wahyudin, 2013). Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Tanimbar Selatan melakukan sistem budidaya dengan menggunakan teknik longline, baik apung maupun tancap. Petani rumput laut di Lermatang dan Matakus biasa menggunakan longline apung sebagai sistem budidaya.

Nelayan Lermatang memulai budidaya rumput laut sekitar tahun 2007-2008. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten mendirikan sebuah bangunan di luar pemukiman Desa Lermatang, tidak jauh dari areal budidaya, sebagai rencana membangun pabrik pengolahan rumput laut dalam bentuk chips, namun rencana itu tidak berlanjut. Seiring dengan menurunnya panen lola dan teripang, budidaya rumput laut muncul sebagai alternatif komoditas yang dapat cepat menghasilkan uang tunai. Aktivitas budidaya dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, anak-anak pada usia tertentu juga ikut menolong pada tahap-tahap tertentu, seperti mengikat bibit. Kegiatan di laut dilakukan oleh laki-laki, walaupun kadang-kadang istri juga ikut di perahu. Umumnya usaha rumput laut berbasis keluarga. Masyarakat Desa Matakus juga aktif dalam budidaya rumput laut dengan areal budidaya di sekitar perairan Pulau Matakus.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-355. Pemasangan Benih Rumpus Laut

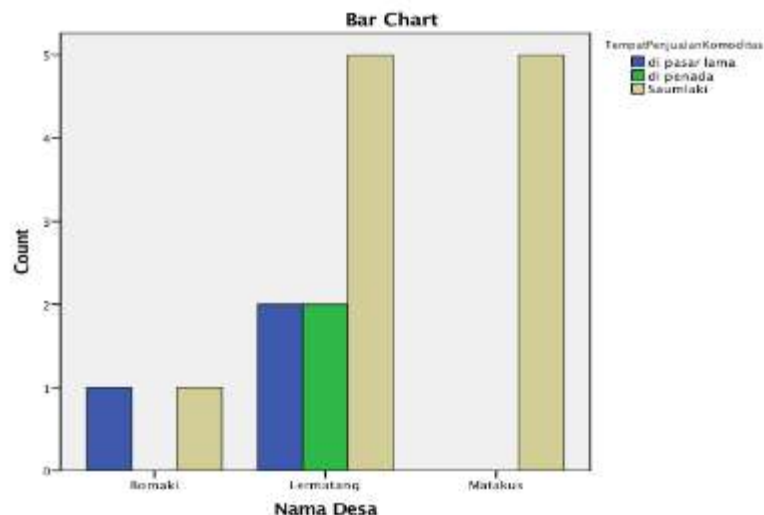
Areal budidaya rumput laut di Desa Lermatang terdapat di wilayah timur desa, yaitu di areal yang dikenal dengan sebutan Kampung Lama, karena situs itu merupakan pemukiman sebelum situs pemukiman sekarang. Areal ini dipilih karena keadaan laut yang tidak bergelombang, sedikit terlindung, sehingga budidaya dapat diusahakan sepanjang tahun. Saat laut tenang pada bulan November-Februari pengikatan atau penanaman bibit diperpanjang ke laut, tetapi pada saat laut bergelombang, diperpendek ke arah darat.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-356. Rumput Laut yang Sedang Dikeringkan

Masyarakat di wilayah studi juga bergabung dalam kelompok usaha budidaya untuk memperlancar kegiatan usahanya. Kelompok usaha tersebut adalah kelompok budidaya rumput laut, kelompok Rumbaru, dan kelompok Wermas. Masyarakat menjual rumput laut ke beberapa lokasi, seperti Pasar Lama, Penadah, dan Saumlaki. Tempat penjualan rumput laut masyarakat ditunjukkan pada Gambar III-357. . Masyarakat menjual hasil panennya ke lokasi tersebut karena pedagang pengumpul berada di lokasi tersebut. Selain itu karena harga yang diberikan oleh pembeli di lokasi tersebut relatif lebih tinggi.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-357. Tempat Penjualan Rumput Laut

2. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Desa yang diperkirakan terpengaruh Kegiatan Proyek meliputi Desa Ilngei, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit. Masyarakat di desa yang terpengaruh kegiatan tidak banyak yang bermatapencaharian sebagai nelayan tangkap. Nelayan di Desa Olilit dan Desa Sifnana Sebagian besar merupakan nelayan harian (*one day fishing*) dan daerah penangkapan ikan tidak sampai ke lokasi lapangan Abadi Blok Masela. Selain itu, wilayah lainnya yang dapat terpengaruh yaitu wilayah Kecamatan Selaru dan wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

Masyarakat di beberapa desa yang terpengaruh kegiatan proyek juga bermatapencaharian sebagai nelayan budidaya, khususnya budidaya rumput laut. Jenis rumput yang dibudidayakan hanya jenis *Eucheuma cottonii* dengan lama pemeliharaan berkisar antara 40-60 hari. Adapun pasar utama yang menjadi tempat transaksi penjualan para pembudidaya rumput laut di Tanimbar Selatan adalah di pusat ibukota kabupaten yang terletak di Desa Saumlaki (Yudi Wahyudin, 2013). Sistem budidaya longline apung biasa digunakan oleh petani rumput laut di Desa Olilit Timur, sedangkan masyarakat di Desa Sifnana dan Saumlaki biasa menggunakan sistem budidaya dengan longline tancap. Menurut pendapat masyarakat, perairan di Desa Lorulun tidak cocok untuk budidaya rumput laut, karena akan terbawa arus dan gelombang yang cukup kencang.

3.3.3 Sosial Budaya

Budaya berarti pikiran atau akal budi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Budaya merupakan identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan secara turun-temurun. Wujud dari budaya terdiri atas gagasan, aktivitas, dan artefak yang membentuk komponen kebudayaan, yaitu warisan budaya bendawi dan tak bendawi, kelembagaan sosial, sistem kepercayaan, estetika (seni), dan bahasa.

3.3.3.1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Suku Tanimbar. Dalam literatur, Kepulauan Tanimbar diperkenalkan dalam tulisan Riedel (1886), seorang pegawai pemerintah

colonial Belanda yang menulis tentang masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang terletak di antara Sulawesi dan Papua, termasuk tentang orang Tanimbar. Pada saat itu orang Tanimbar sudah mendiami 49 pulau dari 89 pulau yang diidentifikasi dan berhubungan dengan peradaban suku Tanimbar. Tanimbar berasal dari kata 'nebar' yang berarti 'laki-laki besar', 'tanah rendah', dan 'sesuatu yang baru muncul'. Tanimbar juga memiliki arti dalam Bahasa Fordata yaitu 'terdampar' yang berasal dari kata 'Tnebar'.

Secara umum, karakteristik masyarakat di Tanimbar hampir sama karena berasal dari suku yang sama. Terdapat 5 rumpun bahasa di Tanimbar, yakni (1) Bahasa Fordata, yaitu Bahasa yang digunakan di Pulau Fordata, Larat, Molo-Maruru, dan sepanjang bagian barat laut Pulau Yamdena dan Pulau Sera; Bahasa ini merupakan Bahasa yang biasanya dipakai dalam acara adat, (2) Bahasa Yamdena, bahasa masyarakat di pesisir timur Pulau Yamdena, (3) Bahasa Selaru, bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Selaru, (4) Bahasa Seluwasan, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Yamdena Barat, dan (5) Bahasa Makatian, yang digunakan oleh masyarakat Makatian. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tanimbar saat ini adalah kelima bahasa lokal tersebut (walaupun sudah mulai jarang digunakan oleh generasi muda), bahasa Melayu-Ambon, dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah lain biasanya digunakan oleh pendatang sesuai dengan daerah asalnya.

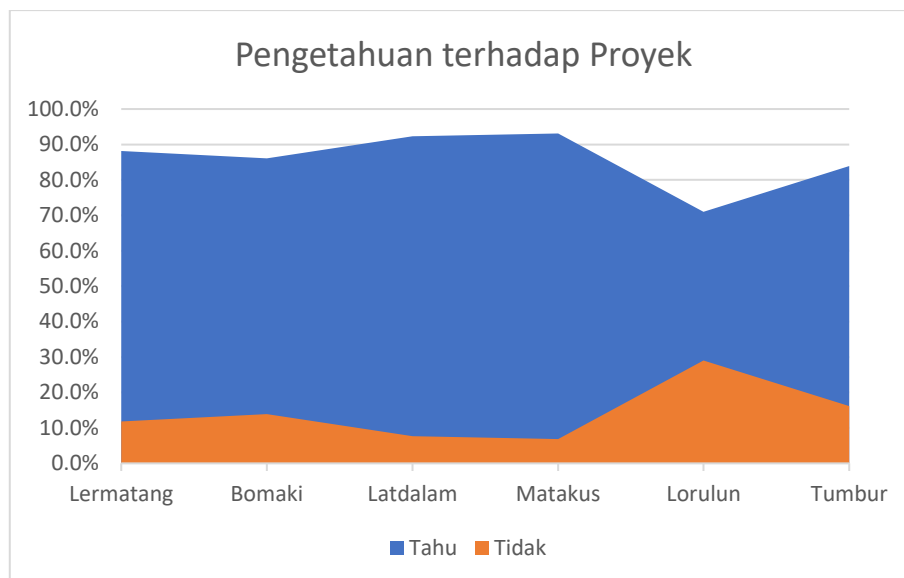
Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa sebagian besar desa wilayah studi rata-rata berumur lebih dari 100 tahun. Desa Sifnana merupakan desa tertua dimana sudah ada sejak 1600-1700 tahun yang lalu. Desa yang merupakan pemekaran yaitu Desa Wowonda, Ilngei, dan Bomaki. Penduduk Desa Wowonda dan Ilngei berasal dari wilayah Mitak (di sebelah utara barat Pulau Yamdena. Desa Wowonda merupakan pemekaran dari Desa Kabiarat.

3.3.3.1.1 Kekhawatiran Masyarakat

Salah satu faktor munculnya kekhawatiran pada masyarakat di wilayah studi adalah pengetahuan terhadap rencana proyek. Ketidaktahuan atau pengetahuan yang kurang mengenai rencana proyek akan meningkatkan kekhawatiran pada masyarakat, karena akan mudah terpengaruh isu-isu negatif atau informasi yang salah mengenai rencana proyek.

1. Terdampak Kegiatan Proyek

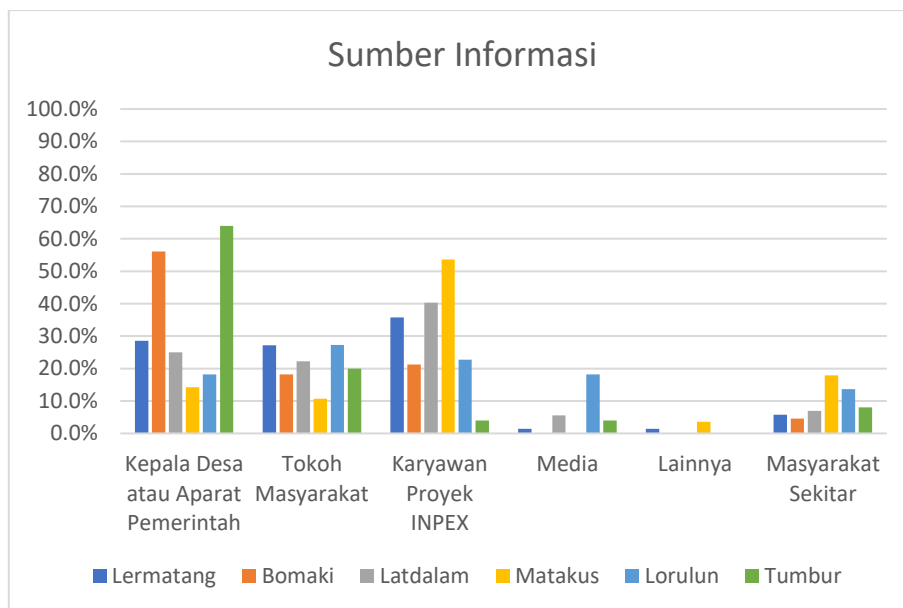
Gambar di bawah ini menjelaskan persentase jumlah responden yang memiliki pengetahuan mengenai rencana proyek. Berdasarkan gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa hampir 90% responden di Desa Lermatang, Bomaki, Latdalam, Matakus, dan Tumbur telah memiliki pengetahuan mengenai rencana proyek. Sedangkan jumlah responden di Desa Lorulun yang memiliki pengetahuan tentang rencana proyek cenderung lebih kecil, yaitu sekitar 80%



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-358 Pengetahuan Masyarakat terhadap Rencana Proyek

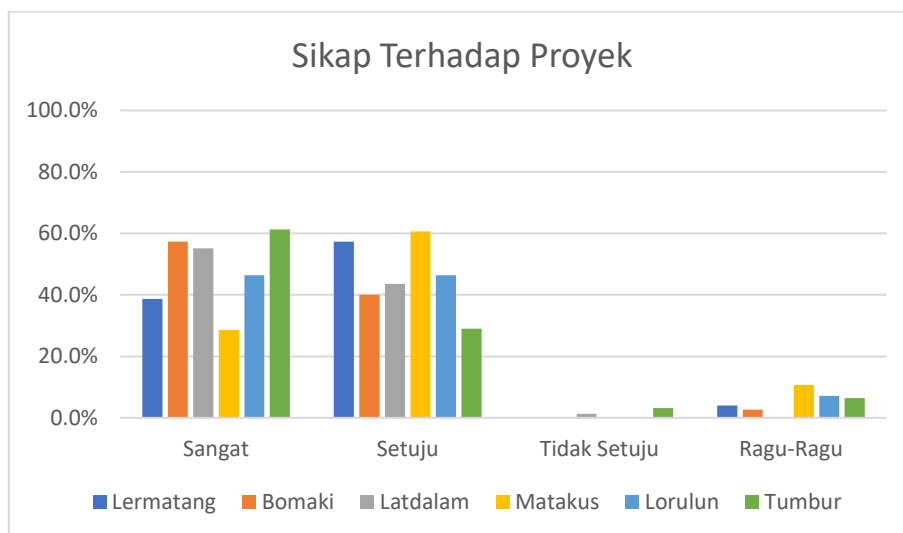
Sumber informasi masyarakat mengenai rencana proyek ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jenis sumber informasi masyarakat di wilayah studi mengenai rencana proyek cukup beragam, yaitu kepala desa atau aparat pemerintah, tokoh masyarakat, karyawan proyek INPEX, media, masyarakat sekitar dan lainnya. Persentase yang cukup menonjol adalah Desa Bomaki dan Tumbur. Lebih dari 50% masyarakat Desa Bomaki dan lebih dari 60% masyarakat Desa Tumbur mendapat informasi mengenai rencana proyek dari kepala desa atau aparat pemerintah. Lebih dari 50% masyarakat Desa Matakus mendapat informasi mengenai rencana proyek dari karyawan INPEX. Hampir 40% masyarakat Desa Lermatang dan Desa Latdalam juga mendapat informasi dari karyawan INPEX. Hal ini menjelaskan bahwa kemungkinan interaksi atau komunikasi antara masyarakat desa dengan karyawan INPEX cukup baik. Sumber informasi pada pada gambar di bawah ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh informasi terkait proyek INPEX dari sosialisasi, baik dari Kabupaten (Desa Bomaki) maupun dari Kecamatan.(Desa Ilngai). Selebihnya masyarakat mendapat informasi dari staf INPEX. Namun, menurut tokoh masyarakat masih ada desa yang belum mengetahui informasi detil tentang proyek tersebut, seperti Desa Wowonda. Hal ini dikarenakan Desa Wowonda belum pernah melakukan interaksi/komunikasi dengan pihak INPEX. Desa lain yang belum pernah melakukan interaksi dengan pihak INPEX adalah Desa Ilngai dan Luran. Desa Olilit dan Sifnana hanya melakukan interaksi berupa sosialisasi. Hal yang berbeda terjadi pada Desa Bomaki, selain sosialisasi rencana proyek pihak INPEX juga memberi himbauan tidak menjual tanah sembarangan. Desa yang menjalin komunikasi dengan baik/lancar dengan pihak INPEX adalah Desa Lermatang. Pada gambar di bawah ini juga menunjukkan bahwa media tidak cukup efektif dalam menyebarkan informasi mengenai rencana proyek. Hal ini dikarenakan jumlah responden yang mendapat informasi dari media cukup rendah dibawah 5%, kecuali untuk Desa Lorulun yang jumlahnya mencapai 20%..



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-359 Sumber Informasi Masyarakat terhadap Rencana Proyek

Informasi yang didapatkan masyarakat akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap proyek yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Mayoritas masyarakat di enam desa wilayah studi mengaku setuju dan sangat setuju dengan rencana proyek yang ada. Jumlah responden yang mengaku tidak setuju sangat kecil dibawah 5%, yaitu masyarakat Desa Latdalam dan Tumbur. Sedangkan masyarakat yang menyatakan masih ragu-ragu berasal dari Desa Lermatang, Desa Bomaki, Desa Matakus, Desa Lorulun dan Desa Tumbur.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-360 Sikap Masyarakat terhadap Rencana Proyek

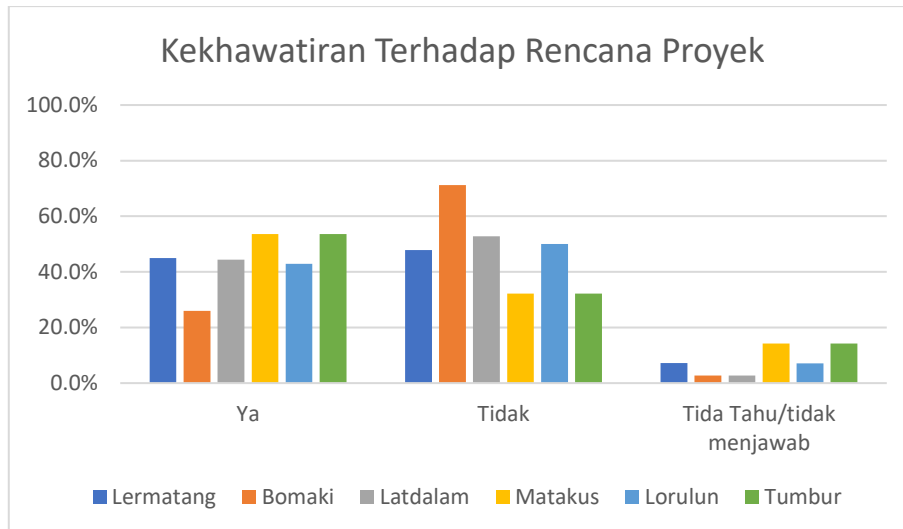
Secara umum, persepsi masyarakat mengenai rencana proyek adalah positif dan masyarakat menyatakan setuju. Masyarakat beranggapan keberadaan proyek akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai rencana proyek menimbulkan kekhawatiran pada diri masyarakat. Persepsi masyarakat di desa terdampak kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-285 Persepsi Masyarakat di Desa Terdampak Mengenai Rencana Proyek

No	Desa	Persepsi
1	Lermatang	INPEX akan membangun pelabuhan untuk kepentingan INPEX
2	Bomaki	Masyarakat setuju hadirnya INPEX karena membawa peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
		INPEX membuka peluang pekerjaan
		Dapat memasarkan hasil pertanian masyarakat
3	Latdalam	Peserta setuju dan sangat setuju terhadap proyek INPEX
		INPEX membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat
		Keberadaan INPEX dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
4	Matakus	Peserta setuju terhadap rencana proyek INPEX
5	Lorulun	Proyek INPEX membahayakan kehidupan lautan, berdampak pada pertanian dan hutan, pasir tidak boleh ditimbun karena akan membahayakan jika tidak direncanakan dengan baik
		Proyek INPEX memberikan peluang ekonomi baru kepada masyarakat (peluang kerja)
6	Tumbur	INPEX membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha untuk masyarakat
		INPEX memperhatikan dan menjamin keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial budaya masyarakat Tanimbar

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

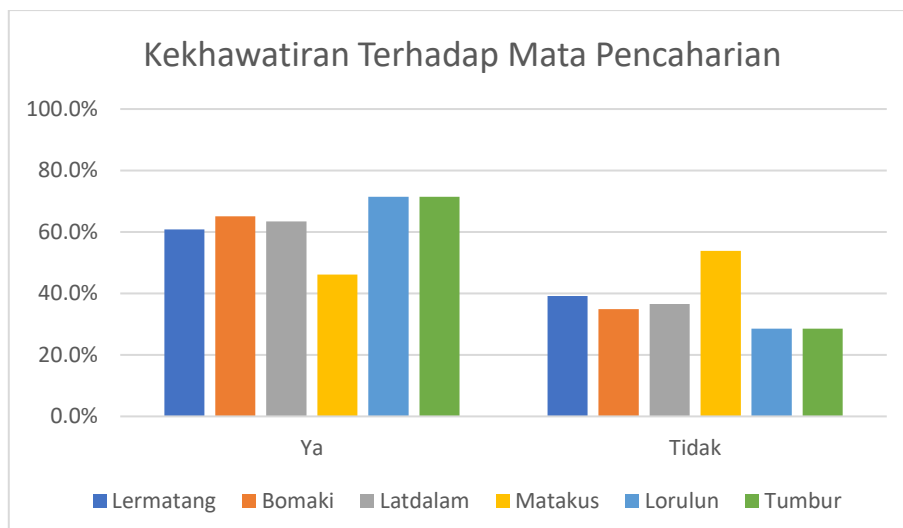
Kekhawatiran masyarakat terhadap rencana proyek ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jumlah responden yang memiliki kekhawatiran terhadap rencana proyek tertinggi yaitu pada responden Desa Matakus dan Desa Tumbur sebanyak lebih dari 50%. Pada kedua desa ini jumlah responden yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak lebih dari 10%. Hal ini merupakan jumlah tertinggi jika dibandingkan desa-desa lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh penyampaian informasi yang kurang efektif kepada masyarakat di desa tersebut. Untuk empat desa lainnya jumlah responden yang menyatakan khawatir kurang dari 45%. Desa dengan jumlah responden khawatir terendah adalah Desa Bomaki. Beberapa jenis kekhawatiran masyarakat adalah kekhawatiran akan mata pencaharian, kekhawatiran akan gangguan aktivitas nelayan, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan, dan kekhawatiran akan wilayah tangkapan ikan yang semakin sempit.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-361 Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Rencana Proyek

Mata pencaharian mayoritas penduduk di wilayah studi adalah sebagai nelayan dan petani. Kedua jenis mata pencaharian ini sangat bergantung pada kondisi sumber daya alam. Adanya rencana proyek yang berada di lingkungan mereka bekerja membuat masyarakat khawatir akan ada gangguan terhadap mata pencaharian bahkan kehilangan mata pencaharian. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada Desa Lorulun dan Desa Tumbur sekitar 70% responden merasa khawatir akan kehilangan mata pencahariannya. Pada Desa Lermatang, Bomaki, dan Latdalam memiliki jumlah responden yang khawatir akan mata pencahariannya sebanyak lebih dari 60%. Jumlah terendah responden yang khawatir akan mata pencahariannya ada pada Desa Matakus, yaitu sebanyak lebih dari 45%.

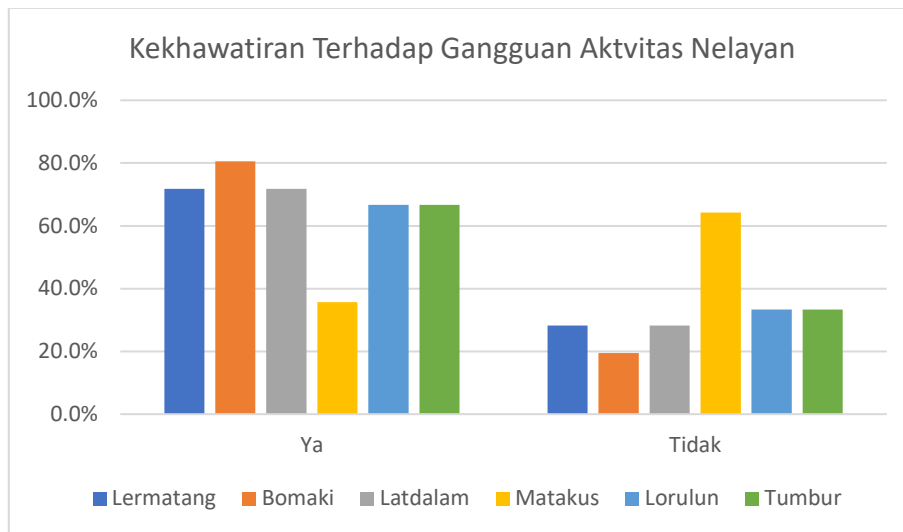


Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-362 Kekhawatiran Masyarakat akan Kehilangan Mata Pencaharian

Salah satu rencana kegiatan proyek adalah pemasangan pipa gas di laut dan eksploitasi di Laut Arafura. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, karena sebagian masyarakat di wilayah studi memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Pembangunan fasilitas produksi dan pendukung di laut dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas nelayan, seperti gangguan pada alur pelayaran, keselamatan nelayan, hingga perubahan karakteristik perairan. Kekhawatiran masyarakat akan

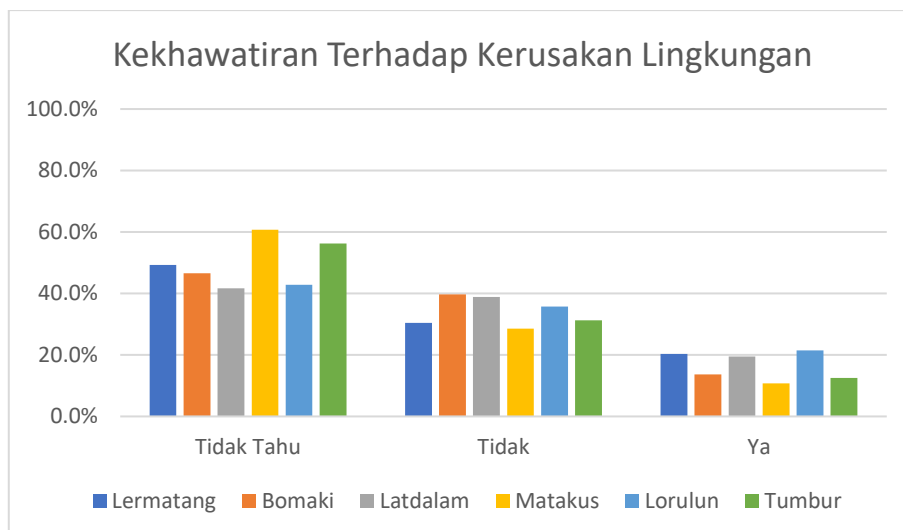
adanya gangguan pada aktivitas nelayan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kekhawatiran tertinggi terdapat pada responden di Desa Bomaki sebanyak 80%. Sedangkan jumlah responden khawatir yang terendah ada pada Desa Matakus hanya sekitar 35%. Jumlah responden yang memiliki kekhawatiran akan gangguan aktivitas nelayan di empat desa lain adalah sekitar 70%.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-363 Kekhawatiran Masyarakat Akan Terganggunya Aktivitas Nelayan

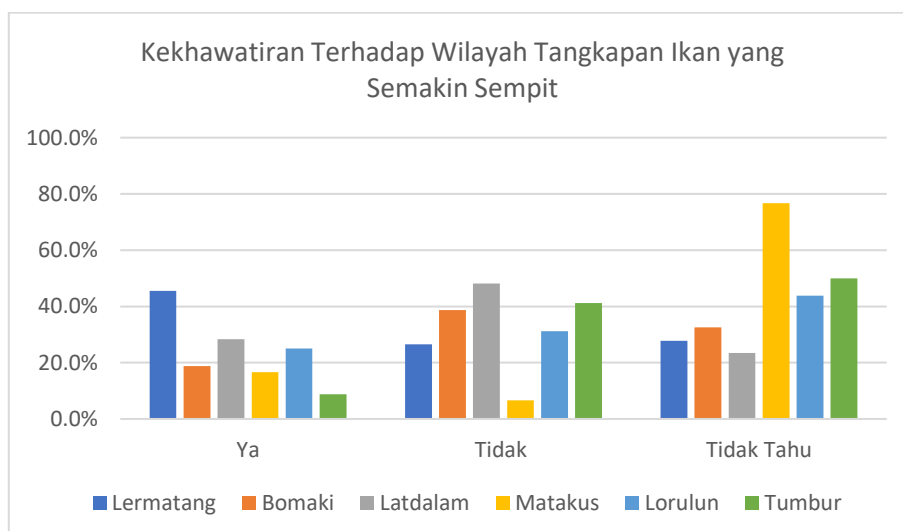
Selain gangguan pada aktivitas nelayan, kekhawatiran yang muncul pada masyarakat adalah kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Kegiatan pembangunan maupun operasi proyek akan berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitar, baik lingkungan darat maupun laut. Kehidupan masyarakat di wilayah studi sangat tergantung pada alam, sehingga rencana kegiatan proyek menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Jumlah responden yang khawatir akan adanya kerusakan lingkungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sekilas jumlah responden yang khawatir cukup rendah. Jumlah responden tertinggi ada pada Desa Lermatang, Latdalam, dan Lorulun yaitu sekitar 20%. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah jumlah responden yang menyatakan tidak tahu masih cukup tinggi. Pada Desa Matakus, jumlah responden yang menyatakan tidak tahu adalah sebanyak 60% dan Desa Tumbur sebanyak 65%. Responden yang menyatakan tidak tahu di empat desa lainnya adalah di bawah 50%. Jumlah ini bisa menjadi responden yang khawatir jika informasi mengenai perkiraan dampak kerusakan lingkungan dan cara mengantisipasinya tidak disampaikan dengan baik.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-364 Kekhawatiran Masyarakat Akan Kerusakan Lingkungan

Salah satu jenis gangguan aktivitas nelayan yang dikhawatirkan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat rencana proyek adalah wilayah tangkapan ikan menjadi semakin sempit. Jumlah responden yang khawatir ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jumlah tertinggi responden yang khawatir ada pada Desa Lermatang, yaitu sekitar 45%. Sedangkan desa lainnya di bawah 30%. Sama halnya dengan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, pada kekhawatiran akan wilayah tangkapan ikan yang makin sempit juga memiliki jumlah responden yang tidak tahu cukup tinggi. Jumlah responden yang menyatakan tidak tahu tertinggi adalah Desa Matakus, yaitu hampir 70%. Desa Tumbur sebanyak 50%. Desa Lorulun sekitar 45% dan tiga desa lainnya di bawah 35%. Banyaknya jumlah responden yang menyatakan tidak tahu bisa disebabkan karena kurangnya informasi mengenai lokasi wilayah pembangunan fasilitas di laut dengan daerah tangkapan ikan nelayan. Sosialisasi informasi mengenai perkiraan dampak dan rencana penanganannya yang tepat akan menurunkan tingkat kekhawatiran masyarakat.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-365 Masyarakat Khawatir Wilayah Tangkapan Semakin Sempit

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, jenis-jenis kekhawatiran ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-286 Kekhawatiran Masyarakat di Wilayah Studi

No	Desa	Kekhawatiran
1	Lermatang	• Akses ke kawasan tangkapan (ke arah Saumlaki) akan tertutup • Lokasi tangkapan dengan jaring dan pancing akan berkurang • Lokasi pelabuhan INPEX merupakan lokasi penangkapan tripang, ikan dan rumput laut (Nustual). • Aktivitas INPEX mempengaruhi rumput laut dan membuat terumbu karang hancur/rusak • Perempuan tidak bisa berkebun dan melaut
2	Bomaki	• Perubahan lingkungan seperti kekurangan lahan, air, kayu, dan hutan • Pencemaran lingkungan (darat, laut, udara) • Meningkatnya kecelakaan lalu lintas • Pergaulan bebas pada anak dan remaja, terjadinya perselingkuhan dan perkawinan beda agama • INPEX tidak membeli hasil pertanian masyarakat karena kekurangan produksi akibat pengaruh musim atau penggunaan pupuk kimia.
3	Latdalam	• Pencemaran lingkungan (darat, laut, udara) • Penyediaan lahan tidak merata atau tidak sesuai. Tanah umum dianggap tanah adat • Luntarnya adat dan budaya lokal akibat pendatang • Pengeboran akan mengakibatkan tsunami • Pergaulan bebas karena masuknya pendatang • Perkawinan dengan pendatang beda agama • Kebun untuk lahan pertanian semakin sempit • Mata pencaharian masyarakat hilang • Masyarakat lokal hanya menjadi penonton (menguntungkan pihak luar)
4	Matakus	• Pipa melintasi Laut Matajus sehingga dikhawatirkan berdampak pada nelayan
5	Lorulun	• Nelayan kehilangan pekerjaan karena lokasi memancing berkurang dan berkurangnya jumlah ikan • Air tercemar minyak • Tergusurnya warga setempat karena dikuasai asing • Penggusuran lahan • Pergaulan bebas karena masuknya pendatang
6	Tumbur	• Limbah perusahaan tidak dikelola dengan baik, sehingga merusak lingkungan hidup • Hasil analisa dampak sosial pada dokumen AMDAL tidak diimplementasikan

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Hasil FGD menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat di hampir semua desa lebih ke bidang ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran ekonomi yaitu masyarakat desa takut adanya persaingan usaha dengan pendatang baru, terganggunya mata pencaharian baik di bidang pertanian darat maupun sebagai nelayan di laut sedangkan kekhawatiran lingkungan yaitu terkait limbah, kegiatan yang merusak lingkungan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah masuknya pendatang yang akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal-hal seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, dan luntarnya adat khususnya di kalangan generasi muda.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, terdapat beberapa subjek kekhawatiran masyarakat yakni terkait dengan faktor-faktor ekonomi dan pendapatan, serta perubahan perilaku dan tata budaya masyarakat tempatan. Kekhawatiran-kekhawatiran ini bermuara pada tingkat penerimaan terhadap rencana perusahaan. Menggunakan persentase atas sikap masyarakat maka dapat disusun lima tingkat kualitas lingkungan dari aspek penerimaan masyarakat terhadap rencana proyek: 0-20% dikatakan Sangat Buruk, 21-40% dikatakan Buruk, 41-60% dikatakan Moderat, 61-80% dikatakan Baik, sementara 81-100% dikatakan Sangat Baik. Berikut adalah Skala Kualitas Lingkungan untuk aspek penerimaan terhadap rencana proyek:

Tabel III-287. Skala Kualitas Lingkungan dari Aspek Kekhawatiran Masyarakat

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Kekhawatiran
1	Sangat Buruk	0-20%
2	Buruk	21-40%
3	Moderat	41-60%
4	Baik	61-80%
5	Sangat Baik	81-100%

2. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Baik desa terdampak maupun desa terpengaruh pada umumnya menyatakan setuju terhadap kegiatan proyek INPEX. Namun tetap terdapat kekhawatiran masyarakat yang perlu diperhatikan terutama mengenai masuknya tenaga kerja luar daerah yang membuat masyarakat tidak dapat bersaing dan membuat masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Tabel di bawah ini menunjukkan persepsi masyarakat di desa terpengaruh mengenai rencana proyek yang akan dilakukan.

Tabel III-288 Persepsi Masyarakat di Desa Terpengaruh Mengenai Rencana Proyek

No	Desa	Persepsi
1	Lauran	INPEX perusahaan besar yang mengusahakan hasil bumi (migas) di Kep. Tanimbar
		INPEX membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha untuk masyarakat
2	Sifnana	Masuknya ribuan tenaga kerja INPEX dapat merubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
		Harga tanah meningkat setelah keberadaan INPEX

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Tabel di bawah ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat di desa terpengaruh proyek yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil wawancara

ini tidak jauh berbeda dengan hasil FGD yang dilakukan kepada masyarakat yaitu kekhawatiran di bidang ekonomi dan lingkungan. Sebagai masyarakat adat, masyarakat pun khawatir akan terjadinya pergeseran budaya seperti luntarnya adat dan budaya Tanimbar, terjadinya perselingkuhan, pergaulan bebas, ataupun perkawinan beda agama.

Tabel III-289 Kekhawatiran Masyarakat di Desa Terpengaruh Proyek

No	Desa	Kekhawatiran
1	Ilngei	• Limbah dapat merusak laut dan mengganggu nelayan • Perempuan papalele kehilangan mata pencaharian • Tingginya kekerasan dalam rumah tangga karena perselingkuhan tinggi • Perkawinan beda agama • Kejahatan meningkat • Polusi udara
2	Wowonda	• Potensi pergaulan bebas • Perkawinan dengan pendatang beda agama
3	Kabiarat	• Rusaknya agama, tradisi dan adat • Perbedaan pendapat dengan orang luar • Penjualan tanah • Pergaulan bebas karena masuknya pendatang
4	Lauran	• Luntarnya adat dan budaya Tanimbar • Pencemaran lingkungan (darat, laut, udara) • Timbulnya bencana seperti pergeseran tanah dan tsunami • Masyarakat tidak dilibatkan dalam proyek INPEX • Hasil masyarakat diambil dan dibawa keluar
5	Sifnana	• Pergaulan bebas karena masuknya pendatang • Meningkatnya perselingkuhan • Perubahan pola pikir anak muda sehingga tidak menghargai adat • Masuknya budaya barat (cara berpakaian, tenaga kerja, dan sex bebas) • Pencemaran lingkungan • Warga lokal hanya bekerja sebagai buruh

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

3.3.3.1.2 Adat dan Budaya Masyarakat

Budaya merupakan suatu hal yang dinamis sehingga kerap berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab perubahan kebudayaan di antaranya adalah asimilasi dan akulturasi. Asimilasi menurut konsep sosiologi adalah proses kelompok minoritas secara bertahap menyesuaikan diri dengan kebiasaan sikap budaya dan adat yang berlaku. Sedangkan akulturasi menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Kebudayaan atau budaya dimaknai sebagai serangkaian ide-ide, gagasan, pengetahuan dan nilai yang digunakan oleh manusia untuk memahami lingkungan hidupnya dan digunakan untuk mewujudkan tingkah lakunya

serta diwariskan dari generasi ke generasi (Geertz, 1973; Spradley 1980; Keesing, 1994). Budaya dapat dibagi ke dalam tiga wujud kebudayaan yaitu pengetahuan budaya, tingkah laku budaya dan benda-benda budaya. Perwujudan budaya ini terdapat di tengah masyarakat berupa interaksi sosial sehingga dalam interaksi sosial antar masyarakat yang berbeda, budaya akan mengalami percampuran.

Namun karena budaya lahir dari proses panjang dan terlembaga sangat dalam di berbagai segi kehidupan sosial maupun mental, perubahan budaya adalah sesuatu yang relatif panjang. Meskipun ada pengaruh dari luar, beberapa bagian dari sistem keyakinan, sejarah dan ikatan sosial kemudian relatif terjaga. Pada konteks masyarakat Tanimbar, asimilasi telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat terutama di desa-desa dekat dengan Kota Saumlaki. Masyarakat minoritas yang merupakan pendatang dari Sulawesi, Ambon, Jawa, dan dari daerah Indonesia lainnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang mayoritas adalah Suku Tanimbar. Secara umum, berasimilasi dengan masyarakat Tanimbar tidak sulit karena mereka sudah menyatu dengan unsur-unsur kebangsaan nasional yang menganut slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku bangsa dan agama tetapi satu bangsa.

Proses akulturasi di dalam masyarakat Tanimbar dapat dilihat dari perubahan budaya lokal yang terjadi terutama sejak masuknya agama Kristen dan Katolik serta datangnya Belanda. Di akhir abad ke 19, masyarakat di Kepulauan Tanimbar masih terlibat peperangan antar suku dan berburu kepala untuk upacara adat dan sebagai lambang prestise di antara suku-suku setempat. Perang antar suku biasanya disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan seperti perang antara Olilit yang bersekutu dengan desa-desa di Pulau Yamdena melawan suku di Selaru untuk memperebutkan wilayah kekuasaan atas Pulau Matakus. Agama Kristen dan Katolik yang datang pada dekade pertama abad ke 20 secara perlahan mengubah budaya lokal seperti berburu kepala yang semakin berkurang dan saat ini praktik berburu kepala sudah tidak dilakukan.

Salah satu ciri masyarakat Tanimbar sudah mengalami perubahan kebudayaan adalah dengan adanya organisasi selain organisasi adat. Organisasi seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang Taruna hampir ada di seluruh wilayah studi yang terdampak maupun terpengaruh proyek. Pada desa terdampak proyek seperti Desa Lermatang terdapat organisasi di bidang keagamaan sebagai bagian dari institusi gereja berupa persekutuan kaum pemuda, wanita, bapak, dan pelayanan. Sementara pada desa terpengaruh yaitu Desa Sifnana, terdapat organisasi berupa persekutuan kaum pemuda, wanita, bapak, pelayanan, dan grup suling; Di Desa Olilit dan Desa Ilngi terdapat organisasi berupa persekutuan kaum pemuda, wanita, bapak, pelayanan.

Satu norma dan pola sosial yang tidak berubah adalah sistem kekerabatan. Sistem ini bisa dikatakan sebagai pilar interaksi sosial masyarakat Tanimbar. Selain pengaruh terhadap interaksi sosial, sistem kekerabatan ini juga akan berpengaruh pada sistem temurilal atau relasi antara manusia dengan sumberdaya agraria baik daratan maupun lautan.

Menggunakan kesejarahan Desa Lermatang sebagai kasus, kita dapat mempelajari pola budaya dan relasi antar manusia maupun antar kelompok yang terbentuk bergenerasi hingga sekarang. Penduduk pertama desa Lermatang berasal dari pulau Nusnitu (pulau pamali) daerah Selu di bagian atas Pulau Sera menggunakan perahu baranratan. Dalam perahu tersebut ada beberapa marga yaitu Nusmese, Kelbulan, Solarbesain, Batmanlusi, Batlalone, dan Maskikit. Marga-marga ini memiliki peran masing-masing di dalam perahu. Marga Kelbulan dengan posisi duduk di depan Sorilur (Bawa Muka atau pemimpin) dengan fungsi atau peran untuk mengamati atau memastikan jalannya perahu

dengan baik. Marga Nusmese posisi duduk di bagian tengah perahu tepatnya di belakang marga Kelbulan. Mereka mempunyai peran sebagai pendeta atau Mangsompe. Marga Maskikit posisi duduknya di bagian tengah perahu berdekatan dengan marga Nusmese. Marga Maskikit mempunyai peran sebagai Timbarua atau menimba air dari dalam perahu. Marga Batmanlusi posisi duduk di bagian belakang kiri dan kanan perahu. Mereka berperan sebagai kemudi kiri yang disebut Willinfian dan kemudi kanan Willinbayan. Batlalone berperan sebagai penabuh gendang. sementara marga Solarbersain berperan sebagai pemandu acara. Dalam perjalanan panjang akhirnya mereka menetap di tempat di mana matahari terbit atau Lermatang yang berasal dari kata “Lere” artinya matahari dan “matang” artinya terbit, dan menyatu ke dalam satu Suan yakni Suan Batlelempun. Seiring berjalannya waktu datanglah marga-marga yang lain dan bergabung ke dalam soa-soa yang telah ada di desa Lermatang dan diterima oleh Soa Batlelempun. Soa kedua yang masuk ke desa Lermatang adalah soa Nuswain. Setelah kedatangan soa Nuswain datang pula soa Taborat. Setelah itu masuk juga Soa Otsuin-Ngriase. Soa Olinger kemudian juga datang ke Lermatang. Kemudian datang pula Soa Otarempuan. (Yayasan Puter 2020). Hingga saat ini terdapat beberapa perubahan konfigurasi mata rumah atau suan, namun tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Dari sekeping informasi kita mendapatkan info bahwa terdapat lima marga awal sebagai satu suan. Kehadiran suan-suan lain kemudian ikut mewarnai masyarakat namun tetap menghormati suan awal. Penghormatan pada yang tertua atau yang lebih dahulu sangat kental dalam relasi keluarga maupun masyarakat di Lermatang, dan juga di Tanimbar.

Satu norma dan pola sosial yang tidak berubah adalah sistem kekerabatan. Sistem ini bisa dikatakan sebagai pilar interaksi sosial masyarakat Tanimbar. Selain pengaruh terhadap interaksi sosial, sistem kekerabatan ini juga akan berpengaruh pada sistem temurial atau relasi antara manusia dengan sumberdaya agraria baik daratan maupun lautan. Di Indonesia terdapat tiga jenis pola kekerabatan yakni sistem paternal, sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Dalam sistem paternal, sang anak akan mengaitkan diri sebagai pewaris kedua orang tuanya dan menghubungkan dirinya dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem patrilineal, sang anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki dan keturunan laki-lakinya akan memiliki posisi lebih tinggi, hak lebih banyak, dan berhak meneruskan nama keluarga. Sementara itu, sistem matrilineal adalah di mana sang anak akan mengaitkan dirinya dengan ibu berdasarkan garis keturunan perempuan dan menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan. Dalam sistem yang terakhir, kedudukan perempuan lebih tinggi, dan memiliki hak lebih banyak (Muhammad 2006).

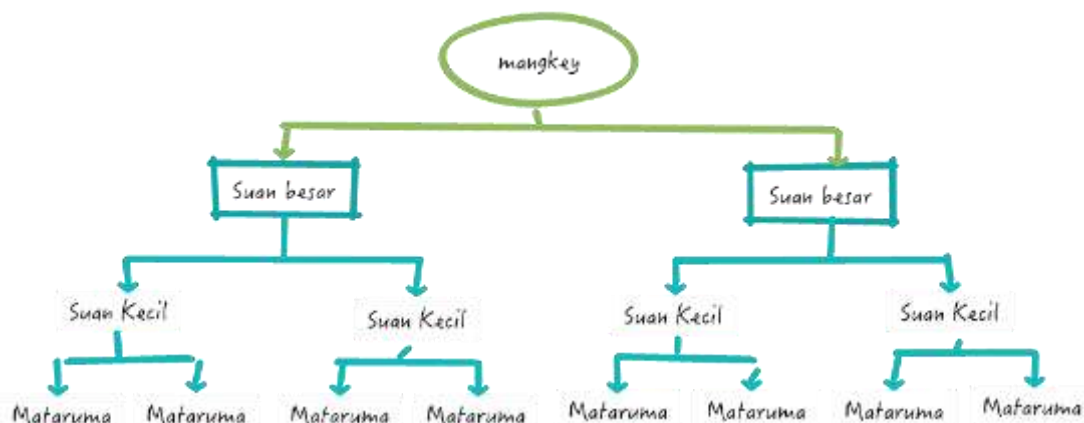
Masyarakat di Tanimbar khususnya di Lermatang merupakan masyarakat patrilineal di mana anak laki-laki adalah penanggung jawab keluarga dan penerus nama keluarga. Maka pemimpin sebuah keluarga adalah laki-laki, dan memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarganya dan mengolah lahan sementara perempuan mengolah dan memanfaatkan hasilnya untuk kemakmuran keluarga. Pola ini memiliki kesesuaian dengan filosofi adat utama orang Tanimbar yakni Duan-Lolat. Konsep duan dan lolat merupakan struktur sosial yang mengatur hubungan sosial orang Tanimbar secara keseluruhan yang menjadi dasar untuk menentukan status sosial duan dan lolat melalui sebuah proses perkawinan. Dalam perkawinan tersebut pihak keluarga yang memberi anak perempuan, dialah yang kemudian menjadi duan dan pihak yang menerima selanjutnya menjadi lolat. Baik duan maupun lolat merupakan bagian dari status sosial yang ada dalam struktur sosial sehingga masing-masing pihak berpegang teguh atas berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki.

Dalam keseharian, hubungan duan-lolat nampak bekerja dalam bentuk misalnya, saat seseorang lolat mendapatkan ikan dari melaut, ia dengan spontan membaginya pada duannya. Pada kasus lain, ketika meminta duan-nya untuk “mendoakan” atau memberkati rumah barunya, maka lolat akan datang mengutarakan maksudnya dengan membawa sopi dan sumbat (daun sirih dan pinang). Pada waktunya duan datang membawa kain tenun ikat serta beras dan lolatnya memberi daging babi, diikuti proses prosesi mendoakan ruang-ruangan di rumah baru lolatnya. Dalam hal-hal keseharian siapa yang membeli rokok atau siapa yang bisa meminta tuak/sopi kepada siapa maka akan teramati struktur sosial ini. Hubungan ini terjadi tidak dilandaskan pada proses jual beli atau barter di antara sesama mereka namun sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bersama (Yayasan Puter 2020).

Pada konteks rasionalnya, relasi Duan-Lolat adalah relasi bilateral, mutual dan saling mengisi. Relasi ini disimbolisasi dengan relasi dualistik di mana dua menjadi satu saling menghargai dan mengisi. Dalam tatanan Budaya masyarakat Tanimba Duan-Lolat dimaknai dengan: “Duan” berarti tanah atau Pemberi Dara (anak perempuan) dan “Lolat” disimbolkan dengan hujan yang jatuh ke bumi yang memberikan kesuburan pada tanah atau Penerima Darah (Lerebulan, 2011:35). Di sini ada nilai “hak” dan “kewajiban” yang sangat mulia. Namun, “Duan Lolat” juga memiliki interpretasi yang lain tapi maknanya sama yaitu interaksi antara dua pihak dan yang paling utama adalah “Duan” Agung yaitu Tuhan dan “Lolat” yaitu manusia. Hukum adat ini mulai beregenerasi menjadi hukum-hukum adat lainnya seperti: 1. “Duan” sebagai pemberi dan “Lolat” sebagai penerima; 2. “Duan” sebagai ayah dan “Lolat” sebagai ibu; 3. “Duan” sebagai kakak dan “Lolat” sebagai adik; 4. “Duan” sebagai lelaki dan “Lolat” sebagai perempuan; 5. “Duan” sebagai matahari dan “Lolat” sebagai bulan; 6. “Duan” sebagai yang berkuasa dan “Lolat” sebagai yang dikuasai; 7. “Duan” sebagai tuan dan “Lolat” sebagai hamba, dan sebagainya (Alaslan 2018).

Seorang laki-laki akan berperan sebagai kepala Mata Rumah (kepala marga) dan juga akan mengatur kekerabatan yang lebih luas yakni suan/soa hingga petuanan. Di Kepulauan Tanimbar terdapat struktur pengambilan keputusan secara adat yang saat ini masih ada. Namun sejak UU Desa Tahun 1979, struktur ini dilebur dengan struktur pemerintah formal di tingkat desa dan membuatnya sedikit banyak meluntur. Struktur tersebut adalah Marga-Suan Kecil-Suan Besar-Desa di mana seorang Kepala Desa adalah sekaligus sebagai Pemuka Adat (Mangkei). Suan atau Soa (adopsi bahasa Maluku Tengah) adalah persekutuan dari beberapa keluarga atau marga yang didasarkan pada kesamaan migrasi/kedatangan (sering kali suan ini diartikan sebagai “mereka yang datang dalam satu perahu”). Terdapat dua jenis suan yakni Suan Kecil dan Suan Besar sebagai payung beberapa Suan Kecil.

Setiap suan memiliki tanah adat atau petuanan, dan kumpulan petuanan ini berada di bawah kendali Mangkey atau Kepala Adat yang sekaligus dijabat oleh Kepala Desa. Struktur hierarki dalam pengambilan keputusan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



(Sumber: Yayasan Puter 2020)

Gambar III-366. Hierarki Pengambilan Keputusan pada masyarakat Tanimbar

Pada tingkat keluarga inti yang menjadi anggota mataruma, anak pertama laki-laki biasanya diberi tugas dalam mengelola tanah bapak. Ada semacam kewajiban yang melekat pada anak pertama bila adik laki-laknya menolak atau ingin merantau (Yayasan Puter 2020). Peran Marga, Mataruma atau Mata Rumah penting karena unit ini yang menjadi unit terkecil yang memiliki semacam “hak” untuk mendapatkan dan mengolah tanah dari komunitas meski tidak berdasarkan *exclusive ownership*. Setiap individu dari tiap keluarga diperbolehkan membuka lahan semampu mereka namun lahan itu pada dasarnya adalah tanah milik komunal (petuanan). Bila tidak mampu mengerjakan sendiri maka akan dilakukan secara berkelompok, bisa dalam satu suan atau berbeda suan. Berikut disampaikan ragam Mataruma, Suan Kecil dan Suan Besar yang ada di Desa Lermatang:

Tabel III-290. Nama-nama Suan dan Mataruma di Desa Lermatang

No.	Suan Besar	Suan Kecil	Mataruma
1.	Olsuin-Ngriase	Olsuin	Kilanmase, Korpau, Nernere, Ranratu, Maskikit, Sainyakit, Songopnuan
		Ngriase	Batmamolin, Batlayar, Rangkoly, Ariesam, Batlayeri
2.	Batlempun-Oibur	Batlempun	Nusmese, Kelbulan, Batlalone, Solarbesain
		Oibur	Watumlawar, Sasake, Sampono, Melbukrani, Buarbelai
3.	Nuswain-Taborat	Nuswain	Yaran, Laratmase, Lilimase, Watumlawar
		Taborat	Batmetam, Laratmase, Metan, Ngilawane, Petekotak
4.	Olinger-Otarempun	Olinger	Takdare, Takdarlere
		Otarempun	Lamere, Korpaulun, Rangkoratat, Batfutu

Sumber: Profil Desa Lermatang (Yayasan Puter 2020)

Status legal bagi obyek kepemilikan lahan dan hak atasnya ditentukan berdasarkan cara suatu individu atau kelompok memperolehnya. Bentuk akuisisi tanah yang dapat ditemui adalah: a. Perusah: hak milik yang pertama diperoleh melalui hasil usaha seorang individu atau kelompok, yaitu melalui pembukaan lahan dan berkebun. Menumbang pohon-pohon besar di hutan menandai kepemilikan seseorang; b. Hak waris: hak yang diperoleh melalui pewarisan. Pewarisan terjadi karena kematian si pemilik perusah atau ketika si pemilik (yang telah berusia lanjut) memutuskan untuk mewariskan kebunnya kepada keturunannya atau kepada seseorang. Warisan tanah dan kebun diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum menikah (ketika menikah, seorang perempuan ikut suaminya); c. Pemberian: hak milik atas tanah dapat diperoleh melalui pemberian (kasi). Misalnya, tanah diberikan kepada, (1) mereka yang berasal dari luar, yang datang menikah dengan perempuan Lermatang, diberikan oleh keluarga si perempuan; (2) seorang

lalat yang meminta dengan membawa sopi kepada duannya (pihak di mana ibunya berasal) sebagai pemilik atau penguasa tanah; hal ini terjadi karena seseorang baru kembali ke kampung dan belum memiliki tanah untuk berkebun; d. Pembelian: hak milik diperoleh melalui pemberian sejumlah uang kepada pemilik tanah. Misalnya seseorang yang baru kembali ke Lermatang ingin segera memiliki kebun, maka ia dapat membawa sopi dan "sumbat" (yang telah disepakati jumlahnya) kepada duannya sebagai tanda 'membeli' tanah milik si duan (Yayasan Puter 2020).

Suan atau soa merupakan persekutuan marga di mana tiap marga memiliki sebuah tugas atau jabatan tertentu. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan adat dan tugas sosial-kemasyarakatan, Kepala Suan dan orang yang dituakan dari masing-masing marga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dengan tugas: a. Mengawasi batas-batas petuanan milik suan, dan milik pnu (marga tertua pemilik tanah); b. Memimpin perang, jika terjadi peperangan antar pnu; c. Memberikan teguran bagi pihak-pihak yang dinilai melanggar aturan adat; d. Menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lingkungan suan masing-masing, dan juga di pnu; e. Melaksanakan tutup-buka sasi (wampe); f. Memimpin/mengkoordinir anggota-anggota soa jika di dalam suan-nya ada acara pernikahan atau kematian.

Konsep duan-lalat juga menjadi dasar bagi pengaturan tenurial. Menurut Drabbe (1940), Renwarin (1987) dan Paulus (2009) duan-lalat memiliki fungsi perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan sehari dalam bentuk sistem arin (pembukaan atau pembersihan tempat bercocok tanam). Tanggung jawab ini adalah bagian dari fungsi perlindungan dari duan kepada lalatnya. Pada kasus di desa Lermatang pembersihan lahan untuk lokasi tanam oleh duan masih dilakukan tanpa menggunakan parameter ekonomi apakah pembiayaan pembukaan lahan ini menguntungkan atau merugikan dari sisi produksi. Pada saat bersamaan, penguasaan lahan oleh masyarakat diatur oleh mataruma dan mataruma diatur oleh petuanan suan kecil dan selanjutnya oleh petuanan suan besar. Petuanan ini mengatur wilayah kelola di darat maupun laut.

Petuanan dan Kepemilikan Wilayah Laut

Batas petuanan laut ditandai dengan batas di darat berupa tanjung yang kemudian dari sana ditarik garis imajiner ke laut sampai pada jarak tertentu, di mana pada jarak itu ditentukan berdasarkan area aktivitas melaut masyarakat setempat. Nelayan Lermatang melakukan aktivitas melaut meliputi wilayah pasang-surut (meti) sampai ke laut dalam. Menurut informan, wilayah pasang surut (meti) sepanjang kurang lebih 300 - 500 meter dari pantai, dengan kedalaman 0-9 meter, setelah itu zona kepala meti yang berlanjut ke tubir selebar kira-kira 12 meter dengan kedalaman 9-12 meter, dilanjutkan dengan air dalam (laut dalam) dengan kedalaman di atas 12 meter (Soselisa dkk 2011:51). Lebar dan kedalaman pada zona-zona itu bervariasi di beberapa tempat. Pembagian petuanan laut menurut zonasi didasarkan pada pengetahuan tentang keadaan dasar laut dan karakter sumber daya di dalamnya kemudian diterapkan dalam aktivitas melaut berdasarkan gender dan juga umur.

Laut dan isinya diakui sebagai milik komunal desa (kampung) sehingga tidak dikenal kepemilikan wilayah laut secara individu atau kelompok marga (mata rumah). Karena milik komunal, maka berlaku hak petuanan (hak ulayat) di mana setiap penduduk Lermatang dapat mencari ikan dan sumber daya lainnya di wilayah laut Lermatang sebagai pemegang primary use rights yang memiliki hak access dan withdrawal (Schlager dan Ostrom 1992). Walaupun demikian, hak menangkap atau mengambil sumber daya laut tertentu akan dibatasi atau ditunda pelaksanaannya ketika sumber daya tersebut dikenakan sasi oleh Pemerintah Desa. Sasi adalah suatu bentuk pengaturan

pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu wilayah tertentu, baik di laut maupun di darat, dan pada suatu waktu tertentu (lihat von Benda-Beckmann and Brouwer 1995; Soselisa 2001). Di Lermatang sumber daya laut yang dikenakan sasi adalah teripang (berbagai jenis), lola (*Trochus niloticus*), japin-japin (*Pinctada margaritifera*), dan batu laga (*Turbo marmorata*). Dengan demikian, ketika sasi dilakukan pada sumber daya ini (tutup sasi), maka penduduk Lermatang sebagai pemegang hak memanen tidak boleh menangkap atau mengambil sumber daya tersebut. Si pelanggar akan dikenai sanksi yang pada masa kini diatur oleh Pemerintah Desa dan disepakati bersama. Sasi bukan saja berlaku untuk masyarakat desa tersebut, tetapi juga semua orang yang masuk ke dalam wilayah desa yang di-sasi itu.

Petuanan dan kepemilikan wilayah darat

Sama seperti wilayah laut, kepemilikan wilayah darat diawali dengan kepemilikan komunal atas tanah menurut konsep petuanan di mana berlaku hak petuanan untuk satu persekutuan (desa) dalam memanfaatkan sumber daya (tanah) di wilayahnya. Diawali dengan perjalanan masuk ke wilayah ini oleh kelompok-kelompok yang berbeda dari berbagai arah, areal yang mereka rintis dan lalui meninggalkan cerita turun-temurun tentang jejak-jejak kaki leluhur, sebagai "tampa jalan" (tempat jalan) leluhur. Berdasarkan pemahaman bahwa terdapat leluhur suatu kelompok yang "rintis" jalan atau yang "punya tanpa jalan" pada suatu areal, maka areal tersebut dianggap sebagai milik kelompok yang bersangkutan atau lebih tepatnya berada dalam penguasaan kelompok itu (hak petuanan). Kepemilikan areal itu biasanya kemudian diperkuat dengan penamaan wilayah ataupun situs-situs tertentu di dalam areal itu oleh pemiliknya. Nama-nama areal mengikuti penamaan feature alam yang ditemui di sekitar, seperti nama sungai, muara (nama sungai dan muaranya biasanya berbeda), sumber mata air, vegetasi di sekitar, ataupun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ maupun berdasarkan kisah pembukaan kebun tersebut; dinamakan dengan bahasa lokal maupun bahasa Indonesia.

Lahan darat terdiri atas lahan permukiman, lahan pertanian, dan hutan. Soa Batlelempun sebagai soa pertama yang masuk ke wilayah Desa Lermatang mendapat hak penguasaan atas wilayah permukiman. Soa ini diakui sebagai soa di mana tuan tanah desa (mangfaluruk pnu) berasal. Dengan demikian, tidak ada status tanah pribadi atau tanah mata rumah di permukiman desa. Di Tanimbar, pada awalnya ijin mendirikan rumah diperoleh dari orang atau kelompok yang diakui merupakan penduduk pertama di suatu kampung (pnue duan). Begitu ijin mendirikan rumah di permukiman diberikan, di kemudian hari ijin itu tidak bisa diambil lagi.

Seperti disampaikan di atas, hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya akan tidak berlaku ketika pemangku adat menetapkan sasi atau larangan ambil. Pada masa lalu, sasi ditetapkan secara dar, oleh pemangku adat dan dilaksanakan oleh tua-tua adat dengan ritual tertentu. Namun saat ini sasi ditetapkan oleh Kepala Desa yang sekaligus sebagai Pemangku Adat atau Mangkey. Ragam sasi di Kepulauan Tanimbar ada tiga yakni: a. Sasi Darat; b. Sasi Laut; dan c. Sasi Gereja. Sasi darat adalah larangan pengambilan produk tertentu seperti kelapa sementara sasi laut adalah pelarangan pengambilan sumber daya laut seperti teripang, lola ataupun batulaga/bia pada periode tertentu. Penetapan dan pembukaan sasi dilakukan oleh perangkat adat dan ritual adat. Sementara sasi gereja adalah penetapan sasi oleh gereja atas permintaan pemilik sumberdaya agar gereja menguatkan permintaannya untuk menutup pengambilan sumberdaya di lahan kelolanya. Dalam sasi gereja, tidak ada ritual adat selain pengumuman pada saat kebaktian di gereja. Namun ketiga

sasi tersebut memiliki kesamaan yakni adanya penanda sasi berupa daun kelapa yang dibentangkan atau dipasang di area yang dinyatakan di-sasi.

Norma dan kebudayaan tidak dapat diukur secara pasti karena tidak mewujud, namun skala kualitas pada aspek adat dan budaya dapat didekati dengan melihat arti penting dan aplikasinya pada kehidupan sosial sehari-hari. Kelas kualitas ini dibagi ke dalam lima kelas dan masing-masing memiliki bobot 1-5 dari yang Sangat Tidak Penting hingga Sangat Penting. Nilai 1 mengindikasikan bahwa adat dan budaya masyarakat asli sudah tidak ditemukan aplikasinya baik dalam bentuk norma, perilaku maupun artefak. Nilai 2 mengindikasikan adat dan istiadat masih ada namun bersifat simbolik dan tidak lagi didukung oleh kelembagaan adat. Nilai 3 mengindikasikan bahwa norma adat masih ada, kelembagaan adat masih ada, namun tidak semua komunitas mengaplikasikannya. Nilai 4 mengindikasikan bahwa norma adat masih ada, dilaksanakan oleh kebanyakan anggota masyarakat, namun tidak memiliki artefak sebagai media yang bersifat sakral. Sementara itu, nilai 5 mengindikasikan bahwa norma dan kelembagaan adat merupakan pranata tunggal, berlaku total, dan situs sakral atau artefak penting masih digunakan. Berdasarkan hasil analisis lapang dan analisis kebudayaan berikut adalah Tabel Skala Kualitas Adat dan Budaya di enam desa terdampak di Kab. Kepulauan Tanimbar:

Tabel III-291. Skala Kualitas Lingkungan pada Aspek Adat dan Budaya

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Arti Penting Adat dan Budaya
1	Adat dan budaya masyarakat asli sudah tidak ditemukan aplikasinya baik dalam bentuk norma, perilaku maupun artefak	Sangat Tidak Penting
2	Adat dan istiadat masih ada namun bersifat simbolik dan tidak lagi didukung oleh kelembagaan adat	Tidak Penting
3	Norma dan kelembagaan adat masih ada namun tidak semua komunitas mengaplikasikannya	Moderat
4	Norma adat masih ada, dilaksanakan oleh kebanyakan anggota masyarakat, namun tidak memiliki artefak sebagai media yang bersifat sakral	Penting
5	Norma dan kelembagaan adat merupakan pranata tunggal, berlaku total serta situs atau artefak sakral masih digunakan	Sangat Penting

3.3.3.1.3 Norma dan nilai Sosial

Desa-desanya wilayah studi baik terdampak maupun terpengaruh merupakan desa yang masih memegang nilai dan norma adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Meskipun nilai dan norma adat tidak tertulis dan perlahan mulai luntur terutama pada generasi muda, namun hal-hal pokok masih diatur oleh nilai dan norma adat. Pengetahuan mengenai nilai dan norma adat ini dibagikan secara turun menurun oleh masing-masing keluarga. Kepulauan Tanimbar yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sangat kaya akan budaya dan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ada beberapa tradisi adat secara umum yang masih bisa dijumpai antara lain tradisi pembukaan lahan/ladang baru, sasi, upacara penyambutan, pentingnya sumur keramat, hutan dan areal pemakaman. Semua ini merupakan norma-norma yang masih hidup dan legitimate di kalangan masyarakat Tanimbar.

Mengacu pada KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku masyarakat.

Masyarakat asli Tanimbar masih mempertahankan beberapa norma adat dalam budaya tradisional mereka. Beberapa norma adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Tanimbar antara lain:

A. Duan Lolat

Adat dan sistem duan-lolat merupakan hukum adat yang paling utama yang mengatur relasi dan tata berperilaku serta pergaulan antar kelompok dan individu di dalam kehidupan seluruh masyarakat Tanimbar, baik di dalam desa maupun antar desa, baik di dalam Kepulauan Tanimbar maupun di luar kepulauan ini. Adat berdasarkan relasi kelompok duan-lolat mendominasi dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran sampai kematian; bukan saja terkait urusan perkawinan, melainkan juga untuk life-cycle lainnya, bahkan di luar itu, seperti dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta dalam proses-proses penyelesaian konflik antar kerabat atau warga.

B. Sopi

Sopi merupakan minuman tradisional yang terbuat dari enau (*Arenga pinnata*) atau kelapa (*Cocos nucifera*) melalui proses destilasi. Sopi memiliki peran penting dalam kegiatan adat. Sopi digunakan dalam situasi yang membutuhkan ritual, seperti ritual untuk memfasilitasi pertukaran antara kerabat duan dan lolat. Sopi ini diperlukan sebagai pendamping saat pertemuan untuk menyelesaikan perselisihan atau ingin menjalin atau memperbaharui aliansi.

Menurut penduduk setempat, Sopi adalah minuman beralkohol tradisional untuk pemacu energi. Di Desa Lermatang hanya ada satu (1) pembuat sopi. Pembuat sopi sebagian besar di Sifnana dan Luran. Di Lermatang, Sopi sebagian besar dibuat dari pucuk kelapa sedangkan di Sifnana dan Luran, Sopi kebanyakan dibuat dari Koli, sejenis pohon palem. Cairan dari tunas dikumpulkan setiap hari selama 6 hari sebelum dipanaskan untuk mendapatkan alkohol suling. Menurut informan setempat, produksi sopi di Lermatang biasanya mencapai 30 botol 600 mL (botol mineral). Satu botol sopi harganya sampai Rp 35.000. Sopi pekat yang diproduksi pertama kali selama setiap batch proses fermentasi disebut Sopi Kepala (alkohol pekat tinggi) yang harganya bisa mencapai Rp 100.000 / botol



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-367 Proses Penampungan untuk Pembuatan Sopi



Gambar III-368 Lumbung Pembuatan Sopi di Desa Lermatang

C. Sasi

Sasi merupakan pengaturan penggunaan sumber daya tertentu. Pengaturan berupa periode pelarangan untuk memanen (tutup sasi) bertujuan agar spesies yang disasi dapat berkembang dan dipanen tepat pada waktunya. Sasi di darat diterapkan pada pohon kelapa yang dipanen untuk produksi kopra, sedangkan sasi di laut diterapkan pada teripang, kerang lola (*Trochus niloticus*) dan batulaga (*Turbo marmorata*). Namun saat ini, sasi darat diterapkan pula pada kelapa, kemiri, bakau, maupun kayu lainnya untuk tujuan komersil. Musim sasi (tutup dan buka sasi) biasanya ditentukan berdasarkan konsensus antara pemerintah desa, kewang laut, para pemimpin adat lain, dan pihak gereja. Waktu akhir penetapan sasi biasa disebut dengan waktu buka sasi. Jika waktu buka sasi telah tiba, maka terlebih dahulu dilakukan upacara adat buka sasi untuk melakukan pemanenan hasil. Bentuk sasi di daerah ini tercatat ada dua bentuk, yaitu sasi darat dan sasi laut, sasi darat umumnya diperuntukkan bagi perkebunan kelapa, baik yang individu maupun perkebunan kelompok. Sedangkan sasi laut umumnya diperuntukkan untuk melakukan penutupan pemanfaatan hasil laut berupa teripang, lola, dan batulaga yang merupakan hasil laut milik bersama. Awalnya, ikan yang disasi, tetapi kemudian sumberdaya laut lainnya yang bernilai ekonomi disasi untuk tujuan ekonomi

masyarakat. Lama waktu sasi cukup beragam dari mulai satu hingga tiga tahun. Sasi di wilayah ini terbagi menjadi tiga, yaitu sasi adat, sasi individu dan sasi gereja. Namun demikian prosesnya hampir sama, yaitu dimulai dengan upacara adat berdasarkan Soa masing-masing, kemudian dibawa ke gereja untuk didoakan dan terakhir disahkan oleh Kepala Desa, tempat dimana sasi akan diberlakukan. Pelanggaran terhadap sasi diberikan dua bentuk sanksi, yaitu sanksi adat dan sanksi ekonomi. sanksi adat diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut, sedangkan sanksi ekonomi diberikan berupa denda sesuai dengan besaran kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran sasi tersebut. Pada masa kini, sanksi denda diatur oleh pemerintah desa melalui kesepakatan bersama, dan ditetapkan dengan keputusan desa, baik diumumkan secara lisan, maupun secara tertulis melalui keputusan desa atau peraturan desa, contohnya di Desa Lermatang sanksi untuk pengambilan teripang atau lola dalam masa tutup sasi dikenai denda Rp 5.000.000,-.

D. Pengenalan orang luar komunitas pada roh desa

Ketika orang dari luar komunitas ingin mengunjungi petuanan atau wilayah adat desa, maka orang dari luar komunitas tersebut harus diperkenalkan dengan roh setempat dan leluhur masyarakat setempat melalui ritual. Ritual ini dilakukan untuk memperkenalkan serta memohon perlindungan dan keselamatan agar orang dari luar komunitas tidak ada yang tertimpa musibah saat berada di daerah petuanan. Ritual tradisional ini dilakukan oleh tetua adat dengan berdoa kepada roh dan leluhur dalam ritual Bahasa Fordata serta persembahan Sopi. Roh setempat dipanggil dengan nama-nama seperti “Dewa Batu” (Batin Ruan), “Dewa Laut” (Tasik Ruan), “Dewa Hutan” (Ampat Ruan), dan sebagainya.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-369 Penerimaan Tamu Secara Adat di Desa Matakus

E. Ritual dan tradisi siklus hidup

Ritual dan tradisi siklus hidup adalah acara untuk merayakan peristiwa terpenting dalam kehidupan sosial, seperti perkawinan, kematian, atau acara syukuran seperti wisuda. Acara ini menjadi kesempatan untuk pertemuan sosial keluarga besar, dan juga tetangga untuk menghidupkan jaringan sosial kekerabatan. Namun, acara seperti ini sudah dimediasi oleh gereja, seperti pembaptisan imam Katolik, pernikahan, pemakaman, pertemuan doa, maupun acara syukuran.

Pernikahan dengan pihak luar suku/desa

Jika ada masyarakat yang menikah dengan pihak luar suku/desa, maka orang tersebut harus mencari bapak angkat untuk menempatkan atau menentukan posisinya di dalam kelompok duan atau lolat yang merupakan syarat penting dalam perkawinan. Jika ada orang yang masuk ke keluarga, maka

satu (1) marga harus ikut upacara adat. Aturan adat di desa wilayah studi mengatur pemberian waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Bagi anak perempuan yang belum menikah, hak waris yang didapat sama dengan anak laki-laki. Namun jika sudah menikah, maka besaran hak waris tergantung pada keputusan saudara laki-laki yang lain. Jika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka ketika menikah anaknya akan ikut marga tetapi ayahnya bisa memberikan harta kepada anak perempuannya.

F. Penggarapan lahan

Aturan adat di Tanimbar khususnya di wilayah studi juga mengatur tentang penggarapan lahan. Lahan di hampir semua desa merupakan milik yang dikelola dan dikontrol oleh soa, masyarakat hanya memiliki hak garap. Namun, pada beberapa desa hal ini sudah mulai luntur, karena pemerintah sudah menerbitkan bukti kepemilikan pribadi dan terjadi jual beli. Pendatang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dapat mengerjakan lahan jika telah menjadi anggota salah satu marga dari penduduk lokal. Sebagaimana dengan syarat menikah dengan penduduk lokal.

G. Pengangkatan anak

Tata cara pengangkatan anak adalah dengan upacara minum Sopi serta sumbatnya (berupa uang biasanya Rp 150.000). Lalu bapak angkat akan mengenalkan anak angkatnya kepada anak-anaknya yang lain sebagai saudara angkat. Setelah pendatang diangkat menjadi warga setempat dengan Soa tertentu, maka dia dapat mengolah lahan dari Soa tersebut dan dapat menikah dengan penduduk lokal yang beda marga.

Selain norma, masyarakat asli Tanimbar juga memiliki hukum adat yang masih berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, hukum adat ini menunjukkan kecenderungan untuk tidak menghukum secara berat laki-laki di masyarakat. Pelanggaran hukum adat serta hukumannya yang paling umum terjadi, yaitu:

- Penyerangan, hukuman untuk penyerangan fisik yaitu denda untuk “cuci tangan” sebesar Rp 1.000.000,00. Namun, jika serangan itu menyebabkan cedera serius, orang yang melakukan penyerangan akan dibawa ke kantor polisi dan mendapatkan tuntutan pidana dan dijatuhkan hukuman penjara. Penyerangan ini juga berlaku pada pasangan suami istri yang terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebanyakan kasus suami yang melakukan penyerangan akan akan ditahan selama beberapa hari, diberikan ceramah, diperingkatkan akan konsekuensi yang lebih serius jika mengulangi pelanggaran, dan kemudian dilepaskan kembali. Di beberapa daerah, tindakan kekerasan dapat diselesaikan dengan “cuci darah” atau penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu pelaku penyerangan memberi saudara laki-laki korban pakaian atau pakaian tradisional (dengan nilai minimum Rp 500.000,00), Sopi, dan uang.
- Perkosaan, di beberapa desa terutama di wilayah urban, kasus perkosaan langsung dibawa ke polisi dan pelaku akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang dari enam atau delapan tahun.
- Zina, dikenakan denda sebanyak Rp 5.000.000,00. Sedangkan di beberapa desa, denda perzinahan bisa mencapai Rp 12.000.000,00 hingga Rp 15.000.000,00.
- Perceraian, jika sang suami meninggalkan istrinya, maka ia harus membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00. Jika ia menikah lagi, di beberapa desa diterapkan harus membayar denda

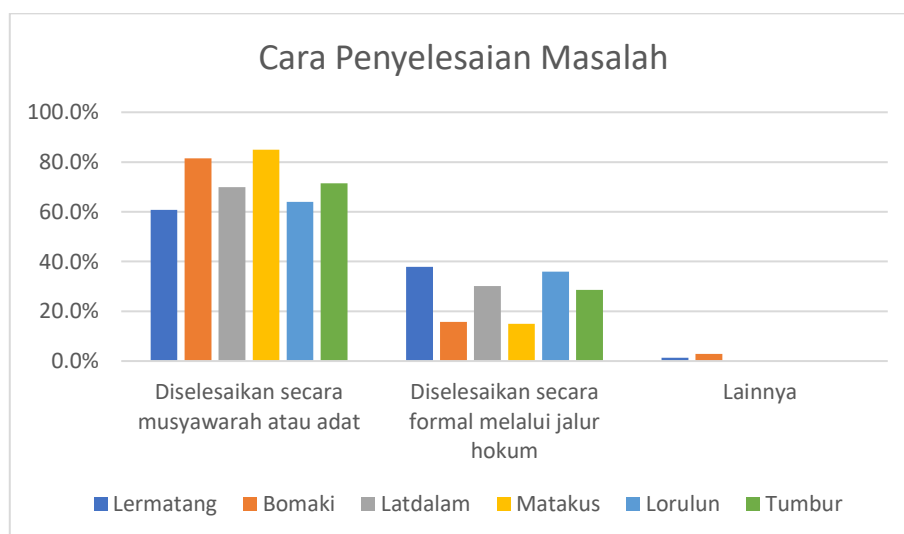
tambahan sebesar Rp 10.000.000,00 hingga Rp 12.000.000,00. Semua barang pernikahan istri juga harus dikembalikan. Sementara hak asuh anak cenderung akan diberikan kepada pihak ibu di sebagian besar daerah, namun pihak yang dianggap bersalah oleh hakim desa pun menjadi bahan pertimbangan hak asuh anak.

- Kehamilan di luar nikah, jika wanita tersebut tidak menerima tanggung jawab dari pria atau tidak dinikahkan, di beberapa desa diharuskan membayar denda sebesar Rp 30.000.000,00 sebagai pengganti tunjangan anak dan biaya pengobatan. Di Desa Lermatang ditetapkan pembayaran untuk perbuatan menghamili tetapi tidak menikahi sebesar Rp.5.000.000 (2014), dan penetapan kemudian naik menjadi Rp. 15.000.000.
- Pencurian, tidak ada aturan khusus yang diterapkan, namun sanksi yang paling umum adalah denda sebesar Rp 5.000.000,00. Sedangkan di beberapa desa seperti di Selaru, terdapat hukuman berupa cambukan di punggung menggunakan tongkat atau di Kandar, dicambuk menggunakan ekor ikan pari. Hukuman ini banyak diterapkan pada orang luar yang melanggar sasi laut.

Meskipun mekanisme penyelesaian masalah ini merupakan peraturan tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakat. Pada umumnya, sebagian besar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan dengan pemuka adat atau pihak Duan menjadi penengahnya. Sistem keamanan lingkungan di desa terdampak maupun terpengaruh juga berjalan aktif yaitu dengan melibatkan Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, dan pemuda.

1. Terdampak Kegiatan Proyek

Desa terdampak kegiatan proyek masih memegang nilai adat dan budaya lokal. Aturan-aturan adat dijalankan bersama dengan norma agama dan juga aturan-aturan pemerintahan desa. Meskipun pada generasi muda beberapa tradisi sudah mulai luntur, namun untuk hal-hal bersifat pokok tetap dijalankan oleh masyarakat. Lebih dari 60% responden menyebutkan bahwa cara penyelesaian masalah di desa mereka melalui musyawarah atau adat. Sedangkan sisanya adalah melalui jalur hukum dan jalur lainnya. Gambar di bawah ini menunjukkan cara penyelesaian masalah di desa terdampak kegiatan proyek.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-370 Cara Penyelesaian Masalah yang Digunakan oleh Masyarakat

Pada prakteknya, cara penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat bergantung pada jenis masalah yang terjadi. Berdasarkan penuturan narasumber mekanisme penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:

Musyawarah atau kekeluargaan. Cara ini merupakan pilihan pertama bagi masyarakat yang difasilitasi oleh tokoh/dewan adat;

Ketua RT. Bila masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan dibawa kepada ketua RT. Ketua RT akan menerima laporan permasalahan dan memfasilitasi musyawarah antar pihak;

Pemerintah Desa. Bila masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat RT, maka akan dibawa ke Pemerintah Desa;

Polisi. Bila masalah masih belum bisa diselesaikan di tingkat desa, maka permasalahan akan dibawa ke pihak berwajib (Polisi). Polisi biasanya akan menganjurkan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pengadilan. Bila masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi dari Polisi, maka proses akan dilanjutkan ke pengadilan.

Perselisihan antar desa yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh sengketa tanah seperti yang terjadi di Desa Bomaki dan Lermatang yang sering terjadi perselisihan sengketa lahan antar keluarga.

2. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Penyelesaian masalah pada desa terpengaruh tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian masalah di desa terdampak. Jika terjadi suatu masalah antar desa, maka tokoh-tokoh antar desa akan mengadakan musyawarah/dialog. Salah satu mekanisme penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melalui garis pertuanan marga seperti yang terjadi di Desa Olilit, Sifnana, dan Luran. Ketiga desa ini tergabung dalam suatu kesepakatan adat yang bertujuan untuk menjaga kehidupan bersama tanpa permusuhan. Mereka tergabung dalam suatu kelembagaan adat yang dikenal dengan nama Mandrwiak yang berfungsi memelihara kehidupan bersama antar kampung/desa. Jika terjadi masalah antara Desa Sifnana dan Luran, maka Olilit yang akan mendamaikan. Jika terjadi masalah antara Desa Sinana dan Olilit maka Desa Luran yang akan mendamaikan. Jika terjadi masalah antara Desa Olilit dan Desa Luran, maka Desa Sifnana yang akan mendamaikan. Mekanisme ini dimediasi oleh Pemerintah Daerah. Terdapat pula sistem keamanan yang melibatkan Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, dan pemuda. Namun, berbeda dengan desa terdampak maupun terpengaruh lainnya, sistem keamanan lingkungan di Desa Olilit dan Sifnana tidak melibatkan pemuda.

Perselisihan antar desa yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh sengketa tanah. Sedangkan kasus yang banyak terjadi di semua desa adalah pengaruh minuman keras (alkohol). Berdasarkan hasil wawancara, di Desa Wowonda sering terjadi kasus pencurian. Sedangkan di Desa Sifnana sering terjadi perselisihan lahan antar keluarga.

Skala kualitas pada aspek Norma dan Nilai Sosial dapat didekati dengan melihat tingkat pengaruh dan aplikasinya pada kehidupan sosial sehari-hari. Kelas kualitas ini dibagi ke dalam lima kelas dan masing-masing memiliki bobot 1-5 dari Sistem Sosial Urban hingga Masyarakat Adat. Nilai 1 mengindikasikan bahwa corak sosial sudah bersifat urban dan tidak lagi memiliki pranata komunal.

Nilai 2 mengindikasikan nilai sosial bersifat komunal namun menggunakan nilai yang bukan merupakan turunan dari adat budaya asli tempatan. Nilai 3 mengindikasikan norma dan nilai sosial menggunakan norma asli, diterapkan hanya oleh individu karena tidak ada lagi pranata adat dan sosialnya. Nilai 4 mengindikasikan bahwa norma dan nilai komunal masih ada, kelembagaan adat masih ada namun bersifat simbolik tanpa otorita resmi. Sedangkan Nilai 5 adalah masyarakat adat yang seluruh aspek kehidupannya masih menggunakan tradisi lama termasuk pranata dan sistem kepercayaannya. Berdasarkan hasil analisis lapang dan analisis mengenai norma dan nilai sosial, berikut adalah Tabel Skala Kualitas Norma dan Nilai Sosial di enam desa terdampak di Kab. Kepulauan Tanimbar:

Tabel III-292. Skala Kualitas Lingkungan pada Aspek Norma dan Nilai Sosial

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Norma dan Norma Sosial
1	Corak sosial sudah bersifat urban dan tidak lagi memiliki pranata komunal	Sangat Tidak Berpengaruh
2	Nilai sosial bersifat komunal namun menggunakan nilai yang bukan merupakan turunan dari adat budaya asli tempatan	Tidak Berpengaruh
3	Norma dan nilai sosial menggunakan norma asli, diterapkan hanya oleh individu karena tidak ada lagi pranata adat dan sosialnya	Moderat
4	Norma dan nilai komunal masih ada, kelembagaan adat masih ada namun bersifat simbolik tanpa otorita resmi	Berpengaruh
5	Masyarakat adat yang seluruh aspek kehidupannya masih menggunakan tradisi lama termasuk pranata dan sistem kepercayaannya	Sangat Berpengaruh

3.3.3.1.4 Warisan Budaya

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dibagi kepada dua, yaitu warisan budaya bendawi (tangible) dan tak benda (intangible). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), warisan budaya bendawi adalah yang dapat di sentuh dan dipakai. Warisan budaya tak benda adalah yang tidak dapat dipegang dan sifatnya dapat berlalu dan hilang seiring perkembangan zaman. Hampir semua desa di desa terdampak maupun desa terpengaruh kegiatan proyek memiliki warisan budayanya masing-masing baik warisan budaya bendawi dan tak benda.

Di Tanimbar, adat masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Masyarakat Tanimbar juga memiliki keterampilan turun-temurun yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tenun Ikat Tanimbar dikenal dari motif dan ciri khasnya serta untuk menjaga keasliannya, Tenun Ikat Tanimbar kini telah memiliki sertifikat. Tenun Ikat Tanimbar masih digunakan dalam upacara adat, pernikahan, acara pemerintahan bahkan oleh-oleh untuk tamu resmi yang datang ke daerah tersebut. Beberapa perempuan tua desa masih membuat tenun ikat yang kemudian dijual di kota Saumlaki atau kepada wisatawan. Para tetua khawatir akan kelanjutan ketrampilan menenun karena tidak ada lagi pemuda yang melakukannya.

Salah satu warisan budaya yang masih ada yaitu kain tenun. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, motif kain yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah 47 motif berbeda. Setiap motif memiliki ciri khas dan filosofi yang berbeda-beda pula, contohnya motif 'Lelumuku' yang umumnya ada di seluruh desa di Kepulauan Tanimbar. Motif 'Lelumuku' memiliki ciri khas berbentuk bunga anggrek berwarna putih yang diapit dengan beberapa harus berwarna kuning, merah, dan cokelat. Motif ini memiliki makna kecantikan, keagungan, dan keuletan dari seorang wanita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pembuatan tenun sudah mulai hilang karena adanya kain yang dibuat secara modern, sehingga keahlian menenun dari kapas menjadi kain tenun Tanimbar yang terkenal sudah mulai hilang bersamaan dengan hilangnya tumbuhan kapas. Walaupun demikian, masih ditemukan pekerjaan menenun di desa-desa terdampak maupun terpengaruh. Hal ini dikarenakan kain tenun merupakan materi adat yang sangat penting dalam acara ritual dan kegiatan adat maupun penyelesaian adat di seluruh Tanimbar. Semua keluarga memiliki kain tenun warisan dari orangtua atau neneknya. Ketika pengambilan data di Desa Olilit, ditemukan dua orang wanita Olilit yang sedang menenun di beranda rumah masing-masing. Motif-motif yang mereka tenun meliputi ulerati, tunsiar, sortenan, alus manis, dan tais matan. Motif tertentu diperuntukkan bagi ritual adat tertentu pula.

Warisan Budaya yang Berwujud (Tangible Culture)

Terdapat peninggalan budaya yang masih ada di Tanimbar, khususnya di pulau Yamdena dan menjadi Situs Arkeologi yang ikonik yaitu situs megalitik, natar, dan monument Kano Baru yang terdapat di desa Sangliat Dol, Wer Tamrian, sebelah utara bandara Mathilda Batlayeri. Monumen perahu ini berbentuk perahu kano terbuat dari batu masih utuh sebanyak dua buah, sedangkan satu buah perahu batu sudah tidak berbentuk lagi yang berada di desa Lorulung dan satu buah monumen perahu yang sudah hancur berada di desa Lermatang. Kemudian situs megalitik, Natar, Monumen Kano Batu terdapat di desa Arui bab. Nekara Dong Son, tipe 1 Heger di desa Arui Das. (Balai Arkeologi Nasional, 2019).



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-371 Perahu Batu di Desa Sangliat Dol



Sumber: Balai Arkeologi Ambon

Gambar III-372 Nekara Dongson di Desa Arui Das

Warisan Budaya yang Tidak Berwujud (Intangible Culture)

Secara umum orang Tanimbar mempunyai nilai budaya yang melekat dalam seluruh aspek kehidupan yang disebut dengan Duan dan Lolat. Nilai ini mewakili hubungan antara pengayom dan pendukung, satu memberikan dukungan dan satu lagi harus memberikan perhatian dan mengawasi serta mensejahterakan. Setiap individu mempunyai Duan dan Lolat, seorang individu sekaligus bertindak sebagai Duan dan Lolat. Istilah ini berangkat dari sistem perkawinan yang ada.

Seorang laki-laki yang hendak meminang anak perempuan dari sebuah keluarga maka laki-laki tersebut harus mendatangi rumah keluarga perempuan untuk mengutarakan maksudnya. Dalam pengutaraan maksudnya tersebut, si pemuda membawa sopi serta sumbatnya kepada keluarga si gadis, sumbatnya ini dimaksudkan untuk membeli makanan dalam berbicara dan juga pemberitahuan kepada keluarga si gadis. Dalam pembicaraan itu juga dicetuskan agar si pemuda boleh kembali lagi pada tanggal tertentu dengan membawa keluarganya. Setelah itu baru datang kembali dengan membawa Sopi dan 'sumbat' nya untuk meminang.

Sopi adalah minuman khas dari orang Tanimbar yang merupakan minuman keras yang terbuat dari fermentasi cairan dari pohon kelapa. Sebelum bunga kelapa mekar maka dari dalam bunga tersebut diambil tangkai calon buah kelapa lalu dipotong dan cairan yang keluar dari calon bunga kelapa tersebut ditampung dalam sebuah botol selama satu malaman. Besoknya air yang sudah tertampung di botol itu disuling atau di campur dengan air dan dimasak sampai uap air sulingan tersebut keluar dan ditampung di botol. Air sulingan itu atau hasil fermentasi disebut dengan sopi.

Sopi ini kemudian dibawa oleh laki-laki dengan sumpalnya. Sumbat istilah untuk tutup botol yang jaman dahulu adalah potongan kayu dibuat kecil sebesar tutup botol yang diselipkan di lubang di daun telinga perempuan untuk tutup botol sopi. Sekarang diganti dengan uang. Uang tersebut untuk membeli cincin, kain dan baju pernikahan, sambil disebutkan cincin seberat 2 atau 3 gram. Sejak itu maka si laki-laki disebut sebagai calon Lolat, setelah diterima maka laki-laki tersebut disebut sebagai Lolat dan keluarga dari perempuan disebut dengan Duan. Jadi keluarga pihak laki-laki disebut dengan Lolat dan keluarga perempuan disebut dengan Duan.

Uang yang diberikan dari calon Lolat kemudian diserahkan ke ibu calon istri (pihak perempuan), dan ibu dari calon istri akan mengumpulkan saudara-saudaranya (Duan dari ayah si calon istri) untuk membeli cincin, kemudian sebagian uang diberikan kepada ibu dari ayah si calon istri (neneknya

calon istri) yang merupakan Duan dari ayahnya ayah calon istri untuk dikumpulkan saudara-saudara dari Duan ayahnya ayah si calon istri untuk dibelikan kain, kemudian yang terakhir adalah uang diberikan kepada Duannya kakek dari ayah si calon perempuan untuk dibelikan baju pengantin.

Apabila si laki-laki merupakan suku bangsa lain atau orang luar, maka dia harus mencari ayah angkat orang setempat (bapak dekat). Bapak dekat ini menjadi kelompoknya atau marganya sehingga orang luar tersebut menjadi satu marga dan dapat menikah dengan orang setempat, begitu juga dengan penggarapan tanah di daerah tersebut. Jadi tetap berprinsip Duan dan Lolat.

Pencarian ayah angkat tentunya juga harus bertolak dari prinsip Duan dan Lolat, suku bangsa lain harus mencari ayah angkat terlebih dahulu dengan memberikan Sopi dan sumpalnya, kemudian ayah angkat memperkenalkan orang baru ini ke keluarganya satu persatu dan kemudian mendapatkan tanah untuk dilakukan mata pencaharian, dan tentu saja si anak angkat ini tidak bisa menikah dengan saudara angkat yang perempuan. Kalau hendak menikah maka dia harus mencari perempuan dari keluarga lain, dan ayah angkatnya akan menjadi juru bicara untuk pernikahan ini.

Kain tenun menjadi hal yang penting dalam masyarakat Tanimbar khususnya dalam perkawinan. Kain tenun juga menjadi ikon dari orang Tanimbar, pada masa lalu membuat kain tenun merupakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Benda Ikonik

A. Tenun Ikat

Sejarah

Tekstil Tenun Tanimbar awalnya muncul sebagai pakaian utama bagi penduduk setempat. Terbuat dari bahan alami yang ditemukan di sekitar mereka, itu adalah satu-satunya bentuk pakaian yang mereka miliki. Meskipun sulit untuk memetakan persis sejarah lengkap dari tekstil.





Gambar III-373 Kain Tenun Ikat Tangan Hasil Produksi Warga Desa Matakus Laki-laki

Di masa lalu, pakaian sehari-hari pria terdiri dari tekstil yang panjangnya 3 meter dan lebar 30 sentimeter yang disebut umpan atau umban di bagian-bagian tertentu pulau. Umpan digunakan untuk menutupi hanya bagian bawah tubuh yang dikenakan dengan membungkus tekstil di sekitar pinggang dan panggul seperti cawat yang kemudian diamankan meninggalkan kedua ujungnya menggantung di bagian depan dan belakang. umpan terbuat dari benang kapas yang dipintal dengan tangan dan serat dari daun pohon Koli (secara tradisional digunakan untuk membuat sopi).

Perempuan

Wanita secara tradisional mengenakan sarung Tenun Ikat yang dikenakan di pinggang dijatuhkan ke pergelangan kaki meninggalkan bagian atas tubuh telanjang. Sarung dikenakan dengan cara dililitkan di pinggang dan ujung-ujungnya dilipat ke luar dan kemudian diikat dengan sabuk rantai atau tali yang terbuat dari serat daun koli. Sementara dada telanjang dianggap normal, kesopanan wanita dipertahankan dengan menutupi kaki. Laki-laki harus menahan diri untuk tidak memandangi perempuan (yang bukan istri mereka) bahkan ketika mereka menyeberangi sungai karena mereka harus mengangkat sarung mereka di atas mata kaki; dikatakan bahwa jika seorang pria ketahuan melihat kaki wanita di atas mata kaki, mereka akan dihukum oleh keluarganya dengan didenda atau dipukuli. Definisi kesopanan berubah ketika kekristenan memasuki wilayah itu, melalui pengaruh misionaris, menjadi sederhana sekarang berarti menutupi tubuh perempuan dari leher ke bawah. Perkembangan ini menambahkan selendang sebagai bagian dari pakaian tradisional wanita yang dipakai untuk menutupi bagian atas tubuh. Pintu masuk misionaris kemudian memulai modernisasi pakaian tradisional Tanimbar.

Seiring berkembangnya waktu dan cara-cara berpakaian modern mulai mempengaruhi daerah melalui pedagang atau pejabat pemerintah, kain tenun tidak lagi dipakai sebagai pakaian sehari-hari, baik sarung kain maupun sarung tenun diselamatkan untuk acara-acara tertentu seperti ritual tradisional, keluarga dan acara-acara resmi.

Signifikansi dan Fungsi Budaya

Di seluruh Maluku, Tanimbar terkenal dengan tenun ikatnya, meskipun kesenian tersebut juga dipraktikkan di seluruh pulau selatan di barat daya Maluku. Populasinya yang besar dan peluang pemasaran terbaik membuat Yamdena memproduksi cukup banyak tenun ikat. Setelah penggunaan kain tenun ikat memudar, kain tenun ikat hanya digunakan untuk keperluan upacara, kain tenun ikat

saat ini digunakan untuk fungsi pemerintah daerah dan perayaan modern, sering kali dibuat menjadi potongan pakaian modern seperti jaket.

Tekstil Tenun ikat Tanimbar sekarang dikenal terutama karena signifikansi budayanya dan sebagai bagian dari identitas kawasan. Tekstil merupakan pusat bagi setiap bagian dari adat tradisional Tanimbar, khususnya dalam ritual masa peralihan dari pernikahan ke pemakaman atau lifecycle. Tekstil keDuanya digunakan sebagai bagian dari kostum tradisional seperti dalam tarian adat dan pernikahan; dan sebagai persembahan di antara anggota keluarga.

Selain pantainya yang indah dan menakjubkan, Matakus terkenal dengan tenun ikatnya yang rumit. Masyarakat Matakus, tua dan muda aktif memproduksi kain ikat untuk masyarakat Saumlaki dan terbuka bagi wisatawan untuk dibeli sebagai oleh-oleh. Pembuatan ikat telah menjadi sumber pendapatan bagi perempuan lokal di sini karena mereka sering menerima pesanan dalam jumlah besar. Produk kain ikat dijual dengan harga Rp 100.000 untuk 1,5 meter.

Duan-Lolat dan Tenun Ikat

Duan-Lolat, seperti yang dijelaskan dalam bagian profil budaya, adalah hierarki sosial yang mendefinisikan tradisi dan praktik budaya di Tanimbar. Untuk mengulangi, Duan lebih unggul dalam hierarki dan memainkan peran "pelindung" dan Lolat adalah bawahan yang memainkan peran pelayan dan pembela. Relevansi tekstil Tenun Ikat dalam dinamika ini melambangkan, melindungi, dan kenyamanan.

Karena peran Duan adalah untuk memastikan kesejahteraan Lolat mereka, mereka diwajibkan untuk menyajikan tekstil di setiap pertemuan keluarga atau acara. Contoh dari hal ini yang ada misalnya Upacara kelulusan seseorang di mana ia dihormati dan dirayakan oleh desa dan keluarganya. Baik Duan dan Lolat-nya hadir dan masing-masing Duan menghadiahkannya dengan kain Tenun Ikat untuk melambangkan perlindungan bagi tahap selanjutnya dalam kehidupannya sedangkan setiap Lolat menyajikan sopi atau uang untuk melambangkan kekuatan dan dukungan dalam perjalanannya. Contoh lain adalah Acara Bayar Harta, yang diterjemahkan secara kasar ke pembayaran mahar, dari keluarga pengantin pria ke keluarga pengantin wanita. Ritual ini bisa berlangsung lama tergantung pada berapa lama yang dibutuhkan keluarga Lolat (keluarga pengantin pria) untuk mengkompilasi barang (bisa bertahun-tahun dalam pernikahan). Upacara ini diselenggarakan oleh masing-masing Duan dari keluarga mempelai perempuan dan sebagai bagian dari ritual, Duan harus menyerahkan Ikat Tenun Tekstil kepada pengantin pria sebagai simbol tempat berteduh untuk perjalanan pernikahan mereka. Dalam setiap ritual, penyajian tenun Ikat adalah representasi perlindungan dalam memasuki setiap tahap kehidupan, bahkan sampai mati

Sementara tenun Ikat tetap menjadi pusat semua aspek tradisi Tanimbar, perannya sebagai ikon dan identitas kawasan berarti bahwa ia juga menonjol dalam aspek-aspek penting dari kehidupan modern. Kain telah menjadi signifikan dalam mempromosikan identitas regional dan simbol kebanggaan bagi Tanimbar di antara bagian-bagian lain di Indonesia.

Terpisah dari penggunaan tradisional yang bisaa, tenun ikat juga telah menjadi bagian dari acara keagamaan seperti Natal dan Paskah dan bahkan malam Tahun Baru karena setiap kesempatan bersifat sentris keluarga. Keterlibatan kain tradisional berarti adaptasi tradisi lokal untuk menghormati dan mengikuti ritual adat dengan acara-acara yang menjadi bagian dari masyarakat setelah masuknya pengaruh agama.

Selain hal-hal di atas, kain juga sudah mulai digunakan sebagai pakaian formal untuk acara-acara seperti pergi ke gereja, pernikahan, sekolah.

Sang Penenun

Tenun Ikat umumnya telah dikenal sebagai “pekerjaan perempuan” dengan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi dari ibu ke anak perempuan. Mulai dari usia muda, para wanita telah terkena tenun ikat dan telah tertanam dalam pikiran mereka bahwa itu adalah peran para wanita di rumah untuk memproduksi kain ini, dianggap tabu bagi laki-laki untuk menenun, zaman modern telah bergerak ke arah dorongan laki-laki untuk terlibat dalam proses tenun ikat yang mendukung istri mereka dengan mempelajari cara mewarnai dan mengatur benang tenun.

Sepanjang sejarah Tanimbar, diyakini bahwa setiap rumah tangga di seluruh pulau memiliki penenun, apakah itu ibu atau anak perempuan atau keduanya. Karena fungsi dasarnya sebagai pakaian sehari-hari, setiap wanita di rumah tangga bertanggung jawab menyediakannya untuk keluarganya, jadi itu adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki dan itu merupakan kontribusi utama wanita untuk rumah tangga.

Sekarang, karena masuknya pakaian modern, keterampilan ini tidak dianggap sebagai penting atau berharga lagi, sehingga beberapa desa di Pulau Yamdena memiliki rumah tangga tanpa penenun sama sekali. Di sisi lain, karena perkembangan ini, Tenun Ikat telah menjadi keterampilan artisanal yang hanya sedikit dimiliki. Akibatnya, ia telah mempengaruhi pertumbuhan Tenun Ikat sebagai industri rumah tangga dan membuatnya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, di mana perempuan dapat berkontribusi lebih banyak untuk rumah tangga mereka.

Pulau Selaru dikenal sebagai pusat industri Tenun Ikat dengan setiap perempuan dari semua generasi di pulau memiliki keterampilan. Kondisi ini bertahan sampai dengan masa sekarang dan dapat dipergunakan sebagai modal untuk produksi tenun Tanimbar.

Teknik, Peralatan dan Bahan

Sebuah kain tenun ikat diidentifikasi sebagai kain tenun yang dibuat menggunakan teknik pewarna untuk menciptakan pola dimana penenun mengikat desain pada susunan benang menggunakan tali atau tali sebelum merendamnya lalu pewarna warna, proses ini dapat dilakukan beberapa kali untuk buat desain dalam berbagai warna. Setelah dikeringkan, rangkaian ulir berpola diatur lagi di antara sisa benang yang bisaanya berjumlah hingga 1.500, atau 2.000 masing-masing ulir. Secara alami, tekstil tenun sangat rumit, bekerja dengan bahan-bahan halus dan membutuhkan disiplin dan kesabaran yang luar biasa.

Secara tradisional, tekstil ini dibuat menggunakan bahan organik yang ditemukan dari alam sekitar. Bahan baku alami sendiri harus melalui proses persiapan mereka sendiri yang akan mengambil, pada masa sekarang, pohon kapas sudah tidak ada lagi, dan di sebagian desa masih ada untuk keperluan sumbu lampu minyak tanah. Bahan kapas untuk membuat pintalan dalam membuat kain sudah tidak ada lagi dan ini juga disebabkan adanya benang yang sudah jadi di kota Saumlaki. Lama kelamaan tidak ada lagi orang-orang atau perempuan desa yang membuat kain tenun.

B. erajinan Kayu

Ukiran kayu berbentuk perahu

Simbol dan peran dari Tua Tua Adat

Dalam proses yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat tentu juga melibatkan adat istiadat dan akan mengundang dewan adat yang terdiri dari beberapa batu adat yang beranggotakan kepala kepala soa. Kepala soa adalah kepala dari kumpulan beberapa marga atau sering dikatakan sebagai pertuanan.

Struktur dewan adat ini disimbolkan dengan sebuah perahu di salah satu desa disebut dengan Fenamlampir mel, atau kamparesi di desa yang lain, ada juga yang menyebutnya dengan iraratu dan lainnya, setiap desa mempunyai istilah yang berbeda-beda dan yang jelas mempunyai fungsi yang sama.

Dalam perahu terdapat beberapa orang (istilah-istilah ini diambil dari salah satu desa penelitian) dengan fungsinya masing masing yaitu 1. Solilur atau Koreo adalah pemandu dalam fungsi perahu, dalam adat, pemandu ini bertugas sebagai jurubicara kepada masyarakat, dibelakang pemandu terdapat 2. Kuere/ kitu kuare atau kapten kapal, dan dalam adat bertindak sebagai pemimpin dewan adat dan dia ini bertugas untuk memikirkan dan memutuskan. Dibelakang Kuere terdapat dua orang yang disebut sebagai sebelah kanan 3. Mangatnyanu silai/mangsofape dan mangsuayat disebelah kiri yang keDuanya bertugas untuk mencari penyelesaian perkara baik dan buruk, dan di belakangnya terdapat 4. marumat yang bekerja sebagai bendahara dan diteruskan dengan 5 Mana suayat yang bekerja sebagai pembantu bendahara serta terakhir sebagai 6. Jurumudi atau Willen peran ini adalah yang mendorong kekuatan berjalannya sebuah kapal. Dewan adat ini menjadi tumpuan dari berjalannya kehidupan sosial masyarakat Tanimbar.

Gambaran tentang dewan adat ini terlihat sebagai sebuah perahu dalam desa, seperti yang digambarkan dalam peninggalan masyarakat Tanimbar di daerah Sangliat Dol yaitu peninggalan perahu besar berupa tumpukan batu berbentuk perahu berada di halaman desa dengan batu-batu adatnya. Tampaknya dewan adat ini berada di Natar Saulun atau alun-alun desa apabila mengadakan upacara desa yang digambarkan dengan duduknya para tetua adat di dalam perahu dari batu (pada masa lalu).

Orang-orang Tanimbar di daerah-daerah yang diteliti menggunakan istilah para tua-tua adat duduk dalam batu-batu adat yang sudah tersedia di latar di muka desa, dan ini persis dengan letak dari monument perahu batu yang ditemukan di daerah atau Desa Sangliat Dol sebagai temuan arkeologi yang ikonik.

Selain tenun kain sebagai ikon, juga adanya ukiran dari kayu yang juga lambang dari adat, khususnya ukiran perahu dengan penumpangnya yang menggambarkan fungsi-fungsi peran dari orang-orang yang ada dalam perahu, dan juga beberapa desa membuat ukiran kayu selain dari perahu, seperti bentuk orang sedang pergi berburu, menyusui, dan lainnya. Jadi tidak melalui ukiran perahu. Bahkan ada juga yang membuat ikat pinggang dari kayu hitam

Masyarakat Adat (Indigenous People)

Masyarakat adat atau Sukubangsa bila dilihat dari definisinya dapat dipahami sebagai sekelompok manusia atau golongan sosial yang hidup di daerah tertentu, mempunyai sejarah asal mula yang sama dan dikuatkan oleh mitologi keberadaan sebagai identitas asal mula keberadaan sukubangsa tersebut dan wilayahnya. Mitos tentang masyarakat adat, suku atau sukubangsa didalamnya terdapat aturan dan norma adat kebiasaan yang turun temurun tersendiri yang berbeda dengan masyarakat adat lain. Masyarakat adat mempunyai Bahasa tersendiri serta sistem kekerabatan

tertentu yang membedakannya dengan sistem kekerabatan masyarakat adat lain. Masyarakat adat bisa terdiri dari beberapa sub suku atau kelompok masyarakat adat dalam satu wilayah yang besar. Perbedaannya tidak terlalu mencolok, misalnya perbedaan dialek, dan tergantung pada bentuk lingkungan alamnya, (fredrik Barth, 1969) misalnya orang Tanimbar yang berada di dalam pulau dengan mata pencaharian berladang bakar berbeda dengan orang tanimbar yang berada di pantai dengan mata pencaharian nelayan.

Masyarakat adat atau sukubangsa yang hidup di Pulau Yamdena dapat dikatakan ada beberapa masyarakat adat dan sukubangsa selain Tanimbar adalah sukubangsa masyarakat adat dari luar tanimbar yang ‘menjadi’ orang Tanimbar dengan cara beradaptasi budaya (duan dan Lolat). Pada dasarnya masyarakat adat yang hidup di Tanimbar adalah masyarakat adat Tanimbar sehingga bersifat homogen.

Di daerah kepulauan Tanimbar, secara suku bangsa memang di dominasi oleh orang Tanimbar atau disebut dengan orang asli Tanimbar, dengan adatnya Duan dan Lolat. Adat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbeda-beda penggunaannya dan bahkan ada yang berubah di beberapa desa penelitian. Secara mitologi, berdasarkan dari ceritera-ceritera orang Tanimbar sendiri, mereka berasal dari daerah Seram di sekitar Gunung Sembilan. Kata “Tanimbar” berasal dari kata Tanempar dalam bahasa Yamdena Timur (Nustimur) atau Tnebar dalam bahasa Fordata, yang berarti “Terdampar”. Orang-orang ini mendarat di daerah kepulauan Tanimbar dan berpencaran, dan menurut daerah masing-masing dianggap daerah pertama mendarat selebihnya menyebar ke desa-desa lain. Masing-masing desa menganggap bahwa daerahnya merupakan singgahan pertama dari orang yang datang dari gunung Sembilan ini.

Kemudian setelah singgah disatu tempat, mendarat lagi orang-orang dari Gunung Sembilan di daerah tersebut kemudian di usir oleh orang yang pertama mendarat dengan sistem peperangan antar kelompok. Begitu seterusnya sampai mereka menyebar ke selatan ke daerah pulau Yamdena.

Apabila berdasarkan dari pola hidup yang ada, tentunya orang Tanimbar (suku bangsa Tanimbar) ini bervariasi pola hidupnya, khususnya yang berlokasi di dekat kota Saumlaki, masyarakat banyak bekerja di industri jasa perkantoran Pemda dan swasta, perdagangan dan juga nelayan. Sedangkan di desa-desa yang bukan di perkotaan banyak bekerja sebagai peladang, nelayan dan berjualan di pasar, sedangkan di daerah-daerah pedesaan jauh dari perkotaan mata pencaharian berladang dan nelayan. Sedangkan adat istiadatnya yang bertumpu pada Duan dan Lolat banyak yang ditinggalkan dan memilih untuk menggunakan adat secara nasional (formal) desa, terutama dalam kepemilikan. Sedangkan dalam penggunaan adat istiadat yang masih digunakan sampai sekarang dengan sistem Duan dan Lolat pada seluruh aktivitas hanya dapat terlihat di desa Latdalam yang masih memegang teguh adat istiadatnya.

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Lermatang

Pada Desa Lermatang terdapat warisan budaya bendawi dan tak benda yang dapat ditemukan di desa ini. Warisan budaya bendawi yang ada di Desa Lermatang, antara lain batu adat milik keluarga Nusmese yang memegang jabatan adat sebagai mangsompe. Keluarga ini juga memiliki benda adat berupa emas berbentuk penyu yang dinamakan Lempitfeni yang dipakai mangsompe dalam upacara pembersihan atau “cuci air” sumur Wetutune. Sementara warisan budaya tak benda yaitu tarian

‘Tore’ yang merupakan tarian khas yang ditampilkan untuk menyambut tamu penting. Warisan tak benda lainnya adalah keahlian mendendangkan foruk yang berupa pantun berirama.



Sumber: INPEX Masela Biological Baseline, Environmental and Social Baseline: Volume IV 2014

Gambar III-374 Batu Adat Keluarga Nusmese

Mata pencaharian masyarakat adalah menangkap ikan di laut dengan cara membuat sero batu dan juga dengan menggunakan panah ikan dengan cara menyelam dan memanah ikan serta menggunakan jaring gantung dengan lokasi yang agak jauh dari pinggir pantai. Kegiatan menangkap ikan dapat dikatakan sebagai kegiatan sehari-hari dan pada dasarnya tidak tergantung pada angin barat atau apapun. Hal ini disebabkan mereka menangkap tidak terlalu jauh dari pantai. Sehingga ketika bukan musim angin barat pantai sangat dangkal dan beberapa hewan laut dapat dijadikan sasaran seperti timun laut (teripang).

Masyarakat masih memegang adat istiadat yang dianutnya seperti Duan dan Lolat hanya di persoalan perkawinan saja dan ada juga digunakan dalam proses kematian tetapi bisaanya dengan mengacu pada agama Kristen, tetapi pada dasarnya penduduknya sudah bervariasi antar kampung. Proses ini melibatkan orang seluruh desa sehingga keterlibatan dari para ketua adat atau kepala soa diperlukan, dan ada juga yang menyerahkan proses ini pada kepala soanya saja sehingga tidak melibatkan orang sedesa. Dapat dikatakan bahwa aktivitas sehari-hari yang bisaanya pada masa lalu dilakukan secara adat karena melibatkan orang sedesa, menjadi tidak lagi dilakukan karena mengandalkan keluarga soa saja.

Dalam sistem yang melibatkan kekerabatan, masalah sosialisasi adat istiadat dinyatakan terhambat oleh adanya Bahasa Indonesia, khususnya dalam hal pantun bersambut yang ada dalam masyarakat pada upacara perkawinan, orang tua tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya atau generasi penerus karena anak-anak membalasnya dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa setempat bahasa Yamdena, sedangkan Bahasa asli pasti akan muncul dalam upacara perkawinan atau upacara upacara lainnya seperti upacara kematian atau menyambut tamu yang dari jauh dan dari luar masyarakat desa.

Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah sistem patrilineal, dengan pewarisan marga jatuh kepada laki-laki dan pengolahan tanah juga ke tanah pihak laki-laki (Lolat). Sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan bisa jadi keluarga tersebut tidak akan pernah menjadi Duan.

Generasi penerus bisaanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan orang tuanya disatu pihak dan dalam pihak lain orang tuanya juga mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan adat istiadat yang berlaku, bahkan orang tuanya juga lebih cenderung bersifat pribadi saja.

Dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan adanya alat tenun dan alat pintal yang dipunyai oleh seorang yang sudah tua dan sekarang alat tersebut tidak dipergunakan lagi dan generasi penerus tidak dapat menggunakan alat tersebut. Alat pintal benang sudah lama tidak dipergunakan lagi karena benang mudah didapat dan pohon kapas sudah tidak ada lagi. Sehingga untuk keperluan adat seperti dalam perkawinan, kain tenun diperoleh dari membeli di kota Saumlaki. Ada alat pintal dan tenun tetapi tidak lagi dapat dipergunakan karena tidak ada orang yang dapat membuatnya juga tidak ada pohon kapas sebagai bahan dasar membuat benang tenun.

Mata pencaharian lainnya adalah menggarap lahan dengan cara membakar dan tadah hujan, kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki oleh Soa, dan anggota soa dapat memiliki lahan serta dia dapat memperjual belikan lahan tersebut kepada orang lain asal disertai dengan surat dari desa.

Adat tidak menjadi ukuran untuk kepemilikan lahan, karena lahan dimiliki oleh para soa dan juga pribadi, sehingga dengan demikian pribadi-pribadi dapat memiliki lahan yang pada awalnya pribadi-pribadi hanya mempunyai hak menggarap. Akibat lanjutannya adalah bahwa lahan dapat dimiliki oleh orang dari luar desa seperti para pendatang yang dapat membeli tanah dari pribadi orang Lermatang.

Batas laut pada dasarnya tidak menjadi masalah, siapapun dapat mencari ikan di wilayah Lermatang khususnya batas laut yang dilanggar oleh orang dari desa tetangga tidak menjadi masalah. Batas laut yang ditunjukkan oleh informan adalah sebuah tanjung yang kemudian juga tanjung pada sisi lainnya di sebelah yang berlawanan.

Untuk menangkap ikan di daerah desa tetangga sebenarnya perlu ijin dari kepala desa untuk mencari ikan di wilayah lain tetapi sering dilanggar karena adanya hubungan kerabat dengan desa tetangga. Persoalan juridis formal dapat diatasi dengan adanya hubungan kerabat, sehingga tidak akan pernah terjadi pencurian hasil laut oleh penduduk desa lain. Hanya ada kejadian yang melibatkan orang luar yang mengambil hasil laut dari pantai di desa tersebut dan kebanyakan berasal dari wilayah lain yang berbeda sukubangsa. Cara mengatasinya bisaanya dengan melibatkan aparat desa.

Masyarakat juga melakukan cocok tanam di ladang dengan sistem ladang berpindah. Kepemilikan lahan dapat dilakukan secara pribadi-pribadi dan dapat diperjual belikan dengan sistem formal atau melalui kepala desa dan tidak melalui adat. Keberadaan adat hanya ada dalam sistem perkawinan.

Di desa ini tidak ada penduduk yang menunjukkan perbedaan tingkah laku selain penduduk desa yang bersangkutan dan penduduk menunjuk penduduk asli adalah penduduk desa Makatian dengan bahasa Makatiannya yang hanya digunakan di desa Makatian, alasan yang jelas adalah bahasa Makatian sangat sulit untuk dipelajari.

Bomaki

Di Desa Bomaki, terdapat warisan budaya bendawi berupa hiasan perkawinan seperti anting (lelbutir), kalung dan hiasan kepala peninggalan zaman dulu yang terbuat dari perunggu yang disimpan oleh salah satu tokoh adat setempat. Namun perhiasan ini sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkawinan dan sudah banyak peninggalan yang hilang walaupun beberapa keluarga masih menyimpan peninggalan perhiasan ini dari orangtuanya.

Pakaian adat pada upacara perkawinan tidak banyak dipertontonkan lagi dikarenakan pembuat tenun di Desa Bomaki sudah tidak ada lagi. Pemintalan benang sebagai bahan baku tenun juga tidak lagi dilakukan karena keterbatasan bahan baku kapas dan sudah ada benang pabrikan dari Saumlaki. Saat ini kebutuhan tenun untuk upacara adat dipenuhi dengan membeli tenun jadi di Saumlaki.

Desa Bomaki memiliki tarian sebagai warisan budaya tak benda yang menjadi ciri khas yaitu 'Tarian Angkosfian'. Tarian ini dibawakan di pusat desa ketika ada acaranya penting seperti menerima tamu agung/pejabat, pentasbisan imam baru, dan pelantikan kades.

Selain tarian, masyarakat Desa Bomaki juga memiliki tradisi bertutur kepada anak, terutama tentang silsilah keluarga serta posisi Duan Lolat yang penting untuk mencegah perkawinan sumbang (kawin salah). Karena perkawinan salah ini akan menyebabkan tidak memiliki keturunan, anak atau si pelanggar sakit hingga menyebabkan kematian, dan hal buruk lainnya. Perkawinan salah ini akan berpengaruh pada ketidakseimbangan hubungan antar kelompok Duan Lolat.

Aturan adat tentang perkawinan masih tetap dipertahankan, begitu juga dengan adat menggarap tanah. Tetapi pada masa sekarang orang luar bisa mengolah lahan dengan menggunakan pendekatan surat formal desa (membeli bukan secara adat). Walaupun mengikuti adat tetapi kepala Soa dapat memberikan tanah kepada orang lain tanpa menggunakan arahan dewan adat dan dapat melakukan jual beli secara langsung. Adat mengikuti aturan nasional atau daerah melalui kepala desa dan dilakukan kesepakatan untuk sebelum sampai kepada desa harus masuk ke adat terlebih dahulu, tetapi masing-masing warga atau Soa berjalan sendiri sendiri. Sehingga lama kelamaan tanah dapat dikerjakan oleh orang luar desa. Sebenarnya tanah adalah milik adat (soa) tetapi soa sendiri yang bisa menjualnya tanpa meminta pengarahan dari dewan adat.

Pembuatan kain tenun sudah tidak dilakukan lagi, walaupun masyarakat dan dewan adat tahu bahwa kain tenun merupakan hal yang harus dibuat oleh kaum perempuan, tetapi sekarang cukup membeli saja. Dahulu ada pembuat kain tenun di desa tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena bisa membelinya. Dahulu masih banyak pohon kapas sebagai bahan untuk memintal menjadi benang tetapi karena hasilnya terlalu lama dan tersedianya benang pabrikan di Saumlaki, maka cukup membeli saja, sehingga orang tua yang bisaanya pembuat tenun tidak bertenun lagi. Pakaian adat khususnya dalam system perkawinan tidak banyak dipertontonkan lagi dan bahkan alat untuk hiasan perkawinan sudah banyak yang hilang, ada seorang ketua adat (pak Felis) hanya mempunyai satu anting satu kalung mempelai perempuan peninggalan zaman dahulu terbuat dari perunggu, yang sekarang tidak dipergunakan lagi.

Pengetahuan tentang fungsi adat pada dasarnya ada dan bisa diterapkan dan semua warga tahu adat istiadat yang berlaku, tetapi karena lebih kepada individual maka, sering anggota masyarakatnya mengerjakan adatnya sencara pribadi-pribadi dan meninggalkan kebersamaan. Begitu juga dengan penjualan lahan kepada orang luar desa, desa memfasilitasi kepemilikan lahan

secara perorangan, padahal dahulu kepemilikan lahan adalah pada Soa soa saja dan hak guna penggarapan ada pada anggota Soa.

Di desa ini terdapat sekelompok hutan yang dianggap keramat karena dulu merupakan daerah pertama nenek moyang masyarakat duduk untuk membuat permukiman, daerah tersebut tidak pernah dipergunakan atau diusahakan oleh anggota masyarakat.

Masyarakat bermata pencaharian mencari ikan di laut dan hasil udang yang diperoleh dari desa ini merupakan udang yang baik kualitasnya, sehingga dari desa ini udang menjadi salah satu primadona yang dibeli oleh para pendatang untuk menjualnya lagi ke kota. Selain dari mencari ikan di laut yang tidak tergantung pada musim tertentu, masyarakat juga menggarap ladang dengan sistem berpindah dan membakar.

Di desa ini terdapat sebuah areal hutan yang dikatakan sebagai hutan larangan, larangan karena dianggap di hutan tersebut nenek moyang penduduk desa duduk berlepas lelah karena perjalanan yang jauh. Hutan yang dianggap hutan larangan ini merupakan hutan bisaa saja dan tidak ada upacara tertentu untuk meritualkannya, tampaknya hanya sebatas pengetahuan saja agar masyarakat tidak mengolah hutan yang ada di situ.

Pada musim tanam, bisaanya ketika musim hujan yaitu pada bulan oktober dan November orang mulai menanam jagung, kumbili, ubi dan kasbi serta beras merah. Kasbi menjadi primadona hasil umbi-umbian dari desa ini yang bisaanya kasbi dijual di pinggir jalan dan pembeli datang dari Saumlaki dan daerah lain.

Daerah Bomaki ini sering terlihat buaya yang berjalan dari daerah hulu sungai agak ke dalam hutan, dan menurut beberapa informan, buaya tersebut pernah juga memangsa penduduk dan akhirnya dibunuh oleh anggota angkatan laut republik Indonesia. Dengan adanya berita itu maka daerah ini juga ditetapkan sebagai daerah terdapat buaya.

Pendatang dari daerah lain, khususnya dari daerah luar Tanimbar banyak juga berdatangan ke desa ini dengan cara seperti yang dilakukan di desa-desa lain yaitu mengikuti adat istiadat untuk menggarap lahan dengan mencari bapak angkat (bapak dekat) dengan memberikan sopi beserta sumbatnya. Dengan demikian maka pendatang tersebut sudah menjadi anggota kerabat dari penduduk desa dan bisa menggarap lahan yang diberikan, dengan adanya sistem pemerintakan desa dengan memberikan sertifikat lahan maka banyak anggota masyarakat yang mensertifikasikan kepemilikan lahan garapannya yang pada dasarnya merupakan tanah Soa.

Penduduk yang berbeda atau bertingkah laku berbeda hanyalah orang dari luar sedangkan bagi masyarakat Tanimbar sendiri tidak ada yang berbeda tingkah lakunya dan juga kebisaaannya antara satu orang Tanimbar dari desa yang berbeda dengan orang Tanimbar lainnya, hanya orang desa Makatian yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan masyarakat Tanimbar lainnya, dan hanya desa Makatian tersebut yang menggunakan bahasa sendiri yang membedakan dengan desa-desa lainnya sesama orang Tanimbar.

Latdalam

Di Desa Latdalam, masih ditemukan pembuatan tenun ikat. Pembuatan tenun ikat masih dilakukan oleh generasi muda perempuan Desa Latdalam walaupun pemintalan kapas sudah tidak ditemukan lagi karena masyarakat membeli benang di pasar. Tenun ikat ini menjadi warisan budaya bendawi yang masih dapat ditemui di Desa Latdalam. Keluarga-keluarga tertentu juga masih menyimpan

benda-benda perhiasan. Pada sebuah rumah di Latdalam ditemukan juga gading gajah (lele) yang dahulu merupakan harta adat penting dalam perkawinan maupun pembayaran denda adat. Selain warisan budaya bendawi, terdapat pula warisan budaya tak benda seperti tarian adat, nyanyian, dan tradisi bertutur kata kepada anak-anak.

Setiap tanggal 5 Oktober, terdapat acara komunal di pusat Desa Latdalam untuk merayakan hari ulang tahun desa. Para pemegang posisi adat dalam perahu hadir dalam posisinya masing-masing di Natar (alun-alun desa) dan dikelilingi oleh masyarakat. Pada acara ini ditampilkan tarian adat 'Nabar' dan nyanyian adat 'Foruk' yang dinyanyikan dalam bahasa lokal. Tarian adat dan nyanyian adat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Latdalam pada waktu tertentu.

Di Desa Latdalam juga terdapat permainan rakyat yang dilakukan oleh anak-anak, seperti main tali, Gici-gici, Kuti karet, dan permainan buah Kaplili yang masih sering dimainkan.

Seperti halnya di Desa Bomaki, Desa Latdalam juga memiliki tradisi bertutur kepada anak-anak, terutama tentang silsilah keluarga serta posisi Duan dan Lolat tetap dilakukan hingga kini, terutama untuk mencegah perkawinan sumbang (kawin salah) karena posisi adat yang salah.

Seperti halnya di Desa Bomaki, Desa Latdalam juga memiliki tradisi bertutur kepada anak-anak, terutama tentang silsilah keluarga serta posisi duan dan lolat tetap dilakukan hingga kini, terutama untuk mencegah perkawinan sumbang (kawin salah) karena posisi adat yang salah.

Penduduk di desa ini sudah banyak yang bercampur, bahkan dengan sukubangsa lain dari luar pulau seperti orang Bugis, Buton dan selayar. Pada umumnya yang datang ke desa ini adalah laki-laki dan menikah dengan perempuan desa ini sehingga mereka mendapatkan lahan dan bercocok tanam seperti halnya orang asli di desa ini. Penduduk juga pernah pergi ke daerah lain di luar desa dan bahkan di luar propinsi, seperti ke Surabaya, ke Makasar, ke Toli-toli.

Dapat dikatakan penduduk desa mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Tetapi dalam hal ikatan terhadap penduduk lain dalam satu desa tetap menggunakan adat istiadat setempat atau adat istiadat Latdalam, yang telah dipakai sebagai acuan dalam bertindak dan bertingkah laku sejak dahulu kala, dan bahkan dapat dikatakan tidak mengalami perubahan. Aturan pemerintah daerah yang diwakilkan kepada kepala desa tetap harus memperhitungkan dewan adat atau batu-batu adat.

Persoalan adat yang menyangkut dewan adat tidak hanya terbatas pada sistem perkawinan saja akan tetapi juga sistem kematian, pemanfaatan lahan yang selama hidup menjadi tanah adat dan penggarap hanya mendapat hak pakai saja. Kepemilikan lahan adalah kepemilikan adat tidak ada kepemilikan tanah secara pribadi

Ketika orang luar desa ingin memperoleh tanah memang cukup mencari bapak angkat atau bapak dekat yang pada gilirannya bisa mendapatkan bagian tanah untuk diolah sebagai hak pakai. Sedangkan sanak keluarga pendatang tersebut apabila hendak mendapatkan lahan akan juga melakukan hal yang sama, sehingga tetap proses tersebut akan mengikuti adat istiadat.

Pembuatan tenun ikat masih dilakukan sampai sekarang dan bahkan sampai generasi mudapun khusus perempuan dapat melakukan kegiatan ini (membuat tenun ikat). Hanya saja pemintalan kapas tidak dilakukan, walaupun ada tanaman kapas di sekitar desa. Pemintalan kapas untuk membuat tenun tidak dilakukan karena benang sudah dapat diperoleh dengan cara membeli.

Dalam bidang keagamaan, memang banyak penduduk beragama Katolik, sedangkan yang beragama Islam pada umumnya adalah orang dari luar Tanimbar, seperti dari Bugis, Buton dan lainnya. Ada juga penduduk asli yang beragama Islam karena ikut dengan suaminya yang beragama Islam. Di desa terdapat penduduk asli yang beragama Islam artinya ikut dengan suaminya beragama Islam tetapi masih memegang adat Tanimbar. Penduduk yang beragama Islam ini ada sekitar 20 orang.

Selain bercocok tanam di ladang tadah hujan dengan sistem ladang bakar, masyarakat desa juga berusaha dengan menangkap ikan di laut untuk kebutuhan sehari-hari, alat yang digunakan sangat bervariasi dari mulai alat pancing, juga ada sero sebagai peninggalan nenek moyang adalah sero batu, dan sekarang sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan sero bambu, bahkan sero juga sudah banyak ditinggalkan. Jala ikan banyak digunakan dan juga alat tembak dengan menembak ikan secara menyelam di malam hari dengan dibekali lampu senter dan kaca mata untuk menyelam.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Tanimbar untuk desa Latdalam pada umumnya bersifat keluarga luas yang diidentifikasi dengan nama marga yang mengikuti garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Dalam prinsip penghormatan bagi keluarga besar adalah sangat menghormati perempuan, apabila sebuah keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka tidak akan mungkin keluarga tersebut menjadi Duan dalam masyarakat. Pewarisan akan tanah mengikuti garis keturunan laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan akan mengikuti suaminya (laki-laki).

Desa Latdalam mempunyai sumber air tawar yang disakralkan sebanyak empat buah sumber air (Wertoleli), bisaanya dilakukan upacara adat pada setiap tahunnya pada ulang tahun desa tanggal 5 oktober. Mata air tersebut dulu pernah digunakan untuk membuat air minum penduduk dengan mengalirkannya kerumah-rumah dengan memakai mesin penarik air sumur dan pipa yang disalurkan ke tempat yang lebih tinggi dan disalurkan ke rumah-rumah, tetapi sejak setahun mesinnya rusak dan belum diperbaiki lagi.

Matakus

Di Desa Matakus terdapat beberapa warisan budaya bendawi maupun tak benda. Warisan budaya bendawi yang dapat ditemukan di Desa Matakus adalah tenun. Pembuatan tenun dilakukan oleh para perempuan Desa Matakus yang hasil dari tenun ini dibuat untuk perlengkapan adat seperti pakaian adat ataupun untuk dijual.

Desa Matakus memiliki beberapa warisan budaya tak benda seperti tari 'Angkosi' yang ditampilkan pada saat menyambut orang penting atau acara adat lainnya dan lagu 'Marlolin'. Selain itu, di Desa Matakus terdapat beberapa acara yang sudah dilakukan secara turun temurun seperti berikut ini:

1) Nabar

Nabar merupakan acara adat untuk mengantar pemuda 'masuk' atau menjadi bagian dari desa tersebut. Acara yang diadakan setiap dua tahun sekali ini mengharuskan pemuda yang akan menjadi bagian desa menggunakan pakaian putih dan sepatu putih. Proses dari acara adat ini yaitu membuat lingkaran dengan pemuda tersebut berada di tengahnya, setelah itu diadakan doa adat dan sumpah adat. Setelah disumpah secara adat, pemuda yang akan 'masuk' akan dicarikan orang tua angkat di desa tersebut, lalu kemudian ketua adat membuat pengukuhan akan pemuda tersebut sudah menjadi bagian dari desa.

2) Doa minta hujan

Jika kemarau melanda di Desa Matakus dalam jangka waktu yang panjang, terdapat tradisi doa minta hujan dengan memotong babi yang di letakkan di atas batu kayu lalu meminta restu orang-orang tua supaya hujan segera turun. Acara ini diadakan di alun-alun desa oleh ketua-ketua adat dan didoakan secara adat. Hasil dari pemotongan babi tersebut hanya bisa dimakan oleh orang-orang tertentu saja seperti kepala dan tetua adat. Selain minta hujan, tradisi ini juga untuk menembus kesalahan orang-orang yang ada di pulau ini.

3) Tabiring Muda

Acara ‘Tabiring Muda’ merupakan acara pengukuhan secara adat seorang laki-laki yang telah menginjak dewasa atau telah menjadi pemuda. Acara ini dihadiri oleh seluruh masyarakat desa.

Lorulun

Desa Lorulun masih menyimpan berbagai warisan budaya bendawi yang tersimpan rapi di dalam rumah adat seperti busur untuk memanah, gading gajah purba, tempat air, tempat untuk menyimpan barang seperti tas, penghargaan olahraga, dan lainnya. Selain itu masih dapat ditemukan masyarakat yang menenun yang hasil tenunnya digunakan sebagai alat untuk perkawinan. Tenunan yang ada bahan-bahan dasarnya (benang) dibeli di kota Saumlaki. Terdapat pula produksi kerajinan ukiran kayu hitam yang dibuat tali pinggang khas Tanimbar atau Maluku. Sedangkan untuk kerajinan kayu merupakan hasil ukiran sendiri dengan menggunakan bahan dasar kayu hitam yang masih terdapat di dalam hutan sekitar Lorulun. Sedangkan warisan budaya tak benda berupa tarian dan foruk. Tarian Tanimbar masih dilakukan dalam acara-acara adat.

Seluruh tanah atau areal desa merupakan tanah adat yang dimiliki oleh para Soa, dan anggota Soa dapat mengerjakannya berdasarkan pada pembagian dari kepala Soa. Adat yang dipegang seperti umumnya masyarakat Tanimbar yang memegang adatnya sebagai Duan dan Lolat menjadi sangat dipegang teguh khususnya pada sistem perkawinan. Tetapi dalam kepemilikan tanah pada masa sekarang banyak dimiliki oleh penduduk secara pribadi dan bukan oleh masing-masing Soa, di satu pihak ada yang masih dimiliki oleh Soa secara adat sehingga pembukaan lahan akan menggunakan adat yang berlaku, di pihak lain adanya surat resmi kepemilikan lahan yang disahkan oleh desa.

Persoalan-persoalan desa biasanya dibicarakan di kantor desa di aula milik desa, sedangkan masalah adat istiadat dilakukan rembug adat di rumah adat yang terletak di tengah desa dengan bentuk rumahnya yang berbeda dengan rumah penduduk. Persoalan desa menyangkut masalah konflik lahan dengan anggota Soa tetangga, dan bisaanya dapat diselesaikan dengan antar Soa, dan apabila dirasa belum tuntas maka dibawa ke rapat dewan adat di rumah ‘adat’.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-375 Rumah Adat Desa Lorulun

Sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan laki-laki atau patrilineal, istri atau perempuan ikut dalam kehidupan dari kelompok marga laki-laki. Tetapi seperti halnya penduduk tanimbar, perempuan menjadi sebuah primadona. Untuk menjadi Duan, maka sebuah keluarga harus mempunyai anak perempuan. Adat ini sangat kuat mempengaruhi kehidupan lainnya, seperti penggarapan lahan. Orang luar atau pendatang yang berasal dari sukubangsa yang berbeda dapat mengerjakan lahan di daerah ini dengan terlebih dahulu menjadi salah satu marga dari penduduk setempat, biasanya seorang laki-laki pendatang akan berusaha untuk mendekati salah seorang warga, apabila warga tersebut agak tua, maka si pendatang tersebut akan mengangkat dirinya sebagai anak dari penduduk (bapak dekat), dengan upacara minum sopi serta sumbatnya (uang beberapa ribu rupiah biasanya 150.000 rupiah) maka ia dapat menjadi anak angkat. Lalu penduduk yang diangkat sebagai ayah angkat akan memperkenalkan pendatang ini kepada anak-anaknya yang lain sebagai saudara angkat. Tetapi dia tidak bisa mengawini anak perempuan dari bapak dekatnya karena sudah semarga. Dengan diangkatnya pendatang ini menjadi warga desa setempat dengan soa tertentu maka dia dapat mengolah lahan dari soa tersebut.

Lama kelamaan proses ini menjadi pudar, karena tanah pada dasarnya diberikan sertifikat sehingga menjadi milik pribadi dan akhirnya tanah dapat diperjual belikan kepada orang lain bahkan kepada sukubangsa lain tanpa harus melalui upacara adat lagi karena membeli tanah dengan sertifikat yang sudah nama pribadi.

Kegiatan mengolah lahan dilakukan di daerah perbukitan dengan sistem tadah hujan dan lading pindah dengan teknik membakar. Setelah musim hujan barulah penduduk mengolah lahannya dengan bercocok tanam menanam jenis umbi-umbian dan bahkan ada juga menanam kacang serta padi merah. Untuk kegiatan mata pencaharian lainnya adalah mencari ikan di pantai yang memang menjadi lingkungan alam penduduk setempat.

Di desa ini masih ada tenunan yang dipergunakan bagi alat untuk perkawinan dan ada juga sekedar memiliki, produksi kerajinan kayu ukiran kayu hitam yang dibuat tali pinggang yang khas tanimbar atau Maluku. Tenunan yang ada bahan-bahan dasarnya (benang) dibeli di kota Saumlaki. Sedangkan untuk kerajinan kayu merupakan hasil ukiran sendiri dengan menggunakan bahan dasar kayu hitam yang masih terdapat di dalam hutan sekitar Lorulun. Mata pencaharian masyarakat seperti layaknya desa-desa sekitarnya banyak menjadi nelayan di laut atau dipantai dengan menangkap ikan-ikan karang dan juga timun laut, teripang.

Sebagian masyarakat bercocok tanam di ladang-ladang kering dengan penguasaan dari adat desa. Kepemilikan lahan pada dasarnya adalah kepemilikan soa dengan beberapa marga yang ada di dalamnya. Anggota marga dapat mengolah lahan sesukanya asal masih dalam wilayah soanya, tetapi lambat laun tanah menjadi milik pribadi dan dapat diperjual belikan.

Beberapa permintaan dari masyarakat desa untuk membangun desa ini dari INPEX adalah salah satunya membuat penerangan jalan bagi desa dan juga membuat irigasi serta air untuk kebutuhan rumah tangga, air untuk irigasi dapat dilanjutkan karena sudah ada bendungan yang ada di salah satu sudut desa dan hanya saja bendungan tersebut sudah penuh dengan lumpur dan tanah sehingga memerlukan penggalian kembali agar supaya dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga dapat diusahakan untuk mencari mata air di dalam hutan yang terletak di bukit sehingga dicari mata airnya untuk minum.

Tumbur

Salah satu warisan budaya yang diturunkan turun temurun di Desa Tumbur adalah pahatan kayu. Desa Tumbur memiliki patung kayu dengan motif perahu dan motif budaya seperti pahatan berbentuk manusia yang sedang memikul bakul, memikul beban, dan memikul tombak. Kayu yang terbaik digunakan adalah Kayu arang atau kayu hitam (ebony) yang berasal dari hutan Desa Tumbur. Namun pahatan kayu pada masa sekarang tidak bermakna lagi. Dulunya ukiran perahu dengan beberapa orang dalam perahu memiliki makna dan termasuk adat dari orang Tanimbar. Kerajinan kayu ini diusahakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pembuatnya masih berusia muda. Kementerian Pariwisata sudah membentuk organisasi yang menjadi wadah bagi para pengrajin untuk melakukan pameran ukiran Tanimbar di Pulau Jawa terutama ukiran berbentuk orang. Selain warisan budaya bendawi, di Desa Tumbur juga terdapat warisan budaya tak benda yaitu tarian 'angkosi'.

Seluruh tanah di desa ini merupakan tanah adat yang kepemilikannya ada pada marga-marga (soa), dan penggarapan lahan atas tanah ini diperoleh dari soa dan individu yang mendapat lahan garapan dari soa tentu akan menggarap lahannya secara pribadi-pribadai, tetapi sekarang banyak lahan dijual secara pribadi, apakah melalui surat hak milik secara pribadi atau dijual kepada pendatang secara langsung dan pembeli yang umumnya pendatang akan mengurusnya kepada kepala desa. Umumnya tanah-tanah yang dijual ini berada di pinggir jalan utama.

Adat istiadat di desa ini mengikuti adat istiadat Duan dan Lolat, fungsi adat pada dasarnya masih berjalan yaitu dengan posisi 1. Adalah pemandu dalam fungsi perahu, dalam adat, pemandu ini bertugas sebagai jurubicara kepada masyarakat, dibelakang pemandu terdapat 2. Kapten kapal, dan dalam adat bertindak sebagai pemimpin dewan adat dan dia ini bertugas untuk memikirkan dan memutuskan. Dibelakang kapten kapal terdapat dua orang yang disebut sebagai sebelah kanan 3. Mangatnyanu silai/mangsofape dan mangsuayat disebelah kiri yang keduanya bertugas untuk mencari penyelesaian perkara baik dan buruk, dan di belakangnya terdapat 4. marumat yang

bekerja sebagai bendahara dan diteruskan dengan 5 Mana suayat yang bekerja sebagai pembantu bendahara serta terakhir sebagai 6. jurumudi peran ini adalah yang mendorong kekuatan berjalannya sebuah kapal. Dewan adat ini menjadi tumpuan dari berjalannya kehidupan sosial masyarakat desa.

Banyak alih fungsi lahan tanpa peran dari dewan adat. Orang luar banyak masuk melalui adat lewat soa sebagai penguasa lahan-lahan kemudian dengan cara menjadi Lolat, dan Lolat ini ternyata banyak membawa kerabatnya sehingga banyak tanah yang sudah dijual oleh penduduk kepada orang luar. Sebagian lagi melalui adat dengan istilah bapak angkat lalu pendatang membawa kerabatnya untuk menetap dan menggarap lahan. Hal inilah yang membuat segelintir dari penduduk desa ini marah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga penduduk lainnya yang menjual tanahnya kepada orang lain dan bahkan kepada orang luar.

Melalui desa banyak juga penduduk yang menjual tanahnya dengan harga murah yang pada dasarnya adalah tanah milik soa, tetapi dengan marga yang sama maka dia dapat menjualnya kepada pihak lain.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-376 Kerajinan Pahatan Kayu

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Lauran

Terdapat peninggalan sejarah berupa meriam Portugis yang diletakkan di alun alun desa. Meriam tersebut merupakan obyek wisata sejarah peninggalan kapal Inggris yang karam di laut Desa Lauran pada abad 17. Meriam tersebut diletakkan di alun-alun desa. Jarak dari ibu kota Kabupaten ke Desa Lauran 7 km dengan waktu tempuh 5-7 menit menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat.

Olilit

Di Desa Olilit masih ditemukan kain tenun hasil kerajinan masyarakat Olilit. Kain tenun dari Desa Olilit memiliki motif yang berbeda dengan desa lainnya yaitu kain tenun 'ulerati'. Dalam Bahasa setempat, 'Ule' berarti bunga dan 'Rati' berarti seratus, yang berarti motif kain tenun khas Desa

Olilit merupakan motif dengan bunga berjumlah seratus pada kain tenunnya. Dahulu kain tenun dibuat dari kapas yang dipintal menjadi benang, namun seiring dengan berjalannya waktu pohon kapas sudah tidak ditemukan di Desa Olilit sehingga benang untuk menenun berasal dari benang yang dijual di pasar.

Terdapat pula warisan budaya tak benda berupa tarian dan lagu daerah khas Desa Olilit. Tari Lilike dan Nabarilah merupakan tari khas Desa Olilit yang biasanya dipentaskan pada saat ada acara besar gereja maupun acara desa. Selain tarian, Desa Olilit juga memiliki lagu khas daerah yakni lagu 'Bulan Ye Odir' dan 'O Bulan Oktober'. Lagu 'Bulan Ye Odir' memiliki arti bulan terang, sementara lagu 'O Bulan Oktober' menceritakan tentang liburan panjang sekolah.

Dari uraian mengenai Warisan Budaya di atas, untuk menentukan kelas atau kriteria status lingkungan, dapat didekati dengan melihat arti pentingnya di masa sekarang. Bagaimanapun, norma adat dan sosial akan menggunakan warisan budaya leluhur pada skala tertentu. Maka penilaian juga akan menggunakan bobot 1 sampai 5 dengan bobot seperti ini: Nilai 1 berarti warisan budaya hanya tak benda dan tidak dilanjutkan lagi; Nilai 2 berarti warisan berupa tak benda namun masih dilakukan oleh orang per orang atau kelompok kecil; Nilai 3 berarti warisan budaya ini berupa tak benda namun masih jamak dilakukan oleh masyarakat; Nilai 4 berarti warisan budaya yang masih ada adalah tak benda dan benda, namun benda tersebut tak lagi digunakan dalam ritus; Nilai 5 mengindikasikan bahwa warisan masih ada baik tak benda dan benda serta masih digunakan dalam ritus tradisi masyarakat dan dihormati.

Tabel III-293. Skala Kualitas Lingkungan pada Aspek Warisan Budaya

Skala	Klasifikasi Warisan Budaya	Warisan Budaya
1	Warisan budaya hanya berbentuk tak benda dan tidak dilanjutkan lagi atau hilang	Sangat Tidak Penting
2	Warisan berupa tak benda namun masih dilakukan oleh orang per orang atau kelompok kecil	Tidak Penting
3	Warisan budaya ini berupa tak benda namun masih jamak dilakukan oleh masyarakat	Moderat
4	Warisan budaya yang masih ada adalah tak benda dan benda, namun benda tersebut tak lagi digunakan dalam ritus	Penting
5	Warisan masih ada baik tak benda dan benda serta masih digunakan dalam ritus tradisi masyarakat dan dihormati/disakralkan.	Sangat Penting

3.3.3.1.5 Situs Sakral Masyarakat

Situs sakral dalam konteks ini merupakan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat dan dijaga secara turun-temurun. Beberapa situs sakral di wilayah studi menjadi tempat masyarakat melakukan ritual-ritual adat.

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Lermatang

Di Desa Lermatang terdapat mata air dan sumur yang dikeramatkan oleh warga yaitu Mata Air Wempas Dalam dan Sumur Keramat Wetutune. Mata Air Wempas Dalam terletak di hutan beberapa kilometer dari pemukiman Desa Lermatang. Air dari mata air Wempas Dalam mengalir ke Sumur Wetutune yang juga di keramatkan oleh masyarakat setempat.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-377 Sumur Keramat Wetutune

Sumur suci bukan hanya peninggalan yang memiliki makna spiritual, tetapi juga menyediakan air tawar bagi warga Desa Lermatang. Selama pengamatan lapangan, masyarakat di Lermatang sangat bergantung pada sumur suci (Wertune Wempas Dalam) karena sumur ini berfungsi sebagai sumber air tawar utama untuk konsumsi sehari-hari. Sehingga hilangnya sumur ini dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Proyek pengembangan Kilang OLNG dapat berdampak pada keberadaan sumur suci di desa Lermatang jika sumur tersebut rusak atau terganggu untuk dijadikan jalan. Sehingga jalur alternatif harus dipertimbangkan untuk mempertahankan sumur ini.

Makam Desa Lermatang terdapat di belakang desa yang mana akses dari pemukiman ke makam desa cukup mudah dengan jalan selebar 1,5 m. Makam desa merupakan tempat peristirahatan terakhir masyarakat Desa Lermatang yang sudah meninggal. Di dekat makam desa, terdapat sebuah pulau kecil bernama Batu Layar. Pulau ini termasuk ke dalam situs yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Lermatang karena pada pulau tersebut ditemukan tulang dan tengkorak manusia dari orang-orang yang dianggap berniat jahat terhadap Desa Lermatang. Batu Layar dapat diakses dengan berjalan kaki dari makam desa jika air laut sedang surut. Lokasi Batu Layar dan makam Desa Lermatang berada di dekat lokasi TUKS perintis.



Sumber: INPEX Masela Biological Baseline, Environmental and Social Baseline: Volume IV 2014

Gambar III-378 Batu Layar

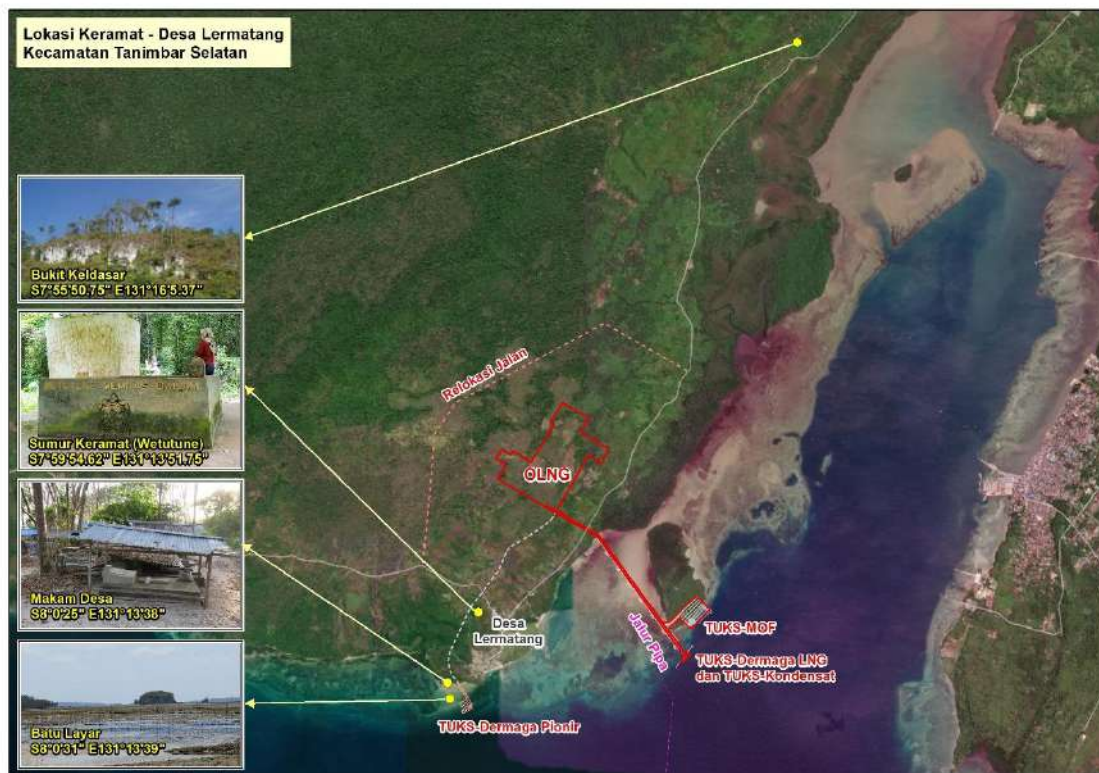
Terdapat gua di Bukit Keldasar (atau Bukit Putih) di dekat Sungai Weminak yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Konon di dalam gua tersebut pernah ada ular besar yang mendiaminya.



Sumber: INPEX Masela Biological Baseline, Environmental and Social Baseline: Volume IV 2014

Gambar III-379 Bukit Keldasar

Lokasi situs sakral Desa Lermatang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar III-380 Lokasi Situs Sakral Desa Lermatang

Bomaki

Di Bomaki terdapat sebuah areal hutan yang dikatakan sebagai hutan larangan, larangan karena dianggap di hutan tersebut nenek moyang penduduk desa duduk berlepas lelah karena perjalanan yang jauh. Hutan yang dianggap hutan larangan ini merupakan hutan biasa saja dan tidak ada upacara tertentu untuk meritualkannya, hanya sebatas pengetahuan saja agar masyarakat tidak mengolah hutan yang ada di situs.

Desa Bomaki memiliki beberapa tempat Pamali (tempat keramat). Pada umumnya, tempat-tempat ini merupakan tempat yang terkait dengan leluhur Soa. Masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang di larang jika sedang berada di tempat Pamali. Selain tempat Pamali, masyarakat juga memiliki kawasan yang dilindungi, seperti sumber air, hutan, dan laut. Hal ini bermaksud untuk melindungi kawasan tersebut agar tidak rusak. Hal ini dikarenakan Bomaki memiliki sumber air yang disalurkan ke Saumlaki.

Salah satu tempat Pamali Desa Bomaki adalah Wermase. Tempat ini berada di wilayah Soa Mitakda. Wermase merupakan tempat terdapatnya tengkorak-tengkorak leluhur yang terbunuh saat perang antar kelompok. Tempat ini berupa goa dan berada di area yang banyak terdapat pepohonan. Masyarakat tidak boleh menebang pohon (misal untuk kayu bakar) atau melakukan hal yang tidak baik, karena akan kerasukan. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat, tidak hanya anggota Soa saja.

Latdalam

Desa Latdalam memiliki beberapa tempat penting dan kawasan yang dilindungi. Tempat penting ini menjadi icon desa. Beberapa tempat penting tersebut adalah:

- a) Werturleli, yaitu sumber air tawar yang disakralkan sebanyak empat titik. Lokasi ini juga menjadi pemandian dan aktivitas mencuci warga. Werturleli terletak 15 km dari Desa Latdalam. Pada lokasi ini dipisahkan air untuk para laki-laki dan untuk perempuan. Kawasan air ini dikelilingi pohon-pohon besar dan merupakan kawasan yang dilindungi pepohonannya untuk menjaga sumber air tidak kering. Kejernihan air di kawasan ini menjadi icon desa yang penting. Biasanya dilakukan upacara adat pada setiap tahunnya pada ulang tahun desa tanggal 5 oktober. Mata air tersebut dulu pernah digunakan untuk membuat air minum penduduk dengan mengalirkannya kerumah-rumah dengan memakai mesin penarik air sumur dan pipa yang disalurkan ke tempat yang lebih tinggi dan disalurkan ke rumah-rumah, tetapi sejak setahun mesinnya rusak dan belum diperbaiki lagi. Pemeliharaan kolam berada di bawah yurisdiksi kepala desa dan didanai oleh pemerintah provinsi



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-381 Sumber Air Werturleli

- b) Batyosa berupa batu dengan lubang di tengah terletak di sisi barat kawasan Lat Dalam. Batu ini terletak di laut dengan pantai dan merupakan salah satu icon desa. Daerah tersebut dianggap sakral oleh penduduk setempat dan memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Tradisi setempat mengharuskan tamu kehormatan disambut dengan segelas sopi sebelum memasuki kawasan tersebut. Acara ini diiringi dengan nyanyian adat oleh sesepuh Lat Dalam dan hadiah kain ikat dari wanita setempat.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-382 Batu Batyosa

- c) Bubulain, Kewasbatar, Laharoi, dan Nayesa. Keempat situs ini merupakan sumber air yang terletak di luar desa. Seperti halnya Werturleli, aturan sejak leluhur yang masih ditaati adalah larangan menebang pohon di sekitar sumber air tersebut

Lokasi situs sakral Desa Latdalam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar III-383 Lokasi Situs Sakral Desa Latdalam

Lorulun

Berdasarkan Ririmase (2013), terdapat situs bekas pemukiman kuno yang terletak di sebelah selatan desa ini. Lokasi situs berada pada lokasi yang relatif tinggi dibanding kawasan sekitarnya. Sebelah timur situs berbatasan langsung dengan pantai dan memiliki topografi yang cukup curam. Sebelah barat dan selatan menunjukkan karakter lahan yang bergelombang. Pintu masuk menuju kawasan bekas pemukiman berada pada sisi utara. Secara umum luas situs diperkirakan mencapai sekitar 2000 m².

Tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Lorulun terkait dengan masing-masing soa atau mata rumah tertentu. Walaupun tempat keramat itu bukan milik soa atau mata rumahnya, tetapi ditaati oleh semua masyarakat desa. Weyeulun merupakan tempat yang dikeramatkan, berupa sepenggal hutan dimana ada tengkorak para leluhur soa dan mata rumah di situ. Nanaryai adalah tempat berupa batu dimana tetua yang memiliki tempat itu akan datang minta hujan untuk desa ketika kemarau panjang.

Tumbur

Situs yang dianggap sakral di Desa Tumbur adalah mata air (salir) sebagai sumber air minum dan Wakentaware sebagai tempat perjalanan leluhur (marga tua)-kampung tua. Tidak semua orang bisa mengunjungi lokasi sakral ini. Hanya orang tertentu yang sudah ditugaskan yang bias mengunjungi lokasi tersebut.

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Wowonda

Di bagian barat Desa Wowonda terdapat sebuah gua yang menurut masyarakat Desa Wowonda tidak memiliki ujung. Gua tersebut bernama Gua Bangruti. 'Bangruti' memiliki arti kelelawar yang mana gua tersebut memang dipenuhi oleh kelelawar.



Sumber: <https://eddieliku.blogspot.com/2014/08/eksotik-maluku-tenggara-barat.html>

Gambar III-384 Gua Bangruti

Olilit

Pada Desa Olilit terdapat beberapa situs dan tempat yang disakralkan atau dianggap suci oleh masyarakat Desa Olilit sebagai berikut:

a) Patung Hati Kudus

Patung ini berada di pinggir Pantai Weluan yang merupakan situs yang dianggap suci oleh masyarakat Olilit. Di situs ini terdapat dua patung, yaitu patung Hati Kudus dan patung Mathias Neyens, seorang misionaris asal Pulau Key yang menyebarkan agama Katolik di Tanimbar. Situs ini menjadi tempat untuk masyarakat berdoa ketika hendak bekerja ke kebun atau melaut.



Sumber: Survei Sosial INPEX, 2019

Gambar III-385 Patung Hati Kudus

b) Monumen Kristus Raja

Pada monumen Kristus Raja, terdapat 3 buah patung Yesus, yaitu patung Yesus memberkati, patung Yesus yang disalib, dan patung Yesus yang dipangku oleh Bunda Maria. Pada area monument terdapat dua bangunan, satu bangunan merupakan tempat patung Yesus memberkati dan satu lagi bangunan yang di dalamnya terdapat meja altar berbentuk perahu batu sepanjang satu meter sebagai tempat untuk misa. Monumen yang dibangun pada tahun 2004 ini menjadi tempat masyarakat untuk berdoa serta menjadi salah satu destinasi wisata rohani.



Sumber: <https://www.adventuretimes.co.uk/picture-this/the-monument-king-christ-patung-kristus-raja-tanimbar>

Gambar III-386 Kristus Raja

c) Gereja Olilit Lama

Gereja Olilit Lama merupakan salah satu tempat yang menjadi tempat disucikan oleh masyarakat Desa Olilit. Di depan gereja ini terdapat patung Ratu Rosario Suci yang diibaratkan sebagai patung pelindung yang melindungi Gereja Olilit Lama.

d) Bukit Kalfari

Bukit Kalfari menjadi salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat Desa Olilit. Bukit ini menjadi tempat untuk berziarah masyarakat setempat.

e) Maria de Lourdes

Sama seperti Bukit Kalfari, Lourdes Bunda Maria menjadi salah satu tempat yang disucikan oleh masyarakat setempat. Tempat ini dijadikan sebagai tempat ziarah

Selain tempat penting terkait agama, masyarakat juga mengakui keberadaan tempat-tempat keramat yang terkait dengan leluhur soa atau mata rumah. Misalnya, Aklain, berupa kolam yang ada buayanya, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di situ tempat tengkorak orang tua-tua satu marga. Bangruti berupa goa besar dengan air yang mengalir sampai ke air besar Wersai.

Pada enam desa terdampak proyek, terdapat beberapa situs sakral dengan beragam pemaknaannya. Pemaknaan dan arti penting ini dapat menjadi pendekatan untuk melihat skala kualitasnya terhadap kehidupan sosial. Untuk melihat kategorisasi tiap situs, maka disusun 5 kelas dengan arti sebagai berikut: 1 berarti situs tersebut hanya menjadi objek tanpa perawatan; 2 berarti situs tersebut masih ada tapi tidak dinilai sakral; 3 berarti situs tersebut ada dan masih dirawat; 4 berarti situs tersebut penting dan dihormati; dan 5 berarti situs tersebut masih menyimpan kesakralan dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kategorisasi mengenai kualitas lingkungan situs sakral di desa terdampak dapat digambarkan dalam tabel in:

Tabel III-294. Skala Kualitas Lingkungan pada Aspek Situs Sakral

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Arti penting Situs Sakral
1	Situs tersebut hanya menjadi objek tanpa perawatan	Sangat Tidak Penting
2	Situs tersebut masih ada tapi tidak dinilai sakral	Tidak Penting
3	Situs tersebut ada dan masih dirawat	Moderat
4	Situs tersebut terawat, penting dan dihormati	Penting
5	Situs tersebut masih menyimpan kesakralan dan tidak semua orang bisa mengaksesnya	Sangat Penting

3.3.3.1.6 Masyarakat Adat

Secara umum, masyarakat di wilayah studi merupakan masyarakat *gemeinschaft* atau masyarakat komunal. Masyarakat menganut sistem kekerabatan yang digerakkan oleh solidaritas mekanik, dimana suatu komunitas akan bergerak secara mekanik memberikan bantuan saat ada peristiwa tertentu, seperti: kelahiran, perkawinan, pembukaan lahan baru, pembangunan rumah, kematian, bahkan jika ada konflik. Nilai gotong royong pada masyarakat masih sangat kuat.

Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah sistem patrilineal, dengan perwarisan marga jatuh pada laki-laki dan pengolahan tanah juga ke tanah pihak laki-laki. Satu desa terdiri dari beberapa marga (Soa), dan satu Soa terdiri dari beberapa Soa, dan satu soa terdiri dari beberapa marga. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa biasanya di setiap desa terdapat kepala Soa.

Masyarakat Tanimbar menganut sistem kekerabatan Duan Lolat. Duan Lolat dimaknai sebagai penghargaan terhadap perempuan. Kata duan merupakan predikat yang diberikan kepada kelompok keluarga yang bertindak sebagai pemberi perempuan. Sedangkan lolat merupakan predikat bagi kelompok keluarga yang menerima perempuan.

Hubungan kekerabatan Duan Lolat yang dijalankan masyarakat memiliki aturan yang harus dijalankan masing-masing pihak. Aturan Duan Lolat biasanya terlihat pada perkawinan dan kematian, meskipun upacara yang dijalankan biasanya sudah menganut Agama Kristen. Aturan ini digambarkan dalam berbagai bentuk barang pemberian dari pihak duan maupun pihak lolat. Pihak duan berkewajiban memberikan pakaian dan perlengkapannya juga bahan makanan seperti beras dan kumbili kepada pihak lolat. Sedangkan, pihak lolat berkewajiban memberikan lauk pauk, seperti daging dan Sopi (tuak khas Tanimbar) kepada duan.

Melihat dari definisi masyarakat adat dapat dikatakan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup dengan budaya mereka sendiri, memiliki siklus hidup, memiliki mata pencaharian, Bahasa atau dialek yang terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama, dengan hukum tradisional tertentu. Dapat berupa etnis atau kelompok dengan budaya tertentu.

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Lermatang

Masyarakat Lermatang masih menganut sistem kekerabatan Duan Lolat seperti desa-desa lain. Namun, adat istiadat ini hanya dipakai saat pernikahan. Prosesi kematian mengacu pada prosesi Agama Kristen karena penduduknya sudah bervariasi antar kampung. Prosesi ini juga melibatkan dewan adat. Desa Lermatang memiliki 12 pemangku adat yang terdiri dari 8 orang tua adat dan 4 Soa.

Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah system patrilineal, dengan pewarisan marga jatuh kepada laki-laki dan pengolahan tanah juga ke tanah pihak laki-laki (Lolat). Sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan bisa jadi keluarga tersebut tidak akan pernah menjadi Duan. Generasi penerus biasanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan orang tuanya disatu pihak dan dalam pihak lain orang tuanya juga mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan adat istiadat yang berlaku, bahkan orang tuanya juga lebih cenderung bersifat pribadi saja.

Dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan adanya alat tenun dan alat pintal yang dimiliki oleh seorang yang sudah tua dan sekarang alat tersebut tidak dipergunakan lagi dan generasi penerus tidak dapat menggunakan alat tersebut. Alat pintal benang sudah lama tidak dipergunakan lagi karena benang mudah didapat dan pohon kapas sudah tidak ada lagi. Sehingga untuk keperluan adat seperti dalam perkawinan, kain tenun diperoleh dari membeli di kota Saumlaki. Ada alat pintal dan tenun tetapi tidak lagi dapat dipergunakan karena tidak ada orang yang dapat membuatnya juga tidak ada pohon kapas sebagai bahan dasar membuat benang tenun.

Mata pencaharian lainnya adalah menggarap lahan dengan cara membakar dan tadah hujan, kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki oleh Soa, dan anggota Soa dapat memiliki lahan serta dia dapat memperjual belikan lahan tersebut kepada orang lain asal disertai dengan surat dari desa. Adat tidak menjadi ukuran untuk kepemilikan lahan, karena lahan dimiliki oleh para Soa dan juga pribadi, sehingga dengan demikian pribadi-pribadi dapat memiliki lahan yang pada awalnya pribadi-pribadi hanya mempunyai hak menggarap. Akibat lanjutannya adalah bahwa lahan dapat

dimiliki oleh orang dari luar desa seperti para pendatang yang dapat membeli tanah dari pribadi orang Lermatang.

Bomaki

Aturan adat tentang perkawinan masih tetap dipertahankan. Struktur adat Desa Bomaki berbentuk perahu yang diisi jabatan-jabatan adat (batu adat). Posisi ini terdiri dari: sorilur (posisi Ndi perahu bagian depan), Mangafwayak (penyiar atau marinyo adat), Nyanuk Silai dan Nyanuk Marumat (juru bicara besar dan kecil, Mangsompe (pendoa), Mangloifise (pengatur persembahan), Wilin Fian dan Wili Bayal (pemegang kemudi kanan dan kiri). Posisi adat dalam konsep perahu ini akan nampak pada saat upacara adat besar di pusat desa (Natar Sori).

Masyarakat Bomaki secara adat tergabung dalam Soa – Soa. Setiap Soa terdiri dari beberapa mata rumah (marga). Terdapat 5 Soa di Bomaki, yaitu:

1. Olingir Das, dengan kepala Soa dari mata rumah Kundre
2. Olingir Bab, dengan kepala Soa dari mata rumah Lermatan
3. Mitakdak, kepala Soa dari mata rumah Sakliresi
4. Kulwembun, dengan kepala Soa dari mata rumah Laiyan
5. Maresiembun dengan kepala Soa dari mata rumah Fenanlampir

Kelompok elite adat adalah mereka yang memiliki jabatan adat (batu adat), yaitu jabatan yang ada dalam struktur perahu, dan diturunkan kepada keturunannya dalam mata rumah tertentu sebagai pemangku jabatan tersebut sejak awal desa berdiri. Demikian juga Soa dipimpin oleh kepala Soa dari mata rumah yang telah ditentukan turun-temurun. Kepala desa harus berasal dari kelompok batu adat. Untuk memberi pertimbangan kepada pimpinan desa terkait hal-hal di desa, dibentuk kelompok “orang tua” atau “tua adat” yang berasal dari kelompok batu adat dan Soa yang dianggap bijaksana. Penentuan orang yang memegang jabatan batu adat ditentukan di dalam masing-masing mata rumah tersebut, yaitu turunan langsung dari pendahulunya, laki-laki, dan merupakan anak tertua. Sedangkan kepala Soa dipilih oleh anggota Soanya dari mata rumah yang secara turun temurun memegang jabatan itu. Selain kelompok elit pemegang batu adat dan pimpinan Soa yang memiliki posisi penting dalam adat, semua warga punya hak dan kewajiban yang sama dalam desa. Mereka memiliki akses untuk berusaha (buka kebun dan mencari ikan) di dalam wilayah desa.

Latdalam

Struktur adat Desa Latdalam hampir sama dengan Desa Bomaki, yaitu digambarkan dengan posisi dalam perahu yang diisi dengan jabatan adat (batu adat). Leluhur penduduk Latdalam berasal dari tiga kelompok besar, yaitu kelompok yang sudah berada di kampung lama, kelompok yang datang dari Lermatang, dan kelompok dari Selaru. Kelompok dari Lermatang adalah kelompok yang menjaga batas barat kampung Lermatang, sedangkan kelompok dari Pulau Selaru datang karena kampung tua Enus di Selaru tenggelam karena bencana alam. Mereka datang dengan perahu sendiri-sendiri dan hidup bersama di pemukiman kampung lama yang terletak di utara pemukiman sekarang. Karena terdiri dari beberapa kelompok, maka sering terjadi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, ketika pindah ke pemukiman sekarang pada tahun 1959, mereka bersepakat untuk berdamai dan mendirikan tugu perdamaian sebagai peringatan atas keputusan itu. Tugu itu berdiri di pusat desa, di depan kantor desa, di dekat alun-alun desa. Setelah bersatu sebagai satu desa adat, maka berbagai perahu itu melebur menjadi satu perahu sebagai representatif desa, yaitu perahu

Baran Ratan. Posisi Nasyori adalah posisi di perahu bagian depan, Mangatyanuk sebagai juru bicara, Mangsompe sebagai pendoa, Mangsaompak sebagai penyambut orang baru yang masuk ke kampung, Mangkitukrawe sebagai timba ruang, dan Wilin sebagai pemegang kemudi.

Persoalan adat yang menyangkut dewan adat di Desa Latdalam tidak hanya terbatas pada sistem perkawinan saja akan tetapi juga sistem kematian dan pemanfaatan lahan. Lahan pertanian di Desa Latdalam merupakan tanah adat dan penggarap hanya mendapat hak pakai saja seumur hidupnya.

Masyarakat tergabung ke dalam Soa-Soa. Setiap Soa terdiri dari beberapa mata rumah (marga). Ada delapan (8) Soa di Desa Latdalam, yaitu:

1. Olingir-Otarempun, dengan kepala Soa dari mata rumah Masnifit
2. Batulempun, dengan kepala Soa dari mata rumah Batmanglusi
3. Mamdirkore, kepala Soa dari mata rumah Darfordate
4. Mahoak, dengan kepala Soa dari mata rumah Samaran
5. Anausu dengan kepala Soa dari mata rumah Luanmase
6. Resa, kepala Soa-nya Fordatkosu
7. Rumdai, dengan kepala Soa Rangkoratak
8. Mahaluruk, dengan kepala Soa Nanaryain.

Untuk menjadi kepala desa, para kandidat disiapkan oleh masing-masing Soa, dipilih yang cakap. Para kandidat ini kemudian disaring di kecamatan. Para kandidat yang lolos penjarangan kemudian dipilih oleh rakyat.

Matakus

Lokasi penting di Desa Matakus adalah kampung tua. Namun, kampung tua tersebut tidak lagi di kunjungi karena ada kepercayaan bagi yang masuk atau mengunjungi desa tersebut akan langsung mati. Tempat khusus lainnya di kampung tua tersebut tersusun dari batu. Pulau Matakus ditemukan dan diperebutkan oleh dua desa, Olilit dan Adaut.

Lorulun

Masyarakat Lorulun masih memegang teguh adat Duan Lolat khususnya pada sistem perkawinan. Terdapat 4 Soa besar di Desa Lorulun. Sebagaimana desa lainnya, selain struktur pemerintah desa, Desa Lorulun juga memiliki struktur adat yang dinamakan Ulul Tutul (nama adat) digambarkan sebagai sebuah perahu yang digambarkan pada sebuah ukiran manusia. Struktur ini diketuai oleh Soliru.

Seluruh tanah atau areal desa merupakan tanah adat yang dimiliki oleh para Soa, dan anggota Soa dapat mengerjakannya berdasarkan pada pembagian dari kepala Soa. Adat yang dipegang seperti umumnya masyarakat Tanimbar yang memegang adatnya sebagai Duan dan Lolat menjadi sangat dipegang teguh khususnya pada sistem perkawinan. Tetapi dalam kepemilikan tanah pada masa sekarang banyak dimiliki oleh penduduk secara pribadi dan bukan oleh masing-masing Soa, di satu pihak ada yang masih dimiliki oleh Soa secara adat sehingga pembukaan lahan akan menggunakan adat yang berlaku, di pihak lain adanya surat resmi kepemilikan lahan yang disahkan oleh desa.

Persoalan-persoalan desa biasanya dibicarakan di kantor desa di aula milik desa, sedangkan masalah adat istiadat dilakukan rembug adat di rumah adat yang terletak di tengah desa dengan bentuk rumahnya yang berbeda dengan rumah penduduk. Persoalan desa menyangkut masalah konflik lahan dengan anggota Soa tetangga, dan biasanya dapat diselesaikan dengan antar Soa, dan apabila dirasa belum tuntas maka dibawa ke rapat dewan adat di rumah 'adat'.

Sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan laki-laki atau patrilineal, istri atau perempuan ikut dalam kehidupan dari kelompok marga laki-laki. Tetapi seperti halnya penduduk tanimbar, perempuan menjadi sebuah primadona. Untuk menjadi Duan, maka sebuah keluarga harus mempunyai anak perempuan. Adat ini sangat kuat mempengaruhi kehidupan lainnya, seperti penggarapan lahan. Orang luar atau pendatang yang berasal dari sukubangsa yang berbeda dapat mengerjakan lahan di daerah ini dengan terlebih dahulu menjadi salah satu marga dari penduduk setempat, biasanya seorang laki-laki pendatang akan berusaha untuk mendekati salah seorang warga, apabila warga tersebut agak tua, maka si pendatang tersebut akan mengangkat dirinya sebagai anak dari penduduk (bapak dekat), dengan upacara minum Sopi serta Sumbatnya (uang beberapa ribu rupiah biasanya 150.000 rupiah) maka ia dapat menjadi anak angkat. Lalu penduduk yang diangkat sebagai ayah angkat akan memperkenalkan pendatang ini kepada anak-anaknya yang lain sebagai saudara angkat. Tetapi dia tidak bisa mengawini anak perempuan dari bapak dekatnya karena sudah semarga. Dengan diangkatnya pendatang ini menjadi warga desa setempat dengan Soa tertentu maka dia dapat mengolah lahan dari Soa tersebut. Lama kelamaan proses ini menjadi pudar, karena tanah pada dasarnya diberikan sertifikat sehingga menjadi milik pribadi dan akhirnya tanah dapat diperjual belikan kepada orang lain bahkan kepada sukubangsa lain tanpa harus melalui upacara adat lagi karena membeli tanah dengan sertifikat yang sudah nama pribadi.

Kegiatan mengolah lahan dilakukan di daerah perbukitan dengan system tadah hujan dan ladang pindah dengan teknik membakar. Setelah musim hujan barulah penduduk mengolah lahannya dengan bercocok tanam menanam jenis umbi-umbian dan bahkan ada juga menanam kacang serta padi merah. Untuk kegiatan mata pencaharian lainnya adalah mencari ikan di pantai yang memang menjadi lingkungan alam penduduk setempat. Di desa ini masih ada tenunan yang dipergunakan bagi alat untuk perkawinan dan ada juga sekedar memiliki, produksi kerajinan kayu ukiran kayu hitam yang dibuat tali pinggang yang khas tanimbar atau Maluku. Tenunan yang ada bahan-bahan dasarnya (benang) dibeli di Kota Saumlaki. Sedangkan untuk kerajinan kayu merupakan hasil ukiran sendiri dengan menggunakan bahan dasar kayu hitam yang masih terdapat di dalam hutan sekitar Lorulun. Mata pencaharian masyarakat seperti layaknya desa-desa sekitarnya banyak menjadi nelayan di laut atau dipantai dengan menangkap ikan-ikan karang dan juga timun laut, teripang.

Sebagian masyarakat bercocok tanam di ladang-ladang kering dengan penguasaan dari adat desa. Kepemilikan lahan pada dasarnya adalah kepemilikan Soa dengan beberapa marga yang ada di dalamnya. Anggota marga dapat mengolah lahan sesukanya asal masih dalam wilayah Soanya, tetapi lambat laun tanah menjadi milik pribadi dan dapat diperjualbelikan.

Tumbur

Masyarakat Desa Tumbur terdiri dari 5 Soa, yaitu Lurikatutuan, Tual, Aru Dalam, Mudi (tergantung juga denga saudara-saudara di Lorulun), dan Manunwembun. Adat istiadat di desa ini mengikuti adat istiadat Duan dan Lolat, fungsi adat pada dasarnya masih berjalan yaitu dengan posisi satu (1). Adalah pemandu dalam fungsi perahu, dalam adat, pemandu ini bertugas sebagai juru bicara kepada masyarakat, di belakang pemandu terdapat dua (2). Kapten kapal, dan dalam adat bertindak

sebagai pemimpin dewan adat dan dia ini bertugas untuk memikirkan dan memutuskan. Dibelakang kapten kapal terdapat dua orang yang disebut sebagai sebelah kanan tiga (3). Mangatnyanu Silai/Mangsofape dan Mangsuayat disebelah kiri yang keduanya bertugas untuk mencari penyelesaian perkara baik dan buruk, dan di belakangnya terdapat 4. Marumat yang bekerja sebagai bendahara dan diteruskan dengan lima (5) Manasuayat yang bekerja sebagai pembantu bendahara serta terakhir sebagai 6. Jurumudi peran ini adalah yang mendorong kekuatan berjalannya sebuah kapal. Dewan adat ini menjadi tumpuan dari berjalannya kehidupan sosial masyarakat desa.

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Ilngei

Secara umum, struktur adat di Desa Ilngei hampir sama dengan struktur adat di Desa Bomaki karena merupakan suku Tanimbar dan menganut sistem kekerabatan Daun Lolat. Desa Ilngei terdiri dari tiga Soa.

Mata pencaharian masyarakat desa ini pada umumnya adalah sebagai nelayan pantai dengan penggunaan Sero pantai dan beberapa menggunakan jaring serta tombak atau senapan panah di dalam laut. Untuk menangkap ikan pada dasarnya tidak terlalu tergantung pada musim tertentu. Sedangkan selain dari nelayan anggota masyarakat juga melakukan sistem perladangan untuk bercocok tanam umbi-umbian serta kacang tanah dan jagung di lahan dengan sistem ladang bakar. Biasanya tanah ditanami kacang hijau untuk tahun pertama kemudian bisa padi, kacang dan umbi-umbian. Tanah digarap selama dua tahun kemudian setelah panen dua kali maka akan pindah lagi ke areal berikutnya dengan persetujuan kepala Soa. Pekerjaan untuk perempuan biasanya adalah menanam sayur, umbi-umbian dan juga berdagang di pasar malam di desa sedangkan pekerjaan laki-laki juga bertani dan nelayan. Selain dari nelayan dan bercocok tanam, masyarakat juga bekerja dalam bidang jasa seperti kuli bangunan, supir kendaraan transportasi penumpang dan juga berdagang kecil-kecilan dengan membuka warung di desa untuk keperluan sekunder dari rumah tangga seperti rokok, gula-gula dan benda-benda lain yang biasa dijual di warung.

Aktivitas membuat kain tenun yang menjadi primadona dari orang Tanimbar pada saat ini tidak lagi dibuat sendiri melainkan dibeli dari luar desa. Walaupun pohon kapas masih terdapat di desa tersebut akan tetapi hanya dipakai sebagai sumbu dari lampu yang digunakan di rumah-rumah atau di perahu ketika sedang pergi ke laut.

Wowonda

Perahu adat di Desa Wowonda disebut juga dengan Kamparesi yang terdiri dari Jurubatu (sorilur) kemudian terdapat tiga (3) Silai dan Marumat. Masing-masing mempunyai peran sendiri sendiri dalam kebiasaan yang berkaitan dengan masalah yang muncul di masyarakat, dan tentu saja masalah adat. Pada pemerintahan desa terdapat tiga tungku yaitu agama, pemerintah dan adat. Ketiganya bekerjasama dalam menangani masyarakat.

Lauran

Masyarakat Lauran menganut sistem kekerabatan yang sama dengan desa lainnya yaitu Duan Lolat. Namun, tradisi dan adat sudah mulai luntur. Penduduk Lauran terdiri dari beberapa Soa, antara lain Taborat, Ulmasemun, Arwalemun, Desemun dan Madedemun. Menurut tokoh adat, asal mula penduduk Yamdena berasal dari pulau seram dari sebuah gunung bernama gunung Sembilan,

penduduk gunung Sembilan pergi merantau dan terdampar di pulau Yamdena dan mendarat di Lauran, sebagian lagi mendarat di daerah lain seperti Olilit, Lermatang, Tumbur.

Penduduk Lauran terdiri dari beberapa marga atau Soa, antara lain Taborat, Ulmasemun, Arwalemun, Desemun dan Madedemun. Menurut tokoh adat, asal mula penduduk Yamdena berasal dari pulau Seram dari sebuah gunung bernama gunung Sembilan, penduduk gunung Sembilan pergi merantau dan terdampar di pulau Yamdena dan mendarat di Lauran, sebagian lagi mendarat di daerah lain seperti Olilit, Lermatang, Tumbur. Terdapat peninggalan sejarah berupa meriam Inggris yang diletakkan di alun alun desa. Meriam tersebut merupakan obyek wisata sejarah peninggalan kapal Inggris yang karam di laut Desa Lauran pada abad 17 Sebelum Masehi. Meriam tersebut diletakkan di alun-alun desa. Jarak dari ibu kota Kabupaten ke desa lauran 7 km dengan waktu tempuh 5-7 menit menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat.

Mata pencaharian masyarakat di desa ini pada umumnya adalah mengolah lahan ladang berpindah dengan teknik membakar semak-semak untuk menyuburkan lahan dan kemudian pada musim hujan baru dikerjakan pengolahan lahannya. Biasanya pengolahan lahan dilakukan pada bulan November dengan menanam jagung dan umbi-umbian serta kacang tanah dan sedikit padi merah. Selain dari bercocok tanam di ladang tadah hujan, penduduk juga bekerja mencari ikan di laut dengan system jala ikan dan juga ada sebagian menggunakan senapan panah ikan dengan menyelam di kedalaman laut. Pekerjaan ini dilakukan pada siang hari untuk menangkap ikan karang. Di samping mata pencaharian berladang dan menangkap ikan, penduduk juga ada yang mengusahakan batu bata, paving block sebagai pengusaha, dan ada juga yang bekerja sebagai polisi serta berjualan dengan membuka toko kelontong.

Tanah garapan yang diolah oleh penduduk pada dasarnya adalah milik dari Soa atau keluarga luas, dan penduduk untuk mengolah lahan harus seizin kepala Soa. Pada saat sekarang kepemilikan lahan berada pada individu-individu, pembagian lahan oleh kepala Soa kemudian diabsahkan oleh kepala desa, sehingga lahan dapat diperjual belikan kepada orang lain terutama orang luar atau sukubangsa selain Tanimbar yang datang ke desa itu. Guna mengolah lahan biasanya orang luar melakukan upacara pemberian Sopi dan sumbatnya kepada seseorang penduduk untuk mencari bapak angkat guna mendapatkan izin mengolah lahan. Setelah itu akan diperkenalkan kepada anggota Soa sebagai sanak saudara. Sehingga penduduk luar desa dapat mengolah lahan yang diberikan tersebut dan bahkan dapat diperjualbelikan. Sistem pemberian Sopi sebagai bagian dalam upacara dilakukan juga untuk menyambut tamu secara bersama, Sopi dituang di gelas, lalu dibacakan mantera oleh kepala Soa yang ditujukan kepada yang Maha Kuasa untuk diharapkan berkahnya agar tamu yang datang ini membawa keberkahan bagi penduduk.

Sifnana

Desa ini terdiri dari lima marga atau Soa, yaitu Aswembun, Krawai, Bungalembu, Oibur, Taborat. Kesemuanya mempunyai lahan garapan yang dibagi-bagi perSoa, anggota Soa akan mendapatkan lahan garapan tetapi bisa menjadi milik pribadi ketika ada pengurusan dari desa dan bisa dijual belikan. Kepala Soa duduk sebagai dewan adat Sifnana yang dibagi dalam: Solilur berperan sebagai Pemandu atau juru bicara ke masyarakat; kemudian dibelakangnya adalah Mangsompe atau Kuere

yang berfikir dan memutuskan, lalu dibelakangnya terdapat Mangatnyanu Silai dan di belakangnya ada Maromat yang berperan sebagai juru bicara antar dewan adat dan dibelakangnya terdapat Manasunyat dan terakhir ada Willem yang berperan sebagai mengemudikan jalannya rapat. Kursi adat atau batu adat disebut juga sebagai Araratu.

Penduduk di desa ini terutama didominasi oleh orang Tanimbar, sedangkan orang pendatang terdiri dari orang Bugis dan orang Buton serta Makasar. Mereka dapat menyatu menjadi penduduk Tanimbar dengan memanfaatkan kedekatannya dalam pengolahan lahan dengan menggunakan adat istiadat, mencari bapak dekat (bapak angkat) guna mendapatkan izin untuk penggarapan tanah atau lahan. Seluruh lahan dimiliki oleh marga atau petuanan atau Soa sebagai tetua adat kepemilikan lahan, sedangkan pada dasarnya pendatang mengerjakan lahannya setelah ada ayah angkat, pada masa sekarang masing-masing lahan mempunyai hak untuk pribadi, ada kepemilikan pribadi sehingga bisa diperjualbelikan.

Desa ini disebut oleh orang Tanimbar sebagai desa Sifnane dan menjadi Sifnana Ketika di bahasa Indonesiakan. Di desa ini terdiri dari 5 marga atau Soa yaitu Aswembun, Krawai, Bungalembu, Oibur, Taborat. Kesemuanya mempunyai lahan garapan yang dibagi-bagi per Soa, anggota Soa akan mendapatkan lahan garapan tetapi bisa menjadi milik pribadi ketika ada pengurusan dari desa dan bisa dijual belikan. Kepala Soa duduk sebagai dewan adat Sifnana yang dibagi dalam: Solilur berperan sebagai pemandu atau juru bicara ke masyarakat; kemudian dibelakangnya adalah Mangsompe atau Kuere yang berfikir dan memutuskan, lalu dibelakangnya terdapat Mangatnyanu Silai dan di belakangnya ada Maromat yang berperan sebagai juru bicara antar dewan adat dan dibelakangnya terdapat Manasunyat dan terakhir ada Willem yang berperan sebagai mengemudikan jalannya rapat. Kursi adat atau batu adat disebut juga sebagai Araratu. Di Sifnana juga terdapat organisasi pemuda yang selalu memberikan masukan tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemuda desa dengan nama Manria. Organisasi pemuda ini juga terdapat di desa Olilit dan Luran yang menjadi penghubung antar Soa, terutama apabila terjadi pertikaian antar Soa dan biasanya terjadi karena perebutan lahan sengketa.

Letak dari desa Sifnana ini agak jauh dari pantai dan memang merupakan daerah perkotaan Saumlaki sehingga penduduk yang menetap sangat bervariasi sampai pada bentuk mata pencahariannya yang tidak hanya bertani tetapi juga di bidang jasa dan perdagangan. Banyak penduduk yang berasal dari luar sukubangsa Tanimbar, terutama dari daerah Sulawesi, orang Bugis, Buton dan Makasar, mereka bermata pencaharian sebagai pedagang kelontong di desa dan sedikit orang pendatang yang mengerjakan lahan garapan sebagai peladang.

Penduduk asli ada juga yang bermata pencaharian sebagai penjual air minum dengan membuat sumur dan pembelinya datang dengan kendaraan besar beserta tangki air. Selain itu banyak juga yang bekerja sebagai pegawai swasta dan negeri. Makanan pokok masyarakat desa pada dasarnya adalah ubi, kumbili, keladi. Pada masa sekitar tahun 1900 an banyak anak muda sudah mengganti makanan tersebut dengan nasi, sehingga sekarang anak-anak muda makanan pokoknya adalah nasi, sedangkan ubi digunakan sebagai makanan selingan saja pada sore hari sebagai teman mengobrol.

Olilit

Penduduk desa ini terdiri dari 2 marga yaitu Lempit Lokat dan Tomban Merayet, bahasa yang digunakan adalah bahasa Yamdena. Daerah Olilit ini merupakan daerah perkotaan dan desa yang tanah di daerah perkotaan banyak dikuasai oleh pemerintah daerah dan menjadi wilayah perkantoran kabupaten dan DPRD, sehingga penduduk merasa perlu adanya simbol daerah Olilit

seperti perahu digunakan sebagai simbol dari kabupaten yang sekarang disimbolkan dengan gading gajah.

Mata pencaharian penduduk ada yang nelayan dengan sistem tembak ikan dengan alat senapan dengan pelurunya sebuah anak panah, dan juga dengan alat sero batu serta sero bambu. Sero ini sekarang sudah tidak dilakukan lagi, karena dianggap sudah kuno dan batunya yang digunakan sebagai alat memancing ikan agar masuk perangkap sudah berantakan, apalagi yang terbuat dari bamboo sudah tidak awet lagi dan diganti dengan penggunaan jala gantung. Masyarakat pergi mencari ikan tidak terlalu jauh ke tengah laut, pada dasarnya mereka hanya sekitar pantai saja dan paling jauh sekitar 100-200 meter ke tengah laut.

Sebelum ke laut atau sebelum mencari ikan di laut maka ada upacara Engas dimana penduduk akan melempar kulit kayu ke laut, upacara ini didahului dengan minum Sopi untuk usaha berinteraksi dengan pemilik alam agar hasil lautnya nanti berlimpah. Setelah minum Sopi barulah melempar kayu-kayu ke laut sembagai simbolisasi ikan-ikan yang diharapkan dapat ditangkap.

Daerah perladangan dan juga kebun yang tadinya dimiliki oleh para Soa sekarang diambil alih oleh pemerintahan kabupaten. Proses pemilikan lahan ini terjadi perubahan adat kepemilikan dimana lahan dulunya dimiliki oleh sekelompok Soa, dan pengerjaan lahan biasanya dibagikan oleh kepala Soa, tetapi pada saat sekarang tanah sudah dimiliki oleh individu-individu dan dikuatkan oleh adanya sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh desa. Masing-masing penduduk dapat menjual lahannya kepada orang luar (migran). Hal ini sangat memungkinkan terjadinya sertifikasi lahan karena desa ini menjadi bagian dari sebuah kota Saumlaki.

Terdapat adat untuk menangani konflik antar penduduk yang biasanya diselesaikan oleh adanya perkumpulan pemuda, cara yang lazim biasanya dua orang yang konflik akan diberhentikan pengolahan lahannya dan pohon di daerah konflik tersebut dipasang sebuah janur (daun kelapa muda) sebagai tanda tanah sengketa.

Mata pencaharian penduduk selain ladang dan juga mencari ikan di laut, banyak penduduk juga bekerja di kota Saumlaki sebagai penjual jasa atau juga berdagang ikan di pasar Saumlaki. Kehidupan mata pencaharian jasa ini berkembang dengan pesat sejalan dengan berkembangnya Saumlaki menjadi sebuah kota kabupaten.

Desa Olilit ini sebagian besar lahannya digunakan untuk kantor pemerintahan maupun DPRD, sehingga merasa bahwa penduduk desa harus diutamakan kepentingannya oleh pemerintah daerah. Desa ini terletak di sebelah utara dari kota Saumlaki dan menjadi desa yang dekat dengan ibukota kabupaten.

Desa ini pada dasarnya sudah dimekarkan menjadi dua desa yaitu Olilit lama dan Olilit baru, kedua-dua permukiman ini masih tetap digunakan. Penduduk dari luar pada dasarnya banyak yang menetap di desa ini karena letaknya dekat dengan kota. Industri kain tenun yang menjadi ikonik di Tanimbar sudah tidak diproduksi lagi, mereka cukup membeli kainnya saja untuk keperluan upacara perkawinan, disamping tanaman kapas sudah tidak ada lagi dan juga alat-alat menenun sudah tidak ada lagi. Lahan-lahan atau kebun pernah juga ditanami dengan pohon jati sebagai usaha dari luar dengan perusahaan kayu di sekitar kota Saumlaki.

Berdasarkan deskripsi mengenai masyarakat adat dan aplikasinya di masyarakat desa-desa terdampak, terdapat beberapa jenis konsep masyarakat adat dengan atribut masing. Menggunakan konsep dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, terdapat beberapa indikator yang disebut

masyarakat adat yakni sekelompok orang yang telah secara turun-temurun bermukim di suatu wilayah geografis tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya hubungan leluhur dan hubungan khusus dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya, yang memiliki sistem nilai yang berbeda yang menentukan sistem ekonomi, politik, sosial dan norma-norma hukum yang sebagian atau seluruhnya berbeda dengan masyarakat pada umumnya (AMAN 2012).

Namun pada saat ini perkembangan sosial sedikit banyak telah mengubah wajah masyarakat adat. Interaksi dengan masyarakat luar dan pelemahan pranata asli seringkali membuat karakter masyarakat adat berubah dan tidak lagi dipandang sebagai masyarakat adat. Menggunakan definisi dan batasan tentang masyarakat adat di atas, maka dapat disusun klasifikasi serta kuantifikasi atas kuat-rendahnya entitas adat sebagai berikut: skor 1 menunjukkan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat pada umumnya, kosmopolit, tidak ada pranata adat yang berlaku; skor 2 mengindikasikan masyarakat punya sejarah genealogis/kekerabatan yang sama tapi tidak menggunakan pranata adat; skor 3 mengindikasikan suatu masyarakat yang menggunakan dua sistem sosial yakni formal dan adat sekaligus dalam kehidupan sehari-hari; skor 4 adalah masyarakat yang secara genealogis sama, memiliki pranata adat sehari-hari bersama lembaga formal, tapi tidak memiliki wilayah ulayat; dan skor 5 adalah masyarakat yang genealogisnya sama, pranata adat sebagai satu-satunya pranata dan memiliki wilayah ulayat yang ketat dan terkelola. Berikut adalah tabel mengenai kualitas lingkungan untuk aspek masyarakat adat terhadap desa-desa terdampak.

Tabel III-295. Kualitas Lingkungan dari Aspek Masyarakat Adat

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Masyarakat Adat
1	Masyarakat pada umumnya, kosmopolit, tidak ada pranata adat yang berlaku	Sangat Tidak Kuat
2	Masyarakat punya sejarah genealogis/kekerabatan yang sama tapi tidak menggunakan pranata adat	Tidak Kuat
3	Masyarakat yang menggunakan dua sistem sosial yakni formal dan adat sekaligus dalam kehidupan sehari-hari	Moderat
4	Masyarakat yang secara genealogis sama, memiliki pranata adat sehari-hari bersama lembaga formal, tapi tidak memiliki wilayah ulayat	Kuat
5	Masyarakat yang genealogisnya sama, pranata adat sebagai satu-satunya pranata dan memiliki wilayah ulayat yang ketat dan terkelola	Sangat Kuat

3.3.3.1.7 Harapan dan Keluhan masyarakat

Keberadaan proyek menimbulkan beberapa harapan pada masyarakat. Harapan-harapan tersebut pada umumnya sama antara desa terdampak maupun desa terpengaruh. Harapan yang muncul yaitu mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, pengembangan usaha dan mata pencaharian, beasiswa pendidikan bagi anak-anak, pembangunan sarana dan prasarana, hingga pengelolaan limbah yang baik

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai harapan di desa terdampak terhadap proyek ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat perlu diperhatikan agar tidak berkembang isu negatif di kalangan masyarakat.

Tabel III-296 Harapan Masyarakat Desa Terdampak Terhadap Proyek

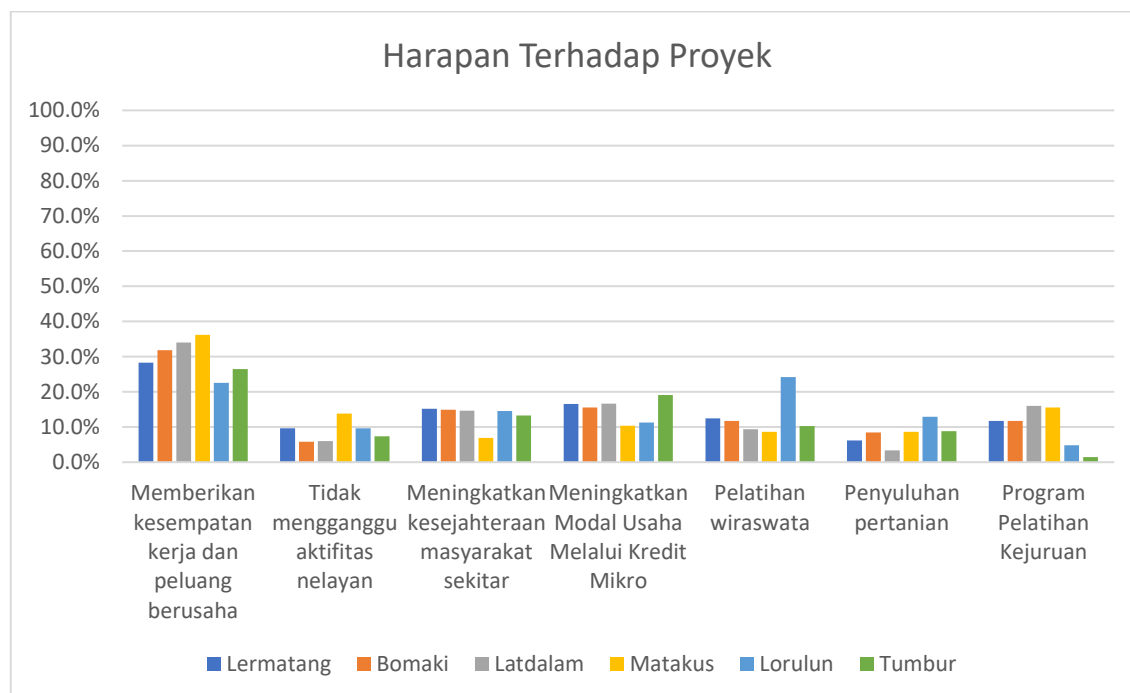
No	Desa	Harapan
1	Lermatang	• Pelatihan tentang teknologi khususnya mengenai pertanian sehingga bisa meningkatkan hasil ladangnya • Peningkatan kualitas transportasi • Membangun jembatan/lintas laut untuk nelayan di pelabuhan menuju Saumlaki atau lokasi penangkapan ikan, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak terganggu • Bantuan armada dan alat tangkap yang lebih lengkap sehingga nelayan dapat mencari lokasi tangkap yang lebih jauh • INPEX dapat melestarikan lokasi tangkapan teripang atau budidaya rumput laut, atau mencari lokasi tangkapan lain sehingga hasil tangkapan nelayan tidak berkurang. • Bantuan teknologi dan pemahaman tentang informasi cuaca, sehingga nelayan siap akan kemungkinan cuaca buruk • Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan perempuan • Pembebasan tanah melalui mekanisme adat dengan nilai yang menguntungkan masyarakat • Beasiswa Pendidikan • Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat • Perhatian/layanan bagi kelompok rentan
2	Bomaki	• Warga dapat menjual hasil bumi ke IINPEX • Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal • Beasiswa pendidikan • Pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan ketrampilan dan kesejahteraannya • Peningkatan harga tanah • Bantuan modal dan saprotan bagi petani khususnya alat pertanian modern sehingga bisa bertanam setiap bulan • Peningkatan mutu kesehatan • Lokasi proyek jauh dari pemukiman sehingga tidak menimbulkan polusi • PEMDA atau INPEX mendukung pelatihan pertanian organik dan pembuatan pupuk pestisida organik • INPEX membeli sayuran dari warga lokal • Dibangun pasar untuk menjual hasil pertanian di Desa Bomaki
3	Latdalam	• Inpex membuat saluran air ke rumah warga • Beasiswa pendidikan anak untuk SMA dan Perguruan Tinggi • Dampak limbah bisa ditekan sesuai dengan standar perundang-undangan agar tidak mempengaruhi kehidupan nelayan • Kesempatan kerja di INPEX bagi masyarakat lokal • Adanya program kesehatan berupa bantuan tenaga medis dan fasilitas kesehatan juga membangun rumah sakit bahkan merekrut anak-anak yang memiliki potensi di bidang medis

No	Desa	Harapan
		• Adanya program penguatan adat istiadat • Program kerohanian: pembangunan gereja dan pelayanan • Program pertanian: pencetakan sawah, penyuluhan budidaya dan cara pemakaian pupuk dan pestisida, bantuan saprodi, bantuan bibit • Bantuan alat tangkap bagi nelayan (jaring, kail, body dan mesin boat) • Pendampingan dan pembinaan aparat desa • INPEX membeli dan membantu pemasaran produk masyarakat (sayur, ubi, singkong, tenun, keripik, dan lainnya) • Bantuan biaya hidup seperti kompensasi sewa lahan kepada masyarakat • Meningkatkan produk unggulan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan peternakan
4	Matakus	• Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal • INPEX memperhatikan dampak negatif pencemaran laut • Proyek INPEX mensejahterakan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan nelayan Matakus • INPEX memberikan alat penerangan dan alat tangkap • INPEX tidak membuang air limbah ke laut karena penghasilan masyarakat dari laut • INPEX memperhatikan masyarakat • Beasiswa pendidikan • Bantuan modal usaha kepada anak-anak lulusan SMA (sekolah terbatas) • Membantu UMKM di Matakus
5	Lorulun	• Beasiswa pendidikan anak untuk sekolah keluar wilayah • Bantuan irigasi pertanian • Peningkatan kualitas fasilitas umum • Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal • Bantuan kepada petani melalui penggalakan penggunaan produk lokal, peningkatan skill pertanian organik. • Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat • INPEX dapat menampung hasil panen dan tenun Lorulun serta membantu bahan bakunya • INPEX membantu pemberdayaan nelayan • INPEX merehabilitasi POLINDES • Membangun sekolah dan sarpras pendidikan serta mendirikan sekolah migas untuk anak Lorulun
6	Tumbur	• INPEX proaktif mendukung pemasaran hasil produksi kerajinan masyarakat • Mendukung usaha pertanian dan perkebunan masyarakat melalui bantuan pemasaran dan bantuan pupuk • Prioritas kesempatan kerja bagi anak daerah Tanimbar

No	Desa	Harapan
		- Daerah Tanimbar mendapat pembagian hasil yang seimbang atau wajar - Hasil pertanian masyarakat diserap oleh INPEX - Beasiswa pendidikan

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Harapan-harapan masyarakat terhadap proyek berdasarkan hasil survei, antara lain memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha, tidak mengganggu aktivitas nelayan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan modal usaha melalui kredit mikro, adanya pelatihan wirausaha, adanya penyuluhan pertanian, dan program pelatihan kejuruan. Harapan masyarakat terhadap proyek digambarkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-387 Harapan terhadap Proyek

Secara umum, harapan tertinggi masyarakat di desa-desa wilayah studi adalah keberadaan proyek dapat memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Harapan-harapan lainnya adalah adanya program-program pendukung usaha masyarakat, seperti bantuan modal usaha melalui kredit mikro dan peningkatan SDM melalui pelatihan wirausaha, penyuluhan pertanian, dan pelatihan kejuruan. Selain itu, masyarakat berharap tidak ada gangguan terhadap aktivitas nelayan, karena sebagian masyarakat di wilayah studi bermata pencaharian sebagai nelayan. Adanya program-program tersebut diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi proyek.

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Hal yang diharapkan oleh masyarakat desa terpengaruh terkait dengan kesempatan kerja, adanya bantuan untuk beasiswa dan modal kerja, serta adanya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Harapan masyarakat di desa terpengaruh proyek ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Harapan ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat desa terpengaruh proyek.

Tabel III-297 Harapan Masyarakat Desa Terpengaruh Terhadap Proyek

No	Desa	Harapan
1	Ilngei	Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Ilngei
2	Wowonda	Kesempatan kerja bagi anak muda
3	Kabiarat	Kesempatan kerja di INPEX untuk anak-anak Lapangan kerja bagi ibu-ibu Produk sayur dan umbi dapat diterima INPEX
4	Lauran	Kesempatan kerja bagi warga lokal Fasilitasi petani dan nelayan agar produktif dan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja INPEX Subsidi pengembangan usaha atau mata pencaharian Perhatian kepada kesehatan masyarakat Beasiswa pendidikan dari INPEX
5	Sifnana	Beasiswa pendidikan Bantuan modal dan pembudidayaan untuk kelompok petani dan nelayan Kesempatan kerja bagi pemuda dan perempuan Kegiatan lain melibatkan perempuan INPEX berinvestasi untuk kegiatan usaha perempuan

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Menggunakan matriks hasil kuesioner mengenai tingkat kekhawatiran di enam desa terdampak, tingkat kekhawatiran masyarakat beragam. Jumlah responden yang memiliki kekhawatiran terhadap rencana proyek tertinggi yaitu pada responden Desa Matakus dan Desa Tumbur sebanyak lebih dari 50%. Pada kedua desa ini jumlah responden yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak lebih dari 10%. Responden di empat desa lainnya yang menyatakan kekhawatirannya kurang dari 45%. Desa dengan jumlah responden khawatir terendah adalah Desa Bomaki. Beberapa jenis kekhawatiran masyarakat adalah kekhawatiran akan mata pencaharian, kekhawatiran akan gangguan aktivitas nelayan, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan, dan kekhawatiran akan wilayah tangkapan ikan yang semakin sempit.

Menggunakan rentang kelas dari persentase kekhawatiran masyarakat, maka dapat disusun klasifikasi atas kekhawatiran sebagai berikut: skor 1 adalah kekhawatiran dengan persentase 85-100%; skor 2 adalah persentase 65-84%; skor 3 adalah persentase 45-64%; skor 4 adalah persentase antara 30-44%; dan skor 5 adalah persentase kekhawatiran 0-29%.

Tabel III-298. Matriks Kualitas Lingkungan dari Aspek Kekhawatiran Masyarakat

Skala	Klasifikasi Kualitas Lingkungan	Kekhawatiran
1	85-100%	Sangat Tinggi
2	65-84%	Tinggi
3	45-64%	Moderat
4	30-44%	Rendah
5	0-29%	Sangat Rendah

3.3.3.1.8 Kelompok Masyarakat Rentan

Masyarakat rentan berdasarkan KBBI yaitu masyarakat yang dalam berbagai hal, kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi akibat keterbatasan fisik dan non fisiknya. Kelompok masyarakat rentan umumnya memiliki keterbatasan untuk memenuhi

kesejahteraan sosialnya. Beberapa kelompok rentan diantaranya adalah wanita khususnya janda, anak-anak terlantar yaitu anak yatim piatu, masyarakat miskin, lansia, dan difabel.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Angka Tahun 2024, bahwa dari tahun 2016 hingga 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak lebih dari sekitar 30%. Secara rinci, garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kelompok masyarakat miskin termasuk ke dalam masyarakat rentan karena sebagian besar masyarakat pada kelompok ini tenaga kerja serabutan ataupun tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pada kelompok ini, masyarakatnya rentan karena berpendidikan rendah, kurang mampu secara finansial, dan tidak memiliki keterampilan yang mumpuni untuk bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhannya sangat terbatas.

Tabel III-299 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Miskin
2016	319.120	31,5	28,31
2017	339.801	30,7	27,47
2018	389.729	31,5	28,08
2019	423.823	30,76	27,25
2020	479.402	30,74	27,11
2021	506.106	30,70	27,27
2022	546.300	26,94	23,88
2023	615.768	27,64	24,47

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Pada desa terdampak kegiatan proyek, ditemukan kelompok masyarakat rentan meliputi janda, anak yatim, lansia, dan masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik atau difabel. Berdasarkan data yang dihimpun dari profil masing-masing desa terdampak, ditemukan terdapat 15 orang janda di Desa Bomaki, 6 orang janda di Matakus, 5 orang janda di Lorulun, dan 25 orang janda di Desa Tumbur. Mayoritas janda yang tercatat ada di desa terdampak bermata pencaharian sebagai petani dengan pendidikan yang terakhir ditamatkan adalah SD dan SMP.

Anak-anak termasuk ke dalam kelompok rentan khususnya anak yatim/piatu. Anak yatim/piatu dikatakan rentan karena kebutuhan hidup sehari-harinya menjadi terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya terbatas secara materi namun juga terbatas mendapatkan kasih sayang dari orang tua lengkap. Anak yatim/piatu ini juga rentan mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan materi yang diperoleh oleh orang tua tunggalnya. Berdasarkan data profil desa (2019), hanya tercatat terdapat 22 anak di bawah 15 tahun yang menjadi piatu dengan rincian 13 orang laki-laki dan sembilan orang perempuan di Desa Tumbur.

Kemiskinan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, baik individu maupun rumah tangga. Kesejahteraan digambarkan melalui kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, kesejahteraan juga dilihat dari kemampuan individu untuk dapat berfungsi dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 persen poin dari 9,22 persen periode September 2019.

Suatu individu atau rumah tangga dikatakan rentan miskin apabila berada tepat di atas garis kemiskinan. Faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi, jumlah anggota rumah tangga yang besar, tingkat pendidikan yang rendah, individu atau rumah tangga yang berada di pedesaan, rumah tangga yang tidak memiliki tabungan, dan rumah tangga yang tidak memiliki tanah menjadi salah satu faktor dari penyebab kemiskinan. Faktor usia kepala rumah tangga yang tinggi menjadi penyebab kerentanan kemiskinan karena penduduk berusia tua cenderung tidak produktif. Penduduk berusia tua yang tergolong tidak rentan miskin dikarenakan memiliki anak-anak dengan pekerjaan yang baik, penurunan rasio ketergantungan dalam keluarga. Faktor demografi lain yang menjadi faktor kerentanan kemiskinan adalah jumlah anggota rumah tangga yang banyak berdampak pada rasio ketergantungan yang tinggi. Rumah tangga yang berada di wilayah pedesaan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kerentanan kemiskinan karena infrastruktur dan transportasi yang kurang berkembang sehingga menjadi penghambat penduduk dalam mengakses pasar, fasilitas layanan kesehatan, dan pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia. Jumlah masyarakat miskin di desa terdampak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-300 Jumlah Masyarakat Miskin di Desa Terdampak

Desa	2019	2020
Kecamatan Tanimbar Selatan		
Lermatang	84	362
Bomaki	294	31
Latdalam	448	402
Matakus	140	38
Kecamatan Wertamrian		
Lorulun	72	-
Tumbur	430	4

Sumber: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2020

Penduduk dengan usia renta atau lansia juga merupakan salah satu kelompok rentan. Kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi menjadikan masyarakat lansia memiliki keterbatasan dalam mendapatkan akses ke sumberdaya karena. Ketidakmampuan masyarakat lansia untuk bekerja juga dikarenakan usia yang semakin tua dan rentan akan penyakit. Data mengenai jumlah lansia yang ada di desa terdampak disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-301 Jumlah Lansia di Desa Terdampak, 2019

Desa	Laki-laki	Perempuan
Kecamatan Tanimbar Selatan		
Bomaki	20	41
Matakus	5	4
Kecamatan Wertamrian		
Lorulun	0	29
Tumbur	23	25

Sumber: Profil Desa Bomaki, Matakus, Lorulun, dan Tumbur 2019

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah wanita berusia 18 – 59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi dikatakan rawan sosial ekonomi karena tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi.

Tabel III-302 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Desa	Jumlah
Kecamatan Tanimbar Selatan	
Lermatang	-
Bomaki	16
Latdalam	19
Matakus	13
Kecamatan Wertamrian	
Lorulun	22
Tumbur	16

Sumber: Profil Desa 2020

Penyandang disabilitas atau difabel bisa disebabkan oleh faktor kelahiran, penyakit, ataupun kecelakaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari profil desa terdampak, tercatat sebanyak 22 laki-laki dan 18 perempuan yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental di Desa Tumbur. Penduduk yang mengalami keterbatasan umumnya memiliki keterbatasan dalam menyejahterakan dirinya karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya. Penduduk difabel juga sulit untuk bekerja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga asset yang dimiliki pun terbatas.

Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 pada ekonomi masyarakat rentan miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bantuan sembako khusus hingga bansos Dana Desa untuk menjaga kebutuhan pangan serta kesehatan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Keluarga Penerima Manfaat sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah.

Tabel III-303 Bantuan yang diberikan pemerintah untuk kelompok masyarakat rentan, Tahun 2020

Desa	BLT Dana Desa	KPM Sembako	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Bantuan Stimulan Langsung COVID-19	PKH
Kecamatan Tanimbar Selatan					
Lermatang	154	89	25	14	117
Bomaki	155	84	98	24	73
Latdalam	252	146	46	24	208
Matakus	24	29	18	16	37
Kecamatan Wertamrian					
Lorulun	146	78	83	16	97
Tumbur	118	85	93	32	75

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tahun 2021

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Tidak jauh berbeda dengan desa terdampak, pada desa terpengaruh juga ditemukan beberapa kelompok masyarakat rentan walaupun data yang ada hanya tersedia untuk Desa Ilngai dan Wowonda. Berdasarkan data dari profil desa (2019), di Desa Ilngai terdapat 18 janda dan di Desa Wowonda terdapat 47 janda. Janda yang berada di kedua desa ini juga umumnya bermatapencaharian sebagai petani dengan pendidikan yang terakhir ditamatkan yaitu SD.

Jumlah lansia pada Desa Ilngai dan Wowonda cukup banyak. Pada Desa Ilngai, terdapat 30 laki-laki dan 36 perempuan. Sementara pada Desa Wowonda, tercatat terdapat 61 laki-laki dan 66 perempuan yang berusia lebih dari 65 tahun. Penduduk difabel yang tercatat di Desa Ilngai maupun Wowonda berjumlah masing-masing satu orang. Disabilitas yang dialami oleh masing-masing orang yaitu tuna wicara dan tuna netra.

Tabel III-304 Jumlah Masyarakat Miskin di Desa Terpengaruh

Desa	2019	2020
Kecamatan Tanimbar Selatan		
Ilngai	157	137
Wowonda	379	93
Kabiarat	220	36
Lauran	400	60
Sifnana	218	142
Olilit	416	235

Sumber: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2020

Jumlah penduduk miskin tahun 2020 di desa terpengaruh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Desa Kabiarat dan Lauran mengalami penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 85% dari tahun sebelumnya. Beberapa jenis bantuan telah diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat rentan dapat dilihat pada Tabel III-306.

Tabel III-305 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Desa	Jumlah
Kecamatan Tanimbar Selatan	
Ilngai	17
Wowonda	22
Kabiarat	15
Lauran	29
Sifnana	63
Saumlaki	111
Olilit	83

Sumber: Profil Desa 2020

Tabel III-306 Bantuan yang diberikan pemerintah untuk kelompok masyarakat rentan, Tahun 2020

Desa	BLT Dana Desa	KPM Sembako	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Bantuan Stimulan Langsung COVID-19	PKH
Kecamatan Tanimbar Selatan					
Ilngai	196	95	51	17	65
Wowonda	97	77	78	32	70
Kabiarat	67	33	39	6	28
Lauran	145	101	144	20	89
Sifnana	142	42	72	24	40
Saumlaki	-	38	190	72	46
Olilit	149	89	290	95	79

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tahun 2021

Tidak ada parameter untuk menentukan kualitas lingkungan pada kelompok rentan. Namun untuk menentukan skala kualitas lingkungan, dapat digunakan angka kemiskinan pada rentang dua tahun yakni tahun 2019-2022. Kelas kualitasnya dapat diklasifikasi dengan skor sebagai berikut: skor 1 menandakan ada kenaikan jumlah secara signifikan; skor 2 mengindikasikan ada kenaikan jumlah orang miskin namun tidak signifikan; skor 3 menandakan tidak ada perubahan; skor 4 mengindikasikan penurunan jumlah kemiskinan tapi tidak signifikan perubahannya; dan 5 adalah penurunan secara signifikan. Berikut untuk pemaparan lebih lanjut:

Tabel III-307. Kualitas Lingkungan dari Aspek Kelompok Rentan

Skala	Klasifikasi Kualitas Sosial	Kelompok Rentan
1	Ada kenaikan jumlah secara signifikan	Sangat Buruk
2	Kenaikan tidak signifikan	Buruk
3	Tidak ada perubahan	Moderat
4	Ada penurunan tapi tidak signifikan	Baik
5	Ada penurunan jumlah secara signifikan	Sangat Baik

3.3.3.2 Kabupaten Maluku Barat Daya

3.3.3.2.1 Persepsi dan Kekhawatiran Masyarakat

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan di Pulau Moa, Pulau Leti, Pulau Lakor, Pulau Masela dan Pulau Babar dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap INPEX Masela Ltd. dan Lapangan Gas Abadi Masela secara umum bernada positif. Masyarakat menerima bahkan mendukung kehadiran proyek tersebut dengan berbagai catatan dan harapan untuk kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik ke depannya dibandingkan kondisi hari ini.

Tabel III-308. Persepsi Masyarakat Terhadap Blok Abadi Masela

No	Pulau	Persepsi atas Proyek
1	Moa	1. Masyarakat mendukung karena diharapkan adanya proyek Gas Abadi INPEX dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat Moa, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan infrastruktur.

No	Pulau	Persepsi atas Proyek
		2. Proyek berpeluang untuk memberdayakan masyarakat Moa melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil. 3. Masyarakat menerima jika perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, termasuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Moa.
2	Leti	1. Masyarakat Leti menyambut baik proyek karena diyakini akan membawa peluang ekonomi baru, seperti lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan taraf hidup. 2. Proyek Gas Abadi Masela diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Pulau Leti, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan konektivitas dan akses ke layanan publik. 3. Masuknya INPEX berpeluang menciptakan program pelatihan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat Leti, khususnya dalam bidang energi dan teknologi.
3	Lakor	1. Masyarakat Lakor menyambut baik INPEX karena diyakini akan membawa peluang ekonomi baru, seperti lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan taraf hidup. 2. INPEX diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Pulau Lakor, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan konektivitas dan akses ke layanan publik. 3. Masyarakat Lakor ingin mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang proyek INPEX, dan mereka ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
4	Luang	1. Proyek harus segera beroperasi karena isu terkait Blok Masela sudah berjalan lama. Dampak pembangunan MBD harus sampai ke Pulau Babar dan pembangunan yang dilakukan harus seimbang. 2. Sangat mendukung dan berharap prosesnya jalan dulu agar ada dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Berharap agar proses sosialisasi dan pembangunan di Blok Masela bisa lebih terbuka 4. Masih ada ketidakpercayaan terhadap INPEX dan pemerintah terkait informasi dan komunikasi tentang proyek, seperti skema pembagian keuntungan, dampak lingkungan jangka panjang, dan rencana pelibatan masyarakat.

No	Pulau	Persepsi atas Proyek
		5. Masyarakat Luang ingin memastikan bahwa manfaat dari proyek INPEX didistribusikan secara adil dan merata, dan mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait proyek.
5	Pulau Masela	1. Masyarakat sangat bersyukur terhadap rencana operasi Blok Masela dan berharap ada kesejahteraan untuk masyarakat. 2. Blok Masela sudah terkenal di dunia tapi penduduk lokal Masela belum pernah merasakan apa itu Blok Masela. Masyarakat bersemangat dan berharap dampak positif pada masyarakat ke depannya. 3. Masyarakat sangat mendukung karena diharapkan memberikan dampak positif pada pembangunan masyarakat di Pulau Masela 4. Masyarakat sangat setuju dan menerima Blok Masela agar bisa bermanfaat besar untuk masyarakat, dan Pulau Masela ini menjadi prioritas utama.
5	Pulau Babar	1. Lapangan Gas Abadi harus segera beroperasi karena isu terkait Blok Masela sudah berjalan lama Dampak pembangunan MBD harus sampai ke Pulau Babar dan seimbang. 2. Masyarakat setuju karena menilai proyek ini akan meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka pengangguran 3. Masyarakat setuju terhadap proyek dengan harapan memberikan dampak positif dengan membuka lapangan pekerjaan melalui perekrutan tenaga kerja lokal.

Sumber: Data Primer, Survei Sosial 2024

Sikap masyarakat secara umum positif namun tetap muncul rasa khawatir karena berbagai isu dan informasi yang tersebar di berbagai media elektronik serta sosial media. Rasa khawatir ini muncul karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana proyek dan lebih banyak informasi dari berbagai pihak yang tidak berwenang. Selain itu pengalaman yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia dan di luar negeri terkait dampak proyek migas juga menjadi faktor munculnya rasa khawatir di masyarakat.

Dari berbagai bentuk kekhawatiran, kekhawatiran yang paling tinggi terkait dengan dampak lingkungan. Masyarakat Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya alam di laut dan di darat. Kehadiran proyek migas menimbulkan rasa khawatir terhadap rusaknya sumber daya alam di kawasan pesisir dan berdampak negatif terhadap wilayah tangkap masyarakat. Apalagi masyarakat di Kepulauan Babar merupakan kelompok masyarakat adat yang kental dengan budaya sasi meti sebagai kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel III-309 Kekhawatiran Masyarakat

No.	Pulau	Kekhawatiran
1	Moa	1. Beberapa masyarakat Pulau Moa khawatir tentang dampak lingkungan dari proyek Lapangan Gas Abadi, seperti pencemaran air dan udara, dan kerusakan hutan. 2. Ketidaktahuan masyarakat akan rencana operasi memunculkan kekhawatiran bahwa proyek Gas Abadi dapat menyebabkan pengusuran masyarakat Moa dari tanah adat mereka. 3. Sebagian masyarakat Moa merasa bahwa INPEX tidak transparan dalam memberikan informasi tentang proyeknya kepada masyarakat.
2	Leti	4. Ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari proyek Gas Abadi, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, dan hilangnya habitat flora dan fauna. 5. Masyarakat Leti khawatir proyek Gas Abadi akan memicu perubahan sosial dan budaya, seperti migrasi, urbanisasi, dan hilangnya tradisi dan nilai-nilai lokal. 6. Masyarakat Leti ingin memastikan bahwa manfaat dari proyek didistribusikan secara adil dan merata, dan mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait proyek.
3	Lakor	1. Masih ada ketidakpastian tentang detail proyek INPEX, seperti skema pembagian keuntungan, dampak lingkungan jangka panjang, dan rencana pelibatan masyarakat.
4	Luang	1. Masyarakat Pulau Luang memiliki ketergantungan tinggi dengan laut, maka diharapkan bahwa proyek ini tidak mengganggu ekosistem laut (terkait dengan usaha budidaya rumput laut dan perikanan tangkap) dan tidak mengubah biofisik laut. 2. Masyarakat berharap proyek ini tidak merusak budaya dan lingkungan di MBD termasuk tradisi "Laor" atau menangkap cacing laut. 3. Blok Masela diharapkan tidak membuat gesekan sosial terkait isu identitas dan primordialisme.
5	Pulau Masela	1. Masyarakat khawatir akan ada dampak negatif terhadap perubahan di pesisir dan di laut karena perairan dekat Pulau Masela adalah wilayah penangkapan ikan sehingga masyarakat takut kehilangan ikan. 2. Masyarakat khawatir mereka akan semakin sulit untuk berbudidaya rumput laut. 3. Masyarakat memiliki kekhawatiran munculnya perubahan budaya akibat masuknya budaya dari luar terhadap budaya lokal. 4. Terdapat kekhawatiran bahwa pengeboran gas akan menimbulkan pencemaran di laut dan udara.

No.	Pulau	Kekhawatiran
6	Babar Barat	1. Masyarakat khawatir bahwa proyek ini akan menggeser adat budaya dan merusak lingkungan biota laut. 2. Masyarakat juga khawatir proyek akan berdampak pada hasil tangkap nelayan. 3. Masyarakat berharap proyek ini tidak merusak budaya dan lingkungan di MBD termasuk tradisi “Laor” atau menangkap cacing laut.
7	Babar Timur	1. Masyarakat khawatir bahwa lingkungan rusak laut dan darat akan rusak akibat proyek. 2. Terdapat juga kekhawatiran dikesampingkannya putra-putri Maluku Barat Daya dalam proses rekrutmen tenaga kerja. 3. Masyarakat mengharapkan adanya tindak lanjut dari AMDAL dengan program-program pelaksanaannya di Kepulauan Babar.

Sumber: Data Primer, Survei Sosial 2024

3.3.3.2.2 Adat dan Budaya Masyarakat

Adat dan budaya masyarakat Maluku Barat Daya merupakan warisan budaya yang berharga dan perlu dilestarikan karena keberagaman dan kekhasan adat dan budaya ini menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Maluku Barat Daya. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, pakaian, tarian, musik, dan tradisi. Pakaian adat Maluku Barat Daya biasanya terbuat dari kain tenun tradisional yang memiliki motif dan warna yang khas. Pakaian adat ini biasanya dipakai pada acara-acara adat dan ritual keagamaan. Tarian tradisional Maluku Barat Daya sangat beragam dan memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Beberapa tarian populer di Maluku Barat Daya antara lain Tari Lenso, Tari Bambu Gila, dan Tari Perang. Selain tarian, terdapat juga beberapa bentuk ritus tradisional yang masih eksis. Beberapa tradisi yang terkenal antara lain Upacara Adat Sasi, Tradisi Pela Gandong, dan Tradisi Upacara Bakar Batu. Untuk bentuk-bentuk manifestasi pada etik, masyarakat Maluku Barat Daya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini diwariskan turun-temurun dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Maluku Barat Daya hingga saat ini.

Sebagai masyarakat adat, masyarakat di Kepulauan Babar memiliki budaya dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur secara turun temurun. Secara umum masyarakat di Kepulauan Babar mulai dari Luang, Sermata, Babar, Dawelor hingga Masela memiliki ciri dan budaya yang homogen. Misalnya pada budaya kalwedo yang menjadi ciri khas dari masyarakat Kepulauan Babar karena memiliki makna sosial di dalamnya. Budaya kalwedo menunjukkan bahwa masyarakat di Kepulauan Babar memiliki karakteristik budaya yang saling menghormati, saling membantu dalam budaya gotong royong serta saling mengunjungi. Budaya gotong royong di Kepulauan Babar ditemui misalnya di Pulau Masela dan Kepulauan Lemola (Leti, Moa, Lakor). Masyarakat di Pulau Masela sendiri memiliki budaya kebersamaan yang sangat kuat dalam membangun dan menjaga rumah tua. Selain itu dalam hal menopang hidup dan memenuhi kebutuhan nafkah, masyarakat di Maluku

Barat Daya kental dengan gotong royong untuk aktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya perikanan seperti buka tutup sasi meti serta membersihkan kampung.

Hasil riset lapang menemukan bahwa masyarakat di Pulau Masela dan Kepulauan Lemola (Leti, Moa, Lakor) memiliki budaya persaudaraan yang kuat dalam hal saling mengunjungi saudara dan kerabat termasuk jika ada saudara ataupun tetangga yang sakit. Masyarakat Masela menyebutkan kebiasaan dan budaya tersebut dengan istilah *kla-ktuti*. Budaya dan adat menjadi pegangan bagi masyarakat Masela sebagai pedoman hidup yaitu hidup mati sama-sama, senang sama-sama. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel Adat sebagai Lembaga Sosial. Masyarakat di Maluku Barat Daya kental dengan konsep hidup yang dikenal dengan istilah “orang bersaudara”. Konsep tersebut bermakna dan mempertegas hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat bahwa penghargaan terhadap perempuan tidak pernah diabaikan dan dijunjung tinggi. Dalam konteks tersebut, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya terkait perbedaan jenis kelamin tetapi lebih dari itu diaplikasikan dalam hubungan persaudaraan yang kuat.



Gambar III-388. Aktivitas Gotong Royong

3.3.3.2.3 Norma dan Nilai Sosial Budaya

A. Kalwedo

Masyarakat di Maluku Barat Daya dikenal dengan kesantunannya dengan mengucapkan salam *kalwedo* kepada orang lain ketika berpapasan atau ketika bertemu di jalan maupun dalam berbagai acara pertemuan resmi serta acara adat khususnya ketika akan membuka sebuah pembicaraan. Setiap kali seseorang mengucapkan salam *kalwedo* untuk mengawali pembicaraan, maka pendengar akan membalas dengan ucapan salam *kalwedo* pula. Demikian pula ketika akan mengakhiri sebuah pembicaraan, akan ditutup dengan salam *kalwedo* dan dibalas dengan *kalwedo*. *Kalwedo* bukan hanya sekedar salam biasa, *kalwedo* memiliki makna “Damai Sejahtera”. Di dalam ungkapan *kalwedo* terkandung nilai-nilai persaudaraan, perdamaian, persaudaraan, gotong royong, saling menghargai, tanggung jawab, kasih sayang dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam ritual adat yang dilakukan masyarakat di Maluku Barat Daya.

Masyarakat sekitar Pulau Leti, Moa, Lakor dan Luang memaknai Budaya *Kalwedo* sebagai identitas budaya untuk membangun hidup dalam kebersamaan. Bagi masyarakat kepulauan Maluku Barat Daya, *Kalwedo* adalah sebuah suara hati yang selalu merangkul, menghimpun, mempersatukan mereka dalam tugas budaya untuk saling menghidup-hidupkan. Masyarakat sekitar gugusan pulau-pulau tersebut juga selalu mengucapkannya dalam salam *Kalwedo* sebagai penanda sejahtera yang

menumbuhkan energi sosial budayanya bersifat lintas pulau serta merangkul, mempersatukan, menghidupkan, dan membahagiakan.

Watloly (2012) dalam bukunya “Budaya Kalwedo di Maluku Barat Daya” menjelaskan terdapat enam aspek Kalwedo sebagai nilai kemanusiaan maupun kehidupan sosial dan ekonomi, yakni:

- 1) Adanya pengakuan terhadap sebuah jati diri kemanusiaan orang Maluku Barat Daya (Manusia Kalwedo), yang sekaligus menjadi semacam falsafah kemanusiaan orang Maluku Barat Daya yang majemuk, dalam membangun ciri persaudaraan orang Maluku Barat Daya yang bersifat lintas pulau dan bahasa;
- 2) Adanya pengakuan terhadap kemajemukan adat dan bahasa, dalam menjalin persaudaraan dan membangun kehidupan bersama sebagai orang bersaudara dalam masyarakat adat MBD yang berbeda-beda pulau;
- 3) Adanya kewajiban untuk saling mengakui, saling menghargai dan saling bekerjasama diantara kemajemukan adat dan bahasa tersebut untuk kedamaian dan kesejahteraan hidup di antara sesama orang bersaudara;
- 4) Adanya rasa hidup solidaritas antar komunitas masyarakat adat di berbagai pulau dengan keunikan sumberdaya alamnya untuk saling melengkapi dan saling menghidupkan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan serta kesejahteraan;
- 5) Adanya sebuah paham kosmologi, dengan kaidah-kaidah keteraturan hidup yang bersifat lintas pulau, untuk membangun harmoni dengan alam material (fisik) dan immaterial (spiritual) serta unsur-unsur yang saling bertentangan dalam membangun sebuah pola peradaban yang sistemik dan fungsional untuk kemajuan hidup bersama;
- 6) Adanya spirit kebersamaan untuk mentransformasikan aneka arus perbedaan dan pertentangan untuk menjadi arus persaudaraan sejati.

Beberapa wilayah tertentu di sekitar Kawasan Pulau Babar memiliki ungkapan salam secara khusus selain kalwedo. Di Kecamatan Babar Timur misalnya, ucapan salam menggunakan istilah lemyal. Lemyal memiliki makna sebagai ucapan selamat atau salam damai. Ucapan lemyal menjadi sebuah ciri khas dan menjadi kearifan lokal masyarakat yang berasal dari Kecamatan Babar Timur. Selain itu lemyal memiliki nilai sosial untuk membangun dan memelihara hubungan interaksi sosial di masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat di Pulau Masela Kecamatan Masela, ucapan salam dikenal dengan istilah twan. Ungkapan twan dalam bahasa Masela memiliki makna sebagai ucapan salam damai atau salam suka cita. Lebih dari itu twan bermakna harapan kebahagiaan, damai, dan suka cita bagi saudara atau orang yang saling berkomunikasi. Dalam sebuah pertemuan formal, ketika seseorang menyerukan salam twan maka pendengar akan menjawab secara spontan dengan ucapan hoe atau oo twan yang artinya sungguh pasti atau amin. Ketika acara adat atau musyawarah, penggunaan twan diucapkan setelah kesepakatan musyawarah dibuat, kemudian tua adat akan mengangkat satu sloki sopi kemudian menyampaikan salam twan untuk menegaskan bahwa segala sesuatu telah selesai dan pendengar menjawab hoi untuk mengamini dan menyetujui.

Sementara, masyarakat yang bermukim di Pulau Dawelor dan Pulau Dawera memiliki ucapan salam yang berbeda yaitu dikenal dengan pengucapan amerere. Amerere memiliki makna saya atau kami ada di dalam kehidupan bersama atau memiliki arti “kami ada disini dan kami tetap ada disini.”

Amerere nilai sosial berupa simbol solidaritas bagi masyarakat Dawelor dan Dawera khususnya bagi mereka yang berada di perantauan. Artinya di dalam ungkapan kata amerere memiliki makna lebih dalam yaitu sebagai pengikat batin berwujud rasa empati yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi yang dihadapi orang lain. Meskipun terdapat ucapan yang beragam, ucapan kalwedo sebagai ucapan salam merupakan ucapan yang umum digunakan oleh masyarakat masyarakat disekitar Kawasan Pulau Babar, khususnya kepada para pendatang.

B. Sopi

Sopi dalam bahasa Belanda disebut dengan zoopje yang berarti alkohol cair. Sopi merupakan minuman tradisional hasil dari penyulingan nira yang berasal dari bahan baku tanaman koli, kelapa atau enau. Di kawasan Maluku Barat Daya, Sopi dianggap sebagai salah satu simbol adat bagi masyarakat dan merupakan sebuah instrumen penting yang harus ada dalam acara adat. Sopi memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat di Kepulauan Babar yaitu sebagai alat untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Pada acara adat, sopi berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu pembicaraan adat. Sebelum pembicaraan adat dimulai, para pihak harus meminum sopi yang dituangkan ke dalam gelas terlebih dahulu. Dalam perspektif budaya, sopi memiliki peran memberi makna salam. Implementasinya adalah sebelum sopi diberikan kepada orang lain maka dari segi aturannya, pelayan yang menyiram sopi di sloki harus lebih dulu mencicipinya. Sebelum sopi diminum, sepenjamu atau penyiram sopi lainnya. Artinya sopi tersebut aman dan damai, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dan sekaligus sebagai jaminan bahwa sopi yang dihidangkan itu layak untuk diminum bersama.

Makna kedua yaitu biasanya dalam membicarakan masalah-masalah penting, ada orang yang dipandang layak untuk berbicara dan memberikan nasehat. Pembicaraan lazimnya dilakukan sambil memegang sloki berisi sopi. Setelah berbicara, sloki tersebut menjadi rebutan. Menurut pemahaman masyarakat adat setempat, tindakan itu merupakan sebuah penghormatan atas pembicaraan tersebut yang dipandang sebagai hikmat dan dianggap sebagai sebuah tanda persetujuan atas pembicaraan yang disampaikan. Makna ketiga menjelaskan bahwa sopi sebagai salah satu elemen adat sebagai norma sosial berperan menyelesaikan berbagai masalah, masyarakat adat di Kepulauan Babar menempatkan sopi dalam fungsi yang positif dan bahkan dipandang berperan sebagai “hakim”. Sopi sebagai alat penyelesaian sebuah masalah atau perkara biasanya digunakan dalam persoalan seperti perkelahian, pertengkaran, penyelesaian batas tanah, dan lain-lain.



Gambar III-389. Sopi Sebagai Simbol Adat

C. Siri Pinang

Siri pinang bagian dari simbol adat budaya kalwedo. Penggunaan siri pinang mengandung nilai-nilai etis, moral dan spiritual yang dapat dijadikan sebagai pengaturan norma masyarakat. Siri pinang dalam kalwedo memaknakan sikap hati yang terbuka untuk menerima, berbagi dan melayani seseorang serta membangun persaudaraan dalam damai dan suka cita. Pemberian siri pinang pada saat penyambutan tamu merupakan bentuk penghormatan tuan rumah kepada tamu yang bermakna saling menghargai dan ketulusan. Terdapat tiga elemen dalam siri pinang yaitu siri yang berisi daun dan buah, pinang dan kapur. Tiga elemen tersebut berpadu yang mengandung nilai kebersamaan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kapur berwarna putih bermakna nilai ketulusan hati dalam membangun hidup bersama dalam persaudaraan.



Siri Pinang



Proses adat menyambut tamu menggunakan siri pinang dan sopi

Gambar III-390. Sarana Adat Siri Pinang saat penyambutan tamu

Sasi dan Tata Kelola Sumber Daya

- Pengertian Sasi

Sasi merupakan sebuah bentuk kearifan lokal masyarakat untuk menjamin kelestarian sumber daya alam yang merupakan anugerah tuhan bagi mereka. Upaya ini merupakan praktik pengelolaan berbasis komunitas (community governance) dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya. Sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai asal usul kata sasi. Menurut Riedel, sasi berasal dari kata “sanksi”, tetapi pendapat ini dibantah oleh Prof. Dr. J. Lokollo, ahli hukum dari Universitas Pattimura. Alasannya “sanksi” berasal dari Bahasa Melayu padahal jauh sebelum Bahasa Melayu masuk ke Maluku, penduduk negeri di Maluku telah memakai nama “tanda sasi” sebagai tanda adanya sasi.

Sasi merupakan suatu budaya yang bersifat hukum adat bagi masyarakat di Maluku untuk menjaga potensi beserta hasil sumber daya alam baik itu di laut dan di darat. Proses pemanfaatan sumber daya alam baik itu di darat maupun di laut biasanya menggunakan sistem buka tutup secara tradisional, di mana sasi digunakan sebagai suatu kebijakan dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam di laut dan darat. Sistem buka tutup yang dimaksud ialah pemanfaatan sumber daya alam secara turun temurun dan umumnya mengatur jenis yang boleh diambil, mengatur terkait waktu buka tutup, lokasi pemanfaatan, siapa yang boleh memanfaatkan dan sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar aturan. Jika sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Sasi memiliki peran penting selain untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan, juga untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang dapat mengganggu keberlanjutan kehidupan masyarakat dimasa mendatang. Disisi lain sasi diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola produk kelautan dan perkebunan secara bijak, menanamkan rasa memiliki bersama sehingga dalam membagikan hasilnya pun dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Selain itu, tujuannya diberlakukannya sasi untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan dunia spiritual, karena bagi masyarakat ataupun individu yang melanggar aturan sasi akan mendapat sanksi spiritual dan sanksi komunitas.

- Hukum Sasi

Dalam sistem sasi terdapat aturan yang mengikat untuk semua orang, baik pemilik maupun orang lain di sekitar objek atau sumber daya alam yang disasi. Aturan dimaksud adalah larangan untuk mengambil (no take) sumber daya alam yang diikat dalam ritual sasi. Selama masa tutup sasi, masyarakat dilarang mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Pelanggaran terhadap aturan sasi, berupa mengambil atau memanen sebelum waktu buka sasi akan memperoleh sanksi baik yang berupa sanksi adat atau sanksi gereja. Bentuk sanksi ditentukan oleh Kewang dan Saniri Negeri. Masyarakat Maluku Barat Daya pada umumnya percaya area yang disasi memiliki larangan yang bersifat religio-magis selain sekedar pantangan. Mereka percaya jika mengambil sembarangan dapat berdampak bagi mereka seperti kutukan, sakit tiba-tiba secara magis, atau berujung pada kematian.

- Praktik Sasi

Tradisi sasi hingga saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat di kawasan pulau-pulau kecil Maluku Barat Daya. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil seperti Pulau Leti, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Babar, Pulau Masela, Pulau Wetar dan Pulau Dawelor mengandalkan hasil pertanian dan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Maka untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian di darat dan di laut, masyarakat menggunakan kearifan lokal sasi. Terdapat perbedaan penyebutan sasi di beberapa pulau kawasan Maluku Barat Daya. Misalnya di Babar Barat sasi disebut dengan ert, di Babar Timur sasi disebut dengan ererka sementara di Luang Sermata disebut dengan Hgeralay/Hgera sedangkan di Pulau Masela, Pulau Wetar dan Pulau Dawelor tetap disebut dengan sasi. Di pulau Leti, Pulau Moa, Pulau Lakor dikenal sertu krei (sasi gereja) dan swer marne (sasi adat). Jenis tanaman yang disasi adalah bambu, kelapa, semangka, jeruk, dan tanaman buah-buahan lainnya. Namun khusus pada tanaman kelapa (sasi dusun) biasanya ditetapkan Sasi Gereja di mana hasil dari sasi akan digunakan untuk kepentingan pembangunan gereja. Sementara pada Sasi Meti, komoditas yang disasi umumnya adalah lola (siput laut/*Trochus niloticus*), teripang dan batulaga (Siput Hijau/*Turbo marmoratus*).

Masyarakat di Pulau Leti juga melakukan sasi hasil laut (ikan, lola, batulaga) dalam kurun waktu tertentu (1-2 tahun) dan itu dilaksanakan dalam sasi adat maupun sasi gereja. Hasil hasil laut yang akan di sasi dilakukan dalam rapat bersama dengan pemangku adat untuk memutuskan harga dan waktu untuk membuka sasi. Jika sudah ada kesepakatan maka akan diberi pengumuman oleh marinyo (petugas adat) bahwa sasi akan dibuka. Selanjutnya pendeta akan berdoa di gereja untuk acara buka sasi. Sedangkan sasi desa biasanya dilakukan untuk tanah atau lahan. Sasi desa dilaksanakan atas keputusan pemerintah desa dan tua-tua adat yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman marinu. Di Desa Leti ada juga dikenal dengan istilah Matakau

(mat'tue), yaitu penanda sasi yang diletakkan di pohon kelapa, mangga atau jeruk agar tidak ada orang yang mengambil secara sengaja.

Di Pulau Moa dan Lakor ada tiga jenis sasi yakni Sasi Gereja (sertu krei), Sasi Desa (sertu nane), dan Sasi Matakau (mat'oe). Tiga jenis sasi ini sampai sekarang masih diberlakukan di Moa. Penduduk pulau ini sangat menggantungkan hidup mereka pada ketersediaan sumber daya alam darat dan laut. Beberapa hasil laut yang bernilai ekonomi seperti lola, batulaga, teripang, dan rumput laut menjadi andalan mereka. Hasil laut ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu dijaga. Masyarakat melakukan sasi untuk sumberdaya tersebut pada area dari bibir pantai hingga batas pasang surut (meti). Pada area tersebut setiap orang dilarang mengambil komoditas yang disasi, namun boleh melintas dan mengambil komoditas yang tidak disasi. Saat sasi diberlakukan akan dilakukan melalui upacara adat dan pemimpin masyarakat lintas desa dan pulau sekitar diundang. Hal ini agar sasi yang dilakukan saling diketahui antar warga lintas desa dan pulau sekitar.

Di Pulau Masela, sasi meti hanya komoditas lola dan teripang. Sasi darat pada umumnya dikelola oleh perorangan dan gereja, sementara sasi di meti sebagian besar dikelola oleh marga-marga asli di wilayah masing-masing. Misalnya sasi meti di Desa Lawawang dipangku oleh marga Tiwery, Warkey, dan Biayey. Di Desa Telarora, sasi meti dipangku oleh marga Borolla, Iwamony, Yordanus Iwamone, Unkelifta, dan Wakim. Pada intinya, setiap wilayah desa atau kampung dikuasai oleh pemangku dari marga asli kampung tersebut. Sementara itu, sasi di Pulau Babar yang terbagi dalam dua kategori: sasi meti per wilayah desa dan sasi pemangku marga. Misalnya, Desa Imroing mempunyai meti laut terbagi dalam tiga pemangku: Pemangku pertama yaitu Marga Blukora, pemangku kedua yaitu Marga Romkeny, Marga Imeyo, dan Marga Imonora dan pemangku ketiga yaitu Marga Imuly, Marga Lukmetiable, dan Marga Unawola. Sedangkan di Tapa dan Emplawas, meti dipangku oleh wilayah desa. Waktu pelaksanaan sasi meti umumnya paling lama selama lima tahun sedangkan sasi darat untuk tanaman paling lama dilakukan selama dua tahun. Namun pada intinya buka sasi dapat dilakukan kapan pun sesuai kesepakatan bersama dan menyesuaikan pada kebutuhan serta keadaan dengan mempertimbangkan ketersediaan hasil sasi baik itu yang di meti dan di darat.

Pada sasi gereja, biasanya proses buka dan tutup akan dilakukan oleh ketua majelis jemaat. Prosesi tersebut dilakukan pada hari Minggu. Ketua majelis jemaat akan menyampaikan kepada seluruh jemaat melalui warta jemaat kemudian dikukuhkan dengan doa oleh pendeta. Setelah itu pemilik sasi akan memasang tanda pada lokasi yang disasi agar masyarakat secara umum mengetahui bahwa lokasi tersebut sedang disasi. Biasanya tanda sasi menggunakan papan dan daun kelapa.

Hasil sasi akan dibeli secara borongan oleh bos dan bos sebagai pembeli kemudian membayar kepada desa dan penyelam yang mengambil dan mengumpulkan tangkapan dalam area sasi. Nilai pendapatan dari sasi selanjutnya akan dibagikan kepada desa dan mata rumah melalui Saniri. Adapun sistem bagi hasil sasi meti dibagi menjadi dua bagian yaitu satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penyelam, namun bisa juga menggunakan tiga bagian yaitu satu bagian pemilik dan dua bagian penyelam, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Sanksi bagi pelanggaran sasi baik itu di darat dan di laut, hampir sama berupa sanksi moril berdasarkan kepercayaan agama dan firman Tuhan. Dalam tradisi masyarakat yang memeluk agama Kristen Protestan, seseorang yang melanggar aturan pelaksanaan sasi akan mendapatkan sanksi berupa sakit dan akan ketahuan karena sakit yang dialami tidak kunjung sembuh kemudian melakukan pengakuan dihadapan majelis gereja atau pendeta. Setelah melakukan pengakuan

biasanya penyakit atau sakit yang dialami pelaku akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian pelaku akan dikenakan sanksi adat yaitu membayar 1 basta, kemudian mendapatkan pembinaan dan membuat perjanjian. Namun jika mengulangi lagi akan dikenakan denda 1 basta ditambah 1 pasang emas. Basta adalah jenis kain adat yang digunakan dalam proses resolusi konflik dan terdapat tujuh jenis kain yang memiliki harga berbeda-beda (Matakena 2019).



Sasi Dusun Kelapa di Babar Timur



Sasi Semangka di Pulau Masela



Aktivitas penangkapan ikan di lokasi sasi meti Desa Telalora Pulau Masela



Lokasi sasi meti di Desa Iblatmuntah Pulau Masela

D. Pernikahan

Tradisi pernikahan di wilayah Kepulauan Leti, Moa, dan Lakor (Lemola) di Maluku Barat Daya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan yang ditemukan di Lemola adalah soal kekerabatan, tata cara pernikahan, peran tetua adat dan mas kawin. Kekerabatan yang ada di Lemola menerapkan sistem patrilineal di mana garis keturunan dan pewarisan harta akan mengikuti garis ayah. Dalam pernikahan, masing-masing wilayah memiliki tata cara pernikahan adat yang berbeda. Dalam upacara pernikahan, Tetua Adat memiliki peran penting, mulai dari proses lamaran hingga pernikahan adat. Satu hal penting dalam proses pernikahan di Lemola adalah mas kawin atau mahar. Mas Kawin di Lemola umumnya bernilai tinggi, dan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di Lemola tergolong mahal.

Proses pernikahan ini terdiri dari tiga tahap yakni a) Tahap persiapan, dan b) Upacara. Pada tahapan persiapan terdapat tiga prosesi penting yakni:

- Pinangan: Pihak keluarga laki-laki melamar pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan (pinang) sebagai tanda keseriusan.

- Pemberian mas kawin: Biasanya berupa uang tunai, perhiasan emas, dan barang-barang keperluan sehari-hari (Gong, Kerbau, Kain Tenun, Kuda, Babi)
- Penentuan tanggal pernikahan: Dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga.

Sementara itu, pada upacara pernikahan, terdapat tiga prosesi utama yang dijalankan yakni:

- Prosesi adat: Biasanya melibatkan tarian adat, nyanyian, dan doa restu dari para tetua adat.
- Pertukaran cincin: Menandakan ikatan pernikahan secara adat.
- Pesta pernikahan: Biasanya dirayakan bersama keluarga dan masyarakat sekitar dengan hidangan khas daerah.

Namun terdapat juga beberapa perbedaan dalam tradisi pernikahan di Pulau Leti, Moa dan Lakor. Beberapa di antaranya disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III-310. Keragaman tata cara pernikahan di Pulau Leti, Moa, dan Lakor

No	Upacara	Leti	Moa	Lakor
1	Serah terima mas kawin:	Mas kawin diserahkan secara bertahap sebelum dan sesudah pernikahan.	Mas kawin biasanya diserahkan seluruhnya sebelum pernikahan.	Serah terima mas kawin bisa dilakukan sebelum atau sesudah pernikahan, tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga.
2	Prosesi adat:	-	Terdapat tradisi "pukul kepala" secara simbolik sebagai tanda penerimaan mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita.	Terdapat tradisi "mandi kembang" di mana kedua mempelai dihujani dengan bunga sebagai simbol pemberkatan.
3	Hidangan pesta	Biasanya menggunakan sagu sebagai bahan pokok.	Sering menggunakan ubi jalar dan pisang sebagai bahan pokok.	Sering menggunakan papeda dan ikan laut sebagai hidangan utama.

Sumber: Data Primer 2024

Sementara itu, terdapat dua sistem pernikahan di Kepulauan Babar yaitu kawin masuk atau pernikahan yang mengikuti istri dan keluarga istri karena menganut kekerabatan matrilineal dan ada juga istilah kawin keluar atau pernikahan yang ikut suami atau keluarga suami dalam sistem kekerabatan patrilineal. Wilayah di Kepulauan Babar yang mengikuti budaya kawin masuk adalah Luang Barat, Tepa, Ilweyar, Weitota, Letsiara, Watrupun, Letwuring, Dawelor, Dawera dan lain-lain.

Sementara wilayah yang menjalankan sistem kawin keluar adalah Pulau Wetar, Pulau Masela, Imroing, Tela, Masbuar, Emplawas, Sermata dan Luang Timur. Pada sistem kawin masuk, setelah prosesi pernikahan dan masominta, pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya mendatangi rumah mempelai perempuan dengan membawa kain basta, sopi dan perlengkapan perkawinan adat. Pada momen ini, pengantin laki-laki mengenakan kain basta dan perempuan mengenakan baju cele hitam. Setelah sampai di depan rumah, perwakilan pengantin laki-laki mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, perwakilan pengantin laki-laki memegang segelas sopi kemudian memulai pembicaraan seputar perkawinan. Selanjutnya perwakilan keluarga perempuan membalas dengan memegang sopi dan menyambut baik pembicaraan dan kedatangan pengantin laki-laki dan kedua mempelai duduk berdampingan.

Pada sistem kawin keluar, mempelai perempuan dijemput oleh keluarga pengantin laki-laki serta diantar oleh keluarga pengantin perempuan mendatangi rumah mempelai laki-laki dengan membawa sopi dan perlengkapan adat lainnya. Pada sistem kawin keluar, pakaian yang digunakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan menggunakan kain basta yang dililitkan ke tubuh. Acara selanjutnya kemudian pelaksanaan sumpah adat oleh tetua adat dan melakukan penyiraman sopi pada tangan kedua pengantin oleh Saniri. Setelah itu, kepala adat membacakan naskah perkawinan adat. Pernikahan secara adat menurut masyarakat di Kepulauan Babar dianggap sah resmi telah menyatukan kedua mempelai sehingga pengantin boleh tinggal bersama meskipun belum menikah melalui pemberkatan gereja.



Pengesahan Pernikahan Secara Adat di Pulau Masela



Pakaian Basta yang digunakan pengantin di Pulau Masela

E. Tyarkan

Masyarakat di Kepulauan Babar memiliki tradisi lisan yang dikenal dengan nyanyian adat yang di dalamnya terdapat pantun adat. Nyanyian adat secara umum disebut dengan tyarkan. Pada nyanyian adat terdapat beragam istilah tersendiri disetiap wilayah, misalnya di Letwurung Kecamatan Babar Timur disebut dengan lyar, sementara di Wetar disebut dengan nyar/niara dan di Pulau Masela disebut dengan nyer (bahasa Masela). Syair yang digunakan dalam tyarkan adalah bahasa tua yang disebut juga bahasa tanah, bahasa asli, atau bahasa leluhur yang diyakini memiliki daya magis. Tyarkan memiliki fungsi dan peran untuk menyampaikan pesan moral dan ungkapan rasa syukur atas kemurahan Tuhan. Tyarkan merupakan nyanyian adat yang dianggap sakral karena mengandung falsafah hidup yang dalam dan diyakini memiliki kekuatan magis. Kesakralan tyarka membentuk suatu sikap penghargaan dan kesungguhan, baik oleh pencipta, penyanyi, maupun

penonton atau pendengar. Pantun adat dan nyanyian adat biasanya digunakan ketikan acara penyambutan tamu, acara pernikahan, penyelesaian konflik dan acara adat lainnya.

F. Struktur Adat dalam Masyarakat Adat

Masing-masing wilayah adat di Maluku Barat Daya yang menjadi basis adat dan kebudayaan Kalwedo selalu memiliki beragam partikularitas sebagai pemerintahan adat yang otonom. Wilayah pemeritahan adat yang otonom itu disebut Leke (di Pulau Kisar), Leta/Lete (di Pulau Letti dan Romang), Letu (di Pulau Damer), Leka atau Lek (di Kepulauan Bbar), dan Ilih atau leta (di Pulau Luang dan Wetar). Unit-unit kecil di bawahnya disebut sebagai Lahunane atau Luwuana atau anak negeri (dusun).

Berdasarkan laporan hasil inventarisasi lembaga adat di Maluku oleh UNPATTI (2010) dapat dilihat bahwa di Maluku Barat Daya dapat dijumpai lembaga pemerintahan adat, lembaga sosial adat, lembaga ekonomi adat, dan lembaga kekerabatan adat. Secara umum tipologi struktur pemerintahan adat di Maluku Barat Daya terdiri dari dua bentuk lembaga:

- Raja (Rai), Orang Kai (orang kaya), Bap Kai atau Gareng. Jabatan tersebut merupakan jabatan eksekutif adat;
- Saniri (Dewan Adat) adalah jabatan legislatif adat;
- Kepala Soa (Clan);
- Kepala Mataruma (Marga)

Frank Cooley (1987:236) dalam Watloly (2012) menyebutkan bahwa sistem pemerintahan adat adalah sebuah sistem “demokrasi terpimpin”. Fakta historis menunjukan bahwa pemerintahan adat tersebut, sebelumnya hanya terbentuk dalam pengorganisasian sosial yang sederhana, seperti bentuk rukun (masyarakat keluarga) kemudian berkembang dan dilembagakan secara formal pada zaman permulaan abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sistem pemerintahan adat (Rai) hanya terdapat di Wonreli – Pulau Kisar, meskipun dulunya tradisi tersebut dikenal oleh beberapa komunitas adat, tetapi akhirnya hilang dan kemudian digantikan dengan Orang Kai yang dominan di Maluku Barat Daya. Umumnya masyarakat pewaris pemerintahan Orang Kai atau Orang Kaya dijumpai di Pulau Babar, Luang, Sermata, Moa, Lakor, Leti, Damer, dan sebagian Kisar dan Romang. Jabatan yang sama di dalam kehidupan masyarakat adat di Pulau Leti disebut sebagai Bap Kai dan di Pulau Wetar disebut Gareng. Raja dan Orang Kai, Bap Kai, orang kaya membawahi sejumlah kepala soa dalam wilayah kekuasaan adatnya.

Setiap Kepala pemerintahan adat mesti dipilih dari klen-klen asil yang memiliki hak untuk menduduki jabatan eksekutif adat yang dipandang sakral. Dalam hal tersebut, bila klen yang bersangkutan belum memiliki calon yang layak dan cakap, maka klen yang bersangkutan akan mengambil dari klen yang terdekat hubungan kekerabatannya untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan adat atas nama klen penguasa atau klen parenta yang dimaksud.

Tabel III-311. Struktur dan Bentuk Pemerintahan Adat di MBD secara Umum

Wilayah Pemerintahan ADAT	Pelaksana Pemerintahan Adat		Lembaga Penegak Adat
Letu, Leta, Lete, Leka, Leke, Ilih	Raja (Rai) Hanya di Wonreli-Kisar	Orang Kai, Bap Kai atau Gareng Pada sebagian besar pulau di MBD (Pulau Romang, Leti, Moa, Lakor Luang, Sermatang, Babar, Wetar, Damer, serta sebagian Kisar kecuali Wonreli.	Saniri
Dusun/Soa	Kepala Soa di 7 Dusun (Yawuru besar, Mesiapi, Woorono, Romleher Utara dan Selatan, Kioumanumere, Nouwuru)	Kepala Soa berjumlah ratusan di Maluku Barat Daya.	Saniri Soa
Mataruma/Marga	Mataruma (Ditunjuk oleh raja dan dilantik dalam forum adat Marna Luhulima)	Mataruma Ditunjuk oleh marga berdasarkan silsilah dan dilantik oleh saniri negeri	Saniri mataruma

Sumber: Data Primer 2024

Seiring perkembangan pemerintahan Desa di seluruh wilayah Indonesia maka gambaran tradisi pemerintahan adat tidak lagi sejalan dengan struktur lama. Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia membuat struktur adat beradaptasi dengan model pemerintahan formal. Dalam perkembangannya Letu, Leta, Leka atau Lekedi di Maluku Barat Daya telah menerapkan pola rekrutmen demokrasi terbuka. Bahkan, setiap kali kebijakan pembangunan selalu berkaitan dengan rekayasa sosial baru dalam sistem pemerintahan adat setempat. Kini adat tak lagi ajeg dengan struktur lama yang ada sebelumnya. Akibatnya sistem kepemimpinan adat makin terkikis habis dalam menyesuaikan sistem pemerintahan dinas. Hampir tidak terdengar lagi peranan Saniri Negeri yang otoritatif seperti sebelumnya. Yang selalu didengar adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) atau LMD (Lembaga Masyarakat Desa). Dampaknya, masyarakat semakin jauh dari otonomi yang diharapkan (termasuk ideal-ideal otonomi daerah), sebaliknya masyarakat malah semakin heteronom (terhempas dan terasing) dari keberibadian sosial adatnya.

Tabel III-312. Lembaga Sosial Adat yang ada di Maluku Barat Daya

Wilayah Adat	Lembaga Sosial Adat	Lembaga Ekonomi Adat	Lembaga Kekerabatan antara Komunitas Adat	Lembaga Kesenian Adat	
				Kesenian	Rumah Adat
Kisar	Roson (Kerja Sama)	Hewere (Sasi)	Osno Honoli (Hidup bersaudara, saling membantu)	Peuk (Seka) Syair/Pantun adat Naikada (doa adat) Anyaman dari daun, kulit bambu, Tenun	Rom Koetenan (Rumah Besar Marga)
Romang	Rosna	Nyertuyarna (Sasi)	Ina-nara (hubungan kandung/sedarah) Amahialy (hubungan antar marga lintas leka dan lintas pulau, juga	Seka Anyaman Belang	Rumah Adat

Wilayah Adat	Lembaga Sosial Adat	Lembaga Ekonomi Adat	Lembaga Kekerabatan antara Komunitas Adat	Lembaga Kesenian Adat	
				Kesenian	Rumah Adat
			hubungan adik kaka yang lintas marga dan lintas leka; Panamali		
Wetar		Sasi	Asurang (persaudaraan lintas marga, negeri, dan pulau)	Seka (tabuh tifa, gerakan heroic, tanpa syair)	Rumah adat
Leti, Moa, Lakor	Muttuw	Sasi	Ina-ama Sobat Panamali	Seka-sikin (musik tifa) Anyaman, Tenun Belang	Rumah Adat atau Pusat Negeri
Luang-Sermata	Liola (P. Luang) Liyiola (P Sermata) Artinya Sistem Kerjasama Urgeni, Te'ewa (Antaran antara bahan makanan kepada orang terutama janda tua yang tidak berlayar/membeli bahan makanan di pulau lain. Liola/Lyola = Tanggungan sanak saudara atau kerabat untuk meringankan	Hgeralay (Sasi)	Luwu Roma (sanak kerabat) Talla atau sobat (Persahabatan : biasanya dengan orang dari pulau lain). Re'a-Pan-ni (Hubungan kekerabatan karena perkawinan)	Tiwla Prai (alat musik tabu pengiring tari seka) Loi Hreka (menari/Seka). Walakey = tari dengan menggunakan belahan bambu (semacam tari gaba-gaba) diiringi lagu tanah	Rom Alyoha, Rom Lawna, Rom Torlely, Rom Hayori
Masela	Nyiola (Saling membantu)	Niola (sistem pertukaran hasil atau bahan makanan) Weira (sasi)	Arwaila (saudara antar dan lintas marga) Panamali	Ehe Lawn (Tari Seka Besar) Wai Seka (Seka kecil) Nyera (lagu/pantun) Tiarka Anyaman Lomba belang	Haik nekra (Ruanh adat tempat musyawarah)
Damer	Nyola	Sasi	Ina-nara, ama-siali (hubungan bersaudara) Ari-Aa (Adik-kaka) Banar (bikin panas hubungan persaudaraan) Panamali	Seka Anyaman dari daun, rotan, dan bambu Lomeba belang (resi damu)	Rapora atau Pusat Negeri

Sumber: Laporan hasil penelitian Lembaga Adat Maluku, 2010

Struktur pemerintahan adat di Pulau Leti, Moa, dan Lakor memiliki kemiripan yakni struktur pemerintah Orang Kai atau Bap Kai sebagai eksekutif, dan Saniri sebagai dewan legislatif dan yudikatif adat. Sebagaimana di Maluku Barat Daya pada umumnya, kelompok penguasa disebut

Orang Kaya karena dipandang sebagai klen asli yang memiliki hak petuanan tanah dan dapat membagi tanah yang dikuasai kepada marga lainnya. Umumnya perubahan struktur pemerintah adat masif tergeser menjadi beririsan dengan desa dinas ketika terjadi pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979. Pasca lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014, percobaan sinkretik rezim desa dinas dengan formasi adat telah menyebabkan perubahan nilai sosial pemerintahan. Pemerintahan sebelumnya yang bersifat pengabdian dan voluntaristik berubah menjadi materialistik karena masuknya dana desa. Saat ini jabatan Kepala Desa menjalankan tugas sekaligus sebagai Ketua Adat. Secara umum kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat desa.

Masyarakat di wilayah Pulau Leti, Moa dan Lakor memiliki struktur yang hampir sama pada lembaga adatnya. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam struktur lembaga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-313. Istilah dalam Lembaga adat di Lemola (Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor)

Nama Pemimpin	Leti	Moa	Lakor
Kepala Desa	Orang Kai	Orang Kai	Orkai
Kepala Soa	Kapal Soe / Kapal Hoe	Kapal Sue	Kapal Ho
Saniri	Saniri	Saniri	Saniri
		Orlete/Riehre	

Sumber: Data Primer 2024

Masyarakat di ketiga pulau tersebut memiliki ikatan adat istiadat yang terbentuk secara turun temurun dalam kelompok yang memiliki marga yang sama atau dari garis keturunan yang sama. Kelompok marga atau kelompok yang sama ini membentuk mata rumah yang dipimpin oleh saniri mata rumah. Tugas saniri adalah mengurus kepentingan mata rumah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat (perkawinan, masalah batas tanah, pelanggaran etika, dan lain berkaitan dengan adat) serta sanksi terhadap pelanggaran adat yang dilakukan. Kelompok mata rumah ini kemudian akan membentuk Soa yang dikepalai oleh seorang Kepala Soa. Tugas Kepala Soa adalah memimpin soa dan mengurus semua kepentingan soa termasuk melaksanakan kerjasama dengan saniri dan kepala desa untuk urusan adat istiadat. Secara umum kedudukan lembaga adat dalam struktur adat dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar III-391. Struktur Adat di Kepulauan Leti, Moa, dan Lakor

Masyarakat yang mendiami gugusan Kepulauan Babar yaitu Pulau Luang, Sermata, Babar, Wetang, Dai, Dawelor dan Dawera serta Pulau Masela juga merupakan kelompok masyarakat adat. Masyarakat yang bermukim di pulau-pulau tersebut merupakan kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah adat secara turun-temurun, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam serta memiliki karakteristik kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum dan lembaga adat.

Masyarakat di Kepulauan Babar dibagi ke dalam dua wilayah adat yaitu wuwuli nouli/wuwlu lawlye dan wilayah adat ilwyar watmier/ilwyar wakmyer. Wuwuli nouli/wuwlu lawlye merupakan kelompok masyarakat yang dianggap sebagai kelompok masyarakat yang lebih dahulu muncul, di mana wilayah adatnya disebut dengan daerah muka tanah atau matahari terbit.

Sementara ilwyar watmier/ilwyar wakmyer adalah kelompok masyarakat yang berasal dari pasir putih atau batu merah, dengan wilayah adatnya disebut dengan daerah belakang tanah atau matahari terbenam. Hubungan kekerabatan antara kedua wilayah adat tersebut sudah terbentuk sejak zaman para leluhur sehingga tetap dijaga dan dipelihara serta memiliki struktur alam gaib yang dijaga dan dihormati.

Tabel III-314 Wilayah Adat di Kepulauan Babar

Kecamatan	Wuwuli Nouli	Ilwyar Watmier
Babar Barat	Desa Imroing Desa Tapa Desa Waitota Desa Letsiara Desa Watrupun Pulau Dai	Desa Tela Desa Masbuar Desa Yaltubung Desa Manuwui
Babar Timur	-	Masyarakat Babar Timur
Pulau Masela	-	Masyarakat Pulau Masela
Dawelor Dawera	-	Masyarakat Pulau Dawelor dan Dawera
Mndona Hyera	Masyarakat Pulau Luang dan Sermata	-

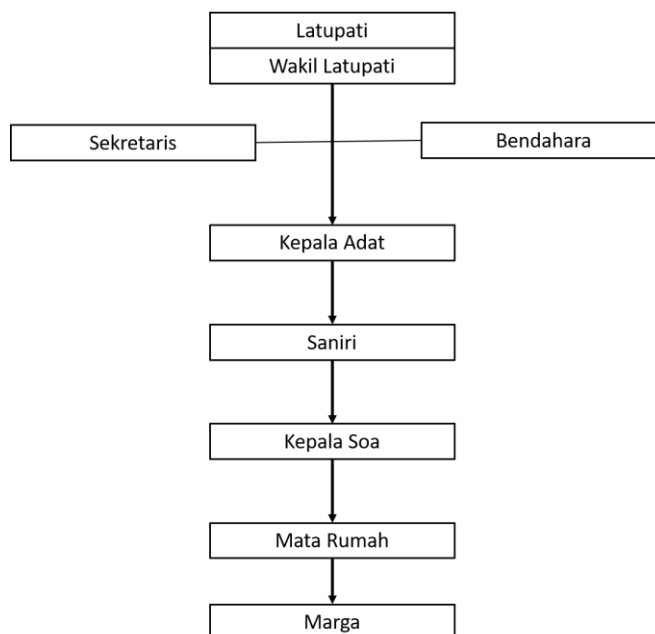
Sumber: Muatan Lokal Kepulauan Babar 2019

Salah satu karakteristik masyarakat adat adalah memiliki lembaga adat yang berperan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat. Lembaga penegakan adat di Kepulauan Babar dikenal dengan sebutan Saniri. Saniri adalah dewan adat yang melaksanakan fungsi legislatif dan yudikatif. Pemilihan anggota Saniri berasal dari mata rumah yang dilihat dari status keturunannya dan silsilah adat. Pengangkatan Saniri berasal dari mata rumah. Saniri yang mewakili mata rumah berfungsi untuk mengawal, menegakkan adat dan menghadiri pertemuan adat, memutuskan hal-hal yang terkait dengan permasalahan adat, pernikahan adat, serta melakukan mediasi dan memperbaiki hubungan kekerabatan.

Masyarakat di Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan kelompok masyarakat desa adat atau disebut dengan negeri. Secara umum setiap desa adat di Pulau Masela dan Pulau Babar memiliki lembaga adat desa yang dipimpin oleh kepala adat di tingkat desa sedangkan di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Latupati. Adapun struktur lembaga adat di Pulau Masela dan Pulau Babar mulai dari Latupati, Kepala Adat, Saniri, Kepala Soa, Mata rumah dan Marga.

- a) Latupati merupakan salah satu dari kepala adat di tingkat desa yang ditunjuk untuk menjabat sebagai ketua adat di tingkat kecamatan. Latupati memiliki peran untuk memfasilitasi kepentingan adat yang tidak bisa diambil di desa atau diselesaikan di tingkat desa. Tugas sehari-hari seorang Latupati dibantu oleh Wakil Latupati, Sekretaris dan Bendahara.
- b) Kepala Adat merupakan pimpinan adat dalam satu wilayah desa. Di Pulau Masela dan Pulau Babar kepala desa otomatis menjadi kepala adat.
- c) Saniri Negeri merupakan posisi penting dalam struktur adat karena memiliki peran dalam membantu Kepala Adat untuk mengkoordinir setiap soa. Selain itu Saniri Negeri memiliki peran sebagai tua adat dalam upacara adat kematian dan perkawinan serta membantu Kepala Adat untuk menyelesaikan konflik.
- d) Kepala Soa merupakan kepala atau pemimpin dari tiap-tiap soa. Kepala Soa memiliki peran sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu masalah atau konflik antar soa. Setiap soa membawahi beberapa mata rumah.
- e) Mata rumah merupakan seseorang yang ditunjuk untuk menerima informasi dan menyampaikan informasi baik itu dari soa ke marga atau dari marga ke soa. Setiap ada masalah dalam marga atau keluarga biasanya terlebih dahulu diselesaikan oleh mata rumah. Jika masalah tidak mampu diselesaikan kemudian naik ketingkat soa.

Secara skematik, struktur adat di Kepulauan Babar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar III-392. Struktur Adat di Kepulauan Babar

3.3.3.2.4 Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan Budaya dapat dibagi menjadi dua yakni Berwujud dan Tidak Berwujud dan menjadi aset penting untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan sumber informasi ilmiah serta sejarah yang berharga.

Menurut Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2003, “Warisan Budaya Tak Benda’ merujuk pada praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya – yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu sebagai bagian dari budaya mereka. Contoh warisan tak benda adalah tradisi lisan, seni pertunjukan, pengetahuan lokal, dan keterampilan tradisional. Sementara itu, “Warisan Budaya Berwujud’ merujuk pada artefak fisik yang diproduksi, dipelihara, dan diwariskan secara antar generasi dalam suatu masyarakat. Artefak atau benda ini dapat mencakup kreasi seni, warisan yang dibangun seperti bangunan dan monumen, serta produk fisik atau nyata lainnya dari kreativitas manusia yang memiliki makna budaya dalam suatu masyarakat (UNESCO 2003).

Meskipun dikenal sebagai “Pulau-Pulau yang Terlupakan,” ternyata wilayah Pulau-Pulau di Maluku Barat Daya dari Pulau Wetar hingga Kepulauan Babar memiliki beragam warisan budaya yang berwujud dan warisan budaya yang tidak berwujud yang masih memiliki nilai hingga saat ini. Artinya keterhubungan mental antara lingkungan fisik dan manusia di wilayah ini masih sangat kental dan tidak bisa diabaikan karena meskipun tidak terlihat, kekayaan ini memiliki keterhubungan timbal balik dan bermakna.

A. Warisan Budaya yang Berwujud (Tangible Culture)

Warisan Budaya berwujud biasanya mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui karena diciptakan oleh alam atau manusia di masa lalu yang sudah tidak ada

lagi. Berdasarkan hasil identifikasi lapang terdapat peninggalan budaya yang berwujud di Kepulauan Babar khususnya di Pulau Masela dan Pulau Babar. Peninggalan tersebut berupa kampung lama atau kampung tua di setiap desa, kain tenun, kain basta dan emas, sumur tua dan batu VOC, mimbar dari batu di Desa Serili Pulau Masela, Tifa (alat musik) yang digunakan untuk mengumpulkan warga, dan tugu pembaptisan di Desa Lalawang. Selain itu terdapat juga sumur-sumur tua yang berfungsi sebagai tempat air tawar peninggalan masa lalu yang berlokasi di beberapa desa di Kepulauan Babar seperti di Desa Lawawang, Desa Iblatmuntah, dan lain-lain.

Sementara itu warisan budaya berwujud di Pulau Leti, Moa dan Lakor adalah Dusun Lama di Pulau Lakor, Rumah Adat Tua sebagai lokasi musyawarah Pusat Negeri di Pulau Leti, Kain basta, serta Kain tenun yang berkaitan dengan ritus adat. Selain itu terdapat juga warisan berwujud yang merupakan peninggalan sejarah jaman kolonial. Temuan ini ada di Pulau Babar, Pulau Masela dan Pulau Moa. Beberapa warisan berwujud ini saat ini menjadi situs sakral maupun situs bersejarah, setidaknya bagi masyarakat tempatan. Berikut adalah situs-situs sakral dan bersejarah yang menjadi warisan berwujud di Maluku Barat Daya:

1. Kampung Lama

Kampung lama di Maluku Barat Daya (MBD) umumnya disebut dengan sebutan "Dusun" atau "Kampung Adat" lama sebelum masyarakat masing-masing desa di setiap pulau bermukim saat ini. Dalam rentang waktu yang cukup panjang hingga 100an tahun, orang MBD telah berpindah dari beberapa kampung lama sebelum ke kampung baru saat ini. Tonggak perpindahan tersebut terjadi karena diakibatkan terjadi perang, menghindari bencana, atau adaptasi agroekologi sesuai kedekatan dengan sumberdaya mereka.

Di Pulau Lakor, masih dijumpai peninggalan dusun lama yang terdapat di Desa Ketti – Letpei, masyarakatnya pernah tiga kali berpindah dari dusun lama:

a) Negeri Klisakliona

Konon negeri ini didirikan oleh orang pertama yang menginjakkan kaki di sekitar pesisir Ketty-Letpei saat ini yakni dari moyang pertama mereka yang berasal dari Kei Besar di Negeri Tutrean.

b) Negeri Letar waru

Konon moyang mereka kedua berasal dari Pulau Luang Timur atau negeri Mietu yang selanjutnya membaur bersama moyang negeri sebelumnya dan berpindah membentuk negeri baru.

c) Negeri Anoheli

Konon moyang mereka berasal dari Pulau Luang Barat, kemudian tiba di Pulau Lakor dan bersama membangun negeri baru.

d) Negeri Ketty-Letpey

Negeri yang saat ini ada, dan menjadi Desa Ketty-Letpey. Warga desa ini berasal dari percampuran ketiga keturunan beberapa moyang tersebut.



Gambar III-393. Derwala Pagar Batu yang Mengelilingi Negeri Lama

Kampung lama terdapat di setiap desa di Pulau Masela dan Pulau Babar yang ditandai dengan adanya peninggalan sumur tua. Kampung lama merupakan kawasan pemukiman yang ditempati oleh penduduk asli dari setiap marga pada zaman dahulu. Penguasaan lahan kampung lama dimiliki oleh marga asli yang berasal dari kampung lama. Saat ini kondisi marga yang berasal dari kampung lama, ada yang bertahan di dalam kampung dan ada yang menyebar ke kampung-kampung yang lain untuk kepentingan mencari nafkah ataupun karena hubungan pernikahan. Kampung lama bagi masyarakat di Kepulauan Babar dan Kepulauan Masela merupakan tempat yang sakral dan harus dijaga sehingga lokasi kampung lama dijadikan situs. Masyarakat percaya bahwa yang suatu kampung pasti ada penghuninya, maka setiap orang dilarang merusak dan mengganggu kampung tersebut. Untuk saat ini kampung lama dimanfaatkan oleh masyarakat keturunan dari kampung tersebut untuk memelihara ternak dan lahan pertanian.

Di Pulau Masela, Kampung lama berada di kawasan Gunung Lerai karena masyarakat asli Masela menurut sejarahnya berasal dari atas gunung. Saat ini untuk menjaga kampung lama tersebut, lahan yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat sopi. Selain itu terdapat pula kepercayaan adanya tujuh kampung yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Penduduk gaib tersebut merupakan penduduk yang berasal dari Gunung Lerai dan hingga saat ini menguasai kawasan hutan di daerah Tanjung Desa Iblatmuntah.

Masyarakat di tiga desa yaitu Desa Babyotang, Desa Telalora, dan Desa iblatmuntah meyakini bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang sakral. Untuk masuk ke lokasi tersebut harus dilakukan izin secara adat dengan memberi makanan menggunakan sopi dan siri pinang, orang Masela menyebutnya dengan istilah “dikasih duduk.” Masyarakat meyakini bahwa ada kehidupan makhluk gaib hidup di bawah daun. Menurut masyarakat, makhluk tersebut beraktivitas seperti manusia biasa seperti mereka melakukan aktivitas memelihara babi, ada yang ke laut, berkebun dan ke hutan.



Lokasi kampung lama



Sumur tua di kampung lama

Gambar III-394. Salah Satu Kampung Lama di Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur

2. Rumah Tua

Di Pulau Leti terdapat beberapa rumah tua atau rumah adat yang disebut sebagai pusat negeri. Tempat ini bagi masyarakat dipergunakan sebagai pusat kegiatan adat baik bermusyawarah dan melakukan sidang adat. Rumah ini didirikan pada tahun 1906 dan masih terjaga sampai sekarang. Rumah ini dihuni oleh keturunan Orkay.



Rumah Adat di Pulau Leti



Penanda pembangunan tahun 1906

Gambar III-395. Rumah Adat atau Rumah Tua di Pulau Leti

Rumah tua merupakan salah satu bagian yang dijaga oleh masyarakat di Kepulauan Babar dan dianggap sebagai rumah adat. Rumah tua terdapat di setiap desa baik itu di Pulau Masela dan Pulau Babar, tetapi untuk rumah tua yang asli hanya ada di Pulau Masela, tepatnya di Desa Telalora. Rumah tua berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan atau musyawarah baik itu di tingkat marga, mata rumah, soa maupun negeri. Biasanya masalah-masalah yang terjadi di tingkatan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Rumah tua di Pulau Masela disebut dengan istilah Im, rumah tua asli yang saat ini masih bertahan di Telalora dimiliki oleh Marga Uniplaita.



Rumah tua di Desa Telalora Pulau Masela



Rumah tua yang telah direnovasi di Desa Latalola Besar Pulau Masela

Gambar III-396. Rumah Tua di Pulau Masela

3. Sumur Tua

Terdapat satu sumur tua di Desa Iblatmuntah yang bernama sumur tua tanyema. Sumur tersebut merupakan tempat yang sakral bagi masyarakat sebagai bentuk peninggalan nenek moyang yang masih bermanfaat hingga hari ini. Sumur tua tersebut dipercaya tidak pernah kering bahkan pada musim kemarau sekalipun. Sumur tua menjadi sumber daya air bersih bagi masyarakat di Desa Iblatmuntah dan desa-desa sekitarnya. Pemanfaatan sumur boleh untuk siapa saja, biasanya masyarakat memanfaatkan air untuk mandi cuci kakus (MCK). Unikny air sumur tersebut dipercaya bisa langsung diminum sehingga hingga saat ini juga menjadi penopang untuk air minum warga. Terdapat aturan bagi para pendatang yang ingin menggunakan air sumur, pendatang harus bersikap dan bertutur kata yang baik, serta membawa atau memegang kayu papua sebagai tanda bahwa telah menjadi bagian dari Pulau Masela.



Gambar III-397. Sumur Tua di Desa Iblatmuntah Pulau Masela

4. Simbol Adat

Dalam penerapan budaya kalwedo, terdapat simbol adat yang dianggap sakral oleh masyarakat di Kepulauan Babar termasuk masyarakat di Pulau Babar dan Pulau Masela. Bagi masyarakat, simbol adat yang dianggap sakral dan berharga adalah emas, sopi dan kain basta. Kain basta adalah perangkat adat yang memiliki nilai sosial tinggi dalam struktur masyarakat ketika pelaksanaan prosesi adat. Basta adalah kain yang diperdagangkan oleh Portugis yang sebenarnya berasal dari India yang kemudian seiring berjalannya waktu menjadi kain berharga bagi masyarakat Kepulauan

Babar. Kain basta sebagai identitas sosial masyarakat merupakan barang sakral karena memiliki banyak peran, di antaranya, sebagai materi perkawinan, ukuran dalam penyelesaian masalah secara adat dan kain yang harus dipakai dalam berbagai kegiatan adat apapun.

Seperti kain basta, perhiasan bagi masyarakat Kepulauan Babar merupakan barang sakral yang harus dijaga dan diwariskan secara turun temurun. Perhiasan yang memiliki nilai kesakralan yang tinggi adalah anting dan emas bulan, kedua aksesoris tersebut harus ada ketika acara prosesi adat pernikahan untuk melengkapi penggunaan kain basta pada pengantin perempuan. Dalam hal fungsi sosial, perhiasan memberikan ciri khas pada status sosial yang memiliki perhiasan di tengah masyarakat di Kepulauan Babar.

Sementara sopi merupakan minuman tradisional yang memiliki peran penting dalam banyak upacara atau pesta-pesta adat sehingga dianggap sakral oleh masyarakat. Sopi yang dibuat masyarakat telah melalui proses yang begitu panjang dan membutuhkan proses kesabaran, keuletan hingga menjadi minuman tradisional sopi yang dapat dikonsumsi. Pengetahuan pembuatan sopi oleh seorang tipar adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun sehingga mengandung banyak makna dan nilai sosial. Nilai-nilai sosial sopi tersebut menjadi sebuah falsafah hidup yang menuntun dan mempersatukan mereka dalam sebuah salam damai sejahtera yang mengikat secara kolektif.

5. Peninggalan Kolonial

Kepulauan Babar khususnya Pulau Masela dan Pulau Babar merupakan wilayah bekas penjajahan Belanda dan Jepang. Hal ini dibuktikan dari peninggalan sejarah yang hari ini masih ditemukan, disimpan dan dianggap sebagai benda sakral oleh masyarakat. Benda sakral peninggalan penjajahan tersebut adalah Batu VOC yang saat ini disimpan dan dirawat oleh garis keturunan dan Pemerintah Desa Marsela. Selain itu, terdapat peninggalan berupa tempayan emas, pedang dan kuburan massal korban pembantaian oleh Jepang di Desa Wakpapapi, tugu pembantaian di Kali Tiwi dan monumen pembaptisan Desa Emplawas serta meriam di Desa Tutuwawang Pulau Babar.

Zaman penjajahan Jepang meninggalkan sejarah penyiksaan pada 710 penduduk di Desa Emplawas. Masuknya Jepang pada tahun 1942 ke Pulau Babar pada awalnya adalah untuk membuat posko atau tempat persinggahan di Desa Tela dan Desa Wakpapapi dalam bentuk bangunan goa. Namun saat ini, gua peninggalan Jepang tersebut telah tertutup tanah. Selain gua, bukti keberadaan Jepang di Tela berupa peninggalan piring-piring tua dan terdapat tugu perdamaian di Desa Manuweri serta peninggalan Belanda berupa tempat pemandian di Desa Anhari.

Ketika melakukan pendudukan, Jepang mengincar tembakau yang khas di Emplawas. Jepang sempat mengeluarkan kebijakan di Wakpapapi yaitu kebijakan perkebunan dan bercocok tanam dengan menggunakan tenaga masyarakat dengan cara kekerasan. Selain itu Jepang melakukan perbuatan keji berupa pemerkosaan kepada para perempuan desa serta mengganggu aktivitas ibadah dan sekolah. Kondisi tersebut membuat murka penduduk sehingga timbul aksi balas dendam dan berakhir dengan pembantaian di Kali Tiwi Emplawas dan Desa Wakpapapi. Kini tempat pembantaian tersebut dianggap sakral dan harus dijaga oleh masyarakat di Pulau Babar khususnya di Desa Emplawas.



Kerangka Manusia bukti pembantaian di Emplawas



Tugu pembantaian di Sungai Tiwi Desa Emplawas



Sungai Tiwi Lokasi Pembantaian di Desa Emplawas



Batu VOC di Desa Marsela

Gambar III-398. Peninggalan Kolonial di Kepulauan Babar

Dalam Jurnal “Sistem Pertahanan di Maluku Abad XVII-XIX”, Syahrudin Mansyur (2006) menulis bahwa berlangsungnya kolonisasi di negara Asia dan Afrika memiliki tujuan awal ekonomi, di mana orang-orang Eropa hanya menempatkan wakil perdagangannya di wilayah-wilayah penghasil komoditi yang dibutuhkan. Namun, melihat keuntungan yang besar dalam perdagangan rempah maka penguasaan atas wilayah penghasil komoditi tersebut menjadi keharusan dan inilah yang menjadi faktor utama pembangunan benteng pertahanan di wilayah-wilayah yang dianggap penting.

Benteng Den Haan, yang sisa-sisa bangunannya masih berdiri di desa Patti, Pulau Moa, Maluku Barat Daya merupakan salah satu benteng pertahanan yang dibuat Belanda pada periode abad XVIII-XIX. Dibangunnya benteng ini juga sekaligus menjadi penanda posisi Belanda yang semakin kondusif di Nusantara dan merasa tidak perlu menambah kubu pertahanannya. Terlebih setelah perang Pattimura pada tahun 1817, tidak ada lagi perlawanan besar dari masyarakat lokal. Selain Den Haan, Benteng-benteng yang dibangun pada masa ini yaitu Follen Haven pada tahun 1712 di Moa dan Beverwijk pada tahun 1845 di Saparua/ Nusalaut.



Gambar III-399. Gereja Tua di Desa Patti dan Prasasti Penanda Pembangunan

Di tempat yang tidak jauh, pada pesisir pantai desa Patti, berdiri kokoh sebuah Gereja Tua. Berbeda dengan gereja yang pada umumnya memiliki nama, gereja ini sama sekali tidak memiliki nama dan hanya disebut Gereja Tua Patti. Pembangunan rumah ibadah ini tentunya tak bisa dilepaskan dari kedatangan bangsa Portugis pada masa pencarian rempah mereka di Nusantara. Ruluf Paulus Latuasan, salah satu tokoh masyarakat Patti mengisahkan. Gedung Gereja Patti dibangun pada tahun 1625 oleh Portugis. Bahkan eksistensi Portugis di Patti juga ditunjukkan dengan berdirinya sebuah benteng. Perihal tahun pembangunan gedung gereja Patti ini diketahui setelah pendeta Zeth Mesakh Soukotta menemukan prasasti yang terpahat pada bubungan gereja yang menyatakan bahwa gedung gereja Patti dibangun pada tahun 1625 dan selesai pada bulan Juni tahun 1741. Gedung gereja ini awalnya dibangun oleh Portugis, namun akibat kalah dalam perang, Portugis harus angkat kaki dari Patti dan pembangunan gedung gereja Patti dilanjutkan oleh Belanda



Gambar III-400. Peninggalan Kolonial Benteng De Haan di Desa Patti Pulau Moa

6. Gua

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat peninggalan penjajahan Belanda dan Jepang berupa gua yang dahulu digunakan sebagai tempat berlindung. Di Pulau Masela, tepatnya di Desa Serili terdapat gua yang di dalamnya terdapat kuburan massal bekas penjajahan yang meninggalkan kerangka dan tulang belulang manusia. Saat ini gua tersebut dikeramatkan oleh masyarakat setempat dan dianggap sebagai lokasi yang sakral. Sementara di Pulau Babar, terdapat gua bekas era penjajahan yang tersebar di setiap desa, dua di antaranya berada di Desa Tela yakni Gua Wunnerh dan Gua di Pantai Palyora, Desa Manuweri.



Gambar III-401. Gua di Desa Serili Pulau Masela

7. Batu Nenek: Legenda Rakyat

Di Pulau Masela terdapat sebuah batu yang dipercayai terkait dengan sebuah folklore atau cerita rakyat. Cerita rakyat ini berasal dari Desa Lawawang Pulau Masela yang berjudul “Ikpotana”. Pada zaman dahulu kala di Lerai ada seorang nenek tua yang berusia sekitar 100 tahun. Sehari-hari nenek tersebut tinggal dekat dengan tungku api sehingga badannya penuh dengan abu dapur. Pada suatu waktu, sedang diadakan acara pergantian tahun dengan tarian-tarian dan upacara dan ketika memasuki puncak acara, si nenek melompat ke dalam lingkaran acara.

Ketika sedang melompat, sedang berlangsung nyanyian pantun tanah yang intinya menyampaikan pesan tentang berkembang biak. Kemudian si nenek meneruskan pantun tanah tersebut. Namun tiba-tiba lidahnya keseleo sehingga terjadilah yang seharusnya si nenek mengatakan “ikpetana” yang artinya berkembang biak kemudian terpeleset menjadi “ikpotana” yang artinya berpencar. Karena kesalahan tersebut seluruh masyarakat Lerai kemudian berpencar ke arah timur, sebagian berpencar di sekitar Lerai dan sebagian ada yang menggunakan kulit kelapa, kulit siput dan kulit kacang untuk menyeberang ke Tanimbar. Versi lain menceritakan bahwa ketika masyarakat turun dari Lerai, sementara nenek turun ke Lawawang dan menutup mata air sehingga kemudian nenek ini dikutuk menjadi batu oleh nenek moyang.



Gambar III-402.Batu Legenda Nenek Menjadi Batu

8. Pohon Ara dan Warisan Spritual Peningjilan

Desa Patti merupakan salah satu dari tiga desa tertua di Pulau Moa selain Moain dan Klis. Desa ini memiliki peninggalan bersejarah religi dan kebudayaan. Batu dan pohon merupakan dua unsur penting dalam kosmologi masyarakat adat di Maluku sehingga dinilai penting dan sakral. Batu di pusat desa/negeri, seperti halnya Batu Pamali sekaligus menjadi tanda bahwa di situlah akhir dari sejarah migrasi leluhur atau masa akhir corak nomaden, dan masa awal bermukim dan menetap di dalam satu kawasan yang disebut negeri/desa. Karena itu batu-batu sakral itu menjadi pusat pelaksanaan ritus baik secara komunal maupun per masing-masing soa, klen atau suku.

Pemanfaatan pusat negeri selain sebagai pusat ritus, juga sebagai pusat sidang adat dan pelantikan pemimpin negeri. Pemimpin negeri akan dilantik dan bersumpah pada leluhur serta setia pada amanah para masing-masing soa. Di pojok-pojok luar pohon ara terdapat tumpukan batu seperti tempat duduk yang merupakan tempat dari masing-masing soa berkumpul untuk mengikuti sidang adat.



Gambar III-403. Pohon Ara sebagai pusat Negeri

Negeri-negeri tua di Maluku Barat Daya menyimpan unsur-unsur itu sebagai unsur yang sakral, dan menariknya di semua lokasi pusat desa, di mana terletak batu berukuran besar, ada pula pohon ara, sebagai simbol kehidupan dan penyatuan semua masyarakat. Di desa Patti, Pulau Moa, malah ditemukan 3 (tiga) buah batu dan pohon ara, sebagai tanda adanya pusat-pusat kehidupan tua dan 3 (tiga) desa yang kini telah menjadi satu. Lokasi ketiga pohon ara dan batu itu adalah di Rokseli, Patti dan Girwelsa.

B. Warisan Budaya yang tidak Berwujud (*Intangible Culture*)

Warisan budaya tak berwujud muncul dalam bentuk tak benda atau sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, etika atau tata cara turun temurun yang lahir, hidup dan hingga saat ini masih dijaga karena dinilai memiliki keterkaitan dengan sejarah dan budaya suatu masyarakat. Berikut disampaikan beberapa warisan budaya tak berwujud yang ada di wilayah Maluku Barat Daya:

1. Sopi

Sopi merupakan kearifan lokal masyarakat di kawasan Maluku Barat Daya. Sopi dapat ditemukan hampir di seluruh desa di Maluku Barat Daya. Tidak diketahui secara pasti kapan dimulai dan ditemukannya pembuatan sopi karena tidak ada bukti secara tertulis. Proses kapan ditemukan sopi ini tidak terungkap karena tradisi lisan yang dipakai dalam pewarisannya. Untuk membuat sopi

sebagian besar penduduk di Kepulauan Babar hanya menggunakan buah tanaman koli/lontar dan kelapa.

Sopi merupakan pengikat bagi masyarakat yang terlibat dalam pertemuan adat. Sopi akan menjadi pengantar atau pembuka pada acara pertemuan, sekaligus sebagai pengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam kebersamaan atau dalam suatu persekutuan. Pada acara pernikahan sopi juga menjadi salah satu syarat yang wajib dibawa oleh keluarga pria dalam acara lamaran. Selain sopi, komponen lain yang dibawa adalah siri pinang dan tembakau. Di Pulau Masela, dalam proses melamar seorang perempuan, para pria akan membawakan sopi, siri pinang, tembakau, dan kain basta. Peran sopi tidak bisa digantikan dengan ramuan lainnya. Menurut masyarakat di Maluku Barat Daya, jika sopi hilang atau musnah maka akan berdampak pada hilangnya adat.

Di Pulau Masela hampir semua laki-laki khususnya kepala rumah tangga menjadi tipar. Tipar merupakan pengrajin sopi dan hanya laki-laki yang boleh menjadi tipar, sedangkan perempuan memiliki peran untuk membantu mempersiapkan proses memasak sopi. Pengetahuan membuat sopi merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun di Pulau Masela. Pembuatan sopi biasanya dilakukan pada musim kemarau yaitu sekitar mulai September hingga November. Agar pengetahuan membuat sopi tidak hilang, biasanya dari kelompok marga akan mewariskan pengetahuan tersebut pada generasi-generasi muda khususnya pada anak laki-laki. Menurut masyarakat, laki-laki harus memiliki pengetahuan sebagai pengrajin sopi atau tipar.

Saat ini sopi tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan adat, di Pulau Masela misalnya sopi telah menjadi pendapatan utama rumah tangga. Pendapatan dari sopi jauh lebih besar dari pada harus bertani atau menjual ikan hasil tangkapan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan bangunan rumah serta fasilitas yang dimiliki rumah tangga. Besarnya pendapatan dari penjualan sopi telah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di Masela. Hasil dari penjualan sopi biasanya akan digunakan untuk keperluan biaya yang besar seperti membangun rumah dan tabungan biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya dalam jumlah yang besar.

Menurut pengalaman salah satu rumah tangga di Masela untuk satu kali produksi mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 20 jerigen sopi, dalam 1 jerigen terdapat 35 liter sopi. Hasil produksi tersebut biasanya dijual dalam kemasan botol mineral bekas yang telah dibersihkan. Satu botol sopi dalam kemasan botol mineral dijual dengan harga Rp 50.000 per botol di dalam desa sedangkan jika dijual di luar pulau menjadi Rp 75.000 per botol.



Gambar III-404. Proses Memasak Sopi di Pulau Masela

2. Kain Tenun

Pengetahuan membuat kain tenun merupakan warisan dari nenek moyang, namun sayangnya aktivitas tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Membuat tenun sudah lagi tidak menarik karena keterbatasan waktu dan bahan baku. Jika penduduk ingin membuat kain tenun maka harus belajar kembali dari sesepuh yang dianggap ahli. Biasanya pembuatan kain tenun dilakukan oleh kelompok perempuan.

Maka agar pengetahuan tersebut tidak hilang, saat ini pemerintah desa di Latalola Kecil dan pihak Kecamatan Pulau Masela mendorong dan memfasilitasi kelompok perempuan melalui lembaga PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) mendorong kelompok perempuan untuk belajar dan memproduksi kain tenun. Biasanya pembuatan kain tenun dilakukan oleh PKK setiap hari sabtu.

Hasil produksi tenun di antaranya adalah kain selendang, kain rok dan kain untuk bahan baju. Pembuatan selendang biasanya membutuhkan waktu selama 2 hari, sedangkan untuk menenun kain membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Harga jual untuk selendang mulai Rp 150.000 per selendang, sedangkan kain untuk rok dan baju dijual dengan harga Rp 800.000 per kain. Motif khas dari kain tenun Pulau Masela adalah motif ikan Samandar atau Baronang (*Siganus Sp.*) dan saat ini motif tersebut sudah diakui oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahan baku untuk menenun yaitu benang saat ini harus didatangkan dari Saumlaki, sedangkan zaman dahulu para nenek moyang memproduksi sendiri benang dari bahan baku kapas. Menurut kelompok pengrajin tenun, untuk memproduksi benang dari kapas pada zaman sekarang ini memakan waktu sehingga mereka lebih memilih membeli dibandingkan harus memproduksi benang sendiri. Hasil tenun sebagian besar dijual di dalam kampung dan dijual di Moa. Di Maluku Barat Daya, kain tenun sangat dibutuhkan setiap saat karena kain tenun diwajibkan untuk dipakai oleh pemerintah kabupaten sehingga permintaan akan kain tenun cukup tinggi sedangkan produksi rendah karena sudah banyak yang meninggalkan aktivitas tenun.



Gambar III-405. Proses Pembuatan Kain Tenun di Pulau Masela

3. Pengetahuan Mengolah Ikan Bibi

Ikan buntal atau pufferfish merupakan jenis ikan beracun yang memerlukan perhatian khusus saat diolah. Racun dalam ikan buntal disebut tetrodotoksin. Kandungan racun tetrodotoksin dalam ikan

buntal dapat menyebabkan kematian. Namun masyarakat Masela merupakan kelompok masyarakat yang dikenal memiliki pengetahuan dalam mengolah ikan buntal. Ikan Buntal oleh masyarakat Masela disebut dengan ikan bibi. Ikan buntal merupakan produk unggulan di Pulau Masela yang diwariskan secara turun temurun. Pulau Masela yang berbatasan secara langsung dengan perairan Australia menjadi potensi tempat yang baik bagi ikan buntal untuk bertelur. Setiap tahun pada bulan Maret hingga April, ikan buntal akan datang berkelompok untuk bertelur. Waktu tersebut akan dimanfaatkan oleh nelayan di Pulau Masela untuk melakukan aktivitas perburuan. Alat tangkap yang digunakan untuk berburu adalah tombak yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 4 hingga 5 meter.

Proses pengolahan ikan menjadi suatu yang khas karena harus membuang racun pada ikan sehingga ikan aman untuk dikonsumsi. Untuk membuang racun, prosesnya adalah memotong bagian mulut ikan untuk mempermudah membuka kulit ikan. Setelah membuka kulit ikan, selanjutnya mengeluarkan telur ikan yang merupakan bagian paling beracun. Ikan tersebut kemudian dikeringkan untuk disimpan dan jika hasil tangkapan berlebih ikan tersebut dijual ke berbagai daerah pulau-pulau kecil di sekitar Masela karena hanya masyarakat Pulau Masela yang terkenal mampu mengolah ikan bibi.



Gambar III-406. Proses Pengolahan Ikan Buntal (Bibi)

4. Pengolahan Garam

Masyarakat di Pulau Masela memiliki pengetahuan lokal dalam pembuatan garam secara tradisional. Pembuatan garam biasanya dilakukan ketika musim kemarau panjang. Masyarakat memanfaatkan air laut yang dianggap bersih kemudian diambil dan ditaruh di cangkang kima. Proses pengeringan menggunakan matahari yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari bisa sampai satu minggu. Setelah air garam mengering akan terbentuk kristal-kristal garam. Garam hasil produksi tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual. Saat ini pembuatan garam secara tradisional sudah mulai ditinggalkan karena masyarakat sudah lebih mudah mengakses garam pabrikan. Sebagian besar penduduk yang masih aktif memproduksi garam tradisional berada di Desa Serili Pulau Masela.



Gambar III-407. Proses pembuatan garam tradisional di Desa Serili, Pulau Masela

5. Hela Tali

Masyarakat pesisir di Maluku Barat Daya memiliki tradisi dan budaya dalam aktivitas penangkapan ikan yang dikenal dengan istilah Hela Tali. Tradisi hela tali merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan turun-temurun oleh masyarakat. Namun di beberapa pulau termasuk desa di kawasan Kepulauan Babar sudah mulai meninggalkan budaya tersebut. Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya tersebut adalah masyarakat di Pulau Masela.

Pelaksanaan hela tali dilakukan secara alami tergantung pada kondisi alam dan kebutuhan di masyarakat. Biasanya hela tali akan dilakukan jika ada tamu yang datang dan dalam pelaksanaan acara besar yang membutuhkan ikan dalam jumlah yang banyak. Salah satu nilai sosial yang dalam tradisi hela tali adalah tumbuhnya rasa kebersamaan melalui budaya gotong royong.

Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan tradisi hela tali yaitu persiapan, pelaksanaan dan penutup. Namun dalam prosesnya telah mengalami modifikasi alat tangkap, jika dulu masyarakat melakukan hela tali menggunakan tali yang terbuat dari daun kelapa dan tali hutan untuk menggiring ikan, kini masyarakat telah menggunakan jaring. Lokasi penangkapan berada di kawasan meti dan dilakukan ketika air surut. Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan hela tali hanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan menunggu untuk mengolah hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan yang diperoleh akan dibagi rata kepada para masyarakat yang ikut tradisi ini.



Gambar III-408. Kegiatan Hela Tali di Pulau Masela

6. Tari Seka

Tari Seka merupakan tarian khas Maluku Barat Daya. Tarian Seka mengandung nilai-nilai sosial dan hubungan antara tuhan dan sesama sebagai nilai religius. Tarian Seka selalu ditampilkan pada acara

syukuran, pernikahan, penyambutan tamu, natal dan tahun baru. Penggunaan tari seka menunjukkan sikap religius dan kepercayaan pada kebesaran tuhan melalui rasa syukur. Selain itu, tari Seka juga menunjukkan nilai persatuan dan kekeluargaan.

Pada saat menari, penari akan bergandengan tangan membentuk sebuah barisan yang kokoh. Gerakan tersebut bukan hanya menunjukkan gerakan yang lincah dan unik tetapi menunjukkan persatuan yang kokoh serta solidaritas. Selain itu tarian seka menunjukkan nilai komunikasi melalui lantunan lagu adat yang menyampaikan banyak makna pesan dan nasehat. Bahkan dalam tarian seka menunjukkan nilai tolong-menolong, nilai tersebut dapat dilihat ketika penari maju sambil merendahkan badan. Iringan tifa akan memberikan semangat pada penari dan menggambarkan nilai sosial untuk saling tolong menolong.

Terdapat empat jenis Tarian Seka yaitu Seka Biasa, Seka Besar, Seka Lelana dan Seka Welkei. Pada Seka Biasa, tarian tersebut digunakan pada acara-acara yang bersifat gembira, bahagia dan sebagai ungkapan terimakasih. Berbeda dengan Seka Besar atau disebut juga dengan tarian perang karena dianggap tarian sakral. Dahulu Tarian Seka besar digunakan untuk memberikan semangat pada pemuda yang akan berperang. Namun saat ini karena sudah tidak berperang, Tarian Seka Besar digunakan pada acara besar untuk penyambutan tamu dan acara-acara besar lainnya. Seka Lelana adalah tarian yang digunakan ketika ada kunjungan muda-mudi antar desa baik itu berbeda pulau maupun dalam satu pulau. Seka welkei adalah tarian yang berbeda dengan seka lainnya. Tarian Seka welkei cenderung mirip dengan tarian saureka-reka di Pulau Ambon. Dahulu kala, tarian seka welkei biasanya digunakan untuk meminta hujan. Namun sayangnya tarian seka welkei ini sudah mulai luntur.



Gambar III-409. Tari Seka di Pulau Masela

3.3.3.2.5 Harapan Masyarakat

Kehadiran Blok Masela disambut baik oleh masyarakat khususnya di Pulau Babar dan Pulau Masela dan pada dasarnya, kehadiran INPEX dan Blok Masela sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Masyarakat berharap banyak dilibatkan dalam proses dan kegiatan operasional baik itu sebagai tenaga kerja dan terdampak dalam kegiatan sosial ekonomi. Selain itu ke depannya jika Blok Masela telah beroperasi, masyarakat berharap terdampak untuk program CSR baik yang bersifat karitatif, pemberdayaan, pembangunan dan pendidikan.

Tabel III-315. Harapan Masyarakat

No	Pulau	Harapan
1	Moa	Masyarakat Moa berharap INPEX dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan pendapatan. Masyarakat Moa ingin dilibatkan dalam proyek INPEX, baik sebagai pekerja maupun sebagai mitra bisnis. Masyarakat Moa berharap INPEX dapat membantu membangun infrastruktur di wilayah mereka, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Moa ingin INPEX melakukan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak negatif dari proyeknya. Masyarakat Moa ingin INPEX menghormati budaya dan tradisi mereka dan tidak merusak lingkungan alam yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Masyarakat Moa ingin INPEX menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Masyarakat Moa ingin INPEX memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama proyek berlangsung. Masyarakat Moa ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek INPEX dan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang proyek tersebut.
2	Leti	Masyarakat Leti berharap INPEX dapat membuka peluang kerja bagi penduduk lokal, baik dalam pekerjaan kasar maupun yang membutuhkan keterampilan tinggi. Masyarakat Leti ingin agar INPEX memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam proyek, seperti penyediaan barang dan jasa. Masyarakat Leti berharap proyek INPEX dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat Leti ingin agar INPEX melakukan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif proyek. Masyarakat Leti ingin agar INPEX menghormati budaya dan tradisi lokal dan tidak merusak lingkungan hidup. Masyarakat Leti ingin agar INPEX memberdayakan mereka dalam hal pengambilan keputusan terkait proyek dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat Leti ingin agar INPEX membantu meningkatkan layanan kesehatan dan infrastruktur di Pulau Leti. Masyarakat Leti ingin agar INPEX melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan proyek-proyek sosial. Masyarakat Leti ingin agar keuntungan dari proyek INPEX dibagikan secara adil kepada masyarakat lokal. Masyarakat Leti ingin agar INPEX membantu mengembangkan daerah mereka dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. Masyarakat Leti ingin agar pemerintah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan proyek INPEX.
3	Lakor	Masyarakat Lakor berharap INPEX dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan pendapatan. Mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam proyek INPEX, baik sebagai pekerja maupun sebagai mitra bisnis, sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

No	Pulau	Harapan
		Masyarakat Lakor menginginkan adanya dana abadi yang dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Masyarakat Lakor sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan laut dan pesisir mereka. Mereka ingin INPEX beroperasi dengan standar lingkungan yang tinggi dan melakukan mitigasi dampak lingkungan secara maksimal. Mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan memastikan bahwa studi tersebut dilakukan secara independen dan komprehensif. Masyarakat Lakor ingin INPEX bertanggung jawab untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas alam. Masyarakat Lakor ingin mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan mereka dan dapat bekerja di proyek INPEX. Mereka ingin INPEX menghormati dan melestarikan budaya adat Lakor dan memastikan bahwa proyeknya tidak membawa dampak negatif terhadap budaya mereka. Masyarakat Lakor ingin INPEX menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi mereka. Mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait proyek, termasuk dalam proses perundingan dan pemantauan. Masyarakat Lakor ingin mendapatkan bagian keuntungan yang adil dari proyek Blok Marsela.
4	Luang	Masyarakat Luang ingin diberdayakan secara ekonomi agar dapat terlibat dalam proyek INPEX dan menikmati manfaatnya secara langsung. Masyarakat Luang berharap INPEX dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan pendapatan. Masyarakat Luang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di wilayah adat mereka. Mereka berharap INPEX dapat beroperasi dengan bertanggung jawab dan meminimalkan dampak lingkungannya. Masyarakat Luang ingin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam bidang energi dan teknologi, agar dapat berperan aktif dalam proyek INPEX. Masyarakat Orang Luang ingin INPEX menghormati budaya dan adat istiadat mereka dan membantu melestarikannya. Masyarakat Orang Luang ingin INPEX menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Masyarakat Orang Luang ingin pemerintah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan proyek INPEX. Masyarakat Orang Luang ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek INPEX.
5	Pulau Masela	Masa depan pendidikan anak-anak pulau marsella diperhatikan serta memperhatikan kesehatan masyarakat. memberikan beasiswa untuk anak-anak sekolah. Harapan pembangunan pelabuhan baru. Perkuat internet.

No	Pulau	Harapan
		Selama ini kami hidup di pulau berbatu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Harapannya dengan adanya blok masela masyarakat tidak menderita dalam hal mencari nafkah. Harapan kami untuk air, ada perhatian dan bantuan untuk kami dari Blok Masela. Pelaksanaan sila ke 5 pancasila Lapangan pekerjaan terbuka dan perioritas terhadap putra putri daerah. Harapannya jangan cuman menjadi nama Blok Masela saja akan tetapi dampaknya kita tidak mendapatkannya termasuk ke dalam program CSR
6	Babar Barat	Harapannya dapat mempercepat infrastruktur dan membantu pengembangan kabupaten juga salah satunya Peningkatan ekonomi di Pulau Babar
7	Babar Timur	Kami sudah dengar ada pembangunan di KKT jadi harus ada pembangunan juga di sini dalam hal infrastruktur. Pemerataan yang diharapkan harus di segala sektor dan segala bidang. Rekrutmen harus merata 50:50. Tambang seperti ini kan ada sistem bagi hasilnya yang harus sama Pembagian dan perekrutan harus seimbang

Sumber: Data Primer, Survei Sosial 2024

3.3.3.2.6 Kelompok Masyarakat Rentan

Salah satu indikator kelompok masyarakat rentan adalah kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mencapai kehidupan yang layak. BPS (2013) menyebutkan bahwa terdapat 7% penduduk miskin di Maluku Barat Daya. Menurut hasil penelitian Watloly dan Litaay (2017) salah satu kelompok rentan di Maluku Barat Daya adalah kelompok masyarakat di Pulau Masela. Adapun faktor penyebab kerentanan yaitu kondisi wilayah yang menyebabkan determinasi, sulitnya akses perhubungan, kurangnya akses pembangunan dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut juga terjadi di Pulau Babar, meskipun menjadi kecamatan induk, tetapi hasil observasi menemukan bahwa kelompok masyarakat di Pulau Babar baik itu di Kecamatan Babar Timur dan Barat mengalami kerentanan akibat sulitnya akses keluar masuk desa. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh kondisi wilayah yang terisolir karena berada di perbatasan antar negara. Maka untuk menghadapi kerentanan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat melakukan upaya adaptasi dengan mengakses dan menguasai sumber daya alam.

Aksesibilitas bisa dikatakan menjadi faktor utama masyarakat di dua pulau tersebut mengalami kerentanan terhadap sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial. Posisi pulau yang terpencil di bibir perbatasan negara berdampak pada sulitnya akses untuk menjangkau lembaga-lembaga ekonomi seperti pasar, perbankan atau lembaga permodalan lainnya. Akibatnya masyarakat yang berada di dua pulau tersebut dililit dengan sistim ijon, barter dan praktik monopoli. Untuk akses antar pulau masyarakat hanya bisa mengakses kapal perintis, kapal ferry dan kapal-kapal lokal yang dapat menghubungkan pulau Masela dengan pulau Babar serta pulau-pulau kecil di sekitar Maluku Barat Daya, maupun kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Maluku .

Ditemukan selama penelitian bahwa, kondisi kapal maupun jadwal pengoperasian kapal-kapal tersebut tidak menentu karena kondisi kapal yang rentan rusak, kapasitas yang kurang memadai dan kondisi iklim kepulauan yang tidak menentu sehingga masyarakat harus menunggu dalam

waktu yang cukup lama dan jarak tempuh yang cukup jauh. Penumpang kapal harus menunggu sehari-hari, bahkan berminggu-minggu, baik di rumah maupun di pelabuhan. Lama waktu menunggu kapal dan lama waktu perjalanan dengan kapal berakibat membengkaknya biaya perjalanan.

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki beberapa kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai kelompok-kelompok rentan tersebut:

1. Perempuan:

- **Persoalan:** Perempuan di MBD masih menghadapi berbagai hambatan, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan juga masih terjadi.
- **Kebutuhan:** Perempuan di MBD membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka juga membutuhkan perlindungan dari kekerasan.
- **Upaya ke depan:** Pemerintah, swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO) perlu menyediakan program-program yang meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

2. Anak-anak:

- **Persoalan:** Anak-anak di MBD masih menghadapi berbagai masalah, seperti gizi buruk, akses yang terbatas terhadap pendidikan, dan pernikahan dini.
- **Kebutuhan:** Anak-anak di MBD membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Mereka juga perlu dilindungi dari pernikahan dini dan eksploitasi.
- **Upaya Ke depan:** Pemerintah, swasta dan NGO perlu menyediakan program-program yang meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Perlu juga dilakukan upaya untuk mencegah pernikahan dini dan eksploitasi anak.

3. Penyandang Disabilitas:

- **Persoalan:** Penyandang disabilitas di MBD masih menghadapi berbagai hambatan, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
- **Kebutuhan:** Penyandang disabilitas di MBD membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Mereka juga membutuhkan infrastruktur yang ramah disabilitas.
- **Upaya ke depan:** Pemerintah, swasta dan NGO perlu menyediakan program-program yang meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Perlu juga dilakukan upaya untuk membangun infrastruktur yang ramah disabilitas.

4. Lansia:

- **Persoalan:** Lansia di MBD masih menghadapi berbagai masalah, seperti kemiskinan, akses yang terbatas terhadap kesehatan, dan kurangnya perhatian dari keluarga.

- Kebutuhan: Lansia di MBD membutuhkan akses yang lebih baik terhadap kesehatan dan jaminan sosial. Mereka juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga.
- Upaya ke depan: Pemerintah dan NGO perlu menyediakan program-program yang meningkatkan akses lansia terhadap kesehatan dan jaminan sosial. Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan merawat lansia.

5. Masyarakat Adat:

- Persoalan: Masyarakat adat di MBD masih menghadapi berbagai masalah, seperti perampasan hak atas tanah dan sumber daya alam, serta diskriminasi.
- Kebutuhan: Masyarakat adat di MBD membutuhkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka, serta akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan.
- Upaya ke depan: Pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat adat terhadap pendidikan dan kesehatan.

3.3.4 Transportasi

3.3.4.1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar

A. Transportasi Darat

Berdasarkan rona awal lalu lintas darat pada penyusunan dokumen ANDAL ini bersumber pada hasil Kajian Analisa Dampak Lalu Lintas pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya, terdapat 7 ruas jalan dan 3 simpang yang dianggap terkena dampak akibat adanya Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar III-410 Wilayah Kajian

Berdasarkan hasil survei inventarisasi ruas jalan yang telah dilakukan, maka diperoleh profil dari ruas jalan yang terkena dampak oleh adanya pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya. Profil data jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Angka 2020, panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2019 tercatat sepanjang 617,33 km. Panjang jalan terdiri dari 226,00 km jalan Negara, 39,05 km jalan provinsi dan 351,83 km jalan kabupaten. Menurut jenis permukaannya, jalan aspal 184,64 km, kerikil 98,11 km, tanah 69,08 dan lainnya belum tercatat. Sedangkan menurut kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam kondisi baik.

Tabel III-316 Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2017-2019

Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
	2017	2018	2019
Jalan Negara	226,00	226,00	226,00
Jalan Provinsi	40,50	39,05	39,05
Jalan Kabupaten	351,83	351,83	351,83
Jumlah	618,33	617,33	617,33

Sumber: Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Angka 2020

Jumlah obyek kendaraan bermotor di Kecamatan Tanimbar Selatan pada tahun 2019 mencapai 7091 kendaraan, di mana jumlah sepeda motor mencapai 6.565 kendaraan dan 526 kendaraan roda empat dengan rata-rata pertumbuhan kendaraan sebesar 15,5%.

Tabel III-317 Jenis Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kecamatan Tanimbar Selatan (2016-2019)

Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019
Mobil Penumpang	146	168	176	196
Bis	14	24	28	32
Truk	187	246	267	298
Sepeda Motor	3.247	4.367	5.965	6.565
Total	3.594	4.805	6.436	7.091

Sumber: Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Angka 2020

Tabel III-318 Ruas Jalan dan Simpang Terdampak

Ruas Jalan					
No.	Nama Ruas Jalan	Status Jalan	Tipe Jalan	Lebar Jalan	Jenis dan Kondisi Perkerasan Jalan
1	Jalan Aruidas-Sp. Ilngei Segmen 1	Nasional	2/2 UD	6,5	Aspal
2	Jalan Aruidas-Sp. Ilngei Segmen 2	Nasional	2/2 UD	7,0	Aspal
3	Jalan Prof. Boediono	Nasional	2/2 UD	7,0	Aspal
4	Jalan Ilngei-Batu Putih Segmen 1	Provinsi	2/2 UD	5,0	Aspal
5	Jalan Ilngei-Batu Putih Segmen 2	Provinsi	2/2 UD	5,0	Aspal
6	Jalan Ilngei-Batu Putih Segmen 3	Provinsi	2/2 UD	5,0	Aspal
7	Jalan Wowonda-Ilngei	Kabupaten	2/2 UD	5,0	Aspal
Simpang					
No.	Nama Simpang	Tipe Simpang		Jenis Pengendalian	
1	Simpang Ilngei	322		Prioritas (<i>Uncontrol</i>)	
2	Simpang Laurant	322		Prioritas (<i>Uncontrol</i>)	
3	Simpang Lermatang	322		Prioritas (<i>Uncontrol</i>)	

Sumber : Hasil Survei, 2020

1) Ruas Jalan

Jalan Aruidas-Sp. Ilngei (041) Segmen 1

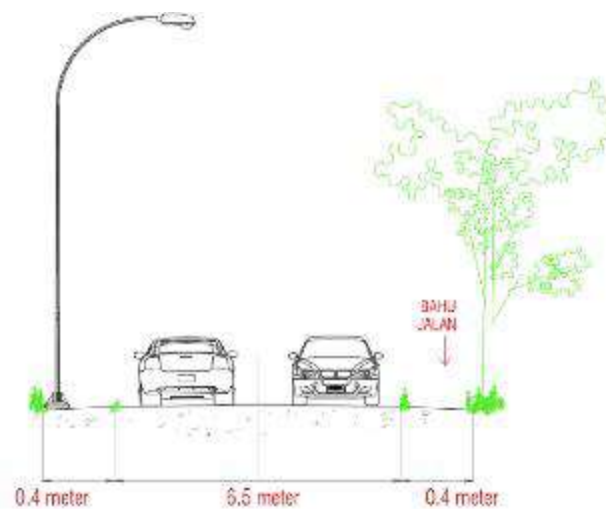
Geometrik Jalan Aruidas-Sp. Ilngei (041) Segmen 1

Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang O LNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Aruidas – Sp. Ilngei (041) Segmen 1 berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Nasional
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 6,5meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: 0,4 meter
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis Per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)
Hambatan Samping	: Rendah



Gambar III-411 Visualisasi Jalan aruidas-Sp. Ilngi Segment 1 Tahun 2020

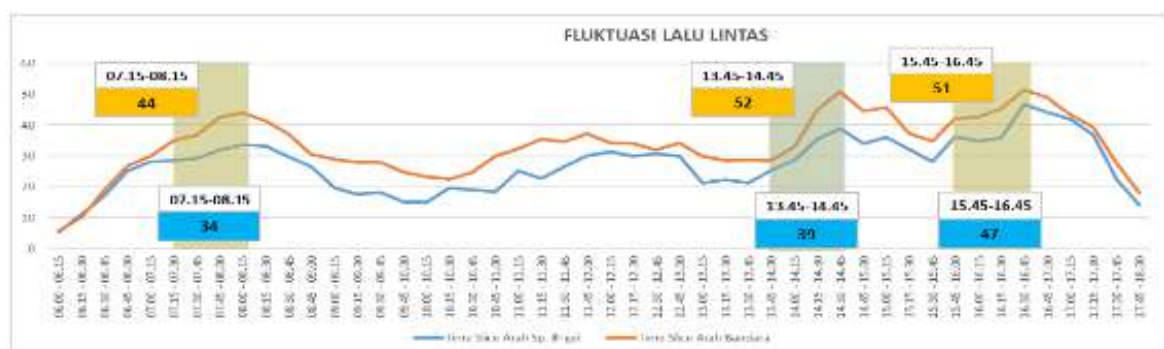


Gambar III-412 Penampang Melintang Jalan Aruidas-Sp. Ilngi Segmen 1

Data Lalu Lintas Jalan Aruidas-Sp. Ilngi (041) Segmen 1

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

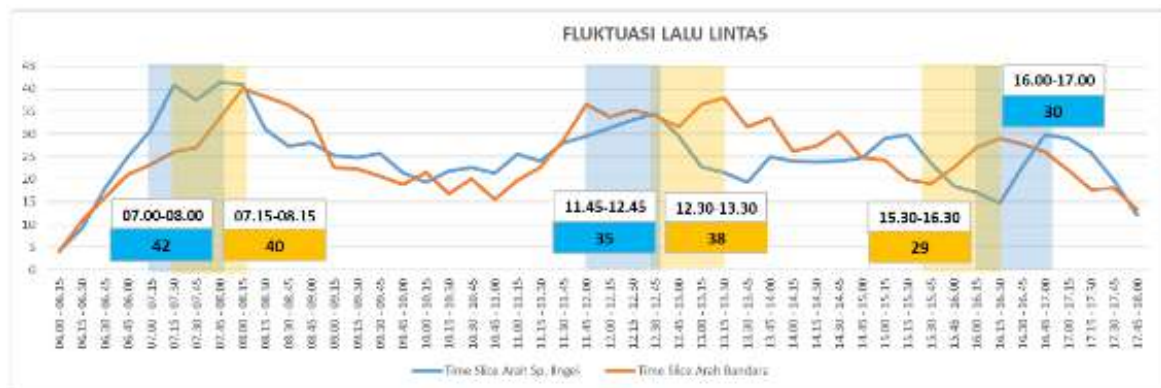
Gambar III-413 Fluktuasi Jalan Aruidas-Sp. Ilngi (041) Segmen 1 pada Hari Kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi di atas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 1 Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Simpang Ilngai peak pagi terjadi pada pukul 07.15-08.15 WIT sebesar 34 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.45-14.45 WIT sebesar 39 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.45-16.45 WIT sebesar 47 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Bandara peak pagi terjadi pada pukul 07.15-08.15 WIT sebesar 44 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.45-14.45 WIT sebesar 52 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.45-16.45 WIT sebesar 51 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 1 pada hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 84,5%, angkutan umum sebesar 13,6%, angkutan barang 1,8% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 84,5% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 926 unit (64,8%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 282 unit (19,7%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-414 Fluktuasi Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 1 pada Hari Libur

Berdasarkan grafik fluktuasi di atas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 1 Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Simpang Ilngai peak pagi terjadi pada pukul 07.00-08.00 WIT sebesar 42 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.45-12.45 WIT sebesar 35 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 30 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Bandara peak pagi terjadi pada pukul 07.15-08.15 WIT sebesar 40 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.30-13.30 WIT sebesar 38 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.30-16.30 WIT sebesar 29 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 1 pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 87,0%, angkutan umum sebesar 11,6%, angkutan barang 1,5% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 87,0% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 828 unit (67,1%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 245 unit (19,9%).

Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 1

Geometri Jalan Aruidas - Sp. Ilngai (041) Segmen 2

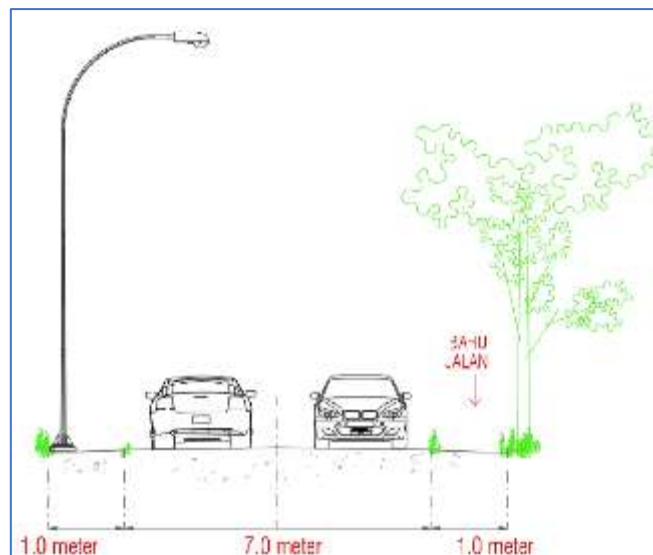
Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 2 berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Nasional
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D 4
Lebar Jalan	: 7,0 meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: 1,0 meter
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)
Hambatan Samping	: Rendah



Gambar III-415 Visualisasi Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 2 Tahun 2020

Data Lalu Lintas Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 2



Gambar III-416 Penampang Melintang Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 2

Data Lalu Lintas Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 2

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada Gambar III-417.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-417 Fluktuasi Jalan Aruidas-Sp. Ilngai (041) Segmen 2 Pada Hari Kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 2 Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Simpang Luran peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 69 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 111 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 17.00-18.00 WIT sebesar 125 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Simpang Ilngai peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 57 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIT sebesar 59 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 106 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (041) Segmen 2 pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 86,7%, angkutan umum sebesar 2,9%, angkutan barang 9,9% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,5%. Secara lebih terperinci, dari 86,7% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 2.844 unit (81,1%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 197 unit (5,6%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-418 Fluktuasi Jalan aruidas-Sp. Ingei (041) Segmen 2 Pada Hari Libur

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Aruidas – Sp. Ingei (041) Segmen 2 Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Simpang Luran peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 65 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 105 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 17.00-18.00 WIT sebesar 118 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Simpang Ingei peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 53 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIT sebesar 55 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 100 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Aruidas – Sp. Ingei (041) Segmen 2 pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 85,5%, angkutan umum sebesar 3,2%, angkutan barang 10,8% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,5%. Secara lebih terperinci, dari 85,5% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 2.585 unit (80%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 179 unit (5,5%).

Jalan Prof. Boediono (041.11K)

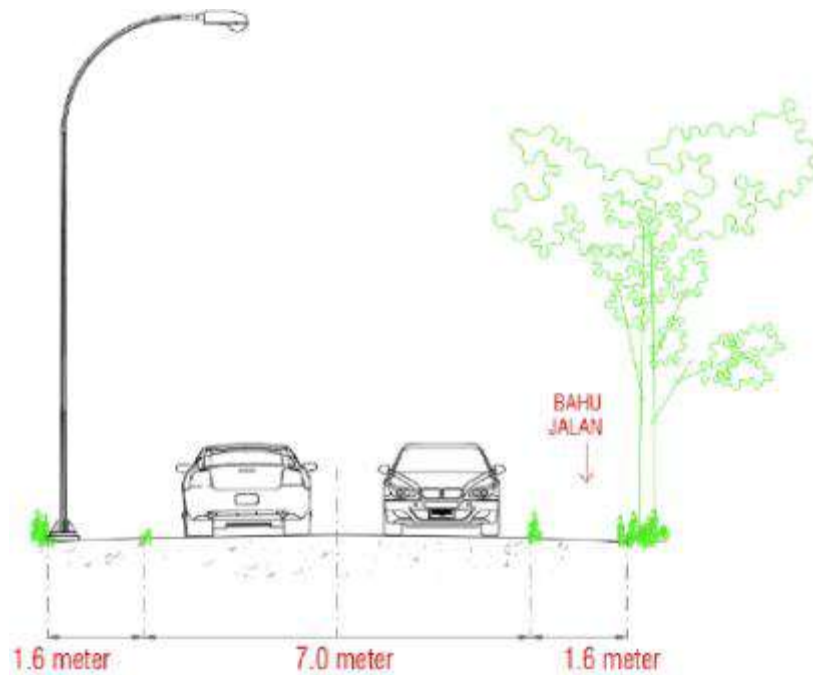
Geometri Jalan Aruidas - Sp. Ingei (041) Segmen 2

Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Prof. Boediono (041.11.K) berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Nasional
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 7,0 meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: 1,6 meter
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)
Hambatan Samping	: Sedang



Gambar III-419 Visualisasi Jalan Prof. Boediono Tahun 2020



Gambar III-420 Penampang Melintang Jalan Prof. Boediono

Data Lalu Lintas Jalan Prof. Boediono

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-421 Fluktuasi Jalan Prof. Boediono (041.11.K) Pada Hari Kerja

Kapasitas jalan merupakan hasil analisis menggunakan MKJI (1997) dengan menggunakan data hasil geometrik. Dengan demikian, kapasitas jalan antar kota pada ruas jalan tersebut adalah:

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Prof. Boediono (041.11.K) Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Simpang Saumlaki peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 218 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.30-13.30 WIT sebesar 106 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 181 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Sp. Lantur peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 181 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 130 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.30-17.30 WIT sebesar 52 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Prof. Boediono (041.11.K) pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 84,1%, angkutan umum sebesar 8,0%, angkutan barang 7,9% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 84,1% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 3.526 unit (74,6%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 449 unit (9,5%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-422 Fluktuasi Jalan Prof Boediono (041.11.K) Pada Hari Libur

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Prof. Boediono (041.11.K) Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Saumlaki peak pagi terjadi pada

pukul 09.00-10.00 WIT sebesar 100 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.45-14.45 WIT sebesar 226 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 14.15-15.15 WIT sebesar 205 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Simpang Luran peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 121 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 175 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 14.15-15.15 WIT sebesar 99 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Prof. Boediono (041.11.K) pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 88,7%, angkutan umum sebesar 6,3%, angkutan barang 5,0% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 88,7% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 5.062 unit (80,8%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 500 unit (8%).

Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 1

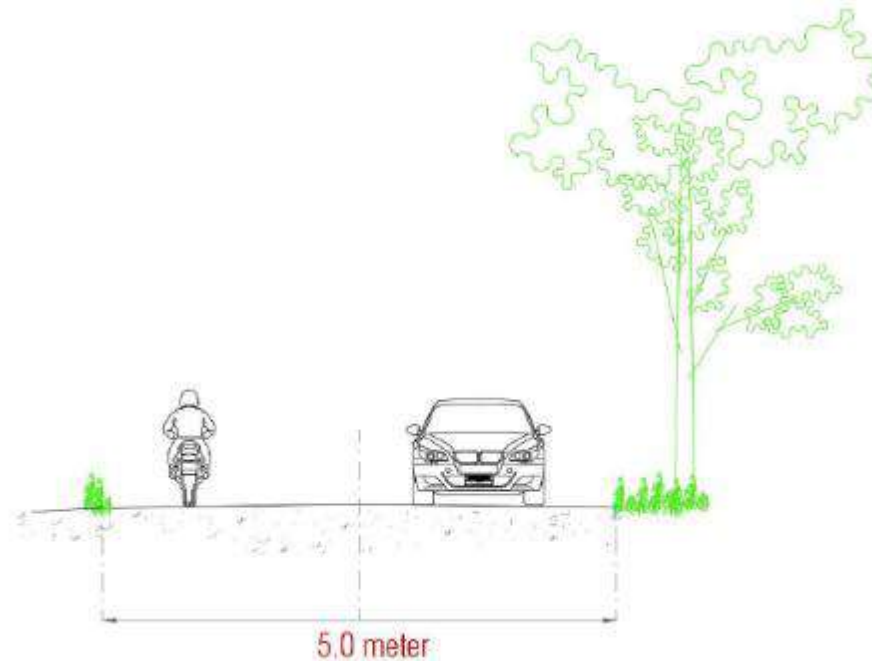
Geometri Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 1

Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Ingei - Batu Putih (040) Segmen 1 berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Provinsi
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 5,0 meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: -
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)
Hambatan Samping	: Rendah



Gambar III-423 Visualisasi Jalan Ingei-Batu Putih 1 Tahun 2020



Gambar III-424 Penampang Melintang Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 1

Data Lalu Lintas Ingei-Batu Putih Segmen 1

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-425 Fluktuasi Jalan Ingei-Batu Putih (040) Segmen Pada Hari Kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 1 Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Bomaki peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 11 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.00-13.00 WIT sebesar 14 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 17.00-18.00 WIT sebesar 13 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Sp. Luran peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 17 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 10.45-11.45 WIT sebesar 19 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.30-16.30 WIT sebesar 21 smp/jam.

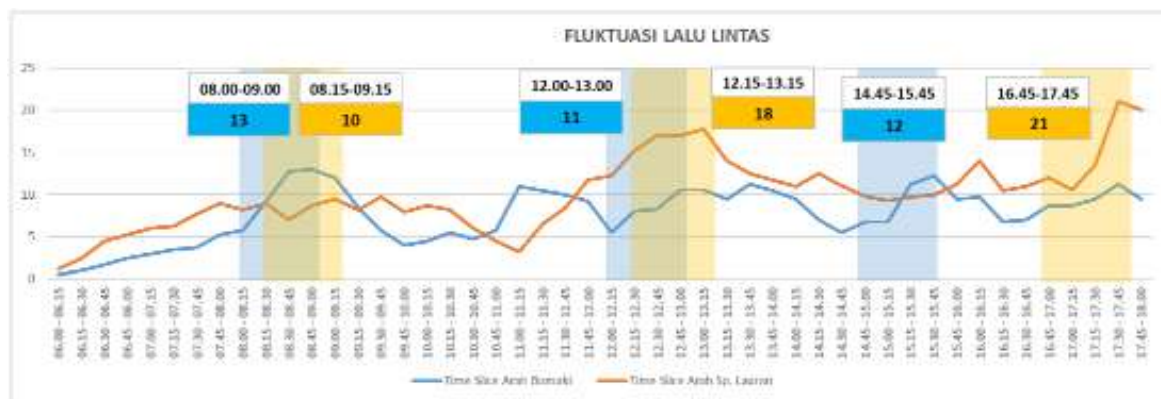
Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 1 pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 89,7%, angkutan umum sebesar 0,0%, angkutan barang

10,3% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 89,7% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 636 unit (86,5%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 23 unit (3,1%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada **Gambar III-426**.

Berdasarkan grafik fluktuasi pada **Gambar III-426**, dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 1 Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Bomaki peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 13 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.00-13.00 WIT sebesar 11 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 14.45-15.45 WIT sebesar 12 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Simpang Luran peak pagi terjadi pada pukul 08.15-09.15 WIT sebesar 10 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.15-13.15 WIT sebesar 18 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.45-17.45 WIT sebesar 21 smp/jam.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-426 Fluktuasi Jalan Ilngai-Batu Putih (040) Segmen 1 Pada Hari Libur

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 1 pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 93,5%, angkutan umum sebesar 0,3%, angkutan barang 6,3% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 93,5% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 640 unit (91%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 17 unit (2,4%).

Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 2

Geometri Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 2

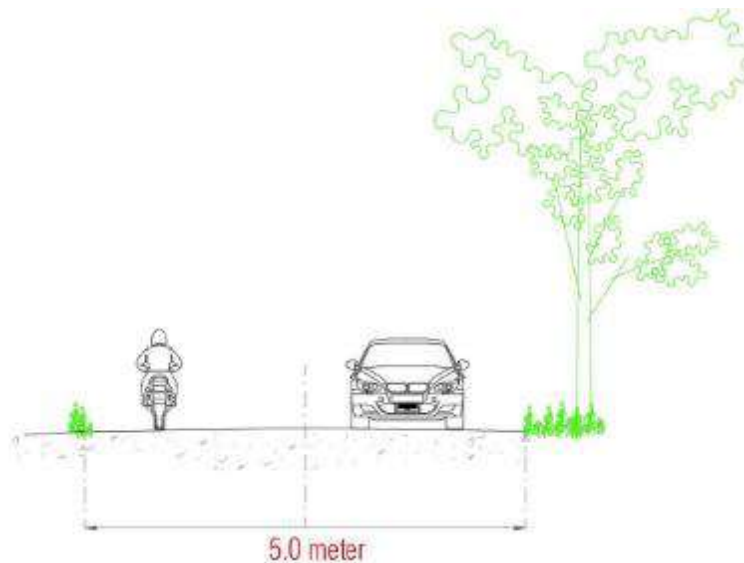
Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Ilngai - Batu Putih (040) Segmen 2 berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Provinsi
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 5,0 meter
Median	: -

Bahu Kiri/kanan : -
 Kondisi Jalan : Baik
 Jenis per kerasan : Aspal Hotmix (Fleksibel)
 Hambatan Samping : Rendah



Gambar III-427 Visualisasi Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 2 Tahun 2020



Gambar III-428 Penampang Melintang Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 2

Data Lalu Lintas Jalan Prof. Boediono

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-429 Fluktuasi Jalan Ingei-Batu Putih (040) Segmen 2 Pada Hari Kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 2 Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Lermatang peak pagi terjadi pada pukul 08.15-09.15 WIT sebesar 5 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.15-13.15 WIT sebesar 18 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 14.15-15.15 WIT sebesar 17 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Bomaki peak pagi terjadi pada pukul 08.30-09.30 WIT sebesar 13 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.15-12.15 WIT sebesar 12 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.45-17.45 WIT sebesar 19 smp/jam.

Untuk jenis moda angkutan di Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 2 pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 89,1%, angkutan umum sebesar 0,4%, angkutan barang 10,5% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 89,1% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 377 unit (77,3%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 58 unit (11,9%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-430 Fluktuasi Jalan Ingei-Batu Putih (040) Segmen 2 Pada Hari Libur

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ingei – Batu Putih (040) Segmen 2 eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Lermatang peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 6 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 6 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.30-17.30 WIT sebesar 13 smp/jam.

smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Bomaki peak pagi terjadi pada pukul 08.45-09.45 WIT sebesar 10 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.00-12.00 WIT sebesar 13 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.15-17.15 WIT sebesar 11 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 2 pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 96,6%, angkutan umum sebesar 0,2%, angkutan barang 3,2% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 96,6% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 404 unit (86,5%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 47 unit (10,1%).

Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3

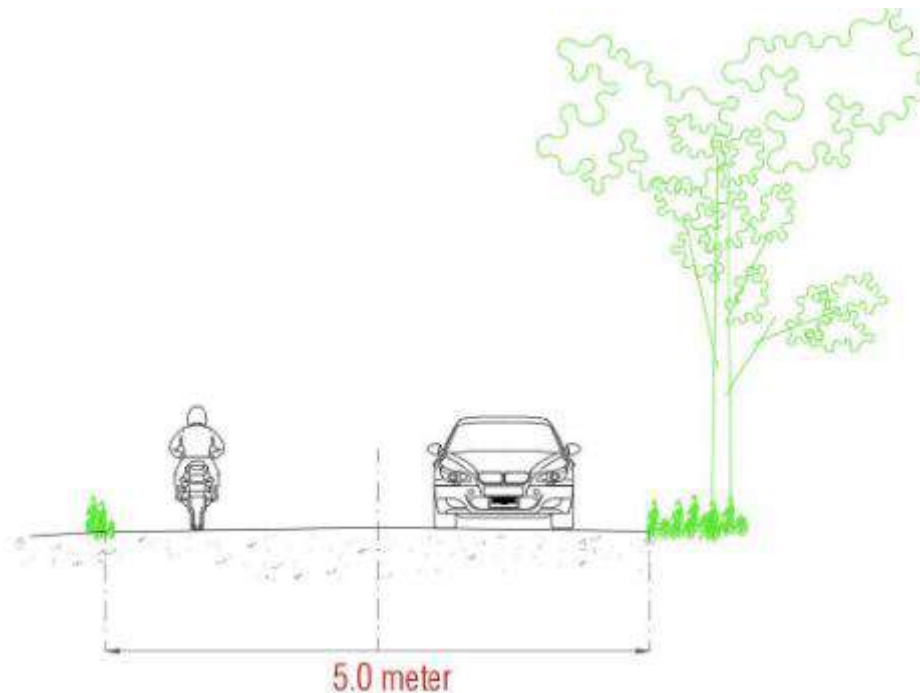
Geometri Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3

Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Ilngai - Batu Putih (040) Segmen 2 berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Provinsi
Fungsi Jalan	: Kolektor Primer
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 5,0 meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: -
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)
Hambatan Samping	: Rendah



Gambar III-431 Visualisasi Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 3 Tahun 2020



Gambar III-432 Penampang Melintang Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 3

Data Lalu Lintas Jalan Prof. Boediono

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-433 Flustuasi Jalan Ilngai-Batu Putih (040) Segmen 3 Pada Hari kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3 Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Latdalam peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 6 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.15-12.15 WIT sebesar 12 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.15-16.15 WIT sebesar 11 smp/jam.

Sedangkan untuk jenis moda angkutan di Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3 pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 89,8%, angkutan umum sebesar 0,6%, angkutan barang 9,6% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 89,8% moda

kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 245 unit (75,9 %), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 45 unit (13,9%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari libur selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-434 Fluktuasi Jalan Ilngai-Batu Putih (041) Segmen 3 Pada Hari Libur

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3 Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Latdalam peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 10 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.45-13.45 WIT sebesar 10 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.15-16. 15 WIT sebesar 10 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Lermatang peak pagi terjadi pada pukul 08.00-09.00 WIT sebesar 15 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 12.30-13.30 WIT sebesar 8 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 15.30-16. 30 WIT sebesar 6 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3 pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 88,7%, angkutan umum sebesar 0,9%, angkutan barang 10,4% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 88,7% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 241 unit (75,8%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 41 unit (12,9%).

Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3

Geometri Jalan Ilngai – Batu Putih (040) Segmen 3

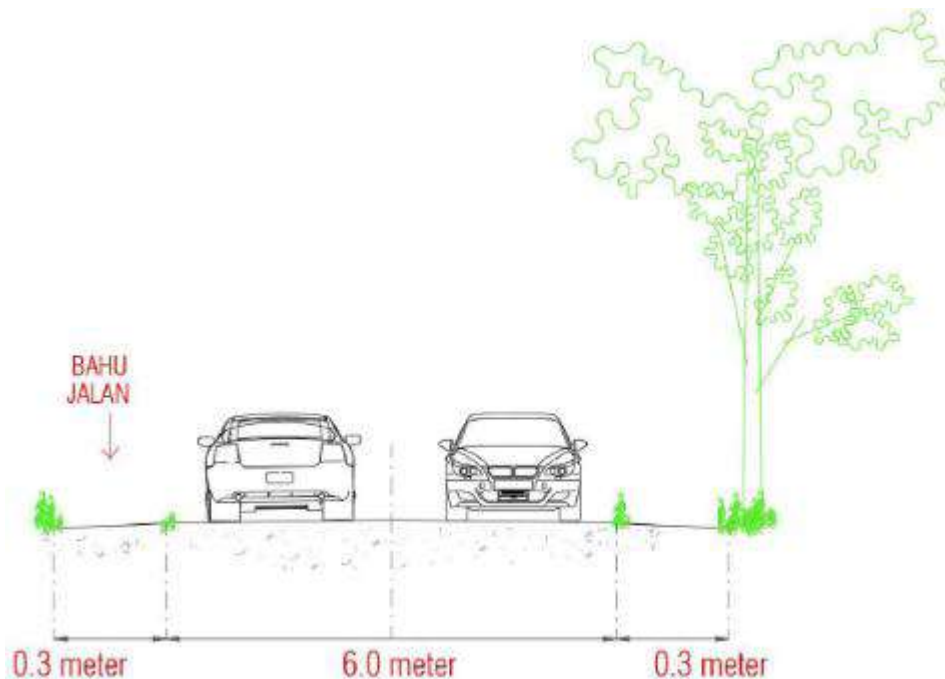
Ruas jalan yang dianggap terkena dampak akibat rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah ruas Jalan Wowonda - Ilngai berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Status Jalan	: Jalan Kabupaten
Fungsi Jalan	: Kolektor Sekunder
Tipe Jalan	: 2/2 D
Lebar Jalan	: 6,0meter
Median	: -
Bahu Kiri/kanan	: 0,3
Kondisi Jalan	: Baik
Jenis per kerasan	: Aspal Hotmix (Fleksibel)

Hambatan Samping : Rendah



Gambar III-435 Visualisasi Jalan Wowonda-IIngei Tahun 2020

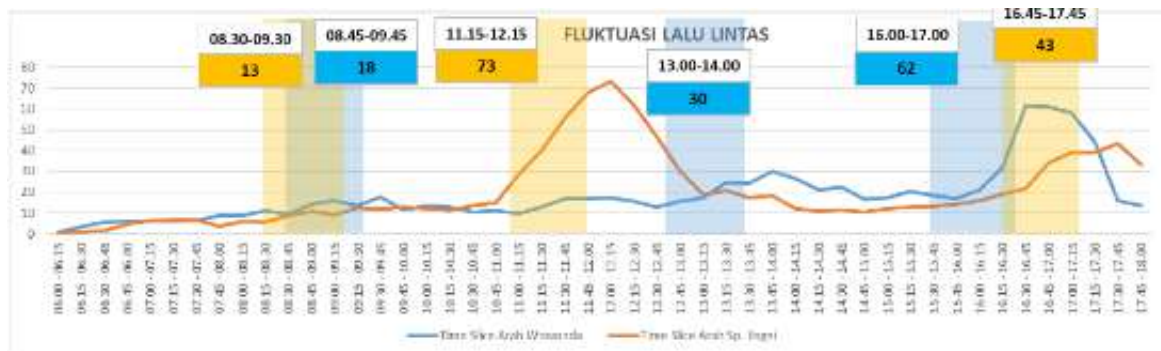


Gambar III-436 Penampang Melintang Jalan Wowonda-IIngei

Data Lalu Lintas Jalan Wowonda-IIngei

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Kerja

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat hari kerja disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

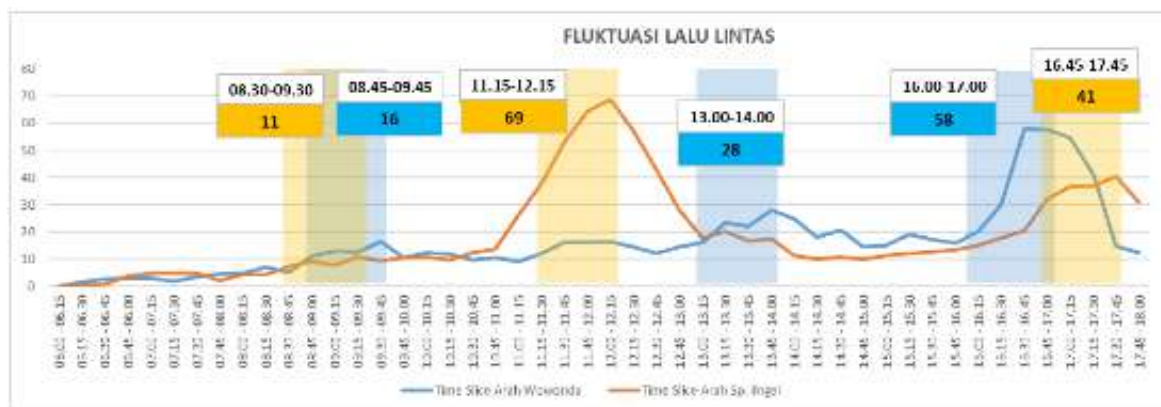
Gambar III-437 Fluktuasi Jalan Wowonda-Ilngi Pada Hari Kerja

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Wowonda – Ilngi Eksisting Tahun 2020 Hari Kerja arah menuju Wowonda peak pagi terjadi pada pukul 08.45-09.45 WIT sebesar 18 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIT sebesar 30 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 62 smp/jam.

Sedangkan untuk jenis moda angkutan di Jalan Wowonda – Ilngi pada Hari Kerja didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 74,0%, angkutan umum sebesar 7,0%, angkutan barang 18,9% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 74,0% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 534 unit (61,6%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 108 unit (12,4%).

- Kondisi Lalu Lintas Pada Hari Libur

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei lalu lintas pada saat hari kerja selama 12 jam. Fluktuasi volume lalu lintas pada saat libur disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Survei, 2020

Gambar III-438 Fluktuasi Jalan Wowonda Pada Hari

Berdasarkan grafik fluktuasi diatas dapat diketahui bahwa volume jam puncak (VJP) Jalan Wowonda – Ilngi Eksisting Tahun 2020 Hari Libur arah menuju Wowonda peak pagi terjadi pada pukul 08.45-09.45 WIT sebesar 16 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIT sebesar 28 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIT sebesar 58 smp/jam. Sedangkan untuk menuju arah Simpang Ilngi peak pagi terjadi pada pukul 08.30-09.30 WIT sebesar 11 smp/jam, pada peak siang terjadi pada pukul 11.15-12.15 WIT sebesar 69 smp/jam, dan pada peak sore terjadi pada pukul 16.45-17.45 WIT sebesar 41 smp/jam.

Proporsi untuk jenis moda angkutan di Jalan Wowonda – Ilngai pada Hari Libur didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 70,0%, angkutan umum sebesar 8,1%, angkutan barang 21,9% dan untuk kendaraan tidak bermotor sebesar 0,0%. Secara lebih terperinci, dari 70,0% moda kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 441 unit (58,8%), sedangkan jenis kendaraan mobil pribadi sebanyak 84 unit (11,2%).

Kapasitas Jalan

Perhitungan kapasitas jalan pada ruas-ruas jalan ter dampak, konsultan menggunakan formulasi dari Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$C = C_o \times FC_{QW} \times FC_{SP} \times FC_{SF}$$

Dimana:

C = Kapasitas (smp/jam)

C₀ = Kapasitas dasar (smp/jam)

FC_W = Faktor penyesuaian lebar jalan

FC_{SP} = Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk tak terbagi)

FC_{SF} = Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb

Dari hasil perhitungan kapasitas jalan luar kota dan perkotaan dengan menggunakan formulasi dalam Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014 diketahui bahwa kapasitas ruas jalan ter dampak pada masing-masing arah. Secara lengkap hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-319 Kapasitas Ruas Jalan Terdampak

No.	Nama Ruas Jalan	Kapasitas Dasar (C ₀) smp/jam	Faktor Penyesuaian			Kapasitas (C)
			FC _w	FC _{sp}	FC _{sf}	Smp/jam
1	Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 1	31000	1,00	1,00	0,96	2976
2	Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 2	31000	1,00	1,00	0,96	2976
3	Jalan Prof. Boediono	31000	1,00	1,00	0,96	3069
4	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 1	31000	0,69	1,00	0,96	2053
5	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 2	31000	0,69	1,00	0,96	2053
6	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 3	31000	0,69	1,00	0,96	2053
7	Jalan Wowonda-Ilngai	31000	0,69	1,00	0,96	2053

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Kondisi Kinerja Tahun Dasar

Nilai V/C ratio di ruas jalan terkena dampak rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya dihasilkan dari pembagian volume jam puncak dibagi dengan besarnya kapasitas jalan yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya. Adapun tingkat pelayanan (level of service/LOS) adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Nilai LOS dinotasikan dalam bentuk huruf dari mulai huruf A – F. huruf A menunjukkan nilai LOS terbaik, sedangkan huruf F menunjukkan nilai LOS terburuk.

Tabel III-320. Skala Penilaian Kualitas Lingkungan berdasarkan V/ C Ratio Jalan

Kriteria	Skala	Nilai V/C Ratio	Keterangan
Sangat Baik	5	< 0,19	Arus Lancar, Volume Rendah, Kecepatan Tinggi
Baik	4	0,20 – 0,44	Arus Stabil, Volume sesuai untuk luar kota, kecepatan terbatas
Sedang	3	0,45 – 0,74	Arus Stabil, Volume sesuai untuk jalan kota, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas
Buruk	2	0,75 – 0,84	Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah
Sangat Buruk	1	> 0,85	Arus tidak stabil dan kecepatan rendah, volume padat

Berdasarkan karakteristik operasi tingkat pelayanan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, maka unjuk kerja lalu lintas pada tahun dasar dari ruas jalan terkena dampak sebelum terbangun Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-321. Kapasitas dan Volume Ruas Jalan Terdampak Pada Hari Kerja

No.	Nama Ruas Jalan	Kapasitas	Volume (Q) (smp/jam)		
		C (smp/jam)	Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp.IIngei Segmen 1	2976	78	90	98
2	Jalan Aruidas-Sp. IIngei Segmen 2	2976	126	170	231
3	Jalan Prof. Boediono	3069	399	236	110
4	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 1	2053	29	33	34
5	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 2	2053	18	30	36
6	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 3	2053	12	25	26
7	Jalan Wowonda-IIngei	2053	31	103	105

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-322. Kinerja Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Terdampak Pada Hari Kerja

No.	Nama Ruas Jalan	V/C Ratio			Tingkat Pelayanan (LOS)			Skala Kualitas Lingkungan		
		Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp.IIngei Segmen 1	0,03	0,03	0,03	A	A	A	5	5	5
2	Jalan Aruidas-Sp. IIngei Segmen 2	0,04	0,06	0,08	A	A	A	5	5	5
3	Jalan Prof. Boediono	0,13	0,08	0,04	A	A	A	5	5	5
4	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 1	0,01	0,02	0,02	A	A	A	5	5	5
5	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 2	0,01	0,01	0,02	A	A	A	5	5	5
6	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 3	0,01	0,01	0,01	A	A	A	5	5	5
7	Jalan Wowonda-IIngei	0,01	0,05	0,05	A	A	A	5	5	5

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-323. Kapasitas dan Volume Ruas Jalan Terdampak Pada Hari Libur

No.	Nama Ruas Jalan	Kapasitas	Volume (Q) (smp/jam)		
		C (smp/jam)	Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp.IIngei Segmen 1	2976	82	73	59
2	Jalan Aruidas-Sp. IIngei Segmen 2	2976	119	161	219
3	Jalan Prof. Boediono	3069	221	401	303
4	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 1	2053	23	29	33
5	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 2	2053	16	19	24
6	Jalan IIngei-Batu Putih Segmen 3	2053	25	18	16
7	Jalan Wowonda-IIngei	2053	28	97	99

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-324. Kinerja Lali Lintas Pada Ruas Jalan Terdampak Pada Hari Libur

No.	Nama Ruas Jalan	V/C Ratio			Tingkat Pelayanan (LOS)			Skala Kualitas Lingkungan		
		Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore	Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp. Ingei Segmen 1	0,03	0,02	0,02	A	A	A	5	5	5
2	Jalan Aruidas-Sp. Ingei Segmen 2	0,04	0,05	0,07	A	A	A	5	5	5
3	Jalan Prof. Boediono	0,07	0,13	0,10	A	A	A	5	5	5
4	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 1	0,01	0,01	0,02	A	A	A	5	5	5
5	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 2	0,01	0,01	0,01	A	A	A	5	5	5
6	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 3	0,01	0,01	0,01	A	A	A	5	5	5
7	Jalan Wowonda-Ingei	0,01	0,05	0,05	A	A	A	5	5	5

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021



Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Gambar III-439. Perbandingan Volume Lalu Lintas Hari Kerja dan Hari Libur

Kecepatan Kendaraan

Kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati beberapa ruas jalan di sekitar kegiatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel III-325. Kecepatan Rata-Rata Ruas Jalan Pada Hari Kerja

No.	Nama Ruas Jalan	Volume (Q) (smp/jam)		
		Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp. Ingei Segmen 1	44	46	44
2	Jalan Aruidas-Sp. Ingei Segmen 2	43	42	44
3	Jalan Prof. Boediono	43	43	45
4	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 1	53	52	53
5	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 2	42	40	41
6	Jalan Ingei-Batu Putih Segmen 3	40	40	40
7	Jalan Wowonda-Ingei	41	44	42

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-326. Kecepatan Rata-Rata Ruas Jalan Pada Hari Libur

No.	Nama Ruas Jalan	Volume (Q) (smp/jam)		
		Pagi	Siang	Sore
1	Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 1	44	45	45
2	Jalan Aruidas-Sp. Ilngai Segmen 2	47	43	44
3	Jalan Prof. Boediono	50	47	43
4	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 1	44	46	43
5	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 2	42	40	42
6	Jalan Ilngai-Batu Putih Segmen 3	43	44	44
7	Jalan Wowonda-Ilngai	43	44	42

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Kondisi Simpang

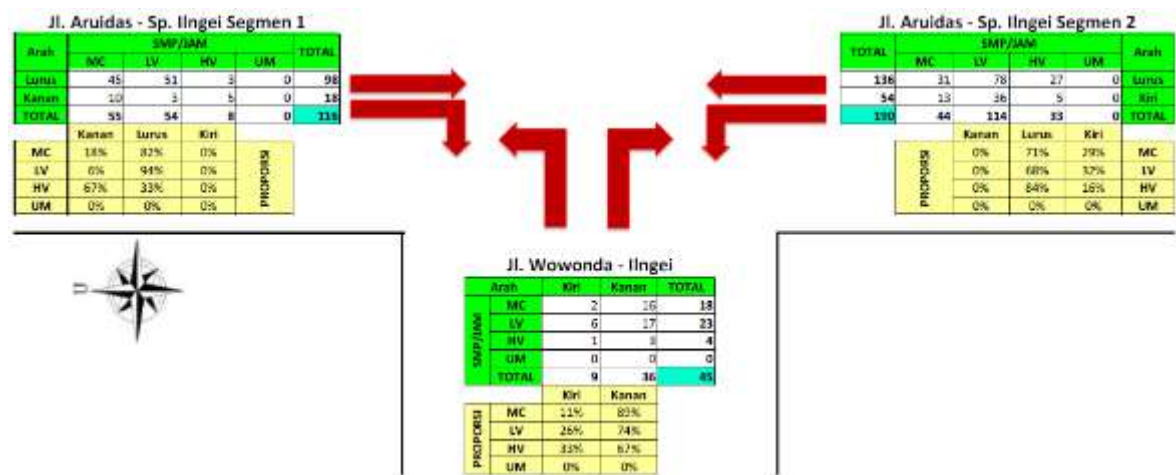
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pelingkupan dampak terdapat 3 (tiga) persimpangan yang terkena dampak dengan adanya pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya. Pada kondisi persimpangan ini akan diuraikan data inventarisasi terhadap kondisi geometrik, analisa lebar pendekat dan tipe persimpangan, analisa kapasitas persimpangan, dan analisa kinerja persimpangan. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja simpang ter dampak akan diuraikan sebagai berikut.

a. Simpang 3 Ilngai

Simpang yang ter dampak pada rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah Simpang 3 Ilngai. Simpang 3 Ilngai merupakan simpang yang menghubungkan ruas Jalan Aruidas – Sp. Ilngai (Jalan Mayor) dan Jalan Wowonda – Ilngai (Jalan Minor).



Gambar III-440 Visualisasi Simpang 3 Ilngai Tahun 2020



Gambar III-441 Deigram Arus Simpang 3 Ingei

Tabel III-327 Lebar Pendekatan dan Tipe Simpang 3 Ingei

Jumlah Lengan Simpang	Pendekatan (m)						Rata-Rata WR	Jumlah Lajur		Tipe Simpang	Tipe Median
	Jalan Mayor			Jalan Minor				Jalan Minor	Jalan Mayor		
	WA m	WC m	WAC m	WB m	WD m	WBD m					
3	3,5	3,5	3,5	0	2,5	1,25	2,38	2	2	322	Tidak Ada

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-328 Kapasitas Simpang 3 Ingei

Kapasitas Dasar (Co) Smp/jam	Faktor Penyesuaian Kapasitas (F)							Kapasitas (C) smp/jam
	Lebar Pendekatan Rata-Rata	Median Jalan	Ukuran Kota	Hambatan Samping	Belok Kiri	Belok Kanan	Rasio Arus Minor	
	FW	Fm	FCS	FRSU	FLT	FRT	Fmi	
2.700	0,91	1,00	0,82	0,85	1,13	0,95	1,05	1.937

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-329 Kinerja Simpang 3 Ingei

Arus lalu-lintas (Q) smp/jam	Derajat Kejenuhan DS=Q/C	Total Tundaan DT	Jl. Mayor DTMA	Jl. Minor DTMI	Tundaan Geometrik (DG)	Tundaan Simpang (D)	Peluang Antrian QP%	Sasaran
315	0,18	1,85	1,38	5,05	4,00	5,85	2-8	DS<0,85

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

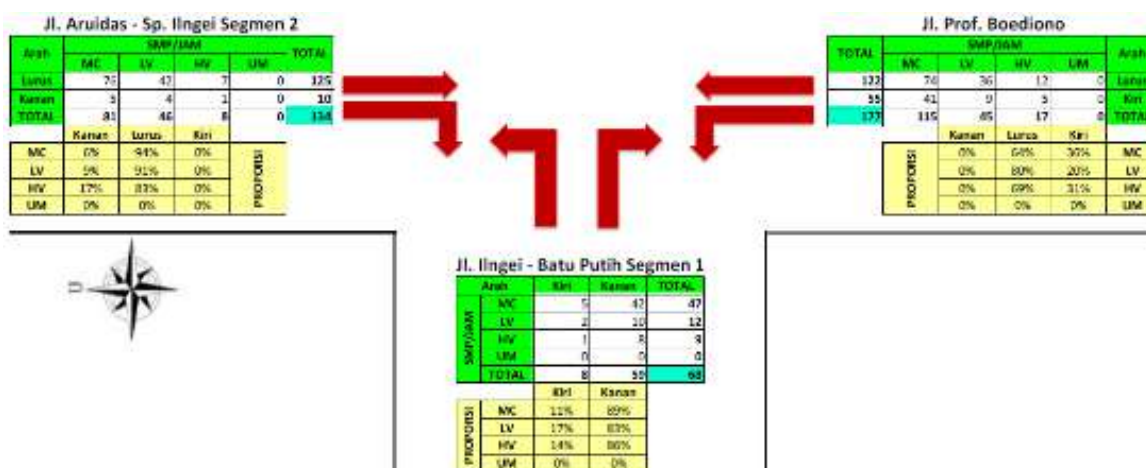
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kinerja Simpang 3 Ingei memiliki derajat kejenuhan 0,18 dengan peluang antrian 2 – 8 % dan tundaan simpang 5,85 dan memiliki LOS A.

b. Simpang 3 Luran

Simpang yang terdampak pada rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah Simpang 3 Luran. Simpang 3 Luran merupakan simpang yang menghubungkan ruas Jalan Aruidas – Sp. Ingei (Jalan Mayor) dan Jalan Ingei – Batu Putih (Jalan Minor).



Gambar III-442 Visualisasi Simpang 3 lauran Tahun 2020



Gambar III-443 Diagram Arus Simpang 3 Luran

Tabel III-330 Lebar Pendekatan dan Tipe Simpang 3 Luran

Jumlah Lengan Simpang	Pendekatan (m)						Rata-Rata WR	Jumlah Lajur		Tipe Simpang	Tipe Median
	Jalan Mayor			Jalan Minor				Jalan Minor	Jalan Mayor		
	WA	WC	WAC	WB	WD	WBD					
	m	m	m	m	m	m					
3	3,5	3,5	3,5	0	2,5	1,25	2,38	2	2	322	Tidak Ada

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-331 Kapasitas Simpang 3 Luran

Faktor Penyesuaian Kapasitas (F)	Kapasitas (C)
----------------------------------	---------------

Kapasitas Dasar (Co) Smp/jam	Lebar Pendekatan Rata-Rata	Median Jalan	Ukuran Kota	Hambatan Samping	Belok Kiri	Belok Kanan	Rasio Arus Minor	smp/jam
	FW	Fm	FCS	FRSU	FLT	FRT	Fmi	
2.700	0,91	1,00	0,82	0,85	1,11	0,95	1,01	1.783

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-332 Kinerja Simpang 3 Lauran

Arus lalu-lintas (Q)	Derajat Kejenuhan	Total Tundaan	Jl. Mayor	Jl. Minor	Tundaan Geometrik	Tundaan Simpang	Peluang Antrian	Sasaran
smp/jam	$DS=Q/C$	DT	DTMA	DTMI	(DG)	(D)	QP%	
379	0,21	2,17	1,62	4,70	4,40	6,21	3-10	$DS<0,85$

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

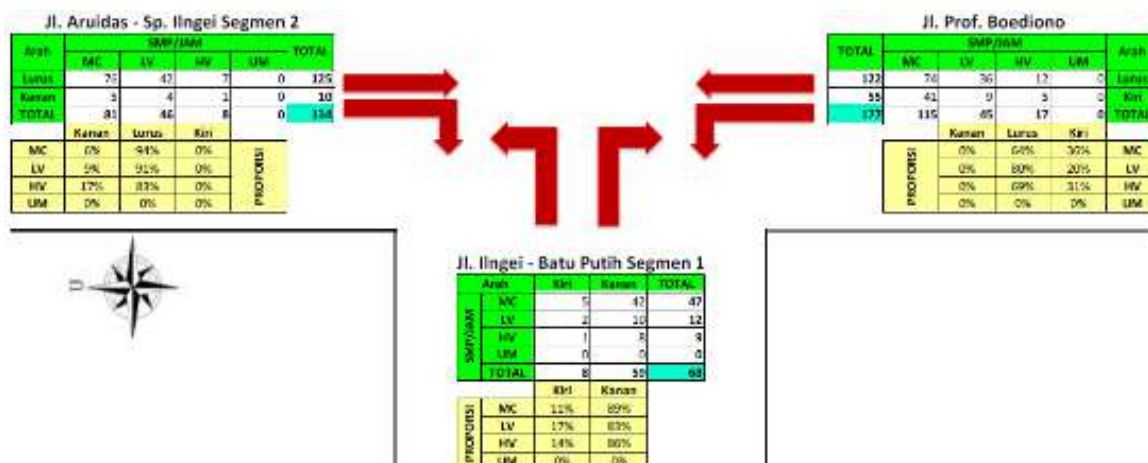
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kinerja Simpang 3 Lauran memiliki derajat kejenuhan 0,21 dengan peluang antrian 3 – 10 % dan tundaan simpang 6,21 dan memiliki LOS A.

c. Simpang 3 Lermatang

Simpang yang terdampak pada rencana pembangunan Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya adalah Simpang 3 Lermatang. Simpang 3 Lermatang merupakan simpang yang menghubungkan ruas Jalan Ilngi – Batu Putih (Jalan Mayor) dan Jalan Desa Lermatang (Jalan Minor).



Gambar III-444 Visualisasi Simpang 3 Lermatang tahun 2020



Gambar III-445 Diagram alur Simpang 3 Lermatang

Tabel III-333 Lebar Pendekatan dan Tipe Simpang 3 Lermatang

Jumlah Lengan Simpang	Pendekatan (m)						Rata-Rata WR	Jumlah Lajur		Tipe Simpang	Tipe Median
	Jalan Mayor			Jalan Minor				Jalan Minor	Jalan Mayor		
	WA m	WC m	WAC m	WB m	WD m	WBD m					
3	2,5	2,5	2,5	0	2,5	1,25	1,88	2	2	322	Tidak Ada

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-334 Kapasitas Simpang 3 Lermatang

Kapasitas Dasar (Co) Smp/jam	Faktor Penyesuaian Kapasitas (F)							Kapasitas (C) smp/jam
	Lebar Pendekatan Rata-Rata	Median Jalan	Ukuran Kota	Hambatan Samping	Belok Kiri	Belok Kanan	Rasio Arus Minor	
	FW	Fm	FCS	FRSU	FLT	FRT	Fmi	
2.700	0,87	1,00	0,82	0,85	1,12	0,93	0,93	1.601

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Tabel III-335 Kinerja Simpang 3 Lauran

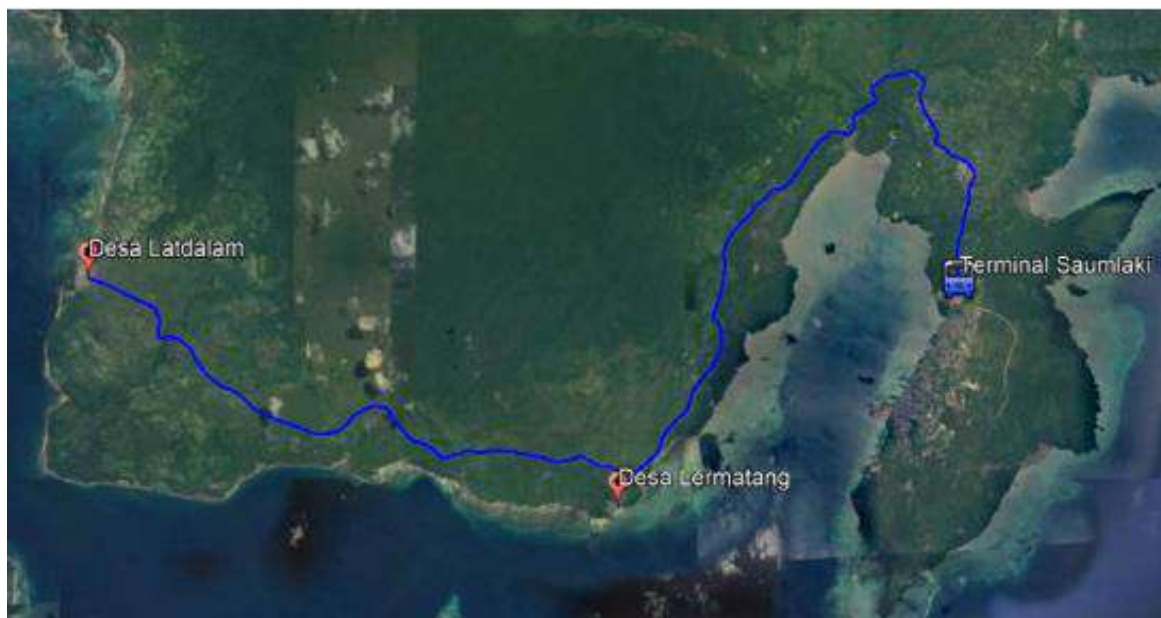
Arus lalu-lintas (Q)	Derajat Kejenuhan	Total Tundaan	Jl. Mayor	Jl. Minor	Tundaan Geometrik	Tundaan Simpang	Peluang Antrian	Sasaran
smp/jam	$DS=Q/C$	DT	DTMA	DTMI	(DG)	(D)	QP%	
52	0,03	2,33	1,25	0,55	4,04	4,37	0-1	$DS<0,85$

Sumber : Hasil Analisis ANDALALIN, 2021

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kinerja Simpang 3 Lermatang memiliki derajat kejenuhan 0,33 dengan peluang antrian 0 – 1 % dan tundaan simpang 4,04 dan memiliki LOS A.

Kondisi Angkutan Umum

Angkutan Umum yang melewati Ruas Jalan Ilgei – Batu Putih yang merupakan akses jalan langsung dari lokasi Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya terdiri dari 1 Angkutan Perintis (DAMRI) dan 2 (dua) trayek Angkutan Kota (Angkot) yaitu Trayek Saumlaki – Lermatang dan Trayek Saumlaki – Lermatang – Latdalam.



Gambar III-446 Rute Angkutan Perintis DAMRI dan Angkot



Gambar III-447 Visualisasi Angkutan Perintis DAMRI Rute Saumlaki Latdalam



Gambar III-448 Visualisasi Angkutan Umum Trayek Saumlaki Lermatang-Latdalam

Berikut adalah kinerja angkutan umum di depan lokasi Kilang OLNG Beserta Fasilitas Pendukungnya sesuai indikator kinerja angkutan umum.

Tabel III-336 Kinerja Angkutan Umum

Indikator	Kinerja
Angkutan Perintis DAMRI	
Frekuensi	1 kendaraan per hari
Load Factor	40-50%
Angkot Trayek Saumlaki-Lermatang	
Frekuensi	1-2 kendaraan per hari
Load Factor	60-70%
Angkot Trayek Saumlaki-Lermatang-Latdalam	
Frekuensi	4-6 kendaraan per hari
Load Factor	60-70%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

B. Transportasi Laut

Beberapa TUKS dan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar antara lain :

1. Dermaga/Pelabuhan Saumlaki adalah dermaga beton kelas II yang posisinya 080 58' 00" LS — 1310 18' 00" BT panjangnya 170 meter, lebar 8 meter dengan kapasitas dermaga maksimal kapal 6022 GRT dengan kedalaman saat air pasang 9 meter dan saat air surut 6 meter, pelabuhan Saumlaki digunakan kapal Pelni, kapal-kapal perintis dan kapal-kapal milik masyarakat.

2. Dermaga Pertamina adalah dermaga besi yang posisinya 070 58' 00" LS — 1310 05' 00" BT panjangnya ±50 m x 5 m, panjang dermaga dari pantai ke kedalaman 350 meter lebar 5 meter terletak di Pulau Yamdena status kepemilikan Pertamina yang merupakan penyalur/penerima bahan bakar dengan daya muat 5000 ton.
3. Dermaga Ferry Saumlaki adalah dermaga beton kelas IV yang posisinya 080 58' 00" LS — 1310 00' 00" BT panjangnya 40 m x 5 m dengan kapasitas dermaga maksimal kapal 1200 GT, kedalaman saat air pasang 7 meter serta saat air surut 4 meter terletak di Pulau Yamdena status kepemilikan Dephub
4. Dermaga Perikanan Saumlaki adalah dermaga beton kelas IV yang posisinya 080 59' 00" LS — 1300 00' 00" BT panjang 50 meter, lebar 5 meter terletak di Pulau Yamdena Selatan status kepemilikan DKP.
5. Dermaga Adaut, P. Selaru Kecamatan Selaru posisi 080 08' 55" LS — 1310 06' 50" BT Panjang dermaga 70 meter, lebar 7 meter konstruksi bangunan terbuat dari Beton. Panjang jalan dari darat ke Laut 800 meter.
6. Dermaga Siera, Kecamatan Wermaktian, posisi 070 39' 25" LS — 1310 02' 20" BT Panjang dermaga 70 meter, lebar 7 meter konstruksi bangunan terbuat dari Beton. Panjang jalan dari darat ke Laut 250 meter.
7. Dermaga umum di Desa Ritabel P. Larat Kec. Tanimbar Utara posisi 070 09' 05" LS — 1300 42' 50" BT dengan data panjang 70 m, lebar 7 m, konstruksi beton, panjang jalan dari darat ke dermaga 10 m.
8. Dermaga Fery letaknya bersebelahan dengan dermaga umum Panjang 40 meter, lebar 5 meter dipakai sandar KM Egron Fery dengan route Larat — Saumlaki PP, dapat disandari KRI jenis Frosch Class.
9. Dermaga Adodo, P. Molu, Kec. Molumaru posisi 060 42' 08" LS - 1310 33' 56" BT Panjang dermaga 70 meter, lebar 7 meter konstruksi bangunan terbuat dari Beton. Panjang jalan dari darat ke Laut 400 meter.

Pergerakan lalu lintas laut berdasarkan data yang tercatat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki pada bulan Oktober 2019, baik dari luar negeri maupun domestik adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel III-337 Pergerakan Kapal-kapal menurut Call di Pelabuhan Saumlaki Bulan Oktober 2019

No.	Jenis Kapal	Jumlah Call (unit)	Σ rata-rata tambat (hari)	Kisaran waktu tiba tertinggi		Kisaran waktu berangkat tertinggi	
				Waktu	Unit	Waktu	Unit
	Kapal Luar Negeri:						
1	Barang	1	1	09.00	1	16.00	1
2	Yacht	8	2	09.00-12.00	8	18.00-21.00	8
	Kapal Dalam Negeri:						
3	Nusantara	53	2	06.00-09.00	26	15.00-18.00	20
4	Perintis	38	2	03.00-06.00	11	15.00-18.00	11
5	Pertamina	5	1	12.00-15.00	2	15.00-18.00	4
6	Perla	36	1	06.00-09.00	28	12.00-15.00	29

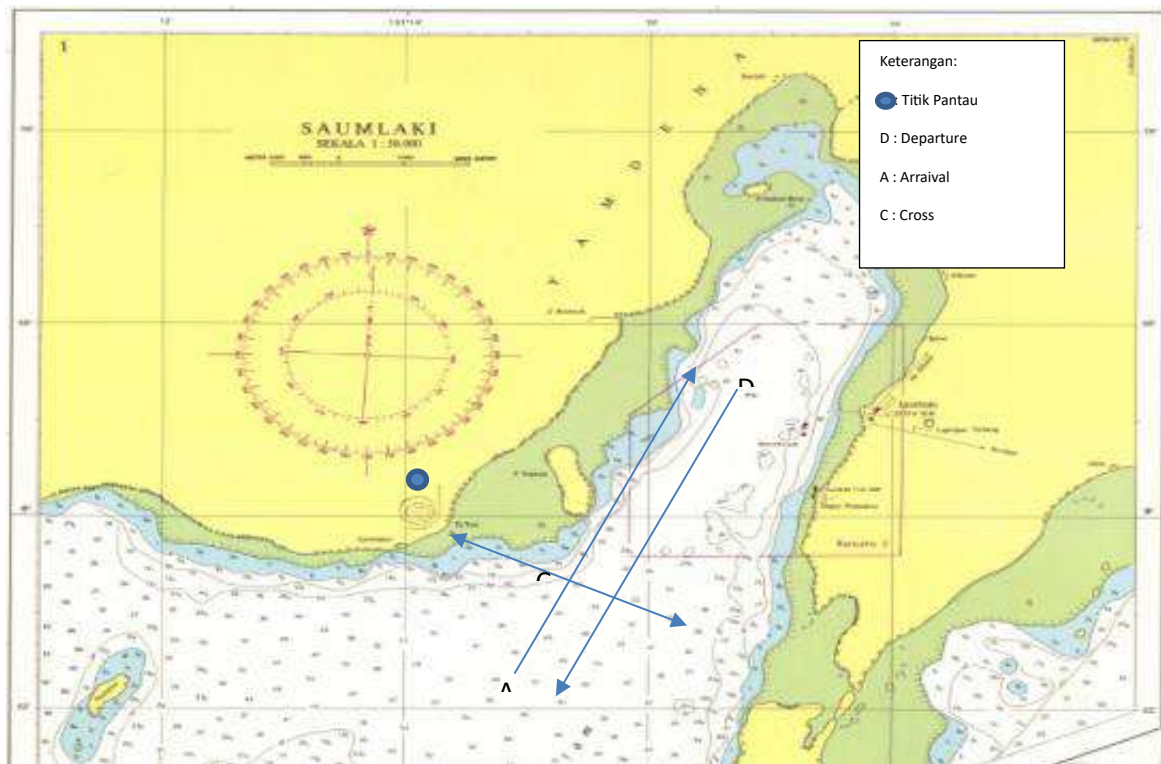
No.	Jenis Kapal	Jumlah Call (unit)	Σ rata-rata tambat (hari)	Kisaran waktu tiba tertinggi		Kisaran waktu berangkat tertinggi	
				Waktu	Unit	Waktu	Unit
Total Call		144					

Sumber: KUPP Kelas II Saumlaki, Oktober 2019, hasil analisis konsultan 2020

Berdasarkan data total call dapat dipastikan jumlah bangkitan lalu lintas kapal menggunakan alur pelayaran Teluk Dalam selama bulan Oktober 2019 sebanyak 288 tiba dan berangkat, ini berarti bahwa setiap hari rata-rata terdapat 9 unit kapal yang melakukan tiba dan berangkat.

Data kedatangan dan keberangkatan terutama kapal-kapal dalam negeri dapat di kelompokkan berdasarkan kelompok waktu, didapatkan waktu-waktu dengan frekuensi tertinggi lalu lintas laut. Tabel di atas menunjukkan waktu frekuensi tertinggi saat kedatangan adalah pada kelompok waktu 06.00 – 09.00 yang dilakukan oleh kapal-kapal Nusantara dengan frekuensi sebanyak 26 unit dan kapal-kapal Perla dengan frekuensi sebanyak 28 unit sehingga total frekuensi 54 unit, sedangkan waktu dengan frekuensi tertinggi saat keberangkatan adalah di kelompok waktu 15.00 – 18.00 yang dilakukan berturut-turut oleh Kapal-kapal Nusantara 20 unit, Perintis 11 unit, dan Pertamina 4 sehingga total frekuensi keberangkatan 35 unit.

Pemantauan lalu lintas laut di Teluk Dalam Pulau Yamdena pada tanggal 29 – 30 November 2019 selama 24 jam, titik pantau terletak di desa Lermatang tepatnya pada posisi 07059'57,8" LS – 131014'18,6" BT. Metode pemantauan seperti terlihat pada gambar di bawah ini, dilakukan mulai jam 18.00 WIT (29-11-2019) sampai dengan 18.00 (30-11-2019) WIT.



Sumber: Peta Laut No.382, PP Tanimbar (Peta Rencana 1) Pushidrosal, 2018, diolah konsultan, 2020

Gambar III-449 Metode pemantauan

Hasil pemantauan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-338 Hasil Pemantauan Lalu lintas Laut di Teluk Dalam

Tanggal			Jumlah dan Jenis Kapal				Jumlah
29-11-'19			Nelayan	Niaga	Penumpang	Ferry	
Jam	18 - 21	D	3				3
		A					
		C	1				1
	21 - 00	D		1			1
		A	1				1
		C			1		1
30-11-'19							
Jam	00 - 03	D		1			1
		A	3				3
		C	1				1
	03 - 06	D	14				14
		A	1	1			2
		C	17				17
	06 - 09	D	1				1
		A	21		1		22
		C					
	09 - 12	D	1				1
		A			1		1
		C	1				1
	12 - 15	D	5			1	6
		A			3		3
		C	4				4
	15 - 18	D	6				6
		A	10	1	1		12
		C	3				3
Melintas Selat Nustual							
Jam	12 - 15	D	2				2
		A					
		C					
	15 - 18	D	1				1
		A	2				2
		C					
Total			98	4	7	1	110

Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Pergerakan lalu lintas laut terpantau sebanyak 110 unit didominasi oleh kapal nelayan sebanyak 98 unit, dan kelompok waktu dengan frekuensi terpadat antara jam 03.00 sampai dengan jam 06.00 pagi sebanyak 33 unit kemudian terpadat ke-2 pada jam 06.00 – 09.00 sebanyak 23 unit.

Untuk kasus lalu lintas yang melalui selat Nustual, terpantau hanya 5 unit kapal nelayan kecil yaitu pada kelompok waktu 12.00-15.00 sebanyak 2 unit dan 15.00-18.00 sebanyak 3 unit, kemungkinan besar untuk melalui selat tersebut sangat tergantung dengan pasang surut.

Gambaran dari hasil analisis data maupun dari hasil pemantauan langsung terdapat persamaan kelompok waktu yang mempunyai frekuensi kepadatan lalu lintas laut, yaitu pada kelompok

waktu 15.00-18.00 (35 unit dan 21 unit). Padatnya frekuensi lalu lintas pada kelompok-kelompok waktu tersebut memberikan gambaran agar lebih memperhatikan dan waspada saat melakukan kegiatan proyek.

Kepulauan Tanimbar dilayani oleh kapal-kapal Pelni, Perintis dan kapal-kapal masyarakat.

Daftar rute perjalanan lewat laut :

Kapal Pelni

- KM. Pangrango dengan route Ambon, Saumlaki, Tapa, Moa, Kisar,
- KM. Kelimutu dengan route Saumlaki, Tual, Banda, Ambon Wanci, Bau Bau, Wanci, P.Hoga, P. Tomiang, Bau-Bau, Makassar, Bima, Benoa, Sby, pp.
- KM. Sirimau dengan route Tual, saumlaki, Kalabahi, Kupang, Larantuka, Labuan Bajo, Bima, Makassar, Batulicin, Sby, PP.

Kapal Perintis

- KM. Sabuk Nusantara 34 dengan route Saumlaki, Tapa, Mahaleta, Moa, Kisar, Kupang PP.
- KM. Sabuk Nusantara 41 dengan route Saumlaki, dawelor, tapa, moa, serwaru, kisar, luray, PP.
- KM. Lintas Bahari Nusantara route dari Saumlaki, Tapa, Marsela, Moa, Kisar, Lirang, Eray, Kalabahi, PP.
- KM. Weta route Saumlaki, Tapa, Moa, Kisar, Ilwaki, PP.
- KM. Tol Laut route Surabaya Saumlaki PP.

Kapal Cargo (Teknik)

- KM. Mitra bersama dengan route Surabaya — Saumlaki, PP.
- KM. Tanimbar Permai dengan route Surabaya — Saumlaki, PP
- KM. Indotim dg. route Surabaya — Saumlaki, PP
- KM. Mitra Nusantara route Surabaya — Saumlaki, PP
- KM. El Shadai route Surabaya — Saumlaki, PP
- KM. Sapta Pesona (Kapai Kayu) Route Surabaya— Saumlaki, PP.
- KM. Yamdena route Surabaya — Saumlaki, PP
- Indimatam VII route Makasar — Saumlaki, PP (Carteran Aneka)

Kapal Ferry

- KMP. Egron dengan route Saumlaki, Siera, Unlah, Yaru, Larat, Molomaru, Saumlaki, Kroing, Adaut, Kisar, Ambon, PP.

Dengan adanya daerah zona terlarang dan terbatas akibat pembangunan jalan lintasan (*causeway*) ke TUKS, maka akan menyebabkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas laut di Teluk Dalam Pulau Yamdena dan di Lintas Selat Nustual, maka dibuatkan tabel kriteria penilaian kualitas lingkungan gangguan lalu lintas akibat pembangunan jalan lintasan (*causeway*) ke TUKS seperti berikut.

Tabel III-339. Skala penilaian gangguan lalu lintas akibat pembangunan jalan lintasan (*causeway*) ke TUKS pada tahap konstruksi

Kriteria	Keterangan	Skala Kualitas Lingkungan
Mengganggu Sekali	Para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) ke TUKS	3
Mengganggu	Para pengguna alur pelayaran diberi akses transportasi alternatif terdekat dari area pembangunan jalan lintasan (<i>causeway</i>) ke TUKS	2
Tidak mengganggu	Para pengguna alur pelayaran berlangsung normal tanpa adanya daerah zona terlarang dan terbatas	1

Tabel III-340. Skala penilaian gangguan lalu lintas keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (*causeway*) ke TUKS, pemuatan dan transportasi LNG serta kondensat pada tahap operasi.

Kriteria	Keterangan	Skala Kualitas Lingkungan
Mengganggu Sekali	Para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (<i>causeway</i>) ke TUKS, pemuatan dan transportasi LNG serta kondensat pada tahap operasi	3
Mengganggu	Para pengguna alur pelayaran diberi akses transportasi alternatif terdekat dari area keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (<i>causeway</i>) ke TUKS, pemuatan dan transportasi LNG serta kondensat pada tahap operasi	2
Tidak mengganggu	Para pengguna alur pelayaran berlangsung normal tanpa adanya daerah zona terlarang dan terbatas	1

Tabel III-341. Skala penilaian gangguan lalu lintas penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas pada tahap pasca operasi

Kriteria	Keterangan	Skala Kualitas Lingkungan
Mengganggu Sekali	Para pengguna alur pelayaran harus menghindari dari area penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas pada tahap pasca operasi	3

Kriteria	Keterangan	Skala Kualitas Lingkungan
Mengganggu	Para pengguna alur pelayaran diberi akses transportasi alternatif terdekat dari area penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas pada tahap pasca operasi	2
Tidak mengganggu	Para pengguna alur pelayaran berlangsung normal tanpa adanya daerah zona terlarang dan terbatas	1

3.3.4.2 Kabupaten Maluku Barat Daya

Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara geografis berada pada wilayah remote dan di luar jalur perdagangan. Oleh karena itu, wilayah ini sering kali disebut The Forgotten Islands atau “Pulau-Pulau yang Terlupakan” dan jarang mendapat perhatian. Aksesibilitas menuju dan dari Maluku Barat Daya relatif terbatas sehingga sulit untuk mendukung arus lalu-lintas logistik perdagangan karena ketidakpastian dan durasi waktu yang panjang. Transportasi antar pulau pun memiliki tantangannya tersendiri. Ketersediaan sarana jalan raya di dalam pulau pun belum seratus persen tersedia. Maka untuk pembahasan transportasi di sini, terdapat tiga kategori penjelasan yakni: a) Menuju dan dari Maluku Barat Daya ke Maluku dan Indonesia secara umum; b) Akses antar pulau di dalam wilayah Maluku Barat Daya; dan c) Sarana perhubungan di dalam pulau-pulau di Maluku Barat Daya.

Akses menuju Maluku Barat Daya dapat ditempuh dari Ambon atau Kupang dengan menggunakan dua moda transportasi yakni pesawat udara dan kapal laut perintis Sabuk Nusantara. Dari Kota Ambon, tersedia hanya satu maskapai yakni Trigana Air yang beroperasi 3 kali dalam seminggu di Hari Selasa, Kamis dan Minggu dengan Rute Kupang - Ambon – Tiakur dan kembali di hari yang sama. Pesawat dari Ambon akan mendarat di ibukota kabupaten di Tiakur, Pulau Moa dengan jarak tempuh 1 jam 45 menit. Sementara itu, kapal perintis Sabuk Nusantara (1. Sabuk Nusantara 60; 2. Sabuk Nusantara 104; 3. Sabuk Nusantara 71; 4. Sabuk Nusantara 73; 5. Sabuk Nusantara 34; dan 6. Sabuk Nusantara 87) juga melayani pengangkutan penumpang dari Pelabuhan Ambon dengan rute Ambon – Kepulauan Tanimbar – Pulau Babar dan Pulau Lain di Maluku Barat Daya – kemudian berakhir di Kota Kupang dengan perkiraan waktu tempuh total adalah sekitar 8 hari. Sebenarnya jenis kapal cepat dengan nama Cantika Lestari juga ada namun pada saat kajian dilakukan moda ini tidak operasional.



Pesawat ATR-400 Trigana Air dari Ambon ke Moa



Pelabuhan Udara di Tiakur, Pulau Moa



Kapal Perintis Sabuk Nusantara ke MBD



Pelabuhan di Pulau Babar, MBD

Sumber: Dokumentasi PKSPL 2024

Gambar III-450. Sarana Transportasi di Kabupaten MBD

Untuk hubungan antar pulau, selain menggunakan Sabuk Nusantara, transportasi harian antar penduduk dilakukan dengan moda perahu baik speedboat fiber, perahu kayu bermesin dalam atau bermesin tempel. Perkiraan jarak antar pulau adalah sebagai berikut:

Tabel III-342. Jarak dan Sarana Transportasi Antar Pulau di Maluku Barat Daya

Dari	Menuju	Sarana	Waktu Tempuh
Pulau Moa	Pulau Luang	Speedboat	2 jam
Pulau Moa	Pulau Sermata	Speedboat	3 jam
Pulau Moa	Pulau Babar	Speedboat	5-6 jam
Pulau Moa	Dai	Speedboa/perahu tempel	9 jam
Pulau Moa	Dowra	Speedboat/perahu tempel	10 jam
Pulau Moa	Dawera	Speedboat	10 jam
Pulau Moa	Wetang	Speedboat	5 jam
Pulau Moa	Damer	Speedboat/kapal cepat	5-6 jam/7-8 jam
Pulau Moa	Pulau Kisar	Perahu tempel	3-4 jam

Sumber: Data Primer 2024

Waktu tempuh dan jadwal keberangkatan perahu-perahu di atas tidak resmi namun rutin. Rute yang paling dekat rutennya adalah antar Pulau Marsela-Wetang-Dai. Setiap hari ada trip di Pulau Wetang di mana dalam satu hari bisa ada 2 – 3 trip. Jumlah speedboat antar pulau ini lebih dari 10 unit. Untuk Rute Ke Dai setiap hari ada satu kali tergantung cuaca, dan sifatnya bukan reguler atau dipesan. Perahu dengan body kayu hanya digunakan untuk transportasi antar pulau di dalam MBD saja.

Selain kapal penumpang, juga terdapat Kapal Kargo untuk pengangkutan logistik antar pulau. Setidaknya ada empat kapal kargo di MBD ini: 1. Kapal Kargo Manohara; 2. Kapal Kargo Asia Permai; 3. Kapal Kargo Intimulia; dan 4. Kapal Kargo Teveline, serta Kapal Kargo Swasta: 1. Berkat Taloda.

Untuk sarana transportasi di darat, sarana angkutan umum resmi pedesaan hanya ditemui di Tiakur, ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Babar baik milik swasta ataupun milik pemerintah daerah, sementara di daerah/pulau lain sarana transportasi umum tidak ada. Yang tersedia adalah sarana angkutan pribadi yang dapat disewa sesuai kebutuhan. Sementara transportasi antar ladang dan permukiman, kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, dan juga menggunakan kuda.



Sarana angkutan pedesaan milik Pemda



Sarana pengangkutan di Pulau Masela



Dermaga di Pulau Masela



Kuda juga menjadi sarana transportasi ke ladang

Sumber: Dokumentasi PKSPL 2024

Gambar III-451. Sarana Transportasi di Kabupaten MBD

Ketersediaan sarana transportasi di Kabupaten Maluku Barat Daya bisa dikatakan masih terbatas dan selama tiga tahun terakhir total panjang jalan justru menurun akibat kerusakan yang tidak diperbaiki. Total panjang jalan yang ada di kabupaten ini adalah 1126,35 km dengan persentase terbesar adalah rusak berat (BPS Kab. Maluku Barat Daya 2023). Dari total jalan tersebut, sepanjang 877,14 km merupakan jalan kabupaten, sementara sisanya adalah jalan negara (191,47 km) dan jalan provinsi (57,74 km). Melihat luasan wilayahnya, panjang jalan eksisting ini tentunya tidak memadai untuk mendukung distribusi dan lalu lintas manusia yang menempatnya.

Tabel III-343. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Maluku Barat Daya Tahun 2020-2022

Jenis Permukaan Jalan	2020 (km)	2021 (km)	2022 (km)
Aspal	427,55	452,85	516,31
Kerikil		184,39	184,12
Tanah	544,21	60,84	119,41
Lainnya	320,95	428,27	306,51
Jumlah	1292,71	1126,35	1126,35

Sumber: Kab. Maluku Barat Daya dalam Angka 2023

Berdasarkan status jalan dalam tiga tahun terakhir kondisi jalan yang Baik dan Sedang terindikasi meningkat dan jalan dengan status Rusak dan Rusak Berat menurun, namun secara porsi total, panjang jalan yang rusak berat tetap paling panjang. Berikut disajikan gambaran lengkapnya:

Tabel III-344. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2022

Kondisi Jalan	2020 (km)	2021 (km)	2022 (km)
Baik	278,67	301,08	353,23

Sedang	391,96	264,41	271,87
Rusak	88,70	111,77	94,38
Rusak Berat	449,09	406,87	406,87
Jumlah	1292,71	1126,35	1126,35

Sumber: Kab. Maluku Barat Daya dalam Angka 2023

3.3.5 Kesehatan Masyarakat

Pembangunan merupakan proses aktivitas sosial yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Proses itu terjadi secara berkelanjutan, berkaitan satu dengan lainnya, berupaya memberi nilai tambah (*add value*) dalam segala dimensi bukan hanya aspek ekonomi/material saja, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Kualitas hidup akan meningkat jika lingkungan hidup semakin baik, karena manusia hidup didalam lingkungan, sebagai tempat bermukim (*place of living*) ataupun sebagai tempat mencari sumber daya (*resources for living*).

Studi Amdal Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Kecamatan Tanimbar Selatan – Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku akan berdampak (positif maupun negatif) pada lingkungan sekitarnya. Dampak bisa timbul pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi maupun saat pasca operasi kegiatan pembangunan tersebut terhadap lingkungan yang berupa pencemaran primer pada kualitas udara, air, tanah dan lingkungan sosial serta dapat mengakibatkan dampak turunan/sekunder terhadap kesehatan masyarakat di wilayah studi, misalnya dampak turunan dari mobilisasi tenaga kerja dalam jumlah yang besar/migrasi, dampak turunan dari mobilisasi peralatan dan material/bahan. Variabel yang diukur untuk menilai gangguan kesehatan lingkungan misalnya gangguan kenyamanan lingkungan (*infermity*) akibat paparan polutan, seperti: paparan debu, kebisingan, kemacetan, dan lain-lain. Adapun gangguan kesehatan masyarakat, timbulnya kesakitan (*morbidity*), dan timbulnya difabel (*disability*), serta yang paling ekstrim adalah timbulnya kematian (*mortality*).

Masalah lingkungan hidup menjadi penting karena pada dasarnya lingkungan memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Pada hakekatnya masalah kehidupan manusia tersebut erat kaitannya dengan keadaan kesehatan individu dan masyarakat, bahkan ukuran akhir dari masalah lingkungan adalah sehat/tidaknya suatu masyarakat yang hidup di dalam suatu lingkungan tertentu (Fuad Amsyari 2002).

Kesehatan masyarakat adalah kondisi ketahanan fisik dan psikis dari suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dari interaksi antara perilaku yang merupakan cermin dari kebiasaan hidup dengan kualitas kesehatan lingkungannya (S.K BAPPEDAL No.124/12/1997).

Kajian aspek Kesehatan Masyarakat berdasarkan S.K BAPPEDAL No.124/12/1997 ada 8 poin yaitu:

1. Parameter lingkungan (aspek fisik kimia – debu, bising, timbunan limbah limbah cair dan padat);
2. Proses dan potensi pemajanan/pemaparan;
3. Potensi besarnya dampak terjadinya sakit;
4. Karakteristik penduduk yang beresiko (penduduk lanjut usia, ibu hamil, dan anak usia balita pada pembahasan perubahan gizi masyarakat dan pengelolaan dampak berupa pengembangan masyarakat kesehatan);

5. Sumberdaya kesehatan (fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan);
6. Kondisi sanitasi lingkungan (kondisi rumah, sarana air bersih, timbulan limbah padat dan cair, sarana MCK, sarana pemrosesan sampah, drainase);
7. Status gizi masyarakat; dan
8. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyakit.

Status kesehatan masyarakat yang akan diukur dalam studi ini meliputi perubahan penyakit menular/infeksius, perubahan penyakit tidak menular/*degenerative*, peningkatan penggunaan zat adiktif (narkoba, alkohol), perubahan status gizi masyarakat, perubahan kesehatan lingkungan/sanitasi lingkungan, sumberdaya kesehatan (fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan), dan cakupan/akses layanan kesehatan di wilayah studi.

Pada pengumpulan data rona lingkungan kesehatan masyarakat di sekitar proyek menggunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data primer hanya dilakukan pada desa terdampak proyek yaitu Desa Lermatang, Bomaki, Latdalam, Matakus, Lorulun dan Tumbur. Adapun pada desa terpengaruh proyek hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari data puskesmas, potensi desa, kecamatan dalam angka, dan statistik kesejahteraan melingkupi data untuk desa terdampak dan terpengaruh oleh proyek sehingga penjelasan untuk data sekunder mewakili dua kriteria desa.

Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga analisa dampak lingkungan menjadi bagian integral dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat. Kajian aspek kesehatan bertujuan untuk memahami faktor risiko kesehatan serta dampak lingkungan yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Kebijakan yang lebih efektif dan program intervensi yang tepat dapat dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Pendekatan yang sistematis dan berbasis data sangat diperlukan guna memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cakupan wilayah kajian di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

3.3.5.1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Menurut data sekunder dari Kecamatan Tanimbar Selatan dalam Angka (2021 - 2022) tren jenis penyakit, jumlah penderita dan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan didominasi oleh kasus penyakit Influenza Like Illness lalu disusul dengan Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat. Tabel berikut ini menampilkan tren 10 penyakit terbanyak dan prevalensinya di Puskesmas Saumlaki selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2022.

Tabel III-345 Tren 10 Penyakit Terbanyak dan Prevalensinya Menurut Kunjungan Pasien di Puskesmas Saumlaki (2021-2022)

No	Jenis Penyakit	2021		2022	
		Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi
1.	<i>Influenza Like Illness</i>	4.691	145,91	0	0
2.	Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat (Penyakit Tulang Belulang, Radang Sendi Termasuk Reumatik)	1.743	54.21	2.012	N/a
3.	Gastritis	969	30,14	1.115	N/a

No	Jenis Penyakit	2021		2022	
		Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi
4.	Hipertensi	964	29,98	1.413	N/a
5.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	452	14,37	0	N/a
6.	Diare Tanpa Dehidrasi	351	10,91	297	N/a
7.	Penyakit Kulit Alergi	331	10,29	254	N/a
8.	Penyakit dan Kelainan Susunan Saraf Lainnya	251	7,81	0	0
9.	Asma	237	7,37	183	N/a
10.	Cedera Akibat Kecelakaan Transportasi	166	5,16	0	0
Jumlah		10.155		12.899	

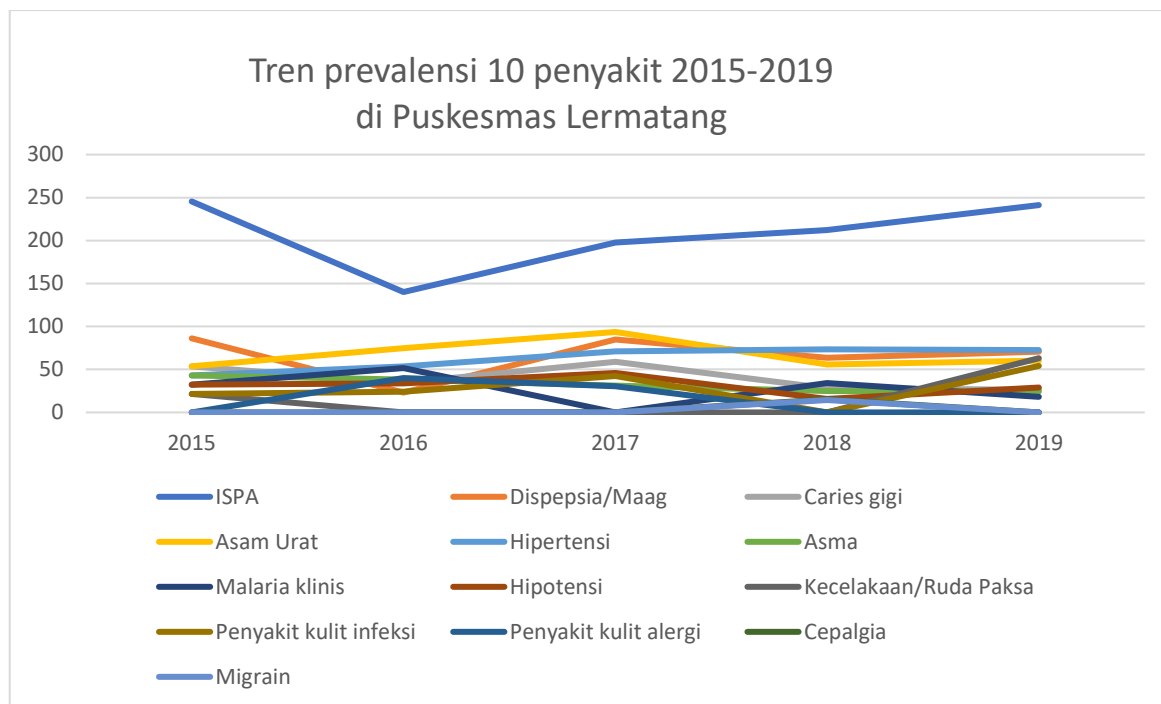
Sumber : Puskesmas Saumlaki, 2021-2022

Sementara berdasarkan data dari Puskesmas Pembantu Lermatang, 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di desa terdampak kegiatan proyek antara lain ISPA, dispepsia, caries gigi, asam urat, hipertensi, asma, malaria klinis, hipotensi, kecelakaan/ruda paksa, penyakit kulit infeksi, penyakit kulit Alergi, Cepalgia, dan Migrain. Data tersebut dihimpun berdasarkan jumlah kunjungan di Puskesmas Pembantu Lermatang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel III-346 Tren 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kunjungan Pasien di Puskesmas Pembantu Lermatang 2015 – 2019

No	Penyakit	2015		2016		2017		2018		2019	
		Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi	Σ	Prevalensi
1.	ISPA	274	245,5	180	140,1	228	197,7	324	212,3	348	241,2
2.	Dispepsia/Maag	96	86,2	26	23,1	98	84,9	97	63,6	102	70,6
3.	Caries gigi	60	53,7	39	34,7	68	58,9	43	28,2	38	26,3
4.	Asam Urat	60	53,7	84	74,7	108	93,6	85	55,7	87	60,3
5.	Hipertensi	48	43,0	60	53,4	82	71,1	112	73,4	105	72,7
6.	Asma	48	43,0	43	38,3	37	31,1	38	24,9	35	24,3
7.	Malaria klinis	36	32,2	58	51,6	0	0,0	52	34,1	26	18,0
8.	Hipotensi	36	32,2	38	33,8	53	45,9	24	15,7	42	29,1
9.	Kecelakaan/Ruda Paksa	24	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	91	63,1
10.	Penyakit kulit infeksi	24	21,5	27	24,0	49	42,5	0	0,0	78	54,1
11.	Penyakit kulit alergi	0	0,0	45	40,0	35	30,4	0	0,0	0	0,0
12.	Cepalgia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	15,1	0	0,0
13.	Migrain	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	14,4	0	0,0
Jumlah		76		600		758		820		952	

Sumber: Puskesmas Pembantu Lermatang, 2020



Sumber: Puskesmas Pembantu Lermatang, 2020

Gambar III-452 Tren 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kunjungan Pasien di Puskesmas Pembantu Lermatang 2015 – 2019

Data dari kunjungan pasien ke Puskesmas Pembantu Lermatang tersebut, penyakit ISPA dari tahun 2015 – 2019 menduduki tempat teratas. Tahun 2015 penyakit ISPA memiliki angka prevalensi sebesar 245,5, tahun 2016 sebesar 140,1, tahun 2017 sebesar 197,7, tahun 2018 sebesar 212,3, serta pada tahun 2019 sebesar 241,2. Oleh karena itu, pola penyakit di wilayah terdampak dan terpengaruh relatif sama dimana penyakit ISPA merupakan masalah kesehatan yang utama dan merupakan penyakit yang khas di daerah tropis. Selain itu, beberapa penelitian kesehatan lingkungan penyakit ISPA memiliki korelasi positif dengan penurunan status kesehatan lingkungan.

Pada tahun 2022, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (penyakit tulang belulang, radang sendi termasuk reumatik) merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat di wilayah studi yaitu sebanyak 2.012 kasus (Puskesmas Saumlaki 2022). Diikuti dengan penyakit hipertensi serta tonsilitis, faringitis dan laringitis yang masing-masing terjadi sebanyak 1.413 kasus dan 1.379 kasus. Jenis penyakit terbanyak berdasarkan jenis kelaminnya dari data Puskesmas Saumlaki disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-347 Jenis Penyakit Terbanyak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Nama Penyakit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat (Penyakit Tulang Belulang, Radang Sendi Termasuk Reumatik)	664	1348	2012
2	Hipertensi	517	896	1413
3	Tonsilitis, Faringitis, Laringitis	619	760	1379
4	ISPA	556	714	1270
5	Bronchitis	598	631	1229
6	Gastritis	357	768	1115

No	Nama Penyakit	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	Diabetes Melitus II	130	204	334
8	Diare Tanpa Dehidrasi	146	151	297
9	Penyakit Kulit Alergi	109	145	254
10	Asma	93	90	183

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2022

Kondisi kesehatan masyarakat tergambarkan dari angka morbiditas. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain akses fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah studi cukup lengkap. Fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanimbar Selatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dan apotik. Namun, fasilitas kesehatan di Kecamatan Wertamrian hanya terdiri dari puskesmas pembantu dan polindes saja. Belum terdapat pada rumah sakit di Kecamatan Wertamrian. Tabel di bawah ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi.

Tabel III-348 Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Wilayah Studi 2022

No	Jenis Sarana Kesehatan	Kecamatan Tanimbar Selatan		Kecamatan Wer Tamrian		Keterangan: Nama Puskesmas Pembantu
		Σ	%	Σ	%	
1.	Rumah sakit	2	15,40	-	-	1.Pustu Olilit
2.	Puskesmas	1	7,7	1	16,66	Pustu Lauran
3.	Puskesmas Pembantu	6	46,15	4	66,67	Pustu Ilnge
4.	Polindes	-	-	1	16,66	Pustu Wowonda
5.	Apotek	4	30,75	-	-	Pustu Lermatang
	Jumlah	13	100,00	6	100,00	Pustu Latdalam

Sumber: Kecamatan Tanimbar Selatan dalam Angka 2023 dan Kecamatan Wer Tamrian dalam Angka 2023

Fasilitas Kesehatan di sekitar proyek sangat terbatas dan tidak merata, dapat dilihat pada **Tabel III-349** dan **Tabel III-350**. Tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu, poskedes, praktik dokter, dan bidan.

Jarak fasilitas kesehatan dari rumah penduduk terdekat adalah 1 Km sedangkan jarak terjauh hingga 99 Km. Tingkat kemudahan menuju fasilitas kesehatan berada pada skala 3 dari skala 1-4 (mudah-susah). **Tabel III-351** hingga **Tabel III-353** menunjukkan informasi detail tentang jarak dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Tabel III-349 Fasilitas Kesehatan di Wilayah Terdampak Proyek

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Lermatang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bomaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Latdalam	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Matakus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wertamrian											
Lorulun	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tumbur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	0

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

Tabel III-350 Fasilitas Kesehatan di Wilayah Terpengaruh Proyek

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Ilngei	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wowonda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kabiarat	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lauran	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sifnana	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Saumlaki	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-
Olilit	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
Total	3	-	1	-	5	-	8	-	3	-	-

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

Tabel III-351 Jarak Terdekat Fasilitas Kesehatan dengan Rumah Penduduk di Wilayah Terdampak Proyek (dalam Km)

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Lermatang	30	99.9	29	30	-	99.9	29	99.9	30	10	99.9
Bomaki	12	99	20	10	10	99	20	99	20	-	99
Latdalam	21	99	21	21	-	99	22	99	22	10	18
Matakus	4	99	4	4	-	99	4	99	4	10	20
Wertamrian											
Lorulun	99.9	99.9	99.9	99.9	-	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
Tumbur	27.2	99.9	1	99.9	99.9	28	27.2	99.9	28	12	99.9

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

Tabel III-352 Jarak Terdekat Fasilitas Kesehatan dengan Rumah Penduduk di Wilayah Terpengaruh Proyek (dalam Km)

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Ilngei	99	99	15	15	-	99	15	99	15	20	99
Wowonda	16	99	15	11	-	99	16	99	15	11	20
Kabiarat	15	99	16	16	-	99	16	99	15	15	16
Lauran	6	99	6	7	-	99	8	99	5	10	20
Sifnana	1	99	-	7	9	99	-	99	-	10	11
Saumlaki	-	99	2	2	7	99	-	99	-	15	20
Olilit	-	99	4	6	-	99	-	99	-	20	22

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

Tabel III-353 Akses Masyarakat menuju Fasilitas Kesehatan di Wilayah Terdampak Proyek

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Lermatang	2	3	2	2	-	3	2	3	2	2	3
Bomaki	2	3	2	2	2	3	2	3	2	-	3
Latdalam	2	3	2	2	-	3	2	3	2	2	2
Matakus	2	3	2	2	-	3	2	3	2	2	2
Wertamrian											
Lorulun	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3
Tumbur	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

*Tingkat kemudahan menuju fasilitas kesehatan (1 - 4; mudah - susah)

Tabel III-354 Akses Masyarakat Menuju Fasilitas Kesehatan di Wilayah Terpengaruh Proyek

Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Tempat Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktik Bidan	Poskesdes	Polindes
Tanimbar Selatan											
Ilngei	3	3	2	2	-	3	2	3	2	2	3
Wowonda	2	3	2	2	-	3	2	3	2	2	2
Kabiarat	1	3	1	1	-	3	1	3	1	2	2
Lauran	2	3	2	2	-	3	2	3	2	2	2
Sifnana	2	3	-	2	2	3	-	3	-	1	2
Saumlaki	-	3	2	2	2	3	-	3	-	1	2
Olilit	-	3	2	2	-	3	-	3	-	1	2

Sumber: Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

*Tingkat kemudahan menuju fasilitas kesehatan dengan 1 - 4; mudah - susah)

Tabel di bawah ini menampilkan tenaga kesehatan yang tersedia di wilayah studi, meliputi tenaga medis dan non medis. Tenaga medis mencakup dokter umum, dokter gigi, perawat umum, dan bidan. Tenaga kesehatan non medis mencakup ahli gizi, ahli farmasi, ahli teknis medis, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat.

Tabel III-355 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tanimbar Selatan 2015 – 2019

Tenaga Kesehatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Dokter Umum	5	8,47	17	20,48	30	25,00	30	25,64	39	11,40
Dokter Gigi	0	0,00	0	0,00	1	0,83	1	0,85	1	0,29
Perawat Umum	28	47,46	40	48,19	48	40,00	49	41,88	168	49,12
Bidan	12	20,34	13	15,66	17	14,17	17	14,53	50	14,62
Ahli Gizi	4	6,78	4	4,82	4	3,33	4	3,42	16	4,68
Ahli Farmasi	2	3,39	2	2,41	2	1,67	3	2,56	14	4,09
Ahli Teknis Medis	3	5,08	1	1,20	4	3,33	0	0,00	4	1,17
Ahli Sanitasi	1	1,69	0	0,00	7	5,83	7	5,98	11	3,22
Ahli Kesehatan Masyarakat	4	6,78	6	7,23	7	5,83	6	5,13	39	11,40
Jumlah	59	100,00	83	100,00	120	100,00	117	100,00	342	100,00

Sumber: Kecamatan Tanimbar Selatan dalam Angka 2020

Tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah 376 orang pada tahun 2017 dan meningkat 34,31% pada tahun 2018 menjadi 505 orang. Jumlah perawat meningkat 29,06% menjadi 342 orang, jumlah bidan meningkat 33,87% menjadi 83 orang, tenaga farmasi meningkat 92,31% menjadi 25 orang, dan tenaga dokter bertambah dari 36 orang menjadi 55 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan tenaga kerja tidak tetap yang ditugaskan di Kepulauan Tanimbar. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik maupun polindes. Berikut data fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Tabel III-356 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Fasilitas Kesehatan	2017	2018	Tenaga Kesehatan	2017	2018
Rumah Sakit	4	4	Dokter	36	55
Rumah Bersalin	1	1	Perawat	265	342
Puskesmas/Posyandu	156	159	Bidan	62	83
Klinik/Polindes	15	14	Ahli Farmasi	13	25
Jumlah	179	178	Jumlah	376	505

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 2019

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 hasil menunjukkan jumlah kunjungan masyarakat ke RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki mengalami penurunan kecuali pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan masyarakat ke RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-357 Kunjungan Masyarakat Ke RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki dan Puskesmas Kecamatan Wertamrian 2017 - 2020

No	Jenis Kunjungan	RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki				Puskesmas Kecamatan Wertamrian			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pengunjung Baru	11.376	18.312	11.640	6.642	6.935	7.368	8.267	5.122
2	Pengunjung Lama	9.098	11.834	9.679	3.519				

Sumber: RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki 2021 dan Puskesmas Perawatan Lorulun, 2017-2020

Data jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas juga dapat dilihat dari jumlah kunjungan berdasarkan jaminan kesehatan yang digunakan pada saat berkunjung ke Puskesmas. Masyarakat lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan seperti jamkesmas dibandingkan akses. Jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas Saumlaki pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-358 Jumlah Kunjungan Puskesmas Saumlaki 2017-2019

Peserta Kunjungan	2017	2018	2019
Kunjungan Askes	9.995	-	6.779
Kunjungan Jamkesmas	20.216	-	17.594
Kunjungan Rakyat (Pasien Bayar)	719	-	2.763

Sumber: Data Puskesmas Saumlaki, 2017-2019

3.3.5.1.1 Penyakit Menular

Penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menurut RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki antara lain seperti DBD, malaria, diare, HIV, dan IMS. Angka morbiditas dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka morbiditas tertinggi pada tahun 2020 adalah diabetes dengan angka morbiditas sebesar 38. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS), morbiditas sendiri adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Mortalitas adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian penduduk di suatu daerah atau wilayah akibat penyakit tertentu. Pada tahun 2020, terdapat angka mortalitas yang disebabkan oleh penyakit hipertensi, diabetes, diare, dan HIV. Tabel di bawah ini menunjukkan angka morbiditas dan mortalitas Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2017 – 2020.

Tabel III-359 Angka Morbiditas dan Mortalitas Penyakit Menular Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2017 – 2020

No	Penyakit	Morbiditas				Mortalitas			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	DBD	2	26	80	1	-	-	-	-
2	Malaria	2	1	1	-	-	1	-	-
3	Diare	243	111	42	30	-	1	2	1
4	HIV	10	13	12	1	-	-	-	1
5	IMS	-	1	-	-	-	-	-	0

Sumber: RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki, 2021

Kasus penyakit menular di wilayah terdampak kegiatan proyek menurut Puskesmas Saumlaki adalah diare, TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), kusta, dan filariasis. Kasus penyakit menular terbanyak selama empat tahun berturut-turut adalah diare yang mencapai 58,28% pada tahun 2014, sebanyak 82,57% pada tahun 2015, sebanyak 78,41% tahun 2016, sebanyak 80,04% tahun 2017 serta sebanyak 84,51% pada tahun 2018, dibandingkan dengan kasus penyakit lainnya. Diare masih menjadi masalah kesehatan besar di negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena angka morbiditas (perbandingan antara kelompok masyarakat yang sakit dan sehat dalam sebuah populasi) dan mortalitas cukup tinggi. Diare/gastroenteritis berada di peringkat tiga belas penyebab kematian secara umum di Indonesia dengan proporsi 3,5%. Adapun kategori penyakit menular menduduki peringkat ketiga. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi diare tertinggi terjadi pada rumah tangga tanpa akses air bersih 18,4%, sistem sanitasi pembuangan limbah dan toilet, serta perilaku hidup tidak sehat, kebiasaan cuci tangan dengan sabun (Depkes RI Tahun 2017).

Selain diare, penyakit TBC dan kusta menjadi penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Kecamatan Tanimbar Selatan berdasarkan data Puskesmas Saumlaki (2014-2018). Penyakit TBC (Tuberculosis) adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang menyebar di udara melalui percikan droplet penderita saat berbicara, batuk, atau bersin. Meski demikian penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan cukup lama dengan penderita, tidak semudah penyebaran flu. Salah satu resiko tertular penyakit TBC ini adalah orang yang tinggal di permukiman padat dan kumuh, tingkat kebersihan rumah yang kurang, ventilasi rumah kurang cukup sehingga sinar matahari tidak masuk ke rumah sehingga menyebabkan kelembapan tinggi. Tahun 2018 angka kasus TBC di Puskesmas Saumlaki mencapai angka 68 kasus. Sementara penyakit Kusta atau penyakit Lepra disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Leprae*. Menurut data Puskesmas Saumlaki, kasus penyakit kusta di Kecamatan Tanimbar Selatan adalah sebesar 65 kasus pada tahun 2018 dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Tabel III-360 Tren Penyakit Menular di Kecamatan Tanimbar Selatan 2014 - 2018

No	Kasus Penyakit Menular	2014		2015		2016		2017		2018	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Diare (Diarhea)	521	58,28	450	82,57	741	78,41	417	80,04	1.080	84,51
2.	TBC (Tuberculosis)	18	2,01	24	4,40	43	4,55	42	8,06	68	5,32
3.	Malaria	323	36,13	51	9,36	72	7,62	5	0,96	6	0,47
4.	DBD (Dengue Fever)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	3,13
5.	HIV/AIDS	22	2,46	20	3,67	28	2,96	2	0,38	19	1,49
6.	Infeksi Menular Seksual (IMS)	10	1,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Kusta	0	0,00	0	0,00	53	5,61	53	10,17	65	5,09
8.	Filariasis	0	0,00	0	0,00	8	0,85	2	0,38	0	0,00
Jumlah		894	100,00	545	100,00	945	100,00	521	100,00	1.278	100,00

Sumber: Puskesmas Saumlaki Tahun 2014 -2018

Tabel III-361 Angka Prevalensi Penyakit Menular Puskesmas Kecamatan Wertamrian Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Penyakit				
	DBD	Malaria	Diare	HIV	IMS
2017	-	5	230	-	-
2018	-	2	321	1	-
2019	-	3	420	2	-
2020	-	6	324	5	-

Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian, 2017-2020

Walaupun tidak banyak kasus akibat HIV, AIDS, dan syphilis, namun pada tahun 2019 ditemukan kasus HIV dan AIDS masing-masing sebanyak 7 kasus yang diderita oleh masyarakat di rentang usia 20-59 tahun. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi dimana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Di Indonesia sendiri penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan seksual yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, artinya semua orang beresiko terinfeksi HIV. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jumlah kasus HIV, AIDS, dan Syphilis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-362 Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Syphilis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017-2019

Kelompok Umur	HIV			AIDS			Syphilis			Jumlah Kematian Akibat AIDS		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14 Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29 Tahun	1	5	6	1	3	2	-	-	-	-	-	-
30-39 Tahun	-	6		-	4	4	-	-	-	-	3	2
40-49 Tahun	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-59 Tahun	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
>59 Tahun	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2020

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Pada tabel di bawah ini dijelaskan bahwa diare merupakan penyakit menular dengan kasus terbanyak di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Selain dapat diakibatkan oleh infeksi bakteri dan/ bakteri, diare juga dapat dipicu oleh buruknya sanitasi lingkungan seperti sarana air bersih dan jamban yang kurang baik. Setiap tahun di desa terdampak kegiatan proyek kasus diare mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 jumlah kasus diare terbanyak berada di Desa Latdalam mencapai 302 kasus namun kasus yang tertangani hanya sekitar 22%. Jumlah kasus di Desa Bomaki sendiri, kasus diare yang tertangani sekitar 59%, Desa Lermatang sekitar 49%, dan

Desa Matakus sekitar 48% kasus diare tertangani. Secara lebih rinci, jumlah kasus diare di desa terdampak kegiatan proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-363 Jumlah Kasus Diare di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Perkiraan Kasus			Diare Ditangani		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Latdalam	2.391	2.491	2.947	51	51	302	18	109	67
Bomaki	1.086	1.210	1.356	25	23	196	18	65	116
Lermatang	1.099	1.068	1.116	24	24	196	16	90	96
Matakus	458	458	510	10	10	80	10	54	38

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2017-2019

Berdasarkan dari data sekunder 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 – 2023 ISPA menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus sebagai berikut:

Tabel III-364 10 Penyakit terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2023

No	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Nama Penyakit	Jumlah	Nama Penyakit	Jumlah	Nama Penyakit	Jumlah
1.	ISPA	18824	ISPA	19602	ISPA	16502
2.	Atritis	11360	Atritis	9414	Atritis	8980
3.	Hipertensi	5811	Hipertensi	5516	Hipertensi	5491
4.	Radang Perut	3887	Radang Perut	3780	Penyakit Kulit Alergi	3417
5.	Tonsilitis, Faringitis, Laringitis	3242	Tonsilitis, Faringitis, Laringitis	2674	Radang perut	3207
6.	Bronkitis	2513	Penyakit Kulit Alergi	2127	Penyakit infeksi kulit	2602
7.	Penyakit Kulit Alergi	2175	Penyakit Kulit Infeksi	1892	Bronkitis	1809
8.	Penyakit Kulit Infeksi	2028	Diare Tanpa Dehidrasi	1512	Tonsilitis, Faringitis, Laringitis	1661
9.	Asma	1706	Bronkitis	1313	Asma	1332
10	Infeksi Penyakit Usus Lainnya	1225	Infeksi Penyakit Usus Lainnya	1056	Diare Tanpa Dehidrasi	1045

Hasil pada data di atas menunjukkan angka prevalensi ISPA dari tahun 2021 – 2013 adalah 14.6%, 15,7%, dan 12,8%. Adanya aktivitas konstruksi tenaga kerja dan operasi, maka akan dibuat *basecamp*/penampungan sementara pekerja pada saat konstruksi. Adanya penambahan pekerja non lokal berpotensi terjadi perubahan penyakit menular, salah satunya ISPA.

Pengukuran kualitas lingkungan yang berkaitan dengan perubahan penyakit menular akibat adanya migrasi tenaga kerja, diukur menggunakan indikator *judgement expert*. Pengukuran dilakukan dengan mengukur kondisi awal dan ditambahkan 2%.

Jumlah Kasus	Nilai	Keterangan
≤ 12. 7 %	5	Sangat Baik
12.8 – 14,8 %	4	Baik

14,9 – 16,9 %	3	Sedang
17 – 19 %	2	Buruk
≥ 19 %	1	Sangat Buruk

Provinsi Maluku merupakan daerah endemis malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles sp.*) betina. Kasus malaria dapat dikatakan positif jika kasus tersebut disertai dengan gejala klinis malaria yaitu demam tinggi disertai menggigil dengan pemeriksaan sediaan darah di laboratorium. Namun berdasarkan data Puskesmas Saumlaki, pada umumnya setiap tahun kasus suspek malaria di desa terdampak kegiatan proyek mengalami penurunan. Jumlah kasus malaria di desa terdampak kegiatan proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-365 Jumlah Kasus Malaria di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Suspek			Positif			Meninggal		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Latdalam	228	242	181	-	1	1	-	-	-
Bomaki	127	132	117	-	-	2	-	-	-
Lermatang	130	130	97	-	-	-	-	-	-
Matakus	19	9	34	-	-	-	-	-	-

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2017-2019

Tahun 2014 INPEX melakukan studi malaria di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang meliputi 6 desa yaitu Saumlaki, Bomaki, Wowonda dan Olilit, Lorulung di Pulau Yamdena, dan desa Adaut di Pulau Selaru. Survei larva dilakukan di 4 desa yakni Desa Olilit, Desa Bomaki, Desa Wowonda dari Kecamatan Tanimbar Selatan, serta desa Adaut Kecamatan Selaru. Hasil survei lainnya pada studi nyamuk dilakukan di salah satu dari 4 desa tersebut. Desa Bomaki dipilih untuk survei nyamuk dewasa karena dari survei larva diketahui bahwa desa ini memiliki tempat perkembangbiakan terbesar. Tiga spesies *Anopheles* yang teridentifikasi di wilayah studi yaitu:

- Nyamuk *An. Farauti* : perkembangbiakan nyamuk *An. farauti* bervariasi dari kubangan lumpur kecil atau wadah bekas sampai ke laguna dan rawa yang luas. Tempat perkembangbiakan tersebar di desa-desa dari Tanimbar Selatan dan Selaru, kecuali di kota Saumlaki dan Olilit Barat. Nyamuk *An. farauti* banyak ditemukan di luar ruangan. Perilaku spesies nyamuk ini bersama dengan kebiasaan masyarakat setempat yang lebih menyukai berdiam di luar rumah pada malam hari lebih memudahkan penyebaran penyakit malaria secara intensif di daerah ini.
- Nyamuk *An. Barbirostris* : nyamuk jenis ini lebih suka berkembang biak di sungai dan rawa-rawa. Spesies ini dikenal sebagai vektor penyakit malaria utama di Timor dan pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur. Di Tnyafar, nyamuk *An. barbirostris* diduga kuat memainkan peran penting dalam penularan penyakit malaria bersama-sama dengan nyamuk *An. farauti* A1.a.
- Nyamuk *An. Flavirostris* : nyamuk jenis ini tidak begitu dikenal di bagian negara ini. Spesies nyamuk hanya ditemukan di Tanimbar Selatan, dan biasanya berkembang biak di rawa-rawa dan genangan air.

Tabel III-366 Jumlah Tempat Perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* Spp menurut jenis dan spesiesnya di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Selaru Tahun 2014

No	Jenis Tempat Perkembangbiakan	An.barbirostris	An.farauti A1.a	An.farauti A1.b	An flavirostris
1	Anak Sungai	7	7	3	7
2	Laguna	0	0	1	0
3	Kubangan Lumpur	5	24	4	5
4	Tambak produktif	0	1	0	1
5	Genangan air	2	7	2	2
6	Sungai	5	3	0	5
7	Aliran air	7	7	0	7
8	Rawa	3	11	9	4
9	Rawa Sagu	4	4	0	4
10	Wadah bekas	3	3	0	3
Total		36	67	19	38

Sumber: Malaria Baseline Study Report in Maluku Tenggara Barat District, 2014

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) merupakan daerah endemik malaria tinggi karena memiliki tingkat sampel darah positif (SPR / *Slide Positivity Rate*) lebih dari 10% dan API (*Annual Parasite Incidences*) lebih dari 5 per 1.000 penduduk. Selama 4 tahun terakhir SPR berkisar antara 33,4% sampai 45,9%. API KKT bervariasi dari 10,5 sampai dengan 20,6 per 1.000 penduduk selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Selain itu, situasi malaria di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Selaru diklasifikasikan sebagai daerah endemik dan daerah insidensi kasus malaria yang tinggi. Pada studi ini, ditemukan 5 (lima) kasus malaria positif yang berarti bahwa mereka semua tertular penyakit malaria di daerah mereka sendiri bukan dari daerah lain di luar KKT.

Musim hujan di Kecamatan Tanimbar Selatan telah menciptakan banyak genangan air yang mengakibatkan jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* meningkat. Sebaliknya pada musim kemarau, jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* menjadi berkurang. Hal ini disebabkan tempat perkembangbiakan yang ukurannya kecil seperti kubangan lumpur, trek jejak ban, dan galian pasir akan menjadi kering karena kurangnya air hujan. Jumlah tempat perkembangbiakan *Anopheles* sp. pada musim hujan mencapai 71 tempat, sedangkan di musim kemarau sebanyak 25 tempat. Namun, di musim kemarau beberapa jenis tempat perkembangbiakan seperti genangan air, anak sungai, sungai, dan rawa-rawa sagu menjadi lebih menguntungkan bagi *Anopheles*, sementara saat musim hujan air hujan akan mengguyur sebagian besar larva nyamuk.

Jumlah kasus malaria di Kecamatan Tanimbar Selatan, rata-rata jumlah kasus per bulan terjadi sejak Desember hingga Juni selama periode 2010-2013. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit malaria terjadi selama musim hujan. Temuan di Tanimbar Selatan telah didukung oleh hasil survei entomologi dalam studi bahwa kontak manusia dengan nyamuk *An. farauti*, adalah 5 kali lebih tinggi pada bulan Maret (40 nyamuk) daripada bulan Agustus (8 nyamuk).

Tabel III-367 Jumlah Nyamuk yang Dikumpulkan Saat Survei Berdasarkan Spesies di Tanimbar Selatan, Maret dan Agustus 2014

Species	Maret (Musim Hujan)	Agustus (Musim Kemarau)
An.barbirostris	6	8
An.farauti A1.a	40	8
An.farauti A1.b	15	0
An.flavirostris	8	28
Total	69	44

Sumber: Malaria Baseline Study Report in Maluku Tenggara Barat District, 2014

Kebanyakan masyarakat di wilayah studi belum sepenuhnya memahami gejala penyakit malaria, cara penularan penyakit dan jenis tempat perkembangbiakan vektor nyamuk malaria. Masyarakat tidak memahami bahwa badan air yang tidak mengalir yang ditumbuhi rumput dapat memberikan tempat perkembangbiakan bagi vektor malaria dan masyarakat juga tidak menyadari tentang pentingnya sanitasi lingkungan. Sebagian besar keluarga telah mendapat ITN (kelambu berinsektisida) dari Puskesmas dan banyak dari mereka juga mendapatkan kelambu yang dibeli dari penjual. Kelambu diprioritaskan untuk anggota keluarga yang berisiko tinggi misalnya bayi, anak balita dan ibu hamil.

Pengendalian Penyakit Malaria menurut Dinas Kesehatan Kabupaten telah menjalankan dua strategi utama yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat serta distribusi LLIN, tetapi hanya sedikit tindakan pengendalian larva karena kurangnya dukungan dari sektor lain yang terkait. Selain malaria, penyakit demam berdarah atau DBD juga disebabkan oleh vektor nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang menularkan virus dengue. Kasus DBD di desa terdampak kegiatan proyek tidak banyak ditemukan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Puskesmas Saumlaki, kasus DBD hanya ditemukan di Desa Bomaki dan Desa Lermatang pada tahun 2019 masing-masing hanya satu kasus.

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Hasil studi lapang berdasarkan terpengaruh kegiatan proyek, penyakit diare masih menjadi yang tertinggi kasusnya dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan kasus diare yang terjadi di desa terpengaruh kegiatan proyek yang mana pada tahun 2019 kasus diare tertangani tertinggi berada di Desa Ingei sebesar 79% dan terendah berada di Desa Sifnana sebesar 5%.

Tabel III-368 Jumlah Kasus Diare di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Perkiraan Kasus			Diare Ditangani		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Saumlaki	12.386	12.386	11.010	265	265	1.352	265	402	386
Olilit Barat	3.416	3.416	3.061	73	73	266	2	88	6
Olilit Timur	2.488	2.488	3.117	53	53	278	16	54	45
Lauran	2.211	2.211	1.955	47	47	248	14	51	64
Ingei	1.437	1.337	1.337	43	31	214	18	72	168
Wowonda	1.803	1.903	1.903	39	39	160	23	64	36
Sifnana	2.954	2.954	3.818	63	63	333	16	24	16
Kabiarat	598	545	895	23	13	74	7	19	24

Sumber: Puskesmas Saumlaki 2017-2019

Sama halnya dengan kasus malaria yang terjadi di desa terdampak kegiatan proyek, kasus malaria di desa terpengaruh kegiatan proyek juga mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019. Kasus malaria dengan jumlah suspek tertinggi berada di Desa Saumlaki dengan kasus suspek malaria mencapai 492 kasus. Jumlah kasus malaria di desa terpengaruh kegiatan proyek disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-369 Jumlah Kasus Malaria di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Suspek			Positif			Meninggal		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Saumlaki	1417	1395	492	1	-	1	-	-	-
Olilit Barat	295	372	183	1	1	1	-	-	-
Olilit Timur	198	273	164	1	1	-	-	-	-
Lauran	182	223	156	-	-	1	-	-	-
Ilngai	133	155	130	-	1	0	-	-	-
Wowonda	165	209	166	-	-	1	-	-	-
Sifnana	266	312	322	-	1	1	-	-	-
Kabiarat	66	43	46	2	-	-	-	-	-

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2017-2019

3.3.5.1.2 Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera, obesitas, penyakit paru obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya merupakan 63% penyebab kematian diseluruh dunia (WHO 2010). Berbagai faktor resiko penyebab PTM antara lain, kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok, minum minuman beralkohol, pola makan, gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga maupun keturunan. Penyakit ini berkorelasi positif dengan faktor lingkungan, perilaku hidup yang tidak sehat, akses terhadap layanan dan fasilitas kesehatan serta faktor genetik.

Hasil data penyakit menular atau infeksius (PM) di Indonesia sendiri masih mendominasi sebagai penyakit tertinggi dan merupakan masalah kesehatan yang penting namun dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM juga tidak bisa diabaikan. Pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyakit tidak menular yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah hipertensi, diabetes, dan asma seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-370 Angka Morbiditas dan Mortalitas Penyakit Tidak Menular Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2017 – 2020

No	Penyakit	Morbiditas				Mortalitas			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Hipertensi	79	56	165	21	2	1	2	1
2	Diabetes	53	53	141	38	1	1	3	1
3	Asma	28	15	32	11	1	0	0	0

Sumber: RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki, 2021

Pada tabel di bawah ini, pasien dengan penyakit diabetes merupakan yang paling banyak mendapatkan perawatan inap. Diabetes melitus adalah penyakit kronis dengan ciri-ciri tingginya kadar (glukosa) darah. Faktor yang berisiko penyakit diabetes adalah obesitas, kurang beraktivitas

fisik, usia, menderita penyakit tekanan darah tinggi (Hipertensi), serta memiliki kadar kolesterol dan trigleserida abnormal. Sementara pasien dengan penyakit dispepsia merupakan pasien yang paling banyak melakukan rawat jalan. Kenaikan tertinggi pasien dengan penyakit tidak menular terjadi pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 penyakit tidak menular mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini bisa disebabkan karena adanya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun peningkatan gaya hidup sehat masyarakat.

Tabel III-371 Data Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Perawatannya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017 - 2020

No	Penyakit	Rawat Inap				Rawat Jalan			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Hipertensi	79	56	165	21	156	68	129	21
2	Diabetes	53	53	141	38	59	60	59	20
3	Dispepsia	53	22	217	32	406	430	453	126
4	Strok	15	36	19	7	19	22	11	0
5	Jantung	43	68	43	17	45	69	27	30

Sumber: RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki 2021

Menurut data dari Puskesmas Kecamatan Wertamrian, penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh masyarakat di Kecamatan Wertamrian adalah hipertensi, diabetes, obesitas, artritis, stroke, asma, dan cedera akibat KKL 3. Penyakit artritis merupakan penyakit tidak menular dengan kasus terbanyak di Kecamatan Wertamrian yang setiap tahunnya meningkat. Penyakit artritis merupakan penyakit akibat peradangan di jaringan tulang rawan yang menyebabkan gangguan pada fungsi sendi. Data penyakit tidak menular di Kecamatan Wertamrian disajikan pada Tabel III-372.

Namun penyakit tidak menular seperti hipertensi pun masih menjadi penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Wertamrian. Hal ini terlihat dari data Puskesmas Kecamatan Wertamrian (**Tabel III-373**) yang menunjukkan jika angka prevalensi penyakit hipertensi cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan penyakit diabetes dan asma.

Tabel III-372 Data Penyakit Tidak Menular Puskesmas Kecamatan Wertamrian Tahun 2017-2020

No	Jenis Penyakit Tidak Menular	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Hipertensi	62	56	58	67
2	Diabetes	23	20	22	25
3	Obesitas	44	45	47	52
4	Artritis	82	85	88	93
5	Stroke Non Haemorrhik	8	10	12	14
6	Asma Bronchial	20	22	24	26
7	Cedera Akibat KKL 3	24	27	25	19

Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian, 2017-2020

Tabel III-373 Angka Prevalensi Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kecamatan Wertamrian Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Penyakit		
	Hipertensi	Diabetes	Asma
2017	150	15	25
2018	155	20	29
2019	165	25	32
2020	167	34	36

Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian, 2017-2020

A. Terdampak Kegiatan Proyek

Penyakit hipertensi merupakan penyakit kedua dengan prevalensi yang cukup tinggi di desa terdampak kegiatan proyek. Penyakit hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Faktor resiko penyakit hipertensi adalah pola konsumsi makanan yang tidak sehat, obesitas, kurang beraktivitas fisik/rutin berolahraga, usia, dan faktor genetik. Pada tahun 2019 penderita hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, jumlah kasus pasien dengan penyakit hipertensi pun mengalami penurunan. Pelayan Kesehatan penderita hipertensi dan jumlah kasus penyakit hipertensi di desa terdampak kegiatan proyek disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-374 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Jumlah Penduduk > 14 Tahun			Mendapat Pelayanan Kesehatan		
	2017	2018	2019*	2017	2018	2019
Latdalam	169	169	26	122	259	26
Bomaki	201	201	14	66	159	14
Lermatang	205	205	20	81	242	20
Matakus	75	75	2	54	58	2

Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian, 2017-2019

* Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia >14 Tahun

Tabel III-375 Jumlah Kasus Hipertensi di Desa Terdampak Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	2017		2018		2019*	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Latdalam	8	25	5	21	10	16
Bomaki	3	15	7	20	3	11
Lermatang	3	16	11	32	4	16
Matakus	1	5	0	1	0	2

Sumber: Puskesmas Saumlaki 2017-2019

*Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi dari Puskesmas Saumlaki

Data primer mengenai penyakit yang diderita oleh masyarakat terdampak kegiatan proyek selama tiga (3) bulan terakhir pun dikumpulkan untuk menunjang data sekunder. Survei dilakukan kepada

328 orang di Desa Lermatang, Desa Latdalam, Desa Bomaki, Desa Matakus, Desa Lorulun, dan Desa Tumbur secara acak. Hasil survei untuk mengetahui penyakit yang diderita responden selama 3 bulan terakhir disajikan pada gambar di bawah ini.

Di semua desa terdampak kegiatan proyek, penyakit influenza menjadi penyakit yang paling banyak diderita oleh responden. Lebih dari 50% responden di Desa Lermatang, Latdalam, dan Matakus mengaku menderita penyakit influenza selama 3 bulan terakhir. Sementara di Desa Bomaki, Lorulun, dan Tumbur, responden yang mengalami penyakit influenza selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 20-40%. Penyakit lain seperti batuk, demam berdarah, asma, cacar, sakit kepala, hipertensi, diabetes, malaria, asam urat, struk, dll diderita oleh responden tidak lebih dari 20%.

Masyarakat di desa terdampak kegiatan proyek telah sadar terhadap layanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hasil survei, jika responden merasa sakit maka responden akan pergi ke puskesmas, dokter praktik, rumah sakit umum, ataupun polindes. Namun tidak banyak responden yang mengobati sendiri dengan membeli obat dijual bebas untuk penyakit flu dan batuk. Jika responden atau keluarga dari responden ada yang akan melahirkan, maka pada umumnya akan dibawa ke bidan terdekat ataupun rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan intensif.



Sumber: Data Primer, Survei Sosial INPEX 2020

Gambar III-453 Kejadian Sakit 3 Bulan Terakhir (Oktober-Desember 2019) yang Dialami oleh Responden

B. Terpengaruh Kegiatan Proyek

Sama seperti desa terdampak kegiatan proyek, pada desa terpengaruh kegiatan proyek dengan penyakit hipertensi merupakan penyakit dengan angka prevalensi tertinggi kedua. Berbeda dengan kasus penyakit hipertensi di desa terdampak, pada kasus penyakit hipertensi di desa terpengaruh kegiatan proyek mengalami kenaikan yang cukup tinggi kecuali di Desa Ilngai. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah pasien penderita hipertensi yang justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan tahun 2018. Permasalahan ini bisa disebabkan akibat penurunan kualitas pelayanan Kesehatan ataupun penurunan kunjungan pasien penderita hipertensi. Pelayanan

kesehatan dan jumlah kasus penyakit hipertensi di desa terpengaruh kegiatan proyek disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-376 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	Jumlah Penduduk > 14 Tahun			Mendapat Pelayanan Kesehatan		
	2017	2018	2019*	2017	2018	2019
Saumlaki	3066	3066	345	357	954	235
Olilit Barat	231	231	21	149	295	21
Olilit Timur	248	248	39	219	247	39
Lauran	303	303	31	110	117	31
Ilngai	159	159	13	159	71	13
Wowonda	210	210	17	133	105	17
Sifnana	410	410	15	91	165	15
Kabiarat	211	211	13	65	159	13

Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian, 2017-2020

* Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia >14 Tahun

Tabel III-377 Jumlah Kasus Hipertensi di di Desa Terpengaruh Kegiatan Proyek Tahun 2017-2019

Desa	2017		2018		2019*	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Saumlaki	10	52	23	119	122	223
Olilit Barat	5	23	3	19	4	17
Olilit Timur	6	21	4	13	4	35
Lauran	4	10	2	7	7	24
Ilngai	5	15	6	27	2	11
Wowonda	5	14	3	5	2	15
Sifnana	4	15	1	8	2	13
Kabiarat	2	8	2	4	4	9

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2017-2019

*Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi dari Puskesmas Saumlaki

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera, obesitas, penyakit paru obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya merupakan 63% penyebab kematian diseluruh dunia (WHO 2010). Berbagai faktor resiko PTM antara lain, kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok, minum minuman beralkohol, pola makan, gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga/keturunan. Penyakit tidak menular di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah hipertensi, diabetes, dan asma seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Penyakit hipertensi merupakan penyakit kedua dengan prevalensi yang cukup tinggi di desa terdampak kegiatan proyek. Penyakit hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung.

Tabel III-378. Jumlah kasus hipertensi berdasarkan desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Desa	Kasus
Latdalam	26
Bomaki	14

Lermatang	20
Matakus	2
Olilit Barat	21
Olilit Timur	39
Lauran	31
Ilngai	13
Wowonda	17
Sifnana	15
Kabiarat	13
Rata Rata	19,2

Indikator yang digunakan adalah berdasarkan data rona penyakit tidak menular (menggunakan kasus hipertensi) yaitu dengan menghitung estimasi kasus hipertensi setiap tahun di lokasi. Didapatkan bahwa estimasi rata-rata penderita hipertensi adalah 19 kasus/desa/tahun, untuk masing-masing tingkatan skala memprediksi dengan kenaikan 30% (mengacu kepada data SKI 2023).

Tabel III-379. Estimasi penyakit tidak menular di wilayah studi Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Penyakit Tidak Menular	Nilai	Keterangan
≤ 19 orang	3	Baik
20– 28 kasus	2	Sedang
≥ 29 kasus	1	Buruk

3.3.5.1.3 Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol)

Penyalahgunaan zat adiktif yang dianalisis berupa penggunaan narkoba dan alkohol oleh masyarakat di wilayah studi. Berdasarkan data Puskesmas Saumlaki, masyarakat di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian belum ada yang mengonsumsi narkoba melainkan mengonsumsi alkohol. Penggunaan alkohol belum terkontrol dan masih tinggi di kalangan masyarakat, hal ini kadang-kadang karena pengaruh adat/kebiasaan. Toko yang menyediakan miras terbanyak di Desa Ilngai (43,75%). Penduduk yang mengonsumsi alkohol terbanyak di Desa Wowondo yaitu 350 penduduk (61,73%) dari total kasus. Jumlah kasus mabuk tertinggi di Desa Ilngai sebanyak 49 kasus (64,47%), sedangkan di Kecamatan Wertamrian yang terdata hanya di Desa Tumbur dengan 2 toko penjual miras dan 130 kasus penduduk yang mengonsumsi miras. Tabel di bawah ini menampilkan data penyalahgunaan zat adiktif di wilayah studi.

Tabel III-380. Data Pemakaian Zat Adiktif (Narkoba dan Alkohol) di Wilayah Studi

Wilayah Studi	Jumlah Toko Menyediakan Miras		Jumlah Penduduk Mengonsumsi Miras		Jumlah Kasus Mabuk Akibat Miras		Jumlah Pengedar Narkoba		Jumlah Penduduk Mengonsumsi Narkoba	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kecamatan Tanimbar Selatan										
Bomaki	5	31,25	53	9,35	25	32,89	0	0,00	0	0,00

Wilayah Studi	Jumlah Toko Menyediakan Miras		Jumlah Penduduk Mengonsumsi Miras		Jumlah Kasus Mabuk Akibat Miras		Jumlah Pengedar Narkoba		Jumlah Penduduk Mengonsumsi Narkoba	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kecamatan Tanimbar Selatan										
Matakus	2	12,50	50	8,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ilngai	7	43,75	79	13,93	49	64,47	0	0,00	0	0,00
Kabiarat	1	6,25	35	6,17	2	2,63	0	0,00	0	0,00
Wowonda	1	6,25	350	61,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	16	100,00	567	100,00	76	100,00	0	0,00	0	0,00
Kecamatan Wertamrian										
Lorulun*	-	-	15	10,34	-	-	-	-	0	0,00
Tumbur	2	100,00	130	89,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	2	100,00	130	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2019

* Sumber: Puskesmas Kecamatan Wertamrian 2020

Berdasarkan data Puskesmas Saumlaki, masyarakat di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian belum ada yang mengonsumsi narkoba, melainkan mengonsumsi alkohol. Penggunaan alkohol belum terkontrol dan masih tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh adat/kebiasaan. Toko yang menyediakan miras terbanyak berada di Desa Ilngai (43,75%). Jumlah konsumen alkohol terbanyak berada di Desa Wowonda yaitu 350 penduduk (61,73%) dari total kasus. Jumlah kasus mabuk tertinggi di Desa Ilngai sebanyak 49 kasus (64,47%), sedangkan di Kecamatan Wertamrian yang terdata hanya di Desa Tumbur dengan 2 toko penjual miras dan 130 kasus penduduk yang mengonsumsi miras.

Tabel III-381. Penyalahgunaan zat adiktif di wilayah studi.

Desa	Jumlah Toko	Jumlah Konsumsi Miras	Jumlah yang mabuk	%
Bomaki	5	53	25	47,
Matakus	2	50	0	0
Ilngai	7	79	49	62,0
Kabiarat	1	35	2	5,8
Wowonda	1	350	0	0
Lorulun*	16	567	76	13,4
Tumbur	-	15	-	
Rata Rata		160	21,71	18,3

Berdasarkan data diatas *cut of point* untuk konsumsi miras dan mabuk adalah rata-rata 22 orang dengan asumsi peningkatan orang yang minum miras dan mabuk 18%.

Jumlah Orang yang Mengonsumsi dan Mabuk	Nilai	Keterangan
≤ 22 orang	5	Sangat baik
23 – 26 orang	4	Baik

27 – 30 orang	3	Sedang
31 – 34 orang	2	Buruk
≥ 35 orang	1	Sangat Buruk

3.3.5.1.4 Status Gizi Masyarakat

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan zat gizi (Beck 2000).

Tabel III-382 Jumlah Bayi Kekurangan Gizi di Kecamatan Tanimbar Selatan 2022

No	Desa	Jumlah Kekurangan Gizi
1	Saumlaki	8
2	Saumlaki Utara	5
3	Olilit	10
4	Sifnana	7
5	Lauran	12
6	Kabiarat	3
7	Ilngai	4
8	Ilngai Barat	2
9	Wowonda	6
10	Bomaki	3
11	Lermatang	10
12	Lat Dalam	7
13	Matakus	5
14	Raw Wurtulely	2

Sumber: Kecamatan Tanimbar Selatan dalam Angka 2023

Berdasarkan data BPS, desa yang memiliki kasus terbanyak kekurangan gizi pada balita yaitu Desa Lauran, lalu disusul oleh Desa Olilit, dan Lematang. Status gizi di Kecamatan Wertamrian ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel III-383 Jumlah Bayi Kekurangan Gizi di Kecamatan Wertamrian 2022

No	Desa	Jumlah Kekurangan Gizi
1	Atubul Dol	1
2	Atubul Da	2
3	Arui Das	2
4	Arui Bab	3
5	Sangliat Krawain	2
6	Sangliat Dol	2
7	Amdasa	2
8	Lorulun	2
9	Tumbur	2

Sumber: Kecamatan Wertamrian dalam Angka 2023

Berdasarkan data di atas, bahwa desa yang paling tinggi kasus kurang gizinya adalah Desa Arui Bai dengan jumlah kasus 3 balita. Desa dengan kasus balita kekurangan gizi paling sedikit adalah desa Atubul Dol.

Tabel III-384 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi, Anak Balita, dan Batita di Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2016-2018

Desa	2016			2017			2018		
	Bayi (6-11 bulan)	Anak Balita (12-59 bulan)	Batita (6-59 bulan)	Bayi (6-11 bulan)	Anak Balita (12-59 bulan)	Batita (6-59 bulan)	Bayi (6-11 bulan)	Anak Balita (12-59 bulan)	Batita (6-59 bulan)
Saumlaki	197	916	1.113	197	916	1.113	160	736	896
Olilit	102	462	550	102	462	550	79	417	496
Sifnana	51	214	265	51	214	265	43	267	310
Lauran	29	170	199	29	170	199	30	148	176
Kabiarat	8	46	54	8	46	54	6	48	54
Ilngai	22	111	133	22	111	133	14	73	87
Wowonda	25	139	164	25	139	164	24	87	111
Bomaki	18	83	101	18	83	101	13	90	103
Lermatang	14	85	99	14	85	99	13	83	96
Lat Dalam	37	184	221	37	184	221	32	230	262
Matakus	7	36	43	7	36	43	7	44	51
Total	510	2.446	2.942	510	2.446	2.942	421	2.223	2.642

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2016-2018

Balita: Bawah lima tahun

Batita : Bawah tiga tahun

Pada tahun 2016 dan 2017, pemberian vitamin A pada bayi sebanyak 510 orang kemudian mengalami penurunan menjadi 421 orang pada tahun 2018. Tahun 2016 dan 2017, pemberian vitamin pada anak balita sebanyak 2.446 orang menurun menjadi 2.223 orang. Pemberian vitamin A pada balita tahun 2016 dan 2017 sebanyak 2.942 dan menurun pada tahun 2018 menjadi 2.642. Pemberian vitamin A terbanyak yaitu pada balita berusia 6 sampai 59 bulan.

Tabel III-385 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 di Kecamatan Tanimbar Selatan 2016-2018

Desa	2016		2017		2018	
	Fe1	Fe3	Fe1	Fe3	Fe1	Fe3
Saumlaki	328	297	355	306	390	363
Olilit	147	104	121	96	164	151
Sifnana	78	54	92	70	95	94
Lauran	53	36	62	53	68	52
Kabiarat	14	15	17	14	19	19
Ilngai	33	22	43	19	41	20
Wowonda	36	38	38	37	48	53
Bomaki	26	36	33	24	37	34
Lermatang	26	23	26	22	24	35
Lat Dalam	66	57	73	59	71	68

Desa	2016		2017		2018	
	Fe1	Fe3	Fe1	Fe3	Fe1	Fe3
Matakus	11	12	13	14	5	14
Total	818	694	873	714	962	903

Sumber: Puskesmas Saumlaki, 2016-2018

Berdasarkan data dari Puskesmas Saumlaki (2018), jumlah ibu hamil yang mendapatkan Fe1 dan Fe3 dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Jumlah ibu hamil yang mendapat Fe1 sebanyak 818, kemudian tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 873, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 962. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Fe3 pada tahun 2016 yaitu sebanyak 694, kemudian meningkat menjadi 714 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 903.

Secara umum wilayah studi Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku belum terbebas dari gizi buruk. Setiap tahun lebih dari sepertiga kematian anak di dunia berkaitan dengan masalah kurang gizi, yang dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Cara menilai status gizi anak balita yaitu menggunakan angka berat badan dan tinggi badan lalu dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z score) menggunakan baku antropometri anak balita (WHO 2005). Menurut WHO (2010) masalah Kesehatan dianggap serius bila prevalensi kurus ada diantara 10,0 – 14,0 % dan dianggap kritis bila $\geq 15,0\%$.

Tabel berikut ini menampilkan bayi dengan kondisi gizi di wilayah kerja Puskesmas Sumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan tahun 2016 hingga 2018 dengan variabel: gizi lebih; gizi Kurang; gizi Buruk. Tahun 2016, kasus gizi di wilayah studi menurut data di Puskesmas Sumlaki adalah sebagai berikut: gizi lebih 6 orang, gizi kurang 11 orang, dan gizi buruk 4 orang; Tahun 2017 kasus gizi lebih masih tetap sebanyak 6 balita, gizi kurang meningkat 18 balita, demikian juga gizi buruk meningkat menjadi 8 orang; adapun pada tahun 2018 kasus gizi menurun, gizi lebih 3 balita, gizi kurang 1 balita dan gizi buruk 2 balita.

Tabel III-386 Bayi Bergizi Buruk di Desa Wilayah Puskesmas Saumlaki 2017-2018 & 2022

Desa Wilayah Studi	2017			2018			2022		
	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi buruk
Saumlaki	3	3	1	2	1	2	-	8	-
Olilit	1	1	-	1	-	-	-	10	-
Sifnana	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Lauran	2	3	3	-	-	-	-	12	-
Kabiarat	-	1	1	-	-	-	-	3	-
Ilngei	-	2	1	-	-	-	-	4	-
Wowonda	-	1	-	-	-	-	-	6	-
Bomaki	-	0	-	-	-	-	-	3	-
Lermatang	-	6	-	-	-	-	-	10	-
Lat Dalam	-	1	1	-	-	-	-	7	-
Matakus	-	1	1	-	-	-	-	5	-

Desa Wilayah Studi	2017			2018			2022		
	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Gizi Lebih	Gizi Kurang	Gizi buruk
Total	6	19	8	3	1	2	-	75	-

Sumber : Puskesmas Saumlaki, 2017-2018 dan 2022

Tabel III-259 Bayi Bergizi Buruk di Desa Wilayah Puskesmas Saumlaki 2017-2018 dan 2022

Desa Wilayah Studi	2022
	Gizi Kurang
Tumbur	2
Lorofun	2
Atubul Da	2
Atubul Dol	1
Amdasa	1
Sangliat Dol	2
Sangliat Krawain	2
Arui Bab	3
Arui Das	2
Total	18

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan zat gizi (Beck 2000). Jika ditemukan 1 kasus gizi buruk di suatu wilayah, maka diperlakukan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Tabel berikut terkait batasan masalah kesehatan masyarakat untuk balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan indikator BB/U (WHO).

Tabel III-387. Balita gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan indikator BB/U

Status Gizi *	Nilai	Keterangan
< 10 %	4	Prevalensi rendah (Baik)
10 - 19%	3	Prevalensi sedang (Sedang)
20 – 29%	2	Prevalensi tinggi (Buruk)
≥ 30%	1	Prevalensi Sangat Tinggi (Sangat Buruk)

*Sumber WHO 1995 dari buku Pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas Tahun 2018

3.3.5.1.5 Sanitasi Lingkungan

Kesehatan Lingkungan adalah kondisi dari berbagai media lingkungan yang tercermin dalam sifat fisik, biologis, kimia, dan sosial dari kualitas parameter-parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. (S.K BAPPEDAL No.124/12/1997). Kondisi/status kesehatan lingkungan sangat memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat karena kebutuhan hidup secara hayati manusia dipenuhi oleh lingkungannya. Beberapa parameter indikator pengukuran pada sanitasi lingkungan meliputi seperti kondisi rumah penduduk, sumber air penduduk, dan sarana

jamban. Hasil studi di lapang pengukuran parameter indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

- Kondisi Rumah Penduduk

Salah satu indikator rumah sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita 10 m². Variabel untuk melihat kondisi rumah penduduk di wilayah studi dikategorikan sebagai rumah permanen (gedung/tembok) dan rumah tidak permanen. Menurut Kepmenkes No 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang kondisi rumah terkait dengan kesehatan lingkungan. Rumah permanen adalah rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan genteng, seng, asbes. Rumah tidak permanen memiliki ciri-ciri berdinding kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (lantai tanah), atap rumahnya dari rumbia. Terdapat tiga kategori rumah jika berdasarkan sirkulasinya yaitu rumah katagori baik (> 15% luas dinding), katagori sedang (10 – 15% luas dinding, dan Katagori buruk (< 10% luas dinding).

Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah yang sering terkena gempa, sehingga sebagian besar bangunan rumah menggunakan atap seng. Atap dengan material seng mendukung perencanaan rumah tahan gempa. Bangunan rumah dengan atap terluas berbahan baku seng pada tahun 2022 mencapai 71,76%.

Tabel III-388 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2022

No	Jenis Atap	2022 (%)
1.	Beton	1,24
2.	Genteng	2,15
3.	Asbes	12
4.	Seng	71,76
5.	Bambu/Kayu	1,14
6	Jerami/Ijuk	1,04

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023

Berdasarkan data BPS mengenai indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diperoleh hasil bahwa sekitar 87,61% rumah tangga mempunyai bangunan tempat tinggal milik sendiri, dan 12,39% bukan milik sendiri (rumah dinas, rumah adat, menyewa, menempati rumah saudara). Data selengkapnya ditampilkan pada gambar di bawah ini.